PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

2018

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2018

BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 263 Ayat (3) dan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 – 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buol.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buol.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Buol, merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pemangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemarataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buol untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buol untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah UrusanPemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapianya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabarab strategi.
24. Prioritas Pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

31. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
33. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan dan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
34. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
35. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
36. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah Karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan dating.
37. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
38. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

39. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
40. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselaatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) RPJMD disusun berdasarkan asas:
   a. demokrasi;
   b. berkeadilan;
   c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
   d. transparansi;
   e. tata kelola pemerintahan yang baik;
   f. berkelanjutan; dan
   g. berwawasan lingkungan.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD, RTRW dan KLHS.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
   a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
   b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
   c. partisipasi masyarakat; dan
   d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 4

1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
   a. visi, misi, dan program Bupati;
   b. arah kebijakan keuangan daerah;
   c. strategi pembangunan daerah;
   d. kebijakan umum;
   e. program Perangkat Daerah;
   f. program lintas Perangkat Daerah; dan
   g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
2) Visi, misi dan program Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih ;
3) Arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai tahapan dan jadwal pelaksanaan program prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah.
6) Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

7) Sistimatika RPMJMD meliputi ;
   a. BAB I Pendahuluan;
   b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah ;
   c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah ;
   d. BAB IV Permasalahan dan Isu-isu strategis ;
   e. BAB V Visi Misi Tujuan dan Sasaran ;
   f. BAB VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ;
   g. BAB VII Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah ;
   h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
   i. BAB IX Penutup

8) Isi dan uraian RPJMD tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh Bappeda.
3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah.
4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
6) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat menjamin:
   a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

7) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

8) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah propinsi dan nasional.

10) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.

11) DPRD dapat memberi masukan pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

12) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.

13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol,
pada tanggal , 09 Juli 2018

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR..02
NOMOR REGISTER : 22,03/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2017 – 2022

I. UMUM

Kabupaten Buol merupakan daerah yang secara geografis memiliki potensi kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat potensial sebagai modal dasar pembangunan daerah sebagai daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang merupakan salah satu Kabupaten berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan juga sebagai Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai wilayah perbatasan baik dengan Provinsi lainnya, juga berbatas dengan Negara Philipina, Kabupaten Buol dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk, yang semakin bertambah dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kabupaten Buol adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017 - 2022. RPJMD Kabupaten Buol memuat visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabupaten Buol dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buol yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Buol. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabupaten Buol secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017–2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2012–2017 untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buol Tahun 2005-2025. Untuk itu periode 5 (lima) tahun mendatang merupakan periode peningkatan pembangunan kota Kabupaten Buol yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kabupaten Buol untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dan Visi Pemerintah Kabupaten Buol merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 dan arah

Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2015-2019. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat Kabupaten Buol maka Visi Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dirumuskan yaitu:"Terwujudnya Kesejahteraan dengan Bertumpu pada Kemandirian dan Kedaulatan Rakyat", yaitu Kabupaten Buol menjadi daerah yang memiliki masyarakat yang ciri kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi, serta keterikatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma dan hukum yang ditopang oleh iman dan Takwa serta penguasaan ilmu dan teknologi yang berperadaban, tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dengan bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan mengelola pertanian menjadi lebih maju sebagai penggerak perekonomian daerah. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (a) Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi; (b) Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Maju, Mandiri da Berkepribadian serta Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan; (d) Mewujudkan Pemangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi yang Berdaya Saing; (e)Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif Berbasis Kewilayahan dan Ekonomi Kerakyatan;(f) Mewujudkan Pembangunan Perdesaan Yang Mandiri Guna Menjaga Keseimbangan Pembangunan Desa-Kota (Balancing Lingkages); (g) Mewujudkan Pembangunan Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Enviromental Security Development).

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017 - 2022 adalah untuk: (a) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Yang Jujur, Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Mewujudkan ketahanan pangan dan Pengembangan Agribisnis melalui peningkatan kapasitas pengelolaan dan produktivitas Pertanian dan Kelautan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;

(c) Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ketersediaan Energi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;(d) Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan; (e) Mewujudkan tercapainya penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui program pemberdayaan masyarakat; (f) Mewujudkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan dan otonomi daerah yang baik, bersih dan prosefional serta aman, nyaman dan terti; dan (g) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkualitas; serta (h) Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Buol ini terdiri dari 7 bab dan 8 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR ..02

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022 dan saya menyambut baik ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017 – 2022 merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disadari bahwa pembangunan akan terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan **yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Kemandirian Dan Kedaulatan Rakyat".**

Saya berharap RPJMD Kabupaten Buol ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan menjadi acuan dasar penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) Perangkat Daerah serta menjadi dasar penyusunan perencanaan lainnya yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat dan kalangan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha dan berkewajiban melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Kabupaten Buol ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan Ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna memberikan maslahat bagi rakyat Kabupaten Buol.

Buol, 26 Maret 2018

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

D A F T A R I S I

Peraturan Daerah			(i)
Kata Pengantar			(ii)
Daftar Isi			(iii)
Daftar Tabel			(v)
Daftar Gambar			(xv)
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I**
	1.1	Latar Belakang	I-1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-11
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-15
	1.4	Maksud dan Tujuan	I-28
	1.5	Sistematika Penulisan	I-30
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**		**II**
	2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-48
	2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-73
	2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-196
BAB III	**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**		**III**
	3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
	3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-57
	3.3	Kerangka Pendanaan	III-72
BAB IV	**PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**		**IV-1**
	4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.2	Isu Strategis	IV-35
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**		**V**
	5.1	Visi	V-1
	5.2	Misi	V-4
	5.3	Tujuan dan Sasaran	V-13

BAB VI	**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**	**VI-1**
	6.1 Strategi Umum	VI-1
	6.2 Arah Kebijakan	VI-50
	6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-53
BAB VII	**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**	**VII**
BAB VIII	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**VIII**
	8.1 Indikator Kinerja	VIIII-1
BAB IX	**PENUTUP**	**IX**
	9.1 Pedoman Transisi	IX-1
	9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel	**2.1**	Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Buol	II-2
Tabel	**2.2**	Klasifikasi Kelas Lereng Kabupaten Buol	II-8
Tabel	**2.3**	Nama dan Tinggi Gunung di Kabupaten Buol	II-10
Tabel	**2.4**	Jenis dan Potensi Bahan Tambang / Galian / Mineral di Kabupaten Buol	II-11
Tabel	**2.5**	Jenis Bahan Tambang/Galian di Kabupaten Buol	II-14
Tabel	**2.6**	Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-16
Tabel	**2.7**	Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-17
Tabel	**2.8**	Proporsi Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kabupaten Buol	II-18
Tabel	**2.9**	Sebaran Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kabupaten Buol	II-19
Tabel	**2.10**	Jumlah Penduduk Kabupaten Buol per Kecamatan Tahun 2016	II-26
Tabel	**2.11**	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-27
Tabel	**2.12**	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-28
Tabel	**2.13**	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-29
Tabel	**2.14**	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-30
Tabel	**2.15**	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan (selain Padi) di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-36
Tabel	**2.16**	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-36
Tabel	**2.17**	Persebaran Luas Sawah Menurut Sumber Pengairannya di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-37

Tabel	**2.18**	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-38
Tabel	**2.19**	Luas Area Perkebunan (Ha) di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-40
Tabel	**2.20**	Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-41
Tabel	**2.21**	Populasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-43
Tabel	**2.22**	Potensi Pertambangan di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-44
Tabel	**2.23**	Obyek Wisata di Kabupaten Buol Tahun 2016	II-45
Tabel	**2.24**	Potensi Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Buol	II-47
Tabel	**2.25**	Perkembangan Kontribusi PDRB Kabupaten Buol Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun Dasar 2010 Tahun 2012-2016	II-49
Tabel	**2.26**	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol	II-54
Tabel	**2.27**	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol	II-56
Tabel	**2.28**	Aspek Kesejahteraan Masyarakat Ketenagakerjaan	II-63
Tabel	**2.29**	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) dan Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	II-67
Tabel	**2.30**	Produksi Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan	II-68
Tabel	**2.31**	Kontribusi Sektor Pariwisata, Sektor Kelautan, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri Terhdapa PDRB	II-69
Tabel	**2.32**	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri dan Pertumbuhan Industri	II-70
Tabel	**2.33**	Jumlah Siswa Pendidikan Usia Dini Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol	II-74
Tabel	**2.34**	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Buol Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTS Tahun 2012-2016	II-80
Tabel	**2.35**	Angka Kelulusan SD/MI – SMP/MTs di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-81

Tabel	**2.36**	Jumlah Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-82
Tabel	**2.37**	Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-83
Tabel	**2.38**	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah di Kabupaten Buol Tahun 2012 sampai 2016	II-84
Tabel	**2.39**	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol	II-85
Tabel	**2.40**	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol	II-86
Tabel	**2.41**	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-87
Tabel	**2.42**	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Buol Tahun 2007-2011	II-89
Tabel	**2.43**	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol	II-93
Tabel	**2.44**	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Buol	II-94
Tabel	**2.45**	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol	II-95
Tabel	**2.46**	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol	II-96
Tabel	**2.47**	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Rasio) di Kabupaten Buol Tahun 2102-2016	II-112
Tabel	**2.48**	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (Rasio) di Kabupaten Buol Tahun 2102-2016	II-113
Tabel	**2.49**	Proporsi Panjang Jalan dengan Jumlah penduduk	II-114
Tabel	**2.50**	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Buol Tahun 2102-2016	II-114
Tabel	**2.51**	Persenatse Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuan Air (Minimal 1,5m(KN) di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-115

Tabel	**2.52**	Persentase Sempadan Jalan yang dipakai Pedagan Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-116
Tabel	**2.53**	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-117
Tabel	**2.54**	Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-117
Tabel	**2.55**	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air yang Tidak Tersumbat di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-118
Tabel	**2.56**	Persentase Pembangunan Turap dan Tanggul di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-119
Tabel	**2.57**	Persentase Irigasi Kabupaten Buol dalam Kondisi Baik di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-120
Tabel	**2.58**	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-121
Tabel	**2.59**	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Tahun 2012-2016	II-121
Tabel	**2.60**	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol	II-123
Tabel	**2.61**	Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-124
Tabel	**2.62**	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Buol	II-125
Tabel	**2.63**	Rasio Rumah Layak Huni	II-126
Tabel	**2.64**	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-126
Tabel	**2.65**	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	II-127
Tabel	**2.66**	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-128
Tabel	**2.67**	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	II-129

Tabel	**2.68**	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-130
Tabel	**2.69**	Jumlah Penyandang dan Jenis PMKS di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-131
Tabel	**2.70**	Persentase Penanganan PMKS di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-133
Tabel	**2.71**	Data Sebaran Lokasi Bencana di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-133
Tabel	**2.72**	Data Pengungsi Bencana Alam dan Persentase Penanganan Korban Bencana Alam di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-134
Tabel	**2.73**	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan, Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek, Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Lulusan S1/S2/S3	II-137
Tabel	**2.74**	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-138
Tabel	**2.75**	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Buol Tahun 2014-2016	II-139
Tabel	**2.76**	Jumlah Sertifikat dan Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-143
Tabel	**2.77**	Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-144
Tabel	**2.78**	Penyelesaian Izin Lokasi Tahun di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-145
Tabel	**2.79**	Tersusunnya RPPLH Kabupaten, Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten dan Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-146
Tabel	**2.80**	Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-147

Tabel	**2.81**	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-148
Tabel	**2.82**	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-151
Tabel	**2.83**	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-156
Tabel	**2.84**	Rasio Ijin Trayek	II-157
Tabel	**2.85**	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-158
Tabel	**2.86**	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-158
Tabel	**2.87**	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-159
Tabel	**2.88**	Pemasangan Rambu-Rambu	II-160
Tabel	**2.89**	Rasio Panjang Jalan per umlah Kendaraan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-160
Tabel	**2.90**	Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-162
Tabel	**2.91**	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-163
Tabel	**2.92**	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-163
Tabel	**2.93**	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-165
Tabel	**2.94**	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-163
Tabel	**2.95**	Capaian Kinerja Statistik di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-170
Tabel	**2.96**	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-171

Tabel	**2.97**	Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-175
Tabel	**2.98**	Capaian Urusan Kearsipan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-177
Tabel	**2.99**	Kunjungan Wisata di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-178
Tabel	**2.100**	Lama Kunjungan Wisata di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-178
Tabel	**2.101**	PAD Sektor Pariewisata Tahun 2012-2016	II-179
Tabel	**2.102**	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija), Kontribusi Sektor Perkekbunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-180
Tabel	**2.103**	Produktivitas Padi Sawah atas Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-181
Tabel	**2.104**	Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-183
Tabel	**2.105**	Cakupan Kinerja Kelautan dan Perikanan	II-187
Tabel	**2.106**	Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-188
Tabel	**2.107**	Capaian Bidang Urusan Keuangan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-190
Tabel	**2.108**	Capaian Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-191
Tabel	**2.109**	Persentase Tindak Lanjut, Pelanggaran dan Jumlah Temuan BPK	II-194
Tabel	**2.110**	Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Dewan	II-195
Tabel	**2.111**	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-195
Tabel	**2.112**	Pengeluaran Konsusmsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Buol Tahun 2012-2017	II-215
Tabel	**2.113**	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	11.218

Tabel	**3.1**	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Jutaan Rupiah)	III-7
Tabel	**3.2**	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	III-22
Tabel	**3.3**	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	III-33
Tabel	**3.4**	Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-37
Tabel	**3.5**	Perkembangan Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-50
Tabel	**3.6**	Analisis Neraca Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-54
Tabel	**3.7**	Proporsi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	III-65
Tabel	**3.8**	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-67
Tabel	**3.9**	Devisit Riil Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	III-68
Tabel	**3.10**	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	III-69
Tabel	**3.11**	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabuapaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	III-71
Tabel	**3.12**	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	III-74
Tabel	**3.13**	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 (Juta Rp)	III-76
Tabel	**3.14**	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 (Juta Rp)	III-81
Tabel	**3.15**	Rencana Penggunaan Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan Dearah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 (Juta Rp)	III-82
Tabel	**5.1**	Pokok-Pokok Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-2

Tabel	**5.2**	Tujuan dan Sasaran Misi I Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-12
Tabel	**5.3**	Tujuan dan Sasaran Misi II Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-13
Tabel	**5.4**	Tujuan dan Sasaran Misi III Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-14
Tabel	**5.5**	Tujuan dan Sasaran Misi IV Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-15
Tabel	**5.6**	Tujuan dan Sasaran Misi V Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-16
Tabel	**5.7**	Tujuan dan Sasaran Misi VI Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-17
Tabel	**5.8**	Tujuan dan Sasaran Misi VII Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	V-17
Tabel	**5.9**	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022	VI-18
Tabel	**6.1**	Misi 1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-3
Tabel	**6.2**	Misi 2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-13
Tabel	**6.3**	Misi 3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-26
Tabel	**6.4**	Misi 4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-33
Tabel	**6.5**	Misi 5 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-36
Tabel	**6.6**	Misi 6 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-43
Tabel	**6.7**	Misi 7 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VI-48
Tabel	**6.8**	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode Tahun 2017-2022	VI-52
Tabel	**7.1**	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	VII-2

		Buol Tahun 2018-2022	
Tabel	**7.2**	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Buol Tahun 2018-2022	VII-6
Tabel	**8.1**	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buol	VIII-2
Tabel	**8.2**	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Buol Periode 2017-2022	VIII-12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	**1.1**	Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol	I-4
Gambar	**1.2**	Bagan Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan RTRW	I-23
Gambar	**1.3**	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-25
Gambar	**2.1**	Peta Kelas Lereng Kabupaten Buol	II-8
Gambar	**2.2**	Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Buol	II-20
Gambar	**2.3**	Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar di Kabupaten Buol (Ha) Tahun 2015	II-34
Gambar	**2.4**	Peta Sebaran Areal Tanaman Pangan, Permukiman dan Penggunaan Lainnya Kabupaten Buol	II-37
Gambar	**2.5**	Peta Keterbatasan Lahan Basah daan Pentingnya Program Intensifikasi Kabupaten Buol	II-38
Gambar	**2.6**	Peta Areal Persawahan Kabupaten Buol	II-38
Gambar	**2.7**	Peta Arahan Penggunaan Lahan untuk Pertanian Perkebunan Kabupaten Buol	II-41
Gambar	**2.8**	PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-47
Gambar	**2.9**	Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-49
Gambar	**2.10**	PDRB per Kapita Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-51
Gambar	**2.11**	Tren Indeks Gini Ratio Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-52
Gambar	**2.12**	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-54
Gambar	**2.13**	Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-57
Gambar	**2.14**	Angka Harapan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-58

Gambar	**2.15**	Persentase Balita Gizi Buruk	II-59
Gambar	**2.16**	Prevalensi Gizi Kurang Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-60
Gambar	**2.17**	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-61
Gambar	**2.18**	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-63
Gambar	**2.19**	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	II-64
Gambar	**2.20**	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	II-65
Gambar	**2.21**	Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol	II-70
Gambar	**2.22**	Perkembangan Olahraga Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol	II-71
Gambar	**2.23**	Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-74
Gambar	**2.24**	APK (Perkembangan Angka Partisipasi Kasar) Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-75
Gambar	**2.25**	APM (Perkembangan Angka Partisipasi Murni) SD/MI, SMP/MTSn dan SMA/SMK/MA	II-77
Gambar	**2.26**	Perkembangan Angka Partsipasi Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	II-78
Gambar	**2.27**	Bangunan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-82
Gambar	**2.28**	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-87
Gambar	**2.29**	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-89
Gambar	**2.30**	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2012-2016	II-91
Gambar	**2.31**	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-90
Gambar	**2.32**	Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol	II-95
Gambar	**2.33**	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-97

Gambar	**2.34**	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-97
Gambar	**2.35**	Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Buol Periode 2012-2016	II-99
Gambar	**2.36**	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2012-2016	II-100
Gambar	**2.37**	Cakupan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-101
Gambar	**2.38**	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-102
Gambar	**2.39**	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-103
Gambar	**2.40**	Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-104
Gambar	**2.41**	Cakupan Puskesmas Terhadap Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-105
Gambar	**2.42**	Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap Desa Tahun 2012-2016	II-106
Gambar	**2.43**	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Tahun 2012-2016	II-107
Gambar	**2.44**	Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-108
Gambar	**2.45**	Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Buol	II-109
Gambar	**2.46**	Persentase KLB di Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-110
Gambar	**2.47**	Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-122
Gambar	**2.48**	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	II-135
Gambar	**2.49**	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	II-140
Gambar	**2.50**	Rasio KDRT di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-141
Gambar	**2.51**	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-142

Gambar	**2.52**	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-144
Gambar	**2.53**	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik	II-150
Gambar	**2.54**	Rata-Rata Kelompok Binaan PKK	II-152
Gambar	**2.55**	Persentase PKK Aktif dan Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-153
Gambar	**2.56**	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-154
Gambar	**2.57**	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-155
Gambar	**2.58**	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-164
Gambar	**2.59**	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-167
Gambar	**2.60**	Persentase Wirausaha Muda yang Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-167
Gambar	**2.61**	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-168
Gambar	**2.62**	Peneyelenggaraan Festival dan Seni Budaya	II-171
Gambar	**2.63**	Benda, Situs dan Kawsan Cagar Budaya ynag Dilestarikan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-172
Gambar	**2.64**	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-173
Gambar	**2.65**	Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-182
Gambar	**2.66**	Persentase Rumah Tangga Pengguna lIstrik di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-183
Gambar	**2.67**	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-185
Gambar	**2.68**	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-185
Gambar	**2.69**	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2012-2016	II-186

Gambar	**2.70**	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2012-2016	II-193
Gambar	**2.71**	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-194
Gambar	**2.72**	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-216
Gambar	**2.73**	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	II-217
Gambar	**3.1**	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)	III-8
Gambar	**3.2**	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-9
Gambar	**3.3**	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-10
Gambar	**3.4**	Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)	III-12
Gambar	**3.5**	Pertambahan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-13
Gambar	**3.6**	Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daearah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-14
Gambar	**3.7**	Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)	III-15
Gambar	**3.8**	Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-16
Gambar	**3.9**	Proporsi Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-17
Gambar	**3.10**	Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)	III-18
Gambar	**3.11**	Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-19
Gambar	**3.12**	Proporsi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-20

Gambar	**3.13**	Perbandingan Realisasi Belanja Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)	III-23
Gambar	**3.14**	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-24
Gambar	**3.15**	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016	III-25
Gambar	**3.16**	Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)	III-26
Gambar	**3.17**	Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-27
Gambar	**3.18**	Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-28
Gambar	**3.19**	Perbandingan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)	III-29
Gambar	**3.20**	Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-30
Gambar	**3.21**	Proporsi Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)	III-31
Gambar	**4.1**	Hubungan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2002-2025 dengan RPJMD Tahun 2017-2022	IV-23
Gambar	**4.2**	Kesesuaian Visi, Misi Pemerintah Tahun 2015-2019 dan Pemerintah Kabupaten Tahun 2017-2022	IV-26
Gambar	**4.3**	Hubungan Agenda Prioritas Nawacita Pemerintah dengan Misi Pembangunan Kabupaten Buol	IV-27
Gambar	**4.4**	Hubungan Harmonisasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Buol	IV-32
Gambar	**5.1**	Diagram Tujuan Misi 1	V-5
Gambar	**5.2**	Diagram Tujuan Misi 2	V-6
Gambar	**5.3**	Diagram Tujuan Misi 3	V-7
Gambar	**5.4**	Diagram Tujuan Misi 4	V-8

Gambar 5.5 Diagram Tujuan Misi 5 V-9

Gambar 5.6 Diagram Tujuan Misi 6 V-10

Gambar 5.7 Diagram Tujuan dan Sasaran Misi 7 V-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi telah mengubah semua paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah termasuk dalam merencanakan proses pembangunan. Proses pembangunan di era sebelum reformasi dikenal dengan *Top Down Planning* atau dari atas ke bawah, maka di era reformasi, paradigma pembangunan dilaksanakan dengan 4 (empat) pendekatan, (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; (2) Pendekatan partisipatif adalah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (3) Pendekatan politis adalah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; (2) Pendekatan integratif adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; (3) Pendekatan spasial adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Prinsip *Bottom Up Planning* jika dikaitkan dengan asas desentralisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi relevan karena daerah diberi otonomi atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Prinsip ini akan memberikan harapan dan tantangan tersendiri bagi daerah dalam menyelenggarakan proses pembangunan di daerah, sehingga dengan prinsip ini, maka pemerintah daerah harus memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi dalam mengelolah dan mengurus pemerintahan di daerah dengan segala potensi yang dimilikinya.

Untuk menerjemahkan prinsip - prinsip dan sistem itulah maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai landasan yuridis dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Diberlakukannya undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) di samping memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi untuk membangun daerahnya, dituntut pula untuk mampu mengidentifikasi keunggulan komparatif (comparative advantages) wilayahnya. Keunggulan komparatif wilayah tersebut untuk selanjutnya harus dapat diarahkan dan dipadukan, serta dikembangkan secara terencana, sehingga tercapai pengembangan wilayah yang optimal, yang tercermin dari luasnya kesempatan kerja dan berusaha, serta adanya insentif ekonomi yang menguntungkan bagi berbagai pelaku ekonomi.

Sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan memiliki keunggulan-keunggulan komparatif yang cukup besar sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Buol berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Daerah harus terencana sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan sehingga terarah dan mencapai sasaran atau tujuan bahkan harus memberi dampak serta manfaat yang besar bagi masyarakat serta tidak bertentangan pula dengan sistem atau prinsip pembangunan nasional.

Untuk mengarahkan pembangunan daerah sehingga terarah, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan beberapa ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang sejalan memberi landasan yuridis bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah termasuk di Kabupaten Buol.

Amanat undang-undang ini mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Berbagai dokumen perencanaan juga diamanatkan Undang-undang tersebut untuk segera disusun adalah RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah, Renstra-OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah), RKPD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Renja-OPD (Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah).

Adapun tahapan proses penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mana pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara bagan alur dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RPJMDKabupaten Buol

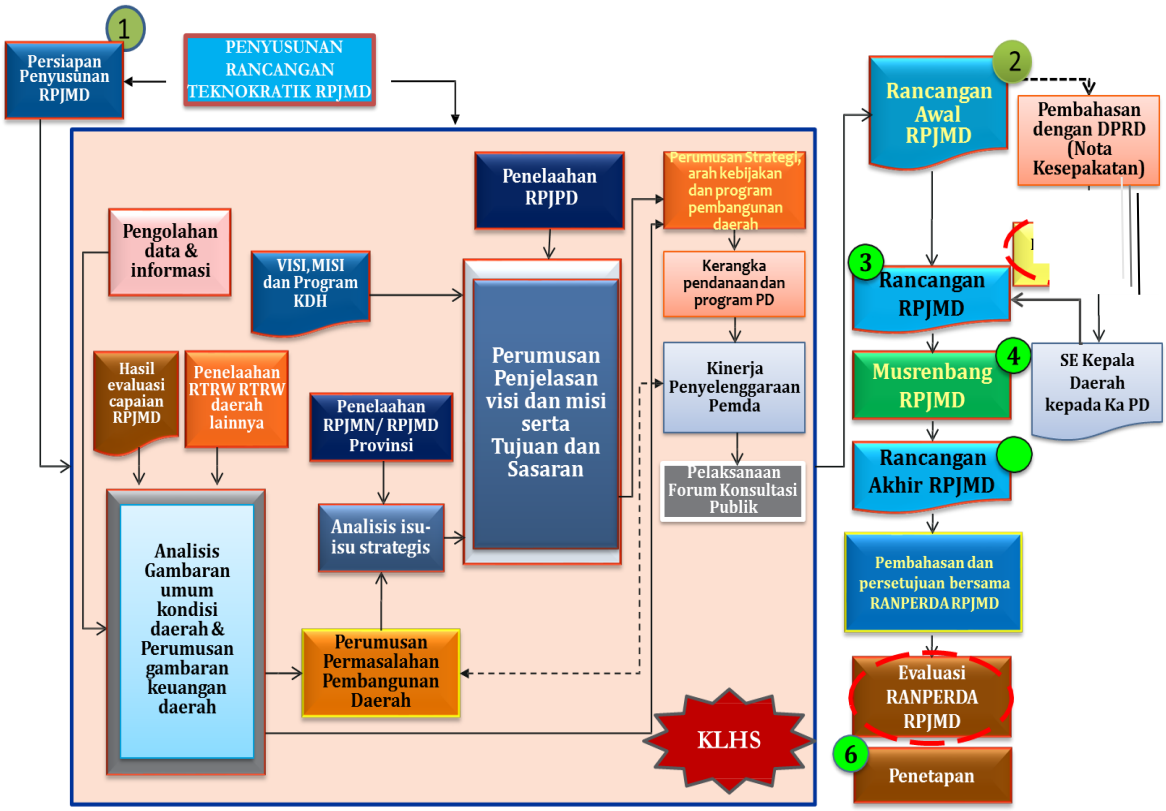

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen RPJMD ini mengintegrasikan sesuai regulasi yang berlaku Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam implementasi misi seperti termaktub dalam program dan kegiatan yang dibangun di atas semangat filosofi *money follow program* baik program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah pendukung misi maupun program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah.

Wujud integrasi tersebut termaktub dalam implementasi Misi Pertama RPJMD Kabupaten Buol periode 2017-2022 yakni mewujudkan keamanan daerah, iklim demokrasi, penegakkan supremasi hukum dan penataan reformasi birokrasi dengan Tujuan Kedua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menghapuskan Kelaparan, dengan Tujuan Ketiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin

kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan Tujuan Keempat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dengan Tujuan Keenam Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, serta dengan tujuan Ketujuh Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam implementasi Misi Kedua RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 yakni mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Tujuan Pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, dengan Tujuan Kedua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan Tujuan Keempat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dengan Tujuan Kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, dengan Tujuan Keenam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan Tujuan Ketujuh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, serta dengan Tujuan Ketiga Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam implementasi termaktub dalam integrasi Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan dengan Tujuan Pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, dengan Tujuan Kedua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan Tujuan Kedua Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, dengan Tujuan Keempat Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan Tujuan Kelima Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam implementasi termaktub dalam integrasi RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 Misi Empat yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing, dengan Tujuan Ketujuh Tujuan Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, dengan Tujuan Kesembilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan Tujuan Kesebelas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan Tujuan Keempat Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan Tujuan Kelima Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam implementasi termaktub dalam integrasi RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 Misi Lima RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 dengan Tujuan Pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, dengan Tujuan Kedua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan Tujuan Keempat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

yakni Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dengan Tujuan Kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, dengan Tujuan Keenam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan Tujuan Ketujuh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, dengan Tujuan Kedelapan Pembangunan Berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan Tujuan Kesembilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan Tujuan Kesepuluh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, dengan Tujuan Kesebelas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan Tujuan Kedua Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, dengan Tujuan Keempat Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan Tujuan Kelima Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan

kehilangan keanekaragaman hayati.

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam implementasi termaktub dalam integrasi RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 Misi Enam RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 dengan Tujuan Pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, dengan Tujuan Kedua Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, dengan Tujuan Keempat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dengan Tujuan Kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, dengan Tujuan Keenam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan Tujuan Ketujuh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, dengan Tujuan Kedelapan Pembangunan Berkelanjutan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan Tujuan Kesembilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan Tujuan Kesepuluh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, dengan Tujuan Kesebelas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan

berkelanjutan, dengan Tujuan Kedua Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, dengan Tujuan Keempat Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dengan Tujuan Kelima Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggusuran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam implementasi termaktub dalam integrasi RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 Misi Ketujuh RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 dengan Tujuan Keenam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, dengan Tujuan Ketujuh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, dengan Tujuan Kesembilan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, dengan Tujuan Kesebelas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan Tujuan Kedua Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, dengan Tujuan Ketiga Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, dengan

Tujuan Keempat Belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 sejumlah peraturan perundang-undangan digunakan sebagai rujukan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 04);
31. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2016 Nomor 05);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa “Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan Rancangan Awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arak kebijakan keuangan daerah”. Untuk maksud itu dokumen ini merujuk kepada RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Daerah Lainnya, RPJPD Kabupaten Buol dan RTRW Kabupaten Buol.

1.3.1. Hubungan Antara RPJMN dengan RPJMD Kabupaten Buol

Secara spesifik, hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 terletak pada:

1. Misi 1 RPJMN yakni mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan dengan misi 1 RPJMD Kabupaten Buol, yakni mewujudkan keamanan daerah, iklim demokrasi, penegakkan supremasi hukum dan penataan reformasi birokrasi; misi 4 RPJMD Kabupaten Buol mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing; Misi 5, mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan memiliki keunggulan komparatif berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan; Misi 6, mewujudkan pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangunan Desa-Kota (Balancing Linkages); Misi 7, mewujudkan pembangunan konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan (Environmental Security Development).
2. Misi 2 RPJMN yakni mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 - 2022 yakni mewujudkan keamanan daerah, iklim demokrasi, penegakan supremasi hukum dan penataan reformasi birokrasi.
3. Misi 3 RPJMN yakni mewujudkan politik Luar Negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Buol Perode 2017 - 2022 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan.
4. Misi 4 RPJMN yakni mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera dengan Misi 2 RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 yakni mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Misi 3 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan; Misi 5 yakni mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan memiliki keunggulan komparatif berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan; dan Misi 6 yakni mewujudkan pembangunan

perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangan Desa-Kota (Balancing Linkages).

5. Misi 5 RPJMN yakni mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan Misi 4 RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing, Misi 5 yakni mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan memiliki keunggulan komparatif berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.
6. Misi 6 RPJMN yakni mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional dengan Misi 2 RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 yakni mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Misi 3 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan, Misi 4 yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing .
7. Misi 7 RPJMN yakni mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dengan Misi 2 RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017-2022 yakni mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD Kabupaten Buol

Hubungan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 terletak pada:

1. Misi 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016 – 2021 yaitu melanjutkan reformasi birokrasi, mendukung penegakan supremasi hukum dan HAM dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Buol Periode

2017-2022 yakni mewujudkan keamanan daerah, iklim demokrasi, penegakan supremasi hukum dan penataan reformasi birokrasi.

2. Misi 2 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016 – 2021 yakni meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 - 2022 Misi 5 yakni mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan memiliki keunggulan komparatif berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan; Misi 6 yakni mewujudkan pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangan Desa-Kota (Balancing Linkages); dan Misi 7 yakni mewujudkan pembangunan konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan (Environmental Security Development).
3. Misi 3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016 – 2021 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya argobisnis dan maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan provinsi maju di kawasan timur indonesia dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 3 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan dan Misi 4 yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing.

4. Misi 4 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016 – 2021 yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 2 yakni mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Daerah Lainnya dengan RPJMD Kabupaten Buol

Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan dokumen RPJPD, RTRW, dan RPJMD daerah lain. Hal ini dilakukan untuk

menyelaraskan RPJMD Kabupaten Buol dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah lainnya. Daerah lainnya adalah Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, dan Gorontalo Utara.

1.3.4 Hubungan Antara RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD Kabupaten Buol

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 - 2022 selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2013 - 2033. Hubungan antara RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dengan RPJMD Kabupaten Buol terdapat pada RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 – 2033 Pasal 4 yakni kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah terdiri atas:

a. Peningkatan sumberdaya lahan pertanian
b. Peningkatan sumberdaya perikanan dan kelautan
c. Pengembangan potensi pariwisata
d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang pertanian, kelautan dan pariwisata
e. Peningkatan aksesibilitas pemasaran produksi pertanian dan kelautan
f. Peningkatan dan pengembangan prasarana wilayah dan
g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Sebagai tambahan, hubungan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Sulawesi Tengah merujuk pada Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, menyebutkan bahwa RTRWP digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi acuan bagi pelasanaan pembangunan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3.5 Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Buol dengan RPJMD Kabupaten Buol

Hubungan antara dokumen RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 - 2025 dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 terletak pada:

1. Misi 1 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni mewujudkan tatanan masyarakat BERKAH sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 1 yakni mewujudkan keamanan daerah, iklim demokrasi, penegakan supremasi hukum dan penataan reformasi birokrasi.
2. Misi 2 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang terampil, berilmu pengetahuan teknologis, produktif, mandiri, dan maju dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 2 yakni mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Misi 3 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni Mewujudkan *good governance* dan *clean governance* dengan aparatur negara yang profesional melayani masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 2 yakni mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Misi 3 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan.
4. Misi 4 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan kualitas infrastruktur wilayah dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 3 yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan; Misi 4 yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing; dan Misi 5 yakni mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan memiliki keunggulan komparatif berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.

5. Misi 5 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan Inklusif dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 4 yakni mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kemandirian energi yang berdaya saing; Misi 5 yakni mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan memiliki keunggulan komparatif berbasis kewilayahan dan ekonomi kerakyatan dan Misi 6 yakni mewujudkan pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangan Desa-Kota (Balancing Linkages).
6. Misi 6 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni mewujudkan Kabupaten Buol yang asri dan lestari, bersih dan indah dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 6 yakni mewujudkan pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangan Desa-Kota (Balancing Linkages) dan Misi 7 yakni mewujudkan pembangunan konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan (Environmental Security Development).
7. Misi 7 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni mewujudkan Kabupaten Buol aman, damai dan bersatu dengan RPJMD Kabupaten Buol Periode 2017 – 2022 Misi 1 mewujudkan keamanan daerah, iklim demokrasi, penegakan supremasi hukum dan penataan reformasi birokrasi dan Misi 7 mewujudkan pembangunan konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan (Environmental Security Development).

Dokumen RPJMD Periode 2017 – 2022 berlandaskan pada Periode ke – 3 RPJPD Kabupaten Buol Periode 2005 – 2025 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Buol di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian yang didukung oleh suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat untuk memandirikan dan mewujudkan kedaulatan masyarakat Buol yang sejahtera.

1.3.6 Hubungan Antara RTRW Kabupaten Buol dengan RPJMD Kabupaten Buol

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012 Nomor 04), sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan.

Hubungan antar dokumen RPJMD dengan RTRW Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Bagan Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan RTRW

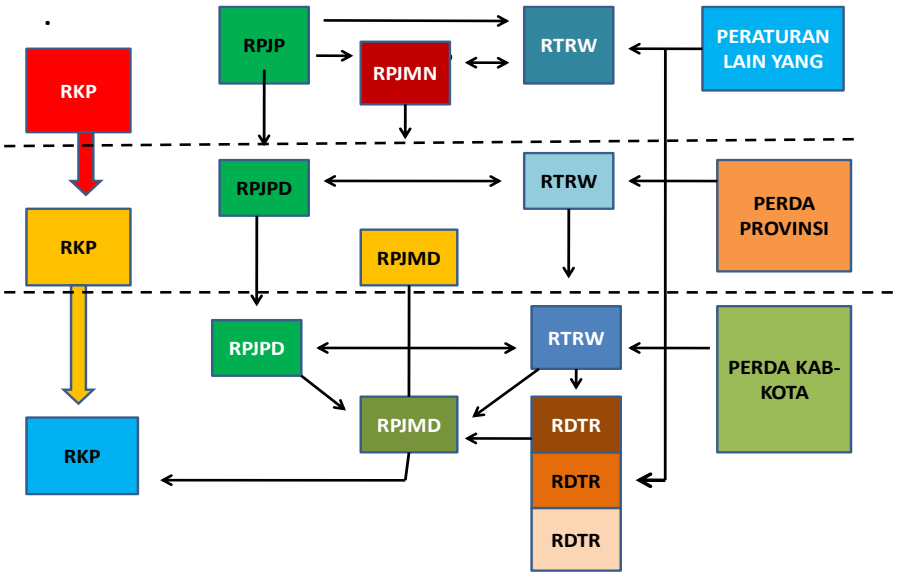

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu: RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Renstra-OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), dan Renja-OPD (Rencana Kerja Organisaisi Perangkat Daerah). Di samping dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut di atas, dalam mewujudkan akselerasi pembangunan secara menyeluruh, Pemerintah Daerah juga memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kesepakatan nasional maupun daerah, seperti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Instruksi Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkelanjutan, dan lain sebagainya.

RPJMD Kabupaten Buol merupakan penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan

dalam RKPD dan menjadi pedoman OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menyusun Rencana Strategis lima tahunan, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, yang akan dilaporkan pelaksanaannya setiap tahun dan pada akhir periode masa jabatan dalam Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buol Tahun 2011-2030 telah ditetapkan arah pengembangan pembangunan dan tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Buol.

Dokumen RPJMD Kabupaten dilakukan penyelarasan dengan RPJMD Provinsi melalui pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah dengan prioritas dan program pembangunan nasional. RPJMD ini juga menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Buol yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan rencana pendanaan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat, sehingga RPJMD menjadi dokumen perencanaan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol. Bagan hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

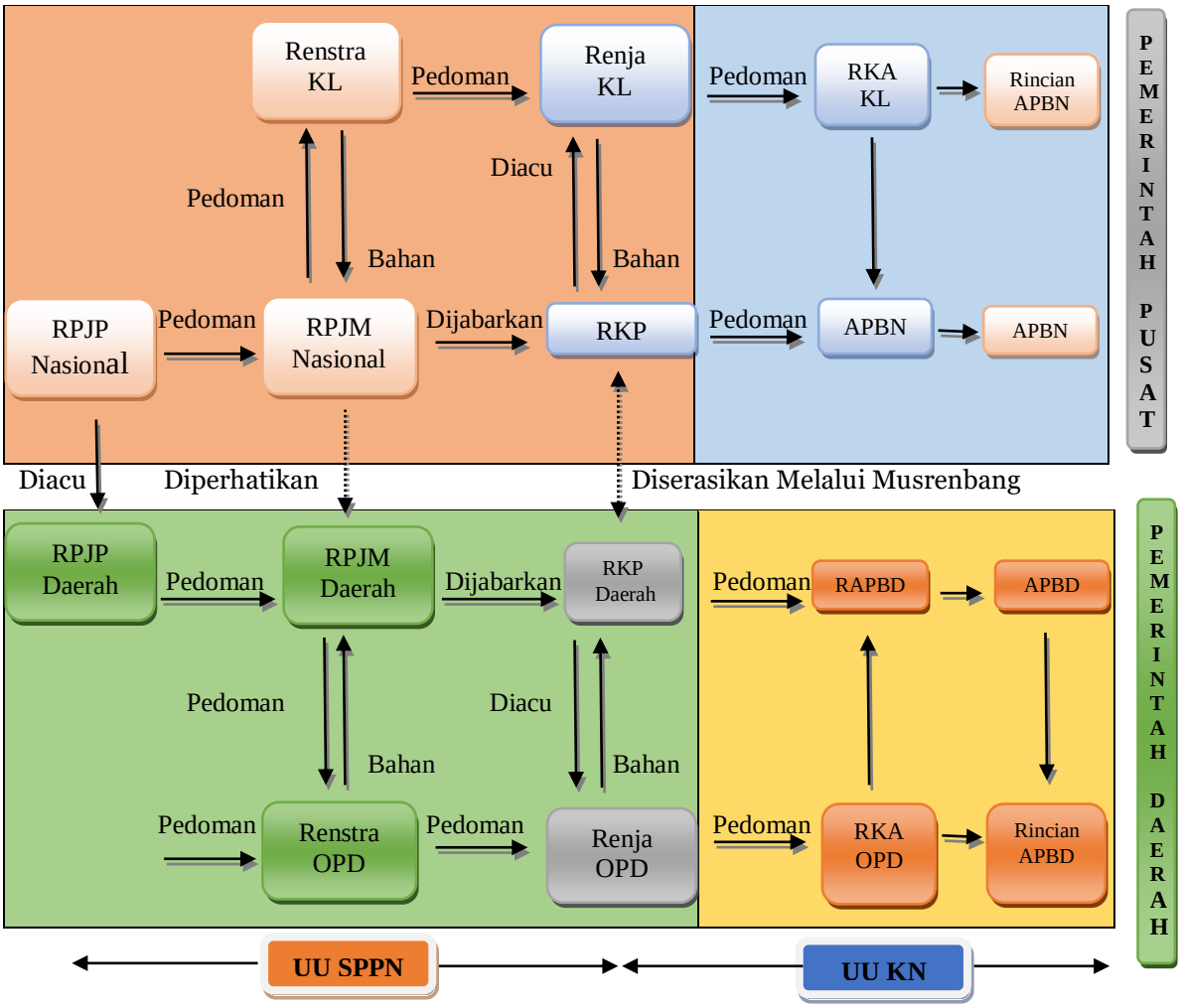

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Perumusan isi dan substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sangat menentukan kualitas dokumen yang akan dihasilkan. Tersusunnya RPJMD sangat strategis dengan maksud untuk mengarahkan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif selama 5 (lima) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Proses dan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Buol dilakukan melalui berbagai proses konsultasi baik konsultasi dan perumusan

bersama Organisasi Perangkat Daerah maupun Konsultasi Publik dengan melibatkan multi pihak yang kemudian ditindaklanjuti dengan konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dimaksudkan juga untuk menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Di samping itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 bertujuan untuk:

1. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional bagi segenap lapisan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Buol, dalam upaya menetapkan prioritas program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan mekanisme monitoring serta evaluasi pembangunan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah;
2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembanguna Daerah);
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;

4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
7. Mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas dan terukur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan taktis strategis daerah untuk periode lima tahun yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Buol, bersifat adaptif, fleksibel, dan mampu mengakomodasikan penyesuaian atas perkembangan yang muncul serta dapat memanfaatkan peluang yang ada, menggambarkan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan setiap organisasi pemerintah. Oleh karena itu, pola pelayanan yang perlu dibangun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV	**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH**
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
BAB VI	**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
BAB VII	**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
BAB VIII	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
BAB IX	**PENUTUP**

ahlis.djirimu66@gmail.com

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Buol, meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Gambaran umum Kabupaten Buol tentang potensi dasar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Buol guna menjadi sumberdaya pokok bagi pengembangan di masa depan, berikut kelemahan-kelemahan yang harus diatasi.

Kabupaten Buol memiliki potensi daerah begitu melimpah diantaranya lahan pertanian, perkebunan rakyat, kawasan hutan, perikanan darat, kelautan, pertambangan dan energi serta pariwisata. Potensi sumberdaya alam ini merupakan sumberdaya bersifat tak terbarukan, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan pengelolaannya dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pengelolaan sumberdaya alam ini dilakukan untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi meningkatkan kemakmuran masyarakat, secara efisien, transparan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, potensi sumberdaya alam yang ada memerlukan penanganan secara khusus.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak geografis wilayah Kabupaten Buol memiliki luas mencapai 4.043,57 Km² atau sekitar 5,94 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara administratif Kabupaten Buol berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli dan Laut Sulawesi. Secara rinci batas-batas wilayah administratif Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Sulawesi.
- Sebelah selatan : Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo

- Sebelah timur : Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.
- Sebelah barat : Kabupaten Tolitoli.

Apabila dicermati, letak Kabupaten Buol sangat strategis dengan tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi Kabupaten Buol ke depan, yaitu:

- Letak geografis Kabupaten Buol yang berbatasan dengan Laut Sulawesi secara tidak langsung akan membuka akses ke Negara-Negara Asia lainnya, sehingga Kabupaten Buol dapat menjadi salah satu pintu Sulawesi untuk pengembangan hubungan dagang dan investasi di era pasar bebas.
- Sebagian besar wilayah Kabupaten Buol mencakup Laut Sulawesi dan ke arah barat dekat dengan Selat Makassar yang akan mendukung terciptanya hubungan dagang dan investasi dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia.
- Adanya keragaman potensi masing-masing daerah sekitar Kabupaten Buol akan mendorong interkoneksitas ekonomi, saling mendukung dan bersinergi untuk kemajuan bersama pada masing-masing wilayah.

Letak ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar sebagai konsekwensi logis dari berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Letak demikian ini merupakan salah satu potensi dan modal bagi pengembangan Kabupaten Buol di masa yang akan datang.

Secara administratif Kabupaten Buol terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 7 (tujuh) kelurahan, dan 108 (seratus delapan) desa, dengan rincian seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se – Kabupaten Buol

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Momunu	Momunu Pinamula Pujimulyo Taluan Potugu Panimbul Tongon	

		Lamadong Pomayagon Guamonial Lamadong Pajeko Wakat Soraya Permata putih Mangubi	
2.	Lakea	Tuinan Lakea II Lakea I Lakuan Buol Bukaan Ngune Ilambe	
3.	Bokat	Tayadun Poongan Bongo Doulan Kantanan Kodolagon Negeri Lama Bokat IV Butukan Bokat Tikopo Bukamog Tang	
		Duamayo	
		Langudon	
4.	Bunobogu	Lonu Tamit	
		Botugolu Bunobogu Konamukan Ponipingan Inalatan Domag Mekar Bunobogu Selatan Pokobo	

5.	Paleleh	Umu Mulangato Lilito Talaki Batu Rata Kwala Besar Tolau Paleleh Lintidu Pionoto Dopalak Dutuno	
6.	Biau		Buol Kali Leok II Leok I Kumaligon Kulango Bugis
7.	Tiloan	Boilan Kokobuka Air Terang Panilan Jaya Jatimulya Lomuli Balau Maniala Monggonit	
8.	Bukal	Biau Bungkudu	
		Rantemaranu	
		Winangun Modo Unone	
		Mopu Diat	
		Potangoan Binuang Yugut Mooyong Mulat Bukal	
9.	Gadung	Lokodidi	

		Matinan Taat Lokodoka Labuton Bulagidun Diapati Nandu Lipubogu Bulagidun Tanjung Pandangan	
10.	Karamat	Mokupo Mendaan Baruga Monano Busak I Busak II Lamakan	
11.	Paleleh Barat	Bodi Tayokan Harmoni Lunguto Timbulon Oyak Hulubalang	

Sumber : SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

2) Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Secara geografis wilayah Kabupaten Buol terletak di ujung utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak astronomisnya antara 0,35°-1,20° Lintang Utara dan 120,12°-122,09° Bujur Timur. Ibu Kota Kabupaten Buol terletak di Kecamatan Biau yang berjarak sekitar 493 Km dari Kota Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Morfologi

Secara fisiografi, wilayah Kabupaten Buol berada di antara jajaran vulkanik lengan utara (northern volcanic ranges) dengan wilayah pegunungan bagian tengah (central mountains) dari Pulau Sulawesi. Morfologi wilayah ini sebagian merupakan perbukitan dengan relief sedang, sebagian besar yang berelief tinggi terutama pada bagian selatan. Sebagian lagi berelief rendah yang umumnya berupa

dataran alluvial dan wilayah-wilayah pesisir pantai, atau bagian utara Kabupaten Buol.

Wilayah bertopografi tinggi terdiri dari deretan perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi lebih dari 2.000 m dpl (di atas permukaan laut). Selain itu terdapat pula perbukitan yang sebagian berupa karst, ada yang menjorok hingga ke batas garis pantai dengan elevasi antara 100 – 300 m, yaitu Tanjung Dako di Kecamatan Karamat dan beberapa pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buol berupa pulau kecil dengan morfologi tidak rumit, diantaranya Pulau Busak, Pulau Raja, Pulau Boki, Pulau Panjang dan Pulau Lesman di perairan Laut Sulawesi.

Berdasarkan proses geologi, pengelompokan umum morfologi laut dan daratan wilayah Kabupaten Buol, dibagi dalam:

a) **Lereng/Tebing Depresi**, menghubungkan daerah depresi yang dalam dengan daerah paparan yang relatif dangkal. Pada beberapa bagian laut, lereng yang terbentuk berupa tebing curam karena proses subduksi. Lereng depresi kedalamannya berkisar antara 100 – 200 meter.
b) **Daerah Paparan**, dengan kedalaman kurang dari 200 m dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut.
c) **Dataran**, terdiri dari:
    a. Dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian besar wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Biau.
    b. Dataran Lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada.

    Secara umum, sebagian dari satuan morfologi ini merupakan permukiman yang sudah lama dibuka.
d) **Perbukitan**, terdiri dari:
    a. Punggung bukit sedimen asimetrik takter orientasi. Bentukan sepert ini dijumpai dalam luasan yang sempit pada daerah perbukitan pesisir bagian selatan sepanjang wilayah Kabupaten Buol
    b. Perbukitan karst (kapur) di atas batu gamping coral. Bentukan bukit karst seperti ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Lakea.

c. Deretan perbukitan di atas batuan beku, dijumpai di bagian barat dan timur Kabupaten Buol seperti pada Kecamatan Lakea, Kecamatan Tiloan dan Kecamatan Paleleh.

e) **Pegunungan**, terdiri dari:

a. Punggung bukit sedimentasi metrik tertoreh melebar, sebarannya dijumpai disebagian wilayah kecamatan yang ada.

b. Punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua wilayah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Buol. Satuan ini merupakan bagian terbesar morfologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Buol. Ketinggiannya berkisar 800–2.500 m dpl (G. Malino). Wilayah-wilayah pegunungan yang termasuk dalam satuan ini meliputi deretan Pegunungan Malino, G. Bangkalang dan G. Tetembu serta G. Tentolomatinan di Pegunungan Paleleh.

3) Topografi

Luas wilayah Kabupaten Buol berada pada topografi dengan ketinggian 0-1000 m dpl (di atas permukaan laut) dengan rincian sebagai berikut : 553,97 km^2 (13,70 persen) antara 1-100 m dpl, 1.629,96 km^2 (40,31 persen) antara 100-500 m dpl, 1.572,14 km^2 (38,88 persen) antara 500-1.000 m dpl, dan 287,5 km^2 (7,11 persen) berada pada ketinggian >1.000 m dpl.

Kemiringan tanah terbagi atas 4 (empat) kelompok yaitu, datar, bergelombang, curam dan sangat curam dengan rincian sebagai berikut : 429,43 km^2 (10,62 persen) antara 0-2° (datar), 866,54 km^2 (21,43 persen) memiliki kemiringan 2-15° (bergelombang), 1.066,29 km^2 (26,375 persen) memiliki kemiringan 16-40° (curam) dan 1.666,76 km^2 (41,22 persen) memiliki kemiringan diatas 40° (sangat curam).

Kemiringan Lereng wilayah Kabupaten Buol mencakup 7 (tujuh) kelas, dimana wilayah bergunung dengan kelerengan 40 persen mendominasi wilayah tersebut dengan luas 95.210,84 Ha (25,03 persen), kemudian wilayah berbukit dengan kelerengan (25–40 persen) seluas 90.646,11 Ha (23,83 persen). Wilayah berbukit dengan kelerengan (15-40 persen) seluas 156.508,61 Ha (41,14 persen), wilayah bergelombang dengan kelerengan (8-15 persen) seluas 33.567,60 Ha (8,82

persen), wilayah berombak dengan kemiringan (3-8 persen) seluas 39.389,11 Ha (10,35 persen), sedangkan wilayah datar dan agak datar (0-8 persen) seluas 55.766,17 Ha (14,66 persen). Hampir setengah (48,85 persen) dari luas Kabupaten Buol memiliki kemiringan > 25 persen. Peta Kelas Lereng Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.2, sedangkan luasan masing-masing kelas disajikan dalam Gambar 2.1.

Tabel 2.2
Klasifikasi Kelas Lereng Kabupaten Buol

No.	Kelerengan	Keterangan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	< 1 %	Datar	7.349,05	1,93
2.	1-3%	Agak Datar	48.417,12	12,73
3.	3-8%	Berombak	39.389,11	10,35
4.	8-15%	Bergelombang	33.567,60	8,82
5.	15-25%	Berbukit	65.862,50	17,31
6.	25-40%	Berbukit	90.646,11	23,83
7.	>40%	Bergunung	95.210,84	25,03
Total			380.442,33	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Buol, SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

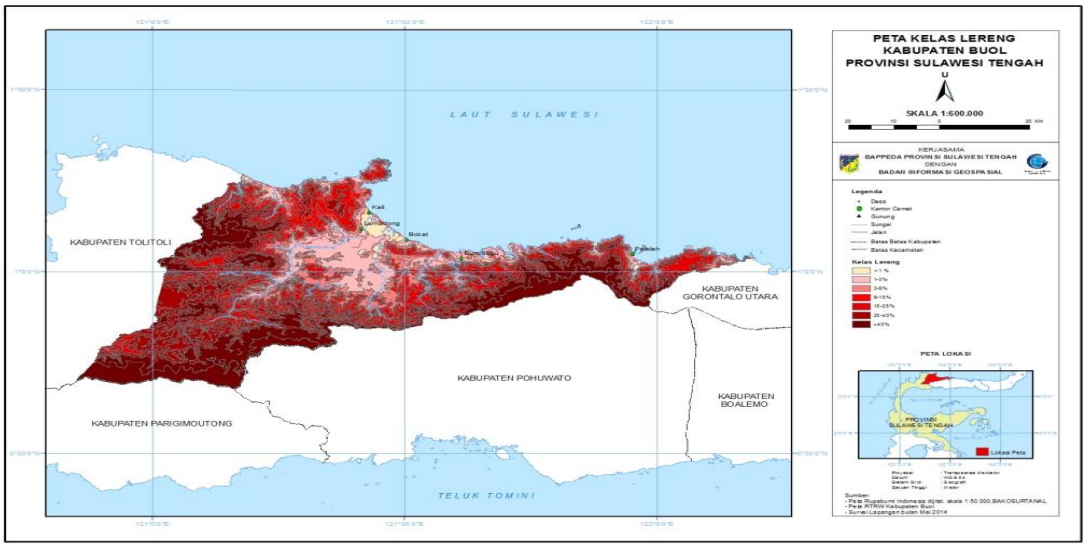

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Peta Penggunaan Lahan Kabuapaten Buol Tahun 2009

Gambar 2.1 Peta Kelas Lereng Kabupaten Buol

4) Geologi

Secara regional, wilayah Kabupaten Buol terletak pada Mandala Geologi Sulawesi Barat. Stratigrafi batuan wilayah ini disusun berdasarkan umur dari tua ke muda sebagai berikut : (1) Formasi Tinombo, litologi penyusun formasi berupa lava basal, basal spilitan, lava andesit, breksi gunung api, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu, batuan termetamorfosa lemah, batuan ini terdapat di bagian selatan dengan arah memanjang relatif timur-barat pada wilayah batas dengan kabupaten lain; (2) Batuan Vulkanik, merupakan batuan gunung api, yang tersebar di banyak tempat namun tidak meluas, antara lain di Desa Momunu bagian barat dan selatan, sebelah barat Kelurahan Leok dan sebelah selatan Desa Bokat yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, sebaran batuan ini juga meluas kearah barat (Tolitoli) dan selatan (Parigi Moutong); (3) Diorit Bone, merupakan batuan beku menengah, penyebaran relatif sempit setempat-setempat, penyebaran terluas kurang dari 600 Ha; (4) Diorit Baliohuto, tergolong kedalam jenis batuan beku dalam yang bersifat menengah sampai asam dan hanya terdapat disekitar Gunung Tentolomatika sebalah selatan Desa Lokodoka; (5) Formasi Dolokapa, terdiri dari batu pasir Wake, batu Lanau, batu lumpur, konglomerat, tufa, tufa lapili, aglomerat, breksi vulkanik dan lava yang bersifat andesit serta basal, penyebaran relatif luas memanjang dari sebelah selatan Desa Momunu kearah timur laut sampai mencapai wilayah Kecamatan Paleleh; (6) Breksi Wobudu, merupakan batu vulkanik, penyebarannya dibagian selatan Desa Bunobogu dan wilayah yang luas sepanjang pegunungan Paleleh kearah timur laut, yaitu Gunung Tentolomatika dan Gunung Bendolo; (7) Molase Celebes Sarasin dan Sarasin (Formasi Lokodidi), terdiri dari konglomerat, batu lanal dan batu lempung, batu gamping koral, tufa, serpih hitam dan napal, formasi ini merupakan penyusun utama wilayah Kecamatan Bokat dan Momunu; (8) Batuan Vulkanik, dengan komposisi aglomerat, tufa dan lava, penyebarannya setempat yaitu di Desa Busak Kecamatan Karamat; (9) Batu Gamping Terumbu, penyusun utama satuan batuan ini adalah batu Gamping Koral, penyebaran terluas terdapat dipesisir utara Kabupaten Buol; (10) Aluvium, terdiri dari material pasir, lempung, lanau, lumpur, kerikil dan karakal, endapan terluas terdapat di dataran kota Buol yang melebar kearah Kelurahan

Leok, Desa Lamadong, Bokat dan Momunu, terutama dataran banjir sungai Momunu.

Struktur geologi bagian timur wilayah Kabupaten Buol relatif lebih terpengaruh secara tektonik dibanding bagian barat. Dibagian timur sesar-sesar vertical dengan 2 arah utama yaitu tenggara-barat laut dan timur laut-barat daya, juga terdapat sesar-sesar dekstral di pegunungan Paleleh dan Gunung Tentolomatika. Pada bagian barat struktur relatif tidak dominan, hanya terdapat 2 struktur utama, yaitu sesar sungkup di sebelah barat Desa Momunu dan sesar vertical di sebelah barat Kelurahan Leok.

Kabupaten Buol memiliki beberapa gunung yang tersebar di beberapa kecamatan seperti terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Nama dan Tinggi Gunung di Kabupaten Buol

No.	Kecamatan	Nama dan Tinggi Gunung
1	*2*	*3*
1.	Momunu	Pogogul (247 m), Lopak (127 m)
2.	Tiloan	Cakar Langit (1.700 m), Tanah Merah (1.500 m), Golkar (1.700 m), Tiloan (1.500 m)
3.	Karamat	Meninggayo (500 m), Lembah Jaya (30 m)
4.	Lakea	Patutu (1.753 m), Pelet (803 m), Bogu (1.000 m), Popal (729 m), Angin laut (1.125 m), Pampangelat (700 m), Tabadak (450 m), Raeba (900 m)
5.	Bokat	Tentelomatika (2.207 m), Larage (1.250 m), Daeng Besar (1.235 m), Tikopo (94 m)
6.	Bukal	Ogu (700 m)
7.	Bunobogu	Padaa (350 m), Limbau (250 m), Kerjaan Lonu (250 m), Ponipingan (160 m), Pandalangi (425 m), Botugolu (120 m)
8.	Gadung	Tabamuang (350 m), Ile-Ile (857 m), Taat (450 m), Intan (160 m), Emas (450 m), Dumbaya (350 m), Diapatih (240 m)
9.	Paleleh Barat	Lintok (1.550 m), Pemandoan (1.763 m), Tamian (425 m)
10.	Paleleh	Intan (1.780 m), Bendolo (1.918 m), Pentolo(2.017 m)

Sumber : BPS Kab. Buol, Kec.Dalam Angka Se-Kabupaten Buol Tahun 2017

Kabupaten Buol terdapat variasi potensi sumberdaya geologi (bahan tambang/galian) yang dapat dikembangkan. Daftar bahan tambang atau galian yang terdapat di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jenis Potensi Bahan Tambang/Galian/Mineral
di Kabupaten Buol

No.	Nama Mineral	Cara Terjadinya	Lokasi	Manfaat	Keadaan di Alam
1.	Emas	Hasil proses hidrotermal, sebagaian daerah sudah tererosi dan diendapkan pada sungai berupa endapan alluvial.	Kabupaten Buol Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, Kecamtan Gadung, Kecamatan Karamat, dan Kecamatan Lakea.	Untuk cadangan moneter, perhiasan, kedokteran dan industri kimia	Mineralisasi emas terdapat pada Formasi Dolokopa dalam urat-urat kwarsa di batuan vulkanik, sumber daya tereka 1.000.000 ton dengan kadar Au (30 – 50 gram/ton) dan Ag (125 – 575) kg, sudah ditambang sejak Tahun 1.896 sampai dengan Tahun 1.929 sebanyak 8.152 Kg Au dan 5.419 Kg Ag.
2.	Tembaga	Merupakan hasil proses metamorfosis kontak	Kabupaten Buol kecamatan Bukal, Kecamatan Bokat, Kecamatan Karamat dan Kecamatan Lakea.	Untuk industri pelistrikan, komunikasi, amunisi dan transportasi	Dalam tahap eksplorasi
3.	Diorit	Merupakan intrusi batuan beku, kandungan Si02 sekitar 50 – 60 persen	Kabupaten Buol	Sebagai material konstruksi bangunan, atas jalan raya campuran beton bertulang, bahan konstruksi darat dan air, selain itu juga digunakan sebagai bahan arsitektur dan ornamaen	Dijumpai sebagai tubuh terobosan (dyke), tidak banyak dijumpai kekar, bersifat pejal, keras warna abu-abu gelap, sifat fisika yang dimiliki oleh batuan ini adalah : - Berat jenis 2,6 – 2,9 - Kuat tekan 150 – 3000 Kg/Cm
4.	Batugamping	Merupakan hasil pengendapan	Kecamatan Bukal,	Bermanfaat sebagai bahan baku	6,91 milyar m^3

		material sisa rombakan binatang laut seperti cangkang kerang, foraminifera, koral atau ganggang laut yang mengalami litifikasi dan kristalisasi.	Kecamatan Bunobugo, Kecamatan Paleleh Barat dan Kecamatan Paleleh.	pembuatan kapur, bahan baku semen, bahan bangunan,industri keramik	
5.	Lempung dan Tanah Liat	Terbentuk dari batuan yang mengalami disintegrasi secara terus menerus karena pelapukan	Kecamatan Biau, Kecamatan Bunobugo, Kecamatan Bokat, Kecamatan Momunu	Untuk industri keramik (gerabah), bahan baku semen portland, bahan genteng	40,88 juta m^3
6.	Pasir dan batu (sirtu)	Hasil endapan yang berasal dari semua jenis batuan	Terdapat hampir disemua sungai yang ada, juga terdapat sebagai bongkah-bongkah batu untuk quari darat	Untuk bahan bangunan, jalan, agregat beton, pengisi coran (kerikil dan split) sebagai campuran dalam pembuatan tegel dan dekorasi bangunan	Pasir berwarna abu-abu gelap berbutir halus sampai sangat kasar, komposisi sirtu terdiri dari batuan beku (granit, andesit dan diorite), batuan malihan (sekis dan genes) dengan ukuran dari kerikil sampai bongkah berdiameter (2 mm – 200 Cm)

Tabel 2.5
Jenis Bahan Tambang/ Galian di Kabupaten Buol

No.	Bahan Tambang/Galian	Kecamatan										
		Lakea	Karamat	Biau	Momunu	Tiloan	Bokat	Bukal	Bunobogu	Gadung	Paleleh Barat	Paleleh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Emas	✓	✓							✓	✓	✓
2.	Tembaga	✓	✓				✓	✓				
3.	Marmer Putih dan Coklat						✓	✓				
4.	Batu Permata	✓	✓		✓		✓		✓			
5.	Batu Kaca	✓	✓		✓		✓		✓			
6.	Bahan Cat										✓	✓
7.	Batu Gamping							✓	✓		✓	✓
8.	Batu Karbit							✓		✓	✓	✓
9.	Batu Bara				✓						✓	
10.	Kalsit				✓						✓	
11.	Pasir Kuarsa				✓						✓	
12.	Sirtukli(pasir,batu, dan kerikil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Buol, Laporan Jenis Bahan Tambang/Galian di Kab. Buol Tahun 2016

5) Hidrologi

Keadaan hidrologi di Kabupaten Buol pada umumnya sama dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat 38 sungai, dimana 15 sungai memiliki panjang lebih dari 20 kilometer dan 18 sungai kurang dari 20 kilometer. Sungai-sungai tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Beberapa sungai telah dimanfaatkan sebagai sumber irigasi baik teknis maupun non teknis.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Buol meliputi Wilayah Sungai Buol, Lantikadigo, Lonu, Bunobogu, Bulagidun, Bodi, Timbulon sudah saatnya dikelola dengan baik, karena kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah sektor yang harus dilayani (industri, pariwisata, perkotaan, pertanian, perikanan, perkebunan, kesehatan, dan lain-lain). Ketersediaan air jumlahnya relatif tetap, bahkan cenderung semakin berkurang karena menurunnya kondisi dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketegangan dan bahkan konflik akibat terjadinya benturan kepentingan, jika permintaan (*Demand*) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumberdaya air untuk pemenuhannya (*Supply*). Oleh karena itu perlu secara proporsional dan seimbang, antara rencana pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya air.

Beberapa daerah aliran sungai telah mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan, erosi yang berlebihan telah mengakibatkan terjadinya sedimentasi. Pengambilan air tanah yang berlebihan di beberapa akuifer telah mengakibatkan terjadi intrusi air laut dan penurunan elevasi muka tanah. Ketidak tersediaan sistem sanitasi dan pengolah limbah industri yang baik, juga telah mengakibatkan terjadinya pencemaran air tanah dan sungai oleh buangan air rumah tangga dan industri, terutama di musim kemarau. Di saat lain di musim hujan, banjir terjadi di mana-mana, akibat karena semakin kecilnya daerah resapan, turunnya kapasitas sungai dan rusaknya sistem drainasi internal.

Undang-Undang Sumberdaya Air Nomor 11 Tahun 1974, Pereturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2015 dimaksudkan untuk memfasilitasi strategi pengelolaan sumberdaya air untuk wilayah sungai di seluruh tanah air untuk memenuhi kebutuhan, baik jangka menengah maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Mengingat pengelolaan sumberdaya air merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak sebagai pengguna, pemanfaat, maupun pengelola, untuk itu tidak dapat dihindari perlunya upaya bersama untuk menggunakan pendekatan *one river basic, one plan, and one integrated management*. Keterpaduan dalam perencanaan, kebersamaan dalam pelaksanaan, dan kepedulian dalam pengendalian sudah sangat mendesak untuk diwujudkan.

Pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air mencakup sistem jaringan prasarana yang mampu digunakan sebagai upaya pendayagunaan sumberdaya air khususnya pertanian, pengendalian daya rusak air (banjir dan abrasi pantai), dan konservasi sumberdaya air. Sumberdaya air ini termasuk juga sumberdaya air pada wilayah pesisir Buol yang memiliki potensi daya rusak tinggi dengan terjadinya abrasi di pantai Buol, sehingga tindakan pengendalian daya rusak perlu dilakukan.

6) Klimatologi

Secara umum, iklim wilayah di Kabupaten Buol sama dengan iklim Sulawesi Tengah. Suhu udara berkisar antara 23,5°C sampai dengan 33,3°C. Seperti disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Kabupaten Buol Tahun 2016

	SUHU (°C)			
Bulan	**Minimum**	**Maksimum**	**Rata-rata**	**Kelembaban**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Januari	23,8	30,6	26,5	82,5
Februari	23,7	32,3	27,1	83,6
Maret	24,2	33	28,2	80,7

April	24,2	33,3	28,5	79,2
Mei	24,7	33,1	28,4	81,2
Juni	24,1	31,9	27,3	82,9
Juli	32,5	32,1	27,1	84,9
Agustus	23,5	32,1	27,7	83
September	23,5	32,1	27	83,5
Oktober	23,6	32	27,4	83,5
Nopember	24,1	32,1	27,6	82,1
Desember	24,2	31,5	27,2	82,3

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.6 di atas menunjukkan kelembaban udara berkisar antara 79,2 persen sampai dengan 84,9 persen. Tekanan udara berkisar diantara 1.009,7 mb hingga 1.011,8 mb. Kecapatan angin berkisar antara 2 knot hingga 5 knot, yang hanya terjadi pada Bulan September. Penyinaran matahari berkisar antara 33 persen hingga 77 persen. Data disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Buol Tahun 2016

Bulan	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)
1	*2*	*3*	*4*
Januari	1.011,8	2	65
Februari	1.011,2	2	67
Maret	1.011,6	2	79
April	1.010,3	2	77
Mei	1.009,7	2	33
Juni	1.010,3	2	52
Juli	1.010,4	2	60
Agustus	1.010,1	2	66

September	1.010,0	5	55
Oktober	1.010,2	2	63
November	1.010,1	2	72
Desember	1.010,1	2	49

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2016

7) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan ialah pengkajian keadaan penggunaan lahan dan fungsi lahan saat sekarang berdasarkan atas: (1) Penutup lahan yang ada di atas permukaan bumi, dan (2) Kegunaan penutup lahan tersebut sesuai dengan maksud si pengguna. Kajian penggunaan dan fungsi lahan pada umumnya dilaksanakan untuk melengkapi (dalam batas keruangan) informasi bagi rencana pengembangan daerah perkotaan dan daerah pedesaan dalam pengambilan keputusan.

Pengembangan biasanya menyangkut pengubahan keadaan pada saat sekarang dalam hal ini alasan serta sebab-sebab yang menjadi latar belakang rencana perubahan keadaan tersebut di atas dianggap sudah diketahui dengan pasti dan telah dimengerti sepenuhnya. Alasan-alasan dan sebab-sebab tersebut dapat bersifat alami (lingkungan : Iklim, bentuk kegunaan dan fungsi lahan, tanah, kondisi hidrologi, flora dan fauna) atau lebih bersifat sosial ekonomi (infrastruktur, pendidikan, agama, tradisi, kondisi kesehatan, perdagangan, dsb).

Adapun penggunaan dan fungsi lahan di Kabupaten Buol dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu : (1) Kawasan Budi Daya; (2) Kawasan Penyangga dan (3) Kawasan Lindung. Secara rinci proporsi penggunaaan dan fungsi lahan di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Proporsi Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kabupaten Buol

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kawasan Budidaya	169.389,82	44,30
2.	Kawasan Penyangga	144.947,96	37,91
3.	Kawasan Lindung	68.050,47	17,80
Total		**382.388,25**	**100**

Sumber : Distarum Kabupaten Buol, RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2030

Sedangkan sebaran penggunaan dan fungsi lahan pada masing-masing kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Sebaran Penggunaan dan Fungsi Lahan di Kab. Buol

No.	Nama Kecamatan	Penggunaan dan Fungsi Lahan (Ha)			Jumlah
		Kawasan Budidaya	Kawasan Penyangga	Kawasan Lindung	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Biau	9.450,40	0,47	0	9.450,87
2.	Bokat	11.629,83	3,34	2.890,05	14.523,22
3.	Bukal	20.386,80	16.444,67	13.826,85	50.658,32
4.	Bunobogu	4.220,35	18.709,47	5.370,59	28.300,41
5.	Gadung	4.646,43	11.021,33	4.120,06	19.787,82
6.	Karamat	7.707,41	8.296,24	0	16.003,65
7.	Lakea	3.220,40	22.048,84	0	25.269,24
8.	Momunu	28.815,70	5.480,58	0	34.296,24
9.	Paleleh	9.874,68	11.378,03	7.241,01	28.493,72
10.	Paleleh Barat	4.453,93	10.557,61	2.174,60	17.168,14
11.	Tiloan	65.001,89	41.007,38	32.427,30	138.436,57
Jumlah		169.389,82	144.947,96	68.050,47	382.388,25

Sumber : Distarum Kabupaten Buol, RTRW Kabupaten Buol Tahun 2012-2030

Berdasarkan Tabel 2.9, wilayah kecamatan yang memiliki penggunaan dan fungsi lahan sebagai kawasan budidaya terbesar adalah Kecamatan Tiloan yaitu 65.001,89 Ha (38,3 persen) dan yang terkecil adalah Kecamatan Lakea yaitu 3.220,40 Ha (1,90 persen). Dan kawasan penyangga terbesar terdapat di Kecamatan Lakea yaitu 22.048,84 Ha (15,21 persen) dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Biau yaitu 0,47 Ha (0,003 persen). Sedangkan Kawasan lindung terbesar berada di Kecamatan Tiloan yaitu 32.427,30 Ha (47,65 persen) dan terdapat 4 (empat) wilayah kecamatan yang tidak memiliki kawasan lindung yaitu Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Lakea dan Kecamatan Momunu. Dari angka tersebut di atas jika disertai data spasial atau peta tersedia maupun peta

hasil analisis, maka akan semakin tampak kondisi dan potensi sehingga dapat menghasilkan saran ataupun arahan, atas ketersediaan lahan atau disebut sebagai cadangan lahan.

Cadangan lahan suatu wilayah sangat perlu diketahui potensi maupun sebarannya, untuk kemudian dikelola berdasarkan pola Tata Ruang yang ada maupun Tata Wilayah yang kemudian diperbaharui berdasarkan keselarasan kebutuhan daerah yang berazas optimasi penggunaan lahan dan kelestarian lingkungan. Melalui peta penggunaan lahan ini tercermin potensi cadangan lahan yang ideal bahwa lahan perbukitan dan pegunungan yang luas wilayahnya berkisar 60 persen perlu tertutup dengan vegetasi alam hutan maupun hutan produksi dan kebun rakyat yang berazas konservasi. Dalam kondisi demikian potensi air tanah dan kondisi lingkungan akan bernuansa alami akan merambah kearah wilayah hilir. Dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan penggunaan lahan, kondisi tersebut kini telah sangat berubah. Kondisi lahan hutan sudah semakin terbatas, pembukaan hutan menjadi perladangan semakin meluas, desakan permintaan perizinan perkebunanpun telah merambah wilayah yang bukan peruntukannya.

Melalui peta menggambarkan cadangan lahan, diperlukan perencanaan penggunaan lahan yang terencana sesuai pola Tata Ruang. Maksud cadangan lahan adalah ketersediaan lahan apapun kondisi dan kualitas maupun potensi, untuk kemudian dilakukan evaluasi dan perencanaan agar berpotensi optimal dan berfungsi untuk peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan bersama. Arah tujuan selanjutnya adalah terkelola berazaskan konservasi baik sumberdaya alam maupun buatan berupa: lahan, vegetasi, hidrologi maupun sumberdaya lainnya secara berkelanjutan. Kondisi optimalitas potensi wilayah sering terganggu oleh cara kelola yang keliru, pembalakan dan penggunaan lahan yang menyimpang dari aturan tata kelola lahan. Berdasarkan informasi cadangan lahan tersebut di atas masih sangat kelihatan perlunya cara pengelolaan secara proposional atas kebutuhan wilayah maupun kondisi lingkungan. Area penggunaan lahan sebagai fungsi lahan cadangan Kabupaten Buol terlihat pada Gambar 2.2 berikut:

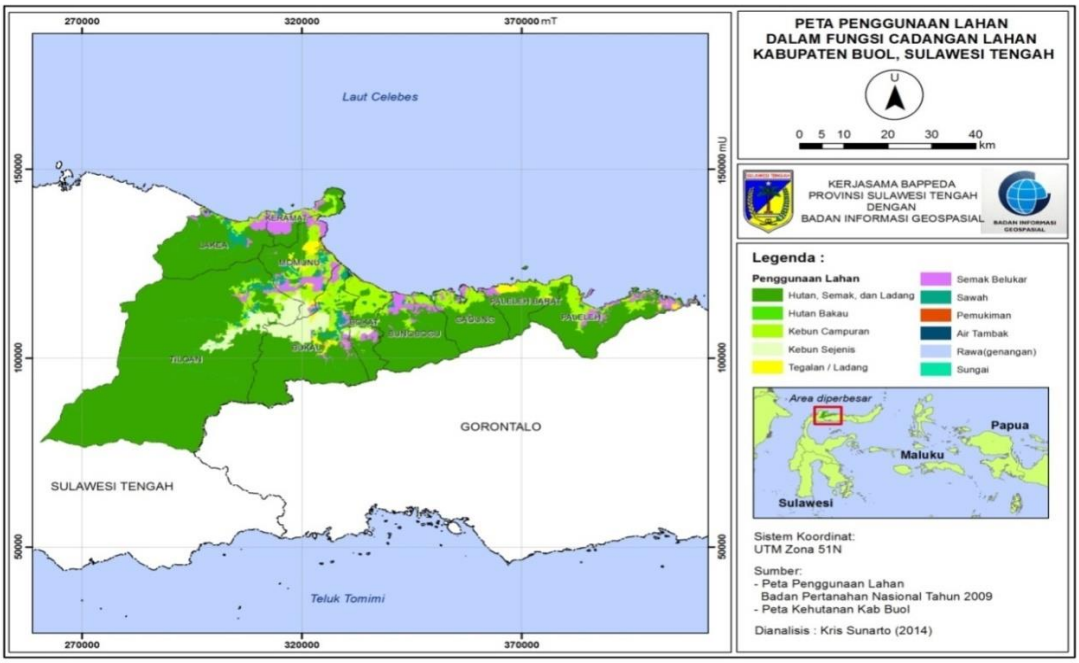

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009

Gambar 2.2 Peta Penggunaan lahan Kabupaten Buol

Keterangan legenda peta secara singkat sebagai berikut: Hutan, semak dan perladangan digabung menjadi satu simbol dengan maksud bahwa areal tersebut merupakan cadangan lahan yang sangat memerlukan cara kelola sebagai kawasan yang bervegetasi lebat dan berazas konservasi. Koservasi lahan, hutan dan air serta biota pada kawasan tersebut perlu diutamakan. Hutan bakau dan nipah sebagai cadangan lahan ekosistem pesisir yang perlu dipertahankan. Kebun campuran sebagai kebun rakyat yang dapat diintensifkan oleh masyarakat antara lain cengkeh, coklat, kopi dan berbagai tanaman keras lainnya. Kebun sejenis dalam gambar ini menunjukkan luasan kebun kelapa sawit yang berdasarkan kesesuaian dan bukan perizinan. Tegal dan ladang merupakan cadangan lahan yang masih dapat diintensifkan pengelolaan pola tanamnya. Semak belukar pada peta menunjukkan semak belukar di lahan kering dan sebagian di lahan basah wilayah pesisir. Semak belukar merupakan cadangan lahan yang harus dikelola secara bijaksana, ada kemungkinan harus dipertahankan untuk keseimbangan ekosistem, dan ada yang perlu dirubah dan dimanfaatkan untuk areal tanaman pangan maupun bahan eksport. Sawah didaerah Kabupaten Buol ada 3 tipe, sawah irigasi setengah teknis,

irigasi sederhana yang disebut sebagai irigasi desa dan tadah hujan. Masing-masing masih dapat diintensifkan melalui pengelolaan saluran irigasi yang lebih baik. Kawasan pemukiman pasti akan berkembang seiring kebutuhan lahan untuk tempat tinggal.

B. Wilayah Rawan Bencana

1) Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah terjadinya goncangan pada bumi yang disebabkan oleh aktivitas tektonik. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi adalah kawasan yang pernah atau berpotensi mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Terjadinya dampak yang disebabkan oleh gempa bumi adalah patahan di permukaan, goncangan tanah, pelulukan atau pencairan tanah, tsunami, retakan tanah permukaan, longsoran/gerakan tanah, dan amblesan.

Konteks perwilayahan menunjukkan dampak dari kejadian gempa bumi, sehingga perlu mengacu pada peta yang memperlihatkan daerah rawan terhadap goncangan gempa, yaitu Peta Bahaya Goncangan Gempa Bumi Indonesia, bisa juga disebut Peta Percepatan Gempa Bumi, adalah peta yang memperlihatkan kontur nilai percepatan gempa bumi dalam periode ulang dan pada jenis *"basement"* batuan tertentu. Peta ini dibuat berdasarkan suatu metodologi probabilistik/kebolehjadian dengan mempertimbangkan rata-rata kejadian gempa di dalam daerah zona sumber gempa ataupun disepanjang suatu patahan. Dengan banyaknya daerah patahan di Kabupaten Buol (lihat uraian pada bagian sebelumnya) maka risiko kegempaan di Kabupaten Buol menjadi sangat tinggi. Berdasarkan pada data risiko kegempaan di Indonesia, Kabupaten Buol (dalam hal ini Pulau Sulawesi) memiliki risiko yang cukup tinggi yaitu antara IV-VII MMI.

Berdasarkan Peta frekuensi kejadian gempa bumi berfokus dangkal dan bersifat merusak (*Beca Carter Holling, 1979*), tampak bahwa gempa bumi berkekuatan ≥ 6 Ms berpeluang besar terjadi di kawasan Pulau Sumatera bagian barat, wilayah selatan Pulau Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan daratan P. Sulawesi. Sedangkan gempabumi berkekuatan ≥ 7 Ms dapat terjadi pada dasar lautan di lantai Samudera Indonesia dari mulai barat laut Pulau

Sumatera menerus hingga ke sebelah barat Aceh, sekitar Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, sekitar Pulau Enggano, Selat Sunda, sebelah selatan Jawa Timur, selatan dan utara Kepulauan Nusa Tenggara termasuk Laut Flores, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Sulawesi dan perairan sebelah timur Pulau Sulawesi sampai ke bagian barat Pulau Halmahera. Selanjutnya gempabumi yang tergolong sangat besar berkekuatan ≥ 8 Ms dapat terjadi di kawasan Halmahera hingga Samudera Pasifik di utara Irian Jaya. Berdasarkan pada data tersebut terlihat bahwa potensi kegempaan di Kabupaten Buol masuk dalam kategori gempa besar, karena keberadaan Kabupaten Buol yang berada pada sekitar Laut Sulawesi yang memiliki risiko gempa ≥ 7 Ms.

Gempa bumi tektonik selalu terjadi secara tiba-tiba dan terkadang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Jika pusat gempanya di dasar laut dapat menimbulkan tsunami, yang juga dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar. Peristiwa tsunami adalah munculnya gelombang pasang beramplitudo besar dengan panjang-gelombang yang panjang. Naik-turunnya gelombang ini dapat memakan waktu sampai 1 jam. Kerusakan akibat tsunami bisa saja lebih besar dibandingkan akibat langsung dari getaran gempa itu sendiri.

Gempa juga dapat menimbulkan liquifaksi yang dapat menyebabkan miring atau ambruknya bangunan. Liquifaksi adalah peristiwa hilangnya air dalam pori-pori tanah pada saat terjadi gempa dan di atas tanah tersebut terdapat beban berat, misalnya gedung bertingkat tinggi.

Ancaman gempa terbesar adalah apabila terjadi gempa di Provinsi Gorontalo yang memiliki pusat gempa dengan skala lebih dari VIII MMI yang memiliki daya rusak sangat dahsyat dan bukan tidak mungkin mampu merusakkan kawasan di Kabupaten Buol, baik kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Bencana alam tsunami pada dasarnya diawali oleh gempabumi, yang menimbulkan gangguan impulsif terhadap air laut karena adanya perubahan bentuk dasar laut. Proses terjadinya tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu hentakan kuat.
b. Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 Km/jam.
c. Mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas.
d. Gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apapun di belakang pantai.

Wilayah Selat Makassar dan Laut Sulawesi memiliki frekuensi yang tinggi kejadian tsunami, kondisi ini dikarenakan potensi kegempaan yang besar berada pada perairan Laut Sulawesi. Selat ini memiliki aktivitas seismik akibat adanya konvergensi empat lempeng tektonik yang menghasilkan struktur yang kompleks. Kenampakan *tsunamigenic* utama di Selat Makassar adalah zone patahan, yang membentuk batas cekungan Selat Makassar. Analisa seismisitas, tektonik dan sejarah tsunami menunjukkan kedua zona patahan ini memiliki karakteristik yang berbeda.

3) Kawasan Rawan Tanah Longsor

Longsor adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi pada wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang telah mengalami pelapukan dan erosi berat, dan juga pada wilayah rawan gempa. Agen utamanya adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran serta akar tunggang. Lokasi longsor dan rawan longsor banyak ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing dekat sungai (di bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.

Berdasarkan pada data dari Dinas Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Sulteng, kawasan rawan longsor di Kabupaten Buol terdapat di Kecamatan Bukal, Bukat, dan Bunobogu. Lokasinya tepat berada pada lokasi sesar.

4) Kawasan Rawan Erosi

Erosi senantiasa terjadi karena ketidakrataan permukaan bumi. Agen utamanya adalah air di samping angin. Pendangkalan sungai yang intensif merupakan salah satu indikasi terjadinya erosi intensif. Indikasi menunjukkan

bahwa lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami erosi intensif adalah Sungai Buol, Sungai Gindopo, dan Sungai Talau. Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Buol sebaiknya dilakukan dengan tanpa merubah jenis vegetasi mengingat kondisi vegetasi yang memang sudah tipis.

5) Kawasan Rawan Abrasi

Abrasi adalah pengikisan wilayah pantai sehingga wilayah darat berkurang. Abrasi dan sedimentasi di perairan dekat pantai merupakan 2 (dua) proses geologi yang terkait. Abrasi berpotensi terjadi pada wilayah pantai yang tersusun oleh formasi batuan aluvial atau batuan lepas. Agen utamanya adalah ombak dan arus susur pantai. Abrasi juga dapat dipicu oleh aktivitas manusia berupa pengambilan karang dari laut, pengambilan pasir di pantai dan pembabatan mangrove. Potensi abrasi pantai di wilayah Buol di sekitar pantai yang terdapat di Kabupaten Buol (Laut Sulawesi). Gambar dari citra satelit menggambarkan betapa Buol memiliki kerentanan terhadap abrasi yang sangat tinggi. Kerusakan daerah pantai akibat abrasi tidak terlepas dari ulah manusia yang banyak menebang hutan bakau yang kemudian dijadikan tempat bermukim sebagaimana banyak ditemui pada sepanjang pesisir Kabupaten Buol.

6) Kawasan Rawan Sedimentasi

Sedimentasi berkaitan erat dengan erosi, longsor dan abrasi. Sedimentasi di darat umumnya disebabkan oleh adanya erosi dan longsor. Umumnya terjadi di badan-badan sungai dan tempat-tempat rendah lainnya seperti drainase dan bahkan badan jalan. Di Kabupaten Buol, proses sedimentasi ini telah menyebabkan pendangkalan sungai dan muara. Kondisi lahan kering tanpa penutup vegetasi memudahkan pengikisan air sehingga menambah kuantitas sedimen. Sedimentasi akan menyebabkan pendangkalan laut dekat pantai yang dapat mengakibatkan pelayaran terganggu. Selain itu, juga dapat menutupi terumbu karang yang akan mengakibatkan potensi ikan berkurang. Kawasan rawan sedimentasi di Kabupaten Buol adalah sungai-sungai yang ada di Kota Buol, daerah yang drainase atau badan jalannya rendah dan daerah pantai.

2.1.2 Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam proses pembangunan, seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan jika kualitasnya baik, sedangkan jika kualitasnya kurang baik dapat berakibat pada beban pembangunan. Demikian pula jika komposisi dan distribusinya tidak seimbang dan merata, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang, karena daerah yang penduduknya sedikit relatif sulit berkembang akibat kurangnya sumberdaya manusia sebagai penggerak pembangunan sekaligus sebagai sasaran pembangunan.

Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2016 sebanyak 152.296 jiwa yang terdiri atas 77.913 jiwa penduduk laki-laki dan 74.383 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2012 hingga Tahun 2015, penduduk Kabupaten Buol mengalami pertumbuhan rata - rata sebesar 2,21 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin Tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 104,75. Jumlah penduduk Kabupaten Buol Tahun 2016 dapat di lihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Per Kecamatan
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk
1	*2*	*3*	*4*
1.	Lakea	10.819	7,1
2.	Biau	37.369	24,54
3.	Karamat	8.981	5,9
4.	Momunu	14.938	9,81
5.	Tiloan	12.771	8,39
6.	Bokat	13.333	8,75
7.	Bukal	14.848	9,75
8.	Bunobogu	9.349	6,14
9.	Gadung	12.092	7,94
10.	Paleleh	11.905	7,82
11.	Paleleh Barat	5.891	3,87
JUMLAH		**152.296**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka, 2017

Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buol Tahun 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*
0–4	9.007	9.042	18.049
5–9	8.894	8.445	17.339
10–14	8.397	7.968	16.365
15–19	7.468	7.070	14.538
20–24	5.978	5.869	11.847
25–29	6.378	6.187	12.565
30–34	6.143	5.909	12.052
35–39	6.148	5.609	11.757
40–44	5.362	4.786	10.148
45–49	4.099	3.705	7.804
50–54	3.214	2.843	6.057
55–59	2.631	2.302	4.933
60–64	1.592	1.502	3.094
65–69	1.106	1.236	2.342
70–74	692	809	1.501
75+	804	1.101	1.905
Jumlah	**77.913**	**74.383**	**152.296**

Sumber : BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka, 2017

Jumlah penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2012 sebanyak 137.479 jiwa sedangkan pada Tahun 2016 sebanyak 152.296 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,21 persen. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Buol selama 5 (lima) tahun terakhir masih menunjukkan perumbuhan yang cukup tinggi ini berarti pemerintah harus dapat mengimbangi untuk menyediakan sarana dan prasarana berupa pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan serta ketersediaan lapangan pekerjaan untuk mencegah kerawanan sosial yang dapat

ditimbulkan. Jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buol Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 di sajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Lakea	10.033	10.300	10.483	10.647	10.819	1,62
2.	Biau	29.442	32.315	33.959	35.615	37.369	4,92
3.	Karamat	8.538	8.667	8.788	8.882	8.981	1,11
4.	Momunu	14.262	14.469	14.640	14.786	14.938	1,03
5.	Tiloan	10.536	11.348	11.819	12.283	12.771	3,97
6.	Bokat	12.927	13.031	13.148	13.237	13.333	0,73
7.	Bukal	13.918	14.226	14.449	14.644	14.848	1,39
8.	Bunobogu	9.041	9.124	9.210	9.277	9.349	0,78
9.	Gadung	11.639	11.769	11.891	11.988	12.092	0,87
10	Paleleh	11.599	11.669	11.761	11.830	11.905	0,63
11	Paleleh Barat	5.544	5.657	5.741	5.815	5.891	1,31
	JUMLAH	137.479	142.585	145.889	149.004	152.296	2,21

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka 2017

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Buol pada Tahun 2016, jenis kelamin laki-laki sebanyak 77.913 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 74.383 jiwa. Jenis kelamin laki laki masih lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, rasio jenis kelamin sebesar 104,75. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Rasio
		Laki Laki	Perempuan	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Lakea	5.541	5.278	10.819	104,98
2.	Biau	18.931	18.438	37.369	102,67
3.	Karamat	4.632	4.349	8.981	106,51
4.	Momunu	7.608	7.330	14.938	103,79
5.	Tiloan	6.616	6.155	12.771	107,49
6.	Bokat	6.738	6.595	13.333	102,17
7.	Bukal	7.724	7.124	14.848	108,42
8.	Bunobogu	4.810	4.539	9.349	105,97
9.	Gadung	6.179	5.913	12.092	104,5
10.	Paleleh	6.094	5.811	11.905	104,87
11.	Paleleh Barat	3.040	2.851	5.891	106,63
JUMLAH		**77.913**	**74.383**	**152.296**	**104,75**

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka 2017

Kepadatan penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2016 mencapai 37,66 jiwa/km^2. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Biau dengan kepadatan 171,57 penduduk/km^2 sedangkan kepadatan penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Tiloan dengan kepadatan 8,88 penduduk/km^2, dengan kondisi penyebaran penduduk yang masih belum merata, maka diperlukan langkah dan strategi yang dapat mendorong dan memacu pemerataan jumlah penduduk dengan meningkatkan pembangunan diwilayah perdesaan, distribusi dan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan diKabupaten Buol Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk per km²
1	*2*	*3*	*4*
1.	Lakea	208,55	51,88
2.	Biau	217,8	171,57
3.	Karamat	153,1	58,66
4.	Momunu	400,4	37,31
5.	Tiloan	1.437,70	8,88
6.	Bokat	196,1	67,99
7.	Bukal	355,52	41,76
8.	Bunobogu	327,15	28,58
9.	Gadung	160,38	75,4
10.	Paleleh	386,19	30,83
11.	Paleleh Barat	200,68	29,36
JUMLAH		**4.043,57**	**37,66**

Sumber : BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2017

2.1.3 Potensi Sumberdaya

A. Rencana Pengembangan Wilayah

Berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Buol, maka pengembangan wilayah terbagi menjadi 3 kawasan yaitu:

a. Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi

a. Kawasan Strategis Perkotaan Buol

Wilayah perkotaan selama ini menjadi pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Buol. Wilayah perkotaan ini menjadi pusat utama perdagangan dan jasa dan menjadi pusat distribusi dan koleksi komoditas utama perdagangan. Wilayah yang menjadi pusat pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan Buol mencakup Kelurahan Kali, Kelurahan Buol, Kelurahan Bugis, Kelurahan Leok I dan II, serta Kelurahan Kumaligon. Sistem aktivitas utama yang dapat dikembangkan pada

Kawasan Perkotaan Buol adalah perdagangan dan jasa skala kabupaten dan skala regional yang akan terkonsentrasi pada kawasan di sekitar Jalur II yang membelah Perkotaan Buol.

b. Kawasan Terpadu Mandiri Air Terang

Strategi pengembangan kawasan ini adalah upaya pengembangan kawasan yang orientasinya adalah ketersediaan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah, seperti aksesibilitas, energi, dan telekomunikasi. Pelaksanaan pengembangan kawasan masih dilakukan dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteran masyarakat dengan prinsip keterpaduan program kegiatan utamanya pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Pemilihan Kawasan air terang sebagai sentra kebijakan pembangunan terpadu adalah sebuah hasil kajian yang matang terutama dalam segi daya dukung dan potensi.

c. Kawasan Agropolitan

1. Air Terang dan Pionoto

Kawasan Agropolitan Air Terang terletak di Kecamatan Tiloan merupakan kawasan dengan potensi pertanian yang signifikan. Untuk itu perlu ada upaya strategis dari Pemerintah Kabupaten Buol untuk mengembangkan pertanian secara terpadu, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Agropolitan yang sudah dirintis oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pengembangan KTM Air Terang di Kecamatan Tiloan. Kecamatan-kecamatan yang berpotensi sebagai Kawasan Pengembangan Agropolitan antara lain adalah wilayah yang mempunyai nilai daya saing komoditas unggulan sektor pertanian, antara lain Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Bokat.

2. Kawasan Agropolitan Peternakan

Kawasan Agropolitan Peternakan terletak di Kecamatan Tiloan seluas 100.000 Ha, sebagai upaya menyediakan dan mengembangkan peternakan sapi berbasis teknologi dan perlakuan modern, ditetapkan dalam rangka mendukung ketersediaan kebutuhan konsumsi daging lokal sekaligus menargetkan daerah

Kabupaten Buol sebagai sentra penghasil daging sapi di Kawasan Timur Indonesia sekaligus berkontribusi signifikan pada kebijakan swasembada daging skala nasional.

d. Kawasan Bahari Terpadu Lokodidi

Kawasan Bahari Terpadu Lokodidi merupakan salah satu kawasan prioritas dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah timur dan wilayah barat Kabupaten Buol yang memiliki ketimpangan sangat besar. Ide dasar pengembangan Kawasan Bahari Terpadu adalah rencana keberadaan pelabuhan regional. Untuk mendukung keberadaan pelabuhan regional dan memanfaatkannya secara optimal dalam rangka pengembangan wilayah, maka muncul ide untuk mengintegrasikannya dengan upaya pengembangan ekonomi lokal di kawasan Lokodidi dan sekitarnya dalam bentuk Kawasan Bahari Terpadu, yang di dalamnya mengintegrasikan aktivitas perikanan dan kelautan, perhubungan, industri pengolahan, pariwisata, dan pengelolaan lingkungan hidup.

e. Kawasan Pertambangan

Kabupaten Buol memiliki Kawasan pertambangan mineral yang cukup potensial untuk dikembangkan dan lokasinya berada di luar kawasan lindung, yaitu di Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat. Tetapi kawasan ini berpotensi menimbulkan konflik lingkungan dengan kawasan sekitarnya, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya perlu mendapat prioritas penanganan dari pemerintah Kabupaten Buol.

f. Kawasan Cagar Alam G. Dako

Kawasan Cagar Alam G. Dako ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kawasan Hutan Suaka Alam dan Wisata, dengan luas lebih kurang 818 Ha atau 0,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Buol. Kawasan Cagar Alam G. Dako meliputi 2 wilayah kabupaten di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Cagar Alam ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan

No 238/Kpts II/1999 dengan luas total kawasan adalah sebesar 19.590,20 Hektar. Bagian terluas dari wilayah Cagar Alam ini terdapat di Kabupaten Tolitoli.

Cagar Alam G. Dako terletak di Kecamatan Lakea dengan luas lebih kurang 818 Ha.Jumlah ini relatif kecil dibanding dengan luas Kawasan Cagar Alam G. Dako yang lebih kurang 19.590,2 Ha. Pada Kawasan Cagar Alam G. Dako merupakan habitat dari beberapa flora dan fauna endemik khas Sulawesi. Berdasarkan data dari Ditjen PHKA Departemen Kehutanan Tahun 2006, Kawasan Cagar Alam G. Dako merupakan habitat dari pohon Damar, Nyatoh, Meranti, dan Kayu Manis, serta habitat dari satwa Anoa, Babi Rusa, Monyet Hitam, dan Elang Laut.

g. Kawasan Cagar Alam G. Tinombala

Cagar Alam Gunung Tinombala terletak di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.Kawasan konservasi ini menempati lahan seluas 37.106,12 Hektar. Diresmikan sebagai cagar alam berdasarkan Menhutbun No. 354/Kpts-II/1999, 27 Mei 1999.

Luas Kawasan Cagar Alam G. Tinombala yang terdapat di Kabupaten Buol lebih kurang seluas 4.500 Ha (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2008). Cagar Alam Gunung Tinombala merupakan habitat dari Pohon Kayu Hitam (Ebony), Damar, Meranti Putih, Meranti Merah, Palapi, dan Rotan. Sedangkan fauna khas yang terdapat pada Cagar Alam G. Tinombala adalah Ular Phyton, Anoa, dan Rusa.

h. Kawasan Cekungan Air Tanah Buol

Kawasan ini terletak pada wilayah utara Kabupaten Buol yang mencakup Kecamatan Lakea, Karamat, Biau, sebagian Kecamatan Momunu dan sebagian Kecamatan Bokat. Keberadaan kawasan Cekungan Air Tanah Buol ini memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan hidrologi di Kabupaten Buol. Keberadaan kawasan Cekungan Air Tanah ini yang sebagian besar berada pada kawasan budidaya non kehutanan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Buol khususnya dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Cekungan Air Tanah Buol tersebut.

i. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan ini membentang dari barat ke timur pada wilayah pegunungan Kabupaten Buol. Kawasan ini memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kawasan bawahannya dari potensi bencana alam. Keberadaan hutan lindung yang berada pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Parigi Moutong harus menjadi perhatian serius untuk menjamin sinkronisasi pola ruang pada kedua wilayah perbatasan tersebut agar tidak saling merugikan.

1. Kawasan Strategis Pemerintahan

a. Kawasan Pusat Pemerintahan Buol

Pemerintahan Kabupaten Buol saat ini dalam tahap penyelesaian pembangunan fisik kawasan. Keberadaan kawasan pusat pemerintahan ini akan memberikan fungsi strategis pelayanan umum kepada masyarakat Kabupaten Buol. Ketersediaan akses yang memadai pada kawasan ini akan semakin menambah peran dan fungsinya dalam pelayanan jasa pemerintahan skala kabupaten. Kebutuhan utama dalam rangka pengembangan kawasan ini adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar pusat pemerintahan yang secara fisik akan berbatasan langsung dengan pusat perekonomian di Kabupaten Buol. Diharapkan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat potensi konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir.

b. Kawasan Ibukota Kecamatan

Kawasan Ibukota Kecamatan ditempatkan sebagai kawasan strategis karena setiap pemerintahan kecamatan harus dapat melayani penduduknya dengan suatu sistem pelayanan yang cepat dan terpadu. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah perdesaan di Kabupaten Buol pada umunya berjauhan letaknya, sehingga penduduk akan sangat terbantu apabila pelayanan yang mereka butuhkan pada saat datang ke ibukota kecamatan tersedia di satu tempat, dengan kelengkapan dan tingkat pelayanan yang memuaskan.

2.1.4 Potensi Unggulan Daerah

A. Pertanian

Sebagai daerah yang berkembang, sektor pertanian di Kabupaten Buol masih memegang peranan penting dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat mengingat sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Selain itu sektor pertanian merupakan sektor penunjang bagi sektor industri, perdagangan dan jasa. Potensi pertanian di Kabupaten Buol tercermin dari luas sawah dan hasil produksi tanaman pangan diwilayah ini. Luas panen (Ha) dan produktifitas tanaman pangan Kabupaten Buol Tahun 2015 - 2016 terlihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.15.

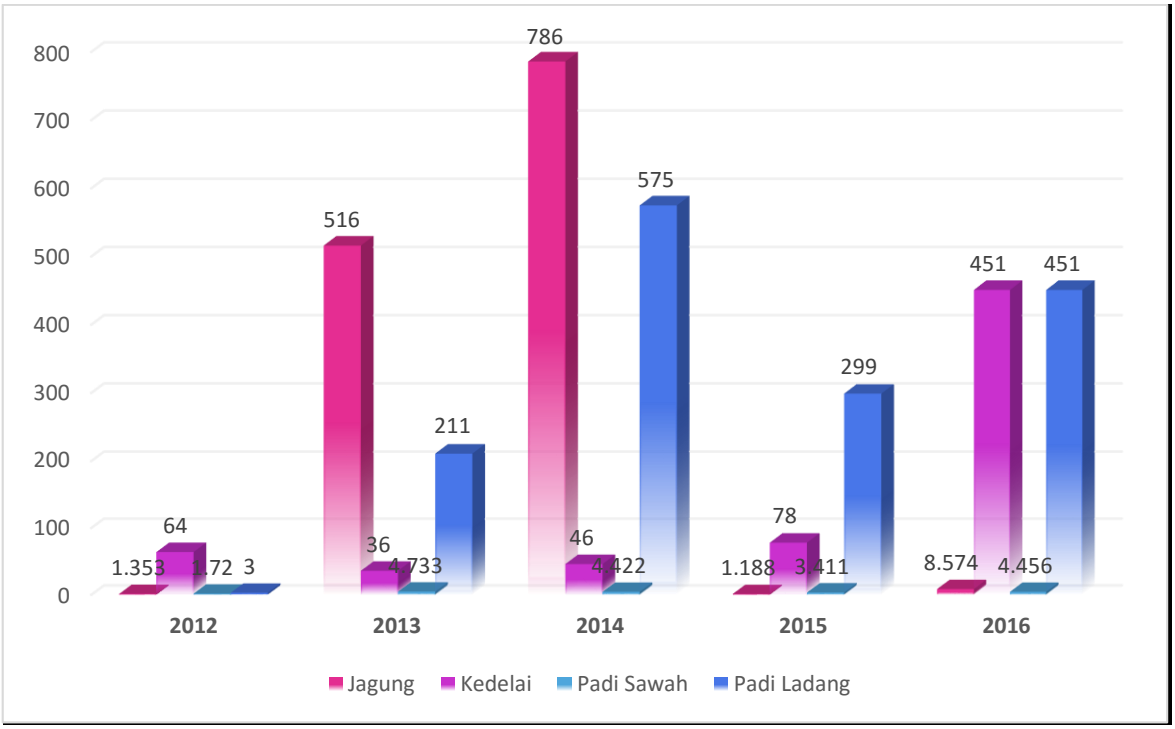

Sumber: BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 2.3 Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar di Kabupaten Buol (Ha) Tahun 2015

Berdasarkan Gambar 2.3, luas panen tanaman pangan yang terdiri dari jagung, kedelai, padi sawah dan padi ladang mengalami peningkatan pada Tahun 2016. Luas panen tanaman jagung mencapai 8.574 Ha, kedelai mencapai 451 Ha, padi sawah 4.456 Ha, dan padi ladang mencapai 451 Ha seperti terlihat pada Tabel 2.15 dan 2.16 berikut:

Tabel 2.15
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Pangan (selain padi) di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
		Jagung	Kedelai	Jagung	Kedelai	Jagung	Kedelai	Jagung	Kedelai
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	2012	1.358	66	1.353	64	5.153	80,13	3,79	1,21
2	2013	637	36	516	36	1.651	50,40	2,59	0,07
3	2014	995	102	786	46	3.889	61	3,91	0,04
4	2015	3.258	74	1.188	78	5.634	140,01	1,73	0,02
5	2016	10.255	451	8.574	451	48.066	625	4,69	0,01

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.16
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
		Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	2012	1.390	5	1.720	3	6.140	6,88	4,42	1,38
2	2013	4.028	566	4.733	211	27.404	738,5	6,80	1,30
3	2014	4.275	561	4.422	575	19.019	1.366	4,45	2,43
4	2015	3.304	486	3.411	299	15.516	864,11	4,70	1,78
5	2016	6.242	459	4.456	451	19.955	1.035	3,20	2,25

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.15 dan 2.16, produktivitas jagung mengalami peningkatan pada Tahun 2012 sebesar 3,79 Ton/Ha menjadi 4,69 Ton/Ha. Kedelai mengalami penurunan produktivitas sejak Tahun 2012 hingga 2016. Tahun sebesar 1,21 Ton/Ha, Tahun 2016 menjadi 0,01 Ton/Ha. Produktivitas padi sawah pada Tahun 2016 sebesar 3,20 Ton/Ha, sedangkan produktivitas padi ladang sebesar 2,25 Ton/Ha.

Luas lahan sawah aktual berdasarkan kondisi pengairannya sepanjang Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol mengalami penurunan luas irigasi. Dimana pada Tahun 2012 luas irigasi teknis sebesar 2.578 Ha dan luas irigasi sederhana sebesar 3.064 Ha dan terjadi penurunan luas irigasi teknis menjadi sebesar 2.490 Ha, dan luas irigasi sederhana menjadi 2.067 Ha. Terjadinya penurunan luas irigasi di Tahun 2016 disebabkan karena pada tahun yang sama terdapat penambahan luas baku lahan sawah seluas 140 Ha tersebar di Kecamatan Lakea, Biau, Tiloan, Bokat,

Bunobogu. Penambahan luas baku lahan sawah ini mengakibatkan bertambahnya tingkat kebutuhan air yang wajib disediakan yaitu dengan penambahan jaringan irigasi. Luas lahan sawah berdasarkan pengairannya dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan produktivitas tanaman sayuran dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.17
Persebaran Luas Sawah Menurut Sumber Pengairannya
Di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No	Kecamatan	Jenis Irigasi Ha/Tahun														
		2012			2013			2014			2015			2016		
		Teknis	1/2 Teknis	Sederhana	Teknis	1/2 Teknis	Sederhana	Teknis	1/2 Teknis	Sederhana	Teknis	1/2 Teknis	Sederhana	Teknis	1/2 Teknis	Sederhana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Lakea	411	5	194	70	-	189	341	75,0	144	48	80	20	293	160	34
2	Keramat	81	-	-	75	-	-	-	75,0	-	81	75	20	75	-	-
3	Biau	-	103	25	139,5	-	70	139,5	-	-	139,5	67	54	75	92	16
4	Momunu	210	140	593	150	165	425	50	150	165	12	84	461	148	78	626
5	Tiloan	589	-	621	50	-	660	440	50	-	71	50	494	511	-	494
6	Bukal	75	-	915	-	75	635	-	-	75	207	-	233	282	82	308
7	Bokat Bunobogu	-	48	282	-	54	217	-	-	51	-	18	302	-	61	350
8	Bunobogu	350	-	218	-	-	-	-	-	320	-	306	192	-	306	128
9	Gadung	25	-	195	-	23	-	145	23	-	25	129	-	-	152	23
10	Paleleh barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
11	Paleleh	245	-	20	-	243	-	-	243	-	70	-	48	175	-	68
Jumlah		**1986**	**592**	**3.064**	**434,5**	**560**	**2.230**	**1.115,3**	**616**	**758**	**653,5**	**839**	**1.824**	**1.559**	**931**	**2.067**
Luas Irigasi		**2.578**		**3.064**	**994,5**		**2.230**	**1.731,5**		**758**	**1.492,5**		**1.824**	**2.490**		**2.067**

Sumber : BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.18
Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sayuran
Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Luas Tanam (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
		Cabe	Bawang Merah	Cabe	Bawang Merah	Cabe	Bawang Merang
1	2	3	4	7	8	9	10
1	2012	45	5	25,38	4	0,56	0,8
2	2013	54	9	21,50	9	0,39	1
3	2014	66	4	19,54	4	0,30	1
4	2015	70	0	48,3	0	0,69	0
5	2016	145	7	38,43	7	0,27	1

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.18, produktivitas tanaman sayuran sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2016 meningkat untuk produktivitas cabe sebesar 0,27 Ton/Ha, sedangkan produktivitas bawang merah sebesar 1 Ton/Ha.

Penggunaan lahan pertanian tanaman pangan intensif dan permukiman Kabupaten Buol dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan Gambar 2.5 dan 2.6.

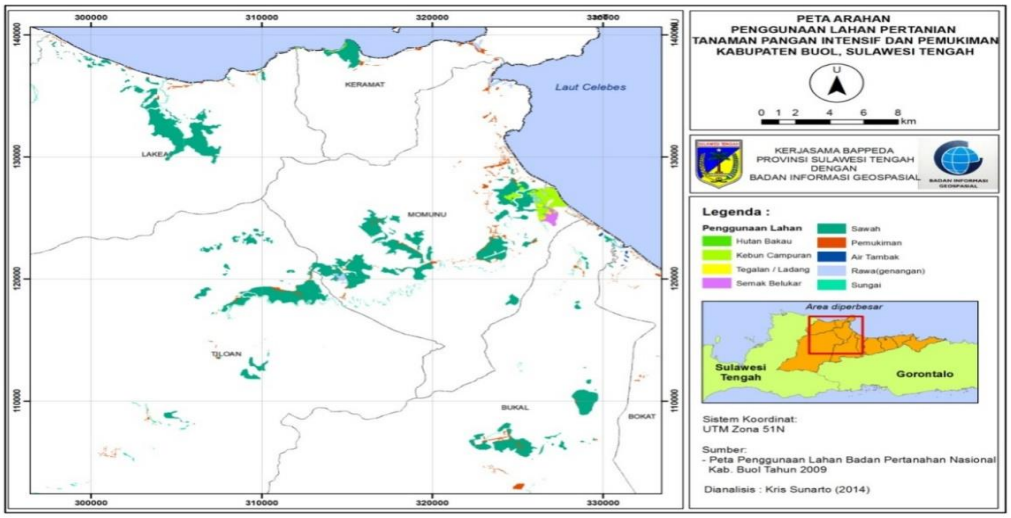

Sumber: Badan Pertanahan Nasional,Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009

Gambar 2.4 Peta Sebaran Areal Tanaman Pangan, Permukiman dan Penggunaan Lainnya Kabupaten Buol

Berdasarkan gambar 2.4 peta sebaran areal tanaman pangan, permukiman dan penggunaan lainnya di Kabupaten Buol terdiri dari areal hutan bakau, kebun campuran, ladang, semak belukar, sawah, permukiman, air tambak, rawa, dan sungai.

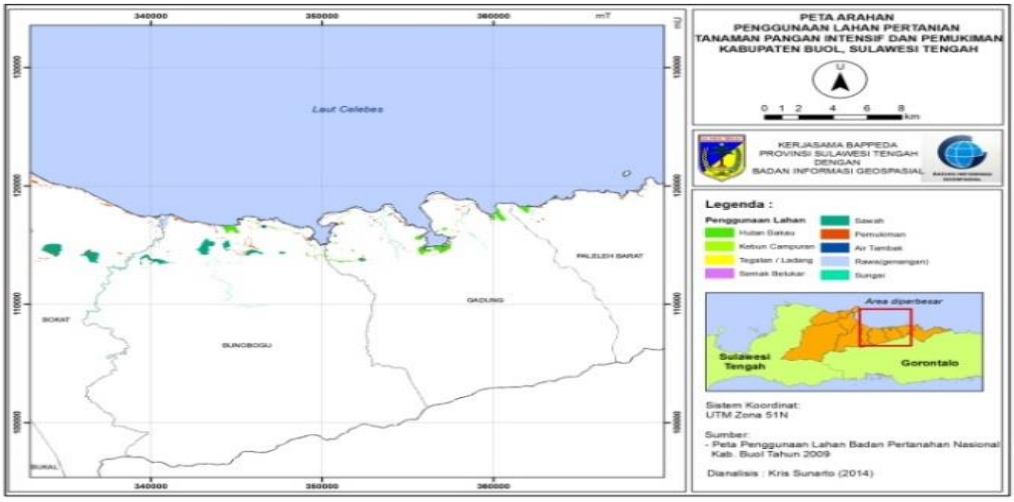

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009

Gambar 2.5 Peta Keterbatasan Lahan Basah dan Pentingnya Program Intensifikasi Kabupaten Buol

Berdasarkan gambar 2.5 terdapat keterbatasan lahan basah sehingga perlu dilakukan intensifikasi dengan memaksimalkan areal lahan basah yang ada di Kabupaten Buol.

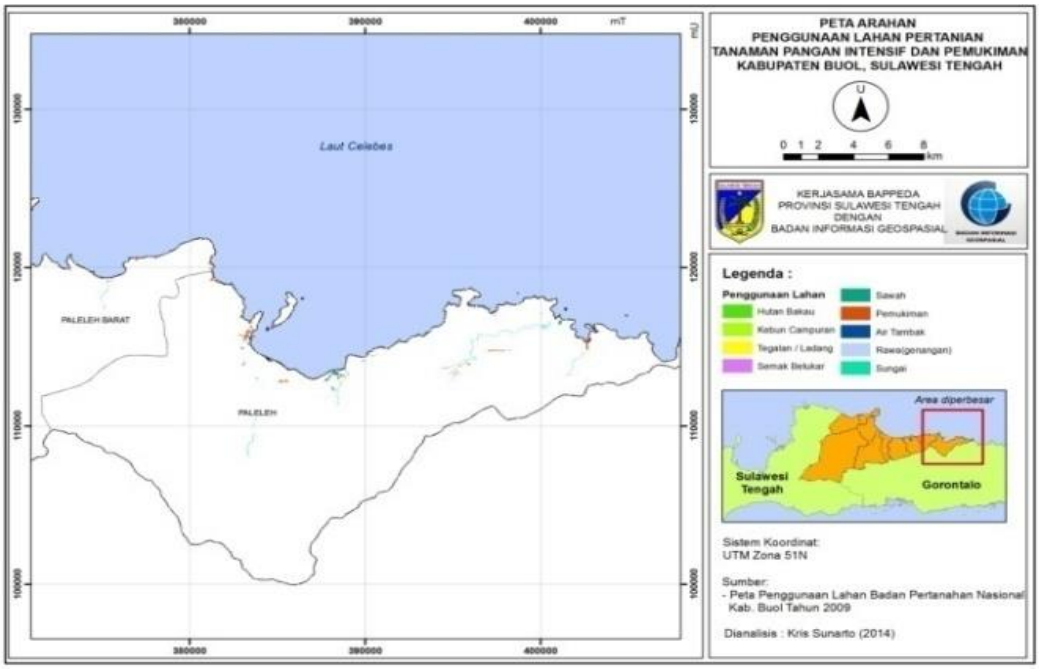

Sumber: Badan Pertanahan Nasional,Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009

Gambar 2.6 Peta Areal Persawahan Kabupaten Buol

Berdasarkan gambar 2.6 tentang luasan areal persawahan di Kabupaten Buol Luasan maupun pola sebaran areal tanaman pangan antara lain sawah tegal dan ladang serta kebun campuran, kemudian pemukiman dan penggunaan lainnya tampak minim. Oleh karenanya sangat diperlukan arahan bidang pertanian untuk upaya mempertahankan luasan maupun meningkatkan potensinya.

B. Perkebunan

Kabupaten Buol memiliki potensi perkebunan yang cukup baik untuk dikembangkan. Hal ini bisa dilihat dari area perkebunan di Kabupaten Buol yang cukup luas serta jenis tanaman perkebunan yang beragam. Potensi perkebunan di Kabupaten Buol tercermin dari luas area perkebunan dan hasil produksi tanaman perkebunan. Hasil produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Buol Tahun 2016 adalah: Kelapa sebanyak 12.766 Ha, Kelapa Sawit 25.051 Ha, Cengkeh 2.591 Ha, Kakao 11.541 Ha, Kopi 630 dan Pala 1.371 Ha. Daftar luas area perkebunan di Kabupaten Buol pada Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Luas Area Perkebunan (Ha)
di Kabupaten Buol Tahun 2016

Kecamatan	Kelapa	Kelapa Sawit	Cengkeh	Kakao	Kopi	Pala
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Lakea	1.324	116	300	794	12	67
Biau	777	-	209	103	10	123
Karamat	1.132	-	277	1.099	13	113
Momunu	1.157	778,95	237	799	60	112
Tiloan	407	12.463,86	43	1.661	62	62
Bokat	1.888	907,53	112	1.148	82	56
Bukal	995	9.844,67	64	1.818	35	52
Bunobogu	1.250	-	112	1.618	200	67
Gadung	1.736	-	354	1.562	69	77
Paleleh	1.395	-	217	445	54	93
Paleleh Barat	705	-	255	478	30	77
Total	**12.766**	**24.111,01**	**2.180**	**11.525**	**627**	**899**

Sumber : BPS Kabupaten Buol, Kabupaten Buol Dalam Angka Tahun 2017

Sedangkan luas produksi dan hasil produksi tanaman perkebunan dari Tahun 2012 – 2015 di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan
Di Kabupaten Buol Tahun 2012-2015

No	Komoditi	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2015	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ribu Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ribu Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ribu Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ribu Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ribu Ton)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Kelapa	8.771	11.430,51	13.722	11.858	12.775	1.191	12.766	10.161,97	12.776	10.247,08
2	Kelapa Sawit	15.089,15	117.514,90	20.344,53	209.528,76	21.322,33	23.073,02	24.111,01	224.474	25.051	194.755
3	Cengkeh	1.295	352,45	2.938	358,48	2.000	340,15	2.18	3,144,612	2591	314,93
4	Kakao	6.446	6.995,50	12.397	7.064	11.578	7.000	11.525	5.457,63	11.541	5.519,31
5	Kopi	326	189,66	948	201,10	629	197,43	627	187,23	630	182,56
6	Pala	133	10,18	145	10,18	436	10,20	899	10	1371	10,08
7	Lada	74	9,68	52	9,68	66	8,17	79	6,22	90	7,11

Sumber : Dinas Pertanian kabupaten Buol Tahun 2017 (Data Diolah)

Melalui proses analisis data spasial, sebaran lokasi dan potensi perkebunan besar maupun perkebunan yang sering disebaut sebagai kebun rakyat ataupun kebun campuran dapat diketahui. Perkebunan rakyat atau kebun campuran merupakan potensi daerah yang perlu kembangkan dan kesempatan tumbuh yang seimbang serta proposional guna capaian hasil komoditas yang optimal. Hal tersebut penting mengingat keseimbangan ekosistem maupun *socio system* yang ada dan yang harus berazas lestari dapat tercapai.

Legenda peta menunjukkan bahwa areal yang berpotensi untuk komoditas kelapa cukup luas, sementara untuk kelapa sawit justru lebih sempit dibandingkan luasan perizinan yang diajukan. Hal ini menujukkan bahwa wilayah perizinannya melampaui batas ketidak sesuaian. Perkebunan kering dan Kebun campuran berarti kebun rakyat yang pada umumnya ada disekitar permukiman. Perkebunan kering bercampur semak dan perladangan, berarti lahan masyarakat yang tingkat pengelolaannya masih sangat rendah. Semak belukar dan hutan merupakan kawasan konservasi. Arahan penggunaan lahan untuk pertanian perkebunan seperti pada Gambar 2.7

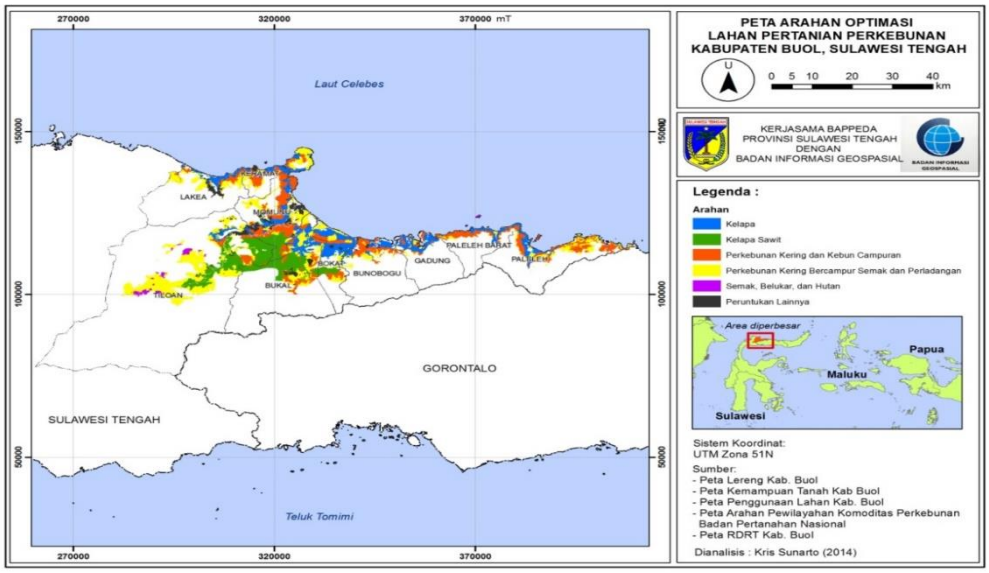

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Buol Tahun 2009

Gambar 2.7 Peta Arahan Penggunaan Lahan untuk Pertanian Perkebunan Kabupaten Buol

Gambar 2.7 menunjukkan kawasan yang lebih sesuai untuk kelapa dapat dipisahkan terhadap peruntukan sawit. Luas untuk sawit 18.300 Ha dan Untuk kelapa 19.600 Ha. Untuk tanaman sawit pada umumnya dikhususkan tanaman sejenis, sementara untuk kelapa merupakan kebun rakyat yang dapat dikombinasi dengan tanaman keras lainnya seperti halnya cokelat, dan tanaman buah-buahan.

C. Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Buol tercermin dari populasi ternak yang dapat dikembangkan di wilayah ini seperti: Sapi, Kambing, Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging dan Itik. Adapun populasi ternak di Kabupaten Buol sampai akhir Tahun 2016 antara lain Sapi 17.288 ekor, Kambing 33.388 ekor, Ayam Pedaging 27.000 ekor, Ayam Buras 119.782 ekor dan Itik sebanyak 130.80 ekor. Daftar populasi hewan ternak besar/kecil dan Unggas di Kabupaten Buol tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Populasi Ternak Besar/Kecil dan Unggas
Di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No.	Tahun	Ternak (Ekor)					
		Sapi	Kambing	Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	2012	13.904	15.340	66.663	4.000	6.100	9.035
2.	2013	14.228	17.778	68.698	14.000	16.000	12.644
3.	2014	15.174	23.059	76.785	9.854	22.000	21.815
4.	2015	16.250	27.387	81.148	27.708	32.000	11.684
5.	2016	17.288	33.388	119.782	28.489	27.000	12.070

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.21 menyajikan data ternak besar ternak kecil dan unggas. Ini mengarah pada potensi wilayah dari sisi keberadaan jumlah hewan maupun dari sisi ketersediaan bahan pakan. Potensi jenis hewan maupun kapasitas masing-masing wilayah kecamatan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah setempat.

Perlu disadari bahwa ketersediaan bahan pangan dan bahkan kemakmuran hasil pertanian tanaman pangan seirama dengan ketersediaan atau bahkan kelimpahan bahan pakan ternak. Secara sepintas tampak bahwa wilayah kabupaten Buol tergolong potensial untuk memenuhi bahan pangan pokok dan ini perlu menjadi perhatian untuk dikembangkan.

Keberhasilan pengembangan bidang tanaman pangan dan peternakan merupakan keberhasilan dalam ketahanan pangan khususnya pada tingkat daerah. Ketahanan bahan pangan maupun pakan ternak bagi setiap daerah diharapkan semakin saling meningkat, sehingga akan berdampak positip dalam ketahanan pangan nasional. Dalam upaya mengejar ketinggalan atas kebutuhan daging sapi, kambing dan ayam yang merupakan kebutuhan pokok nasional maupun daerah. Kelimpahan ternak lokal diharapkan dapat menunjang kebutuhan ternak nasional yang pertumbuhan populasinya masih dibawah 10 persen.

D. Perikanan dan Kelautan

Potensi kelautan di Kabupaten Buol potensial untuk dikembangkan mengingat luas wilayah lautnya yang cukup luas yaitu ±3.777 km² dan banyaknya jenis ikan di wilayah ini seperti: Tuna, Tongkol, Kerapu, Napoleon serta berbagai jenis ikan lainnya. Tahun 2016 jumlah produksi perikanan laut sebanyak 19.255,90 ton. Perikanan darat terdiri dari perikanan tambak, kolam dan sawah juga potensial untuk dikembangkan berbagai jenis ikan seperti: Nila, Mas, Lele dan berbagai jenis ikan lainya. Pada Tahun 2016 jumlah produksi perikanan tambak sebesar 70,4 ton dan perikanan kolam sebesar 52,9 ton.

E. Pertambangan

Sektor pertambangan di Kabupaten Buol memiliki potensi untuk dikembangkan. Potensi tersebut berupa berbagai jenis bahan tambang seperti: Emas, Batu Bara, Biji Besi, Gypsum, Kaolin, Pasir Kwarsa, Batu Kapur dan berbagai jenis tambang yang lain serta sumber energi sinar matahari yang sangat potensial.

Potensi tambang tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Buol yang sebagian besar belum diolah dan sebagian lagi telah diolah secara tradisional oleh masyarakat. Daftar jenis bahan tambang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Potensi Pertambangan di Kabupaten Buol Tahun 2016

No	Lokasi/Kecamatan	Jenis Tambang	Keterangan

1	2	3	4
1.	Momunu	Emas, Batubara, Gypsum	Belum diolah
2.	Paleleh	Emas	Diolah oleh masyarakat
3.	Gadung	Emas	Diolah oleh masyarakat
4.	Lakea	Emas, Gypsum, Batu Kapur	Belum diolah
5.	Bokat	Batu Kapur	Belum diolah
6.	Tersebar diseluruh Kecamatan di Buol	Koalin, Pasir Kwarsa, Biji Besi dan Batu Kapur	Belum diolah

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol, Tahun 2017

F. Pariwisata

Kabupaten Buol memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan meliputi wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya. Obyek-obyek wisata ini harus dikembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Adapun obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Buol adalah seperti pada Tabel 2.23 dan sebaran potensi wisata bahari pada Tabel 2.24.

Tabel 2.23
Obyek Wisata Di Kabupaten Buol Tahun 2016

No.	Jenis Obyek Wisata	Bentuk Obyek Wisata	Lokasi / Kecamatan
1	2	3	4
1.	Wisata Alam	Air Terjun	Paleleh Barat
			Tiloan
		Permadian Air Panas	Momunu

		Batu Susun	Lakea
		Pasir Putih	Beberapa Kecamatan Yang memiliki Wilayah Pantai
		Pulau Busak	Karamat
2.	Wisata Bahari	Pulau Boki	Paleleh Barat
		Pulau Raja	
		Pulau Ringgit	
		Pulau Panjang	Paleleh
		Kuburan Keramat Teluk Bilang	Karamat
3.	Wisata Sejarah dan Budaya	Rumah Adat Buol	Biau
		Kuburan Raja Buol	Biau

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol, Laporan Obyek Wisata di Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.24
Potensi Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Buol

No.	Nama Pulau	Lokasi		Luas (Ha)	Posisi Geografis		Potensi	Keterangan
		Desa/Kel.	Kecamatan		Bujur	Lintang		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	BUSAK	BUSAK I	KARAMAT	14,5	121°21,'50" BT 121°22,'10" BT	01°16'42" LU 01°16'28" LU	- Obyek Wisata Pasir Putih -Budidaya Laut dan Pesisir -*Coral Reef* -Kepiting Kenari -Kepiting Biru	Tidak Berpenghuni
2.	PANJANG	PALELEH	PALELEH	50,7	121°28,'30" BT	01°18'30" LU	- Obyek Wisata Pasir Putih -Budidaya Laut dan Pesisir -*Coral Reef* -Kepiting Kenari	Berpenghuni 13 KK tapi tidak menetap
3.	RAJA	TIMBULON	PALELEH BARAT	75,5	121°50,'30" BT	01°07'40" LU	- Obyek Wisata Pasir Putih -Budidaya Laut dan Pesisir -*Coral Reef* -Kepiting Kenari -Ikan Karang -Ikan Hias	- Tidak Berpenghuni -Terdapat Situs Sejarah (Kuburan Keramat)
4.	BOKI	TIMBULON	PALELEH BARAT	20.25	121°48,'00" BT	01°06'00" LU	- Obyek Wisata Pasir Putih -Budidaya Laut dan Pesisir -*Coral Reef* -Kepiting Kenari -Ikan Hias	Tidak Berpenghuni
5.	LESMAN	PALELEH	PALELEH	22,3	121°58,'20" BT	01°03'25" LU	- Obyek Wisata Pasir Putih -Budidaya Laut dan Pesisir -*Coral Reef* -Kepiting Kenari	-Tidak Berpenghuni -Terdapat Situs Sejarah berupa Benteng Belanda
6.	RINGGIT	PALELEH	PALELEH	7,1	121°50,'20" BT	01°07'40" LU	- Obyek Wisata Pasir Putih -Budidaya Laut dan Pesisir -*Coral Reef*	- Tidak Berpenghuni -Berbatasan dengan Provinsi Gorontalo

Sumber : BPS Kabupaten Buol Tahun 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam satu periode tertentu atas dasar harga konstan. PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selama kurun waktu Tahun 2012-2016 besaran PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Gambar 2.8.

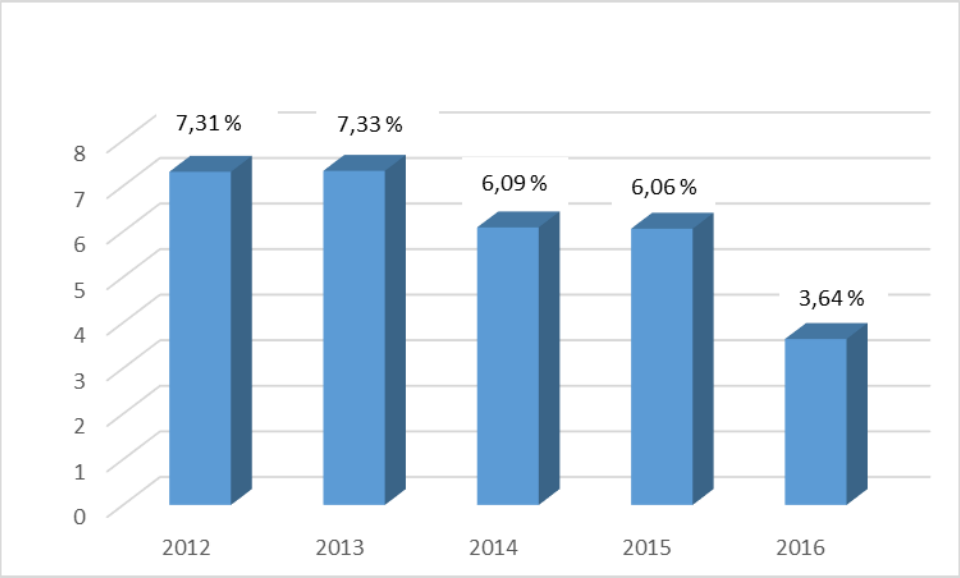

Sumber : SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.8 PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.8 PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 sepanjang Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol sebesar 7,31 persen di Tahun 2012 meningkat pada Tahun 2013 menjadi 7,33 persen. Sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2016 mengalami tren penurunan, hingga menjadi 3,64 persen. Hal ini terjadi akibat adanya penurunan produksi di sektor tanaman perkebunan.

Tabel 2.25
Perkembangan Kontribusi PDRB Kabupaten Buol Berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun Dasar 2010
Tahun 2012 - 2016

NO.	SEKTOR	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	54,98	53,31	49,58	49,29	46,30	48,54	34,29	46,13	18,48	11,91
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,48	0,97	1,38	0,82	2,16	1,54	2,53	1,61	2,39	2,39
3.	Industri Pengolahan	10,30	11,48	12,27	13,33	13,03	14,86	18,28	14,82	23,50	25,17
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,02	0,05	0,02	0,06	-	0,08	0,04	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,18	0,16	0,06	0,23	0,15	0,21	0,16	0,29	0,27
6.	Konstruksi	9,89	9,24	12,29	9,69	12,22	8,15	13,27	8,34	9,72	8,40
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,31	5,53	4,49	6,69	4,46	5,22	5,08	3,99	7,90	11,51
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,24	3,20	3,73	3,40	3,93	3,93	3,18	3,98	4,68	5,18
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,45	0,59	0,51	0,67	0,62	0,75	0,73	0,93	0,92
10.	Informasi dan Komunikasi	1,15	1,25	0,82	1,42	0,79	1,42	1,35	1,74	1,46	2,39
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,14	1,16	1,22	0,64	0,75	0,54	1,30	1,25	3,36	3,82
12.	Real Estate	2,42	2,25	2,68	3,03	3,71	3,21	3,66	4,41	3,27	3,44
13.	Jasa Perusahaan	0,06	0,07	0,07	0,08	0,07	0,09	0,11	0,10	0,14	0,15
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	4,01	4,53	4,49	5,01	4,38	4,63	5,34	5,12	10,46	11,95

NO.	SEKTOR	2012		2013		2014		2015		2016	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
15.	Jasa Pendidikan	3,08	2,88	3,55	3,34	3,78	3,51	5,04	3,65	7,21	6,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	1,68	2,07	2,05	2,17	2,21	3,05	2,38	3,69	3,98
17.	Jasa Lainnya	1,47	1,79	0,59	0,59	1,32	1,32	2,55	1,50	2,49	2,27

Sumber data: BPS Kabupaten Buol, PDRB Kabupaten Buol Tahun 2017

2. Laju Inflasi Daerah

Selain pertumbuhan ekonomi, isu perekonomian makro daerah kedua adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga paket komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dibandingkan harga rata-rata pada periode sebelumnya. Secara umum tingkat inflasi Kabupaten Buol menunjukkan tren fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2012 mencapai 6,03 persen, Tahun 2013 naik menjadi 7,2 persen. Pada Tahun 2014 turun menjadi sebesar 6,59 persen serta pada Tahun 2015 naik menjadi 7,03 persen dan Tahun 2016 turun menjadi 4,38, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.9.

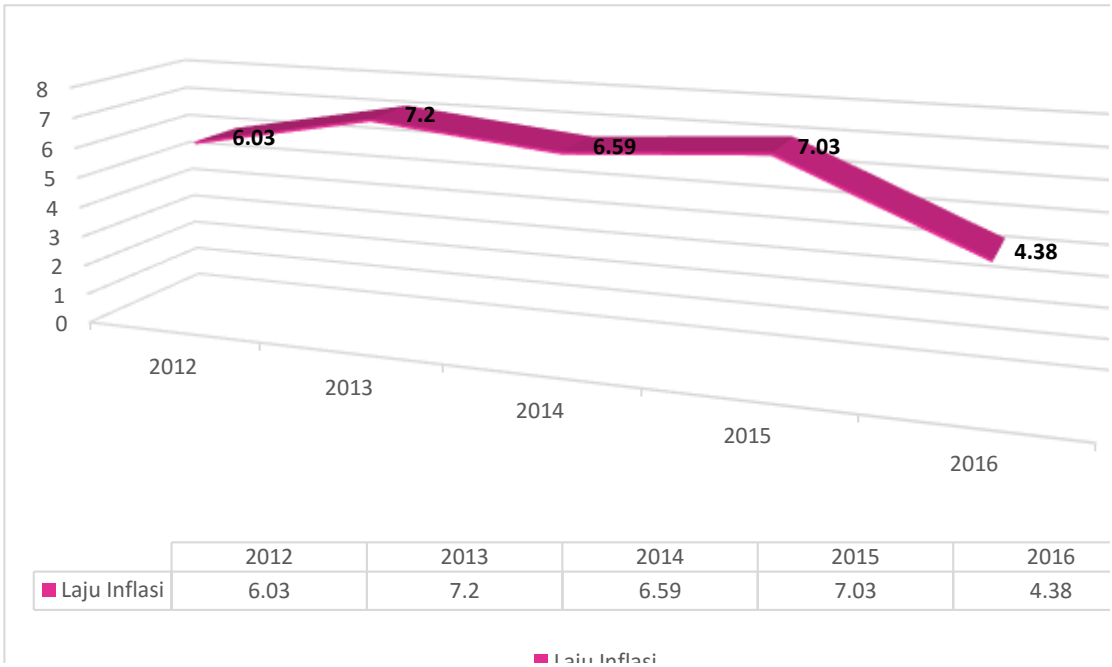

Sumber: BAPPEDA Kab. Buol, Pertumbuhan Inflasi Kab. Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Gambar 2.9 Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Buol

Tahun 2012 – 2016

Adapun kelompok pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap tingkat inflasi Kabupaten Buol sampai dengan bulan September Tahun 2016 adalah kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yaitu sebesar 6,61 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 4,04 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 3,83 persen, kelompok Sandang sebesar 2,83 persen, kelompok Bahan Makanan sebesar 2,57 persen, kelompok kesehatan 1,33 persen dan kelompok Pendidikan, Rekreasi dan olahraga sebesar 0,07 persen.

3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil hasil bagi antara total nilai PDRB disuatu wilayah dengan jumlah penduduk diwilayah tersebut pada pertengahan tahun.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk secara rata-rata di suatu wilayah. Namun besarnya PDRB per kapita tidak serta merta menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk tanpa diimbangi dengan pemerataan pendapatan yang tercermin dari nilai indeks Gini Rasio. Idealnya besarnya nilai PDRB perkapita penduduk harus diimbangi dengan semakin meratanya pendapatan yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya nilai gini rasio (mendekati nilai nol).

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Buol menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada Tahun 2012 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Buol sebesar Rp 23.835.875,-, Tahun 2013 sebesar Rp 26.028.893,-, Tahun 2014 sebesar Rp 28.621.545,- Tahun 2015 sebesar Rp 30.720.583,- dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 31.700.727,-. Sedangkan nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Buol juga menunjukkan tren peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada Tahun 2012 nilai

PDRB perkapita ADHK 2010 Kabupaten Buol sebesar Rp 21.151.830,-, Tahun 2013 sebesar 21.888.878,-, Tahun 2014 sebesar Rp.22.695.823,- Tahun 2015 sebesar Rp. 23.568.592- dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 23.898.65,- per tahun. PDRB per kapita dapat dilihat sepanjang Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.10.

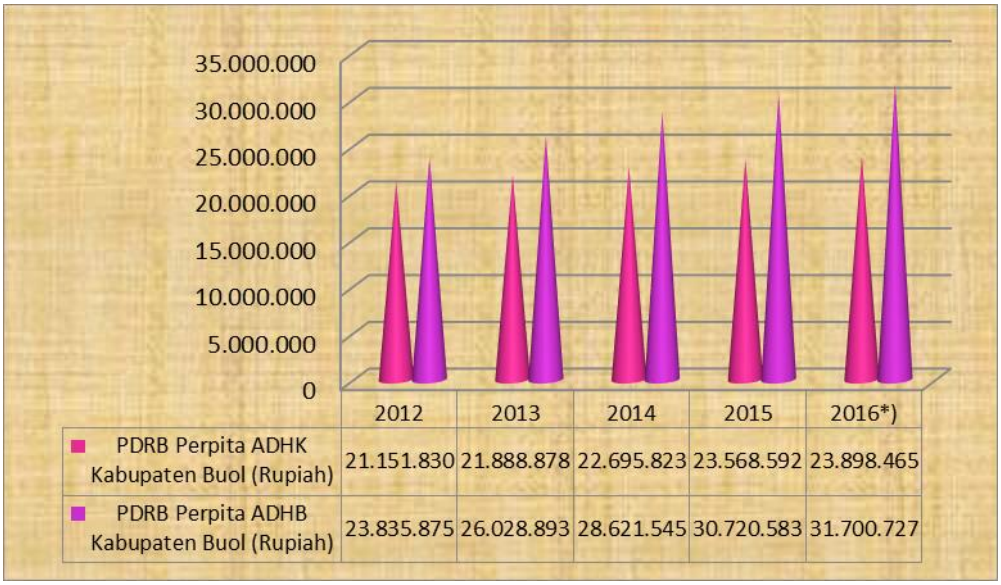

Sumber: BPS Kabupaten Buol, PDRB Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.10 PRDB Per Kapita Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

- **Indeks Gini**

Berdasarkan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buol, tingkat pemerataan pendapatan sudah sangat baik, berada posisi 0,30 poin pada Tahun 2016. Jadi dari tahun ke tahun tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Buol dapat terdistribusi dengan baik, Tahun 2012 Indeks Gini Ratio berada pada 0,35 poin, Tahun 2013 berada pada posisi 0,33 poin, Tahun 2014 menjadi 0,32 poin dan Tahun 2015 mencapai 0,31 poin. Tren pencapaiannya dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut:

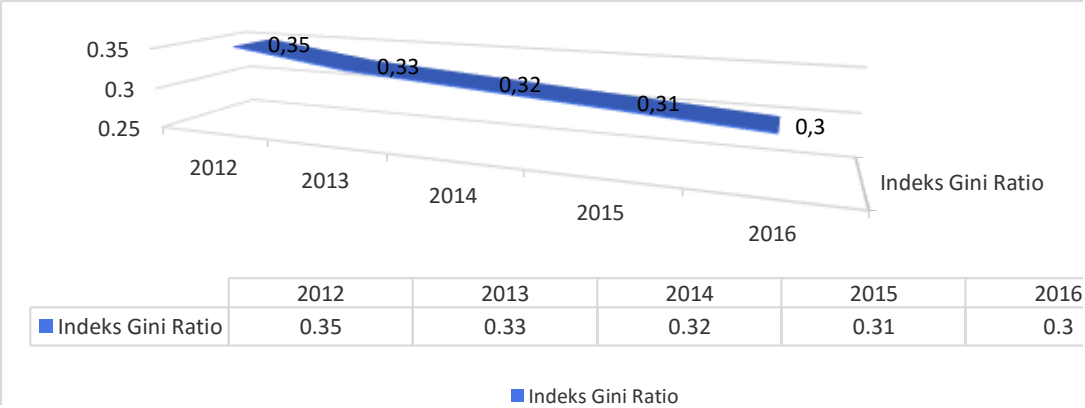

	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Gini Ratio	0.35	0.33	0.32	0.31	0.3

Indeks Gini Ratio

Sumber: BPS Kabupaten Buol,Rasio Gini Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Gambar 2.11 Tren Indeks Gini Ratio Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

- **Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan di Kabupaten Buol**

Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Buol selama periode 5 (lima) tahun terakhir jumlah penduduk miskin Kabupaten Buol menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada Tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buol tercatat sebesar 22.300 jiwa (15,99 persen) menurun menjadi 21.600 jiwa (15,06 persen) pada Tahun 2013 kemudian menurun lagi menjadi 20.800 jiwa (14,18 persen) pada Tahun 2014. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 24.310 jiwa (16,36 persen) dan Tahun 2016 meningkat menjadi 25.270 jiwa (16,68 persen). Persentase penduduk diatas garis kemiskinan disajikan pada Tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2012 - 2016 di Kabupaten Buol

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Penduduk	137.479	142.585	145.889	149.804	152.296
2.	Persentase Penduduk di atas Gari Kemiskinan (%)	84,01	84,97	85,82	83,64	83,32
3.	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/ Bulan)	236.601	253.185	266.475	271.525	304.085

Sumber Data: BPS Kab. Buol, Data dan Informasi Kemiskinan Kab. Buol Tahun 2013 s/d 2017

Meningkatnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Buol pada 2 (dua) tahun terakhir tidak lepas dari meningkatnya angka garis kemiskinan Kabupaten Buol yang terus meningkat, dimana pada Tahun 2015 angka garis kemiskinan sebesar Rp 271.525,- meningkat menjadi Rp.304.085,- pada Tahun 2016.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan sosial terdiri dari indikator – indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia)/ HDI (*Human Development Index*), merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, meek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah adalah daerah maju, daerah berkembang atau daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buol terus mengalami peningkatan seperti disajikan pada Gambar 2.12 berikut:

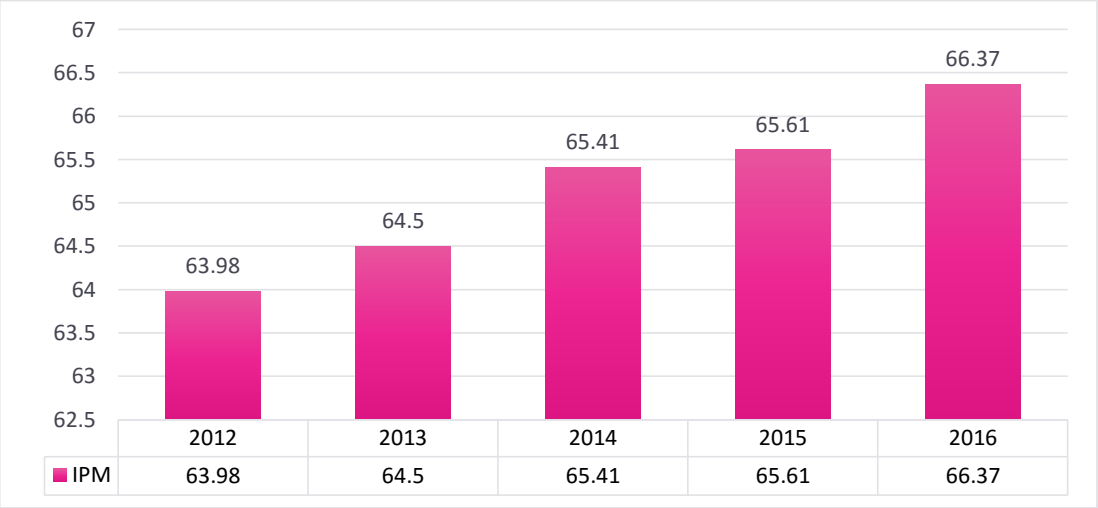

Sumber: BPS Kabupaten Buol, IPM Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan Gambar 2.12, menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 menunjukkan tren peningkatan angka dari 63,98 persen pada Tahun 2012 meningkat hingga 66,37 persen di Tahun 2016. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam pembangunan ekonominya. Dimana IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi.

2. Angka Melek Huruf

AMH (Angka Melek Huruf) adalah alat ukur khususnya untuk penduduk yang berusia berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dalam bidang pendidikan untuk mengukur indikator keberhasilan pendidikan terutama dalam pemberantasan buta huruf maka

rumus AMH dapat digunakan untuk mendapatkan capaian rata-rata pembangunan di Sektor Pendidikan, teruama terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD (Sekolah Dasar). Adapun manfaat penetapan AMH adalah:

(1) Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
(2) Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Dengan demikian maka, angka melek huruf mencerminkan perkembangan intelektual di suatu daerah.

Data mengenai perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Melek Huruf
Tahun 2012 -2016 Kabupaten Buol

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (Jiwa)	15.699,76	13.301,02	24.645,66	13.978,81	17.396,75
2.	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (Jiwa)	16.071	13.608	25.275	14.222	17.694
3.	Angka melek huruf (%)	97,69	97,75	97,51	98,29	98,32

Sumber : BPS Proyeksi Penduduk 2010-2035, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017

Perkembangan AMH (Angka Melek Huruf) selama periode 2012-2016 mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar. Pada Tahun 2012 mancapi 97,69 dan Tahun 2013 mencapai 97,75 persen. Sementara pada Tahun 2014 terjadi penurunan mencapai 97,51 persen akan tetapi pada Tahun 2015 meningkat menjadi 98,29 persen dan naik mencapai 98,32 persen pada Tahun 2016, dengan melihat perkembangan angka melek huruf jika mengacu pada Tahun 2016 maka masih teradapat 1,68 persen Penduduk Kabupaten Buol yang tergolong tidak dapat membaca dan menulis.

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk Sekolah Dasar sampai dengan TPT (Tingkat Pendidikan Terakhir). Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah adalah peluang anak tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Data mengenai Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.13.

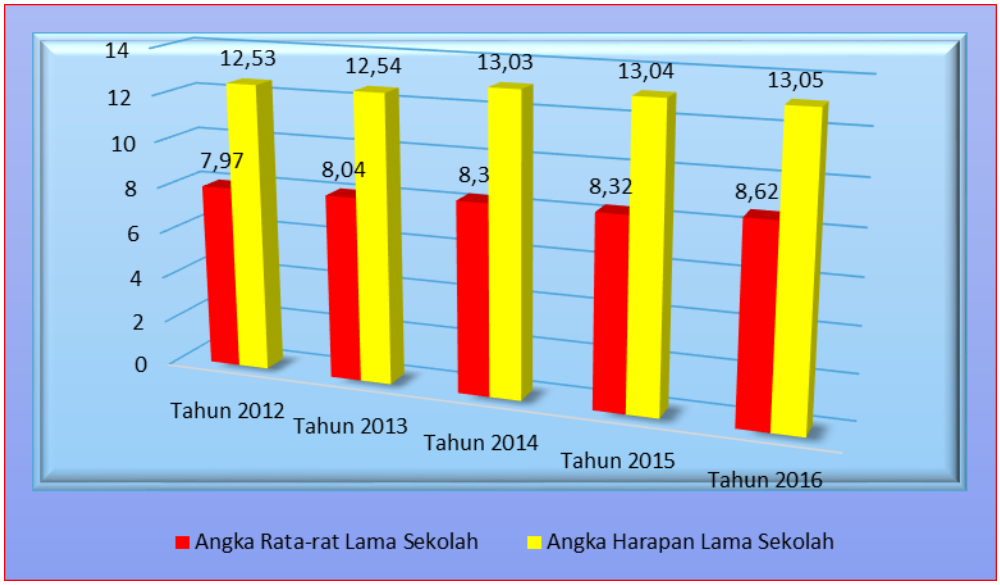

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017

Gambar 2.13 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarakan Gambar 2.13, rata-rata lama sekolah pada Tahun 2012 menunjukan angka capaian 7,92 tahun yang kemudian meningkat menjadi 8,04 tahun pada Tahun 2013, Tahun 2014 meningkat mencapai 8,30 tahun yang kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2015 yakni hanya sebesar 8,32 tahun dan pada Tahun 2016 kembali terjadi peningkatan yakni mencapai 8,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Buol secara umum baru mancapai usia sekolah SMP dengan demikian maka masih diperlukan usaha untuk meningkatan hal tersebut.

Adapun untuk HLS (Harapan Lama Sekolah) perhitungnya dimulai sejak penduduk berusia 7 (tujuh) tahun keatas, hal ini digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem pendidikan di berbagi tingkatan yang ditunjukkan dengan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Berdasarkan data yang tersaji maka capaian HLS Tahun 2012 adalah 12,53 tahun kemudian mengalami kenaikan mencapai 12,54 tahun pada Tahun 2013, pada Tahun 2014 naik mencapai 13 ,03 tahun kemudian pada Tahun 2015 meningkat lagi mencapai 13,04 tahun dan pada Tahun 2016 mencapai 13,05 tahun. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah, maka angka capaian HLS Kabupaten Buol berada pada peringkat ke tiga setelah Kota Palu yakni 15,52 tahun dan Kabupaten Poso 13,15 tahun dengan demikian maka masih diperlukan peningkatan sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Sulawesi Tengah.

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai suatu umur, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku

dilingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Data mengenai Angka Harapan Hidup di Kabupaten Buol terdapat pada Gambar 2.14 berikut:

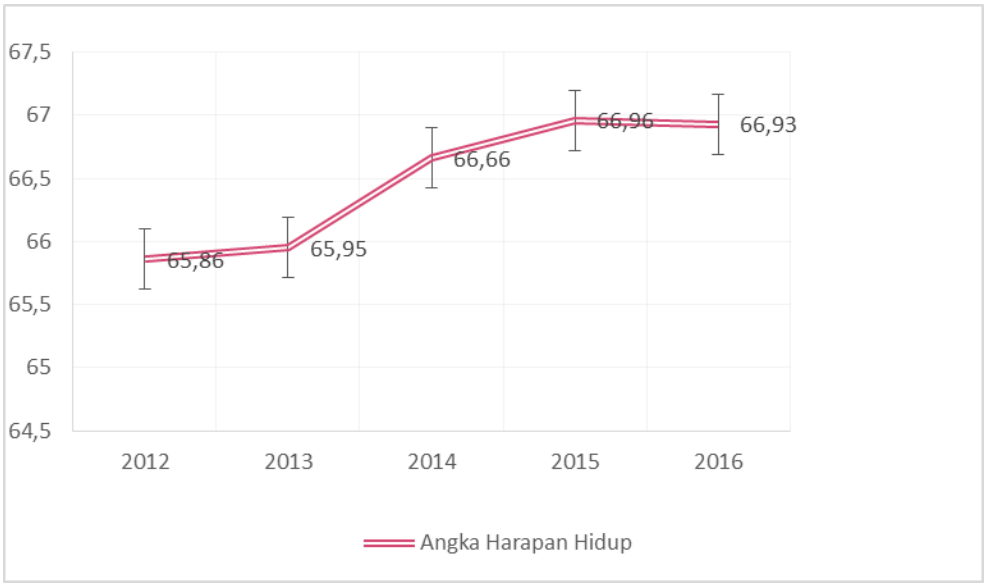

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol, BPS Kabupaten Buol, Buol Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 2.14 Angka Harapan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.14, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Buol dari Tahun 2012-2016 sudah cukup baik karena cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2012 Angka Harapan Hidup 65,86 tahun, kemudian mengalami kenaikan di Tahun 2013-2015 menjadi 66,96 tahun. Namun kembali turun di Tahun 2016 menjadi 66,93 tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 67,30 tahun.

5. Persentase Balita Gizi Buruk

Dalam 1.000 hari pertama kehidupan bayi merupakan usia emas bagi tumbuh dan kembang anak. Agar anak-anak Indonesia yang akan menjadi harapan masa depan bangsa tumbuh cerdas dan sehat, bayi harus mendapat asupan gizi cukup sejak dalam kandungan (270 hari) hingga berusia dua tahun (730 hari). Persentase balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk pada tahun berkenaan dibagi dengan jumlah balita dikalikan 100 persen.

Persentase mengenai balita gizi buruk di Kabupaten Buol sepanjang tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.15.

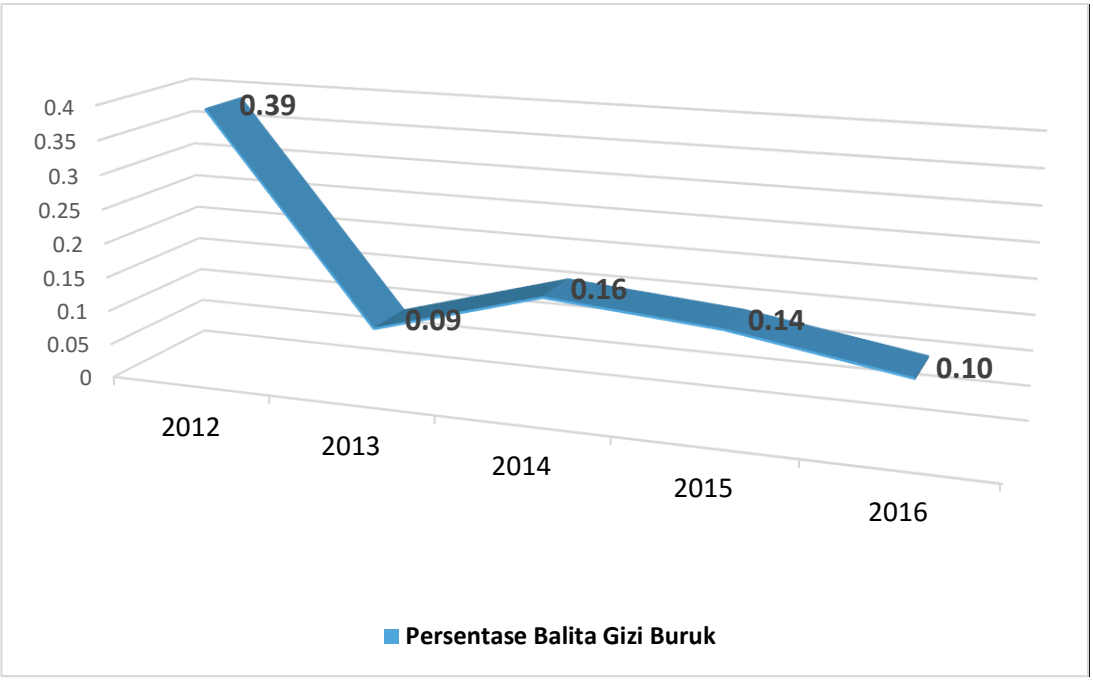

Sumber: Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Gambar 2.15 Persentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan Gambar 2.15, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2012 persentase balita gizi buruk sebesar 0,39 persen, kemudian turun menjadi 0,09 persen di Tahun 2013. Tahun 2014 naik kembali menjadi 0,16 persen. Tahun 2015-2016 turun menjadi 0,10 persen. Data tersebut diatas menunjukkan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Buol sangat baik. *WHO* (*World Health Organization*) mensyaratkan, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila bila prevalensi balita pendek kurang dari 20 persen dan prevalensi balita kurus kurang dari 5 persen.

6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan jumlah balita gizi kurang pada tahun berkenaan dibagi dengan jumlah balita pada tahun tersebut dikali

dengan 100 persen. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 seperti pada Gambar 2.16 berikut:

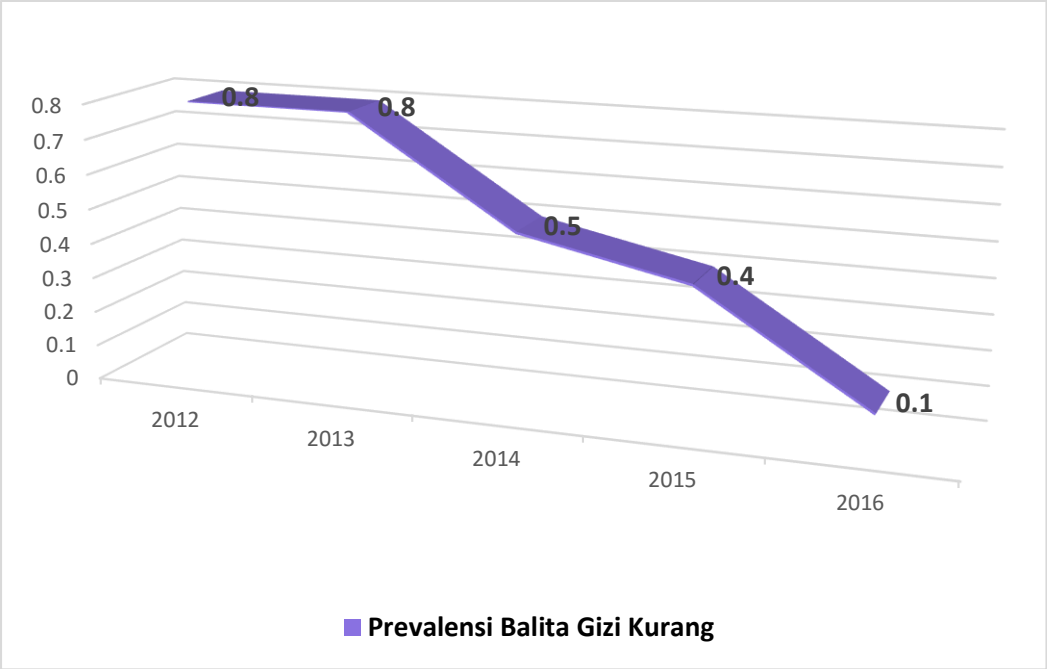

Sumber: Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013-2017

Gambar 2.16 Prevalensi Gizi Kurang Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.16 diatas, prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 menunjukkan penurunan dari angka prevalensi balita gizi kurang. Pada Tahun 2012-2013 prevalensi gizi kurang sebesar 0,8 persen, turun menjadi 0,5 persen di Tahun 2014. Tahun 2015 prevalensi gizi kurang kembali turun menjadi 0,4 persen, dan pada Tahun 2016 turun hingga sebesar 0,1 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perbaikan gizi balita di Kabupaten Buol. Sesuai dengan standar *WHO (World Health Organization)*, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila bila prevalensi balita pendek kurang dari 20 persen dan prevalensi balita kurus kurang dari 5 persen.

7. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah jumlah desa siaga aktif dibagi jumlah desa siaga yang dibentuk di kali 100 persen. Cakupan desa siaga aktif di

Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 dapat di lihat pada Gambar 2.17 berikut:

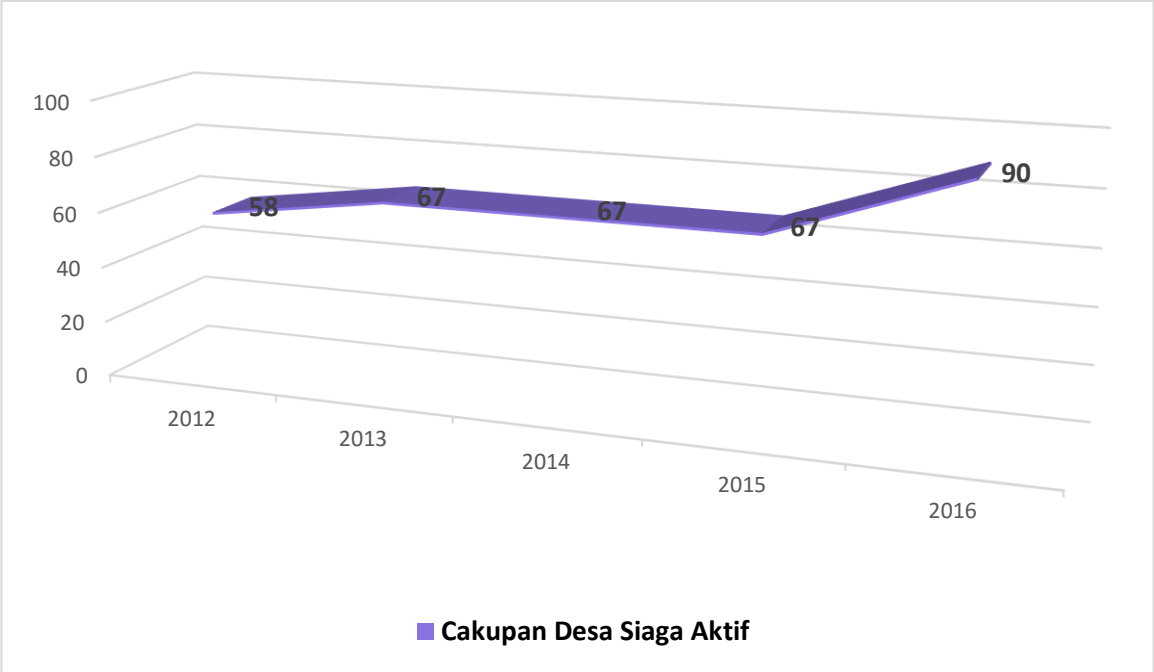

Sumber: Data Profil Kesehatan Tahun 2013-2017

Gambar 2.17 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.17 cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2016-2016 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2012 cakupan desa siaga aktif sebesar 58 persen meningkat menjadi 67 di Tahun 2013 hingga 2015. Pada Tahun 2016 meningkat kembali menjadi 90 persen. Meskipun terjadi peningkatan cakupan desa siaga aktif, namun belum secara keseluruhan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Buol berstatus Desa Siaga Aktif. Dimana dari 115 desa/kelurahan yang ada, 104 kelurahan/desa yang berstatus desa siaga aktif hingga Tahun 2016.

8. Tenaga Kerja (Persentase Angka partisipasi angkatan kerja, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Tingkat Penggauran Terbuka, Rasio Penduduk yang bekerja)

Angka partisipasi angkatan kerja adalah tingkat partisipasi umum yaitu jumlah angkatan kerja dibagi seluruh penduduk berumur 10 tahun keatas, jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sepanjang Tahun 2012-2016, kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja) disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Ketenagakerjaan

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian Kerja Tahun 2012 - 2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	68	66	69	67	64
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	68,74	66,18	66,31	67,89	68,32
3.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,26	1,74	1,99	3,58	2,52
4.	Rasio penduduk yang bekerja	0,98	0,96	0,97	0,99	0,96

Sumber : BPS Sakernas Agustus 2013-2017

Secara umum Tabel 2.28, komposisi jumlah angka partisipasi angkatan kerja Tahun 2012 mencapai 68 persen menurun pada Tahun 2016 sebesar 64 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2012 mencapai 68,74 persen, namun pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 68,32 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2012 mencapai 2,26 dan Tahun 2016 sebesar 2,52 persen.

9. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi yang layak, memiliki hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar anggota dan

antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I adalah persentase perbandingan antara jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dengan jumlah keluarga. Data persentase kelaurga pra sejahtera dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada Gambar 2.18 berikut:

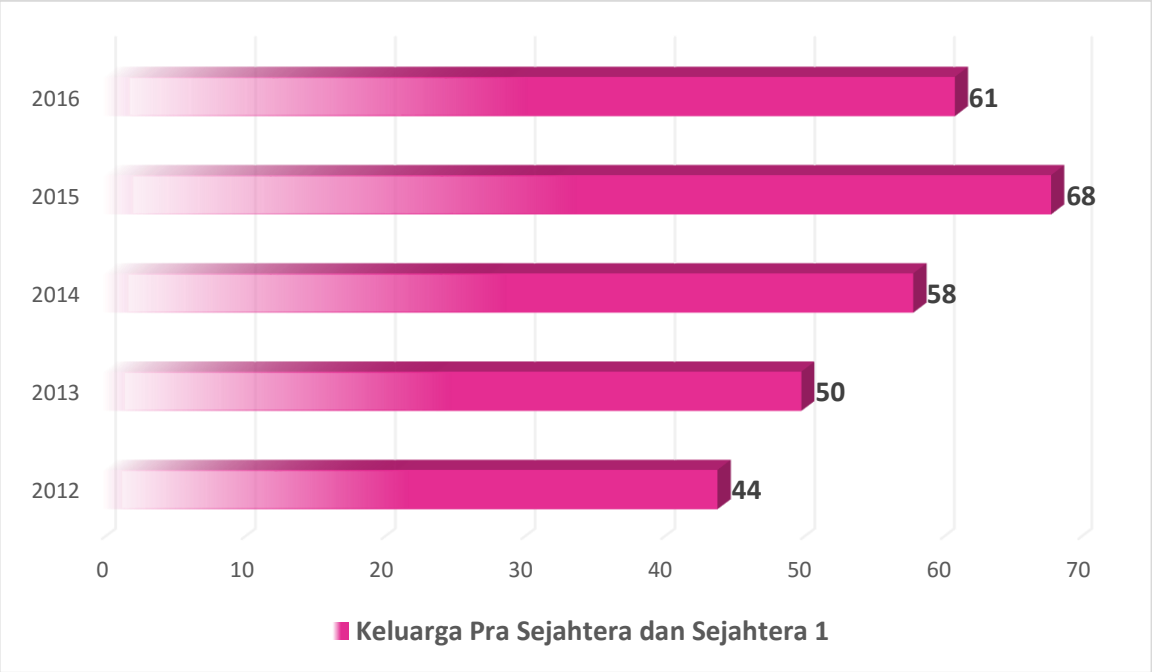

Sumber: Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol 2013-2017

Gambar 2.18 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Gambar 2.18 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarrga sejahtera I di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 menunjukkan tren angka fluktuatif. Pada Tahun 2012 dari 44 persen meningkat hingga 68 persen di Tahun 2015. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 61 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Buol hingga Tahun 2016, ada 61 persen keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

10. Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan adalah persentase perbandingan antara PAD dan jumlah pendapatan daerah. Data persentase PAD terhadap pendapatan dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut:

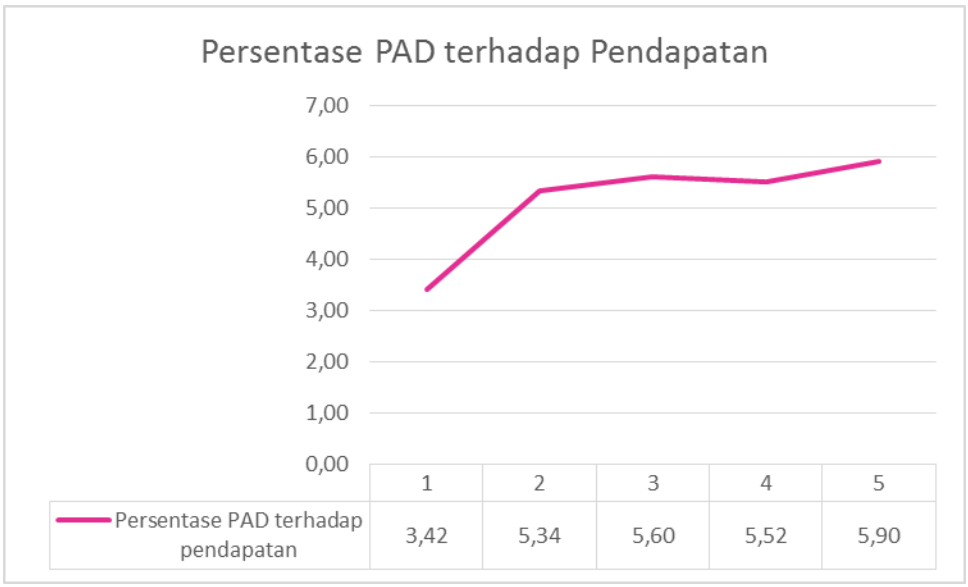

Sumber: BPKAD Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.19 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa persentase PAD menurun dari Tahun 2012 ke Tahun 2013, yakni dari 3,42 persen menjadi 5,34 persen. Persentase PAD mengalami tren fluktuatif sejkak Tahun 2013 hingga Tahun 2016. Tahun 2014 sebesar 5,60 persen, Tahun 2015 sebesar 5,52 persen, dan Tahun 2016 sebesar 5,90 persen.

11. Opini (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan

Opini BPK adalah Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah.

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2012 adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tahun 2013 *Disclaimer,*

Tahun 2014 WDP, Tahun 2015 WDP dan Tahun 2016 meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

12. Pencapaian Skor PPH (Pola Pangan Harapan)

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan adalah persentase AKG (Angka Kecukupan Gizi) dikali dengan bobot masing – masing kelompok pangan. Data mengenai pencapaian skor pola pangan harapan tersaji pada Gambar 2.20 berikut:

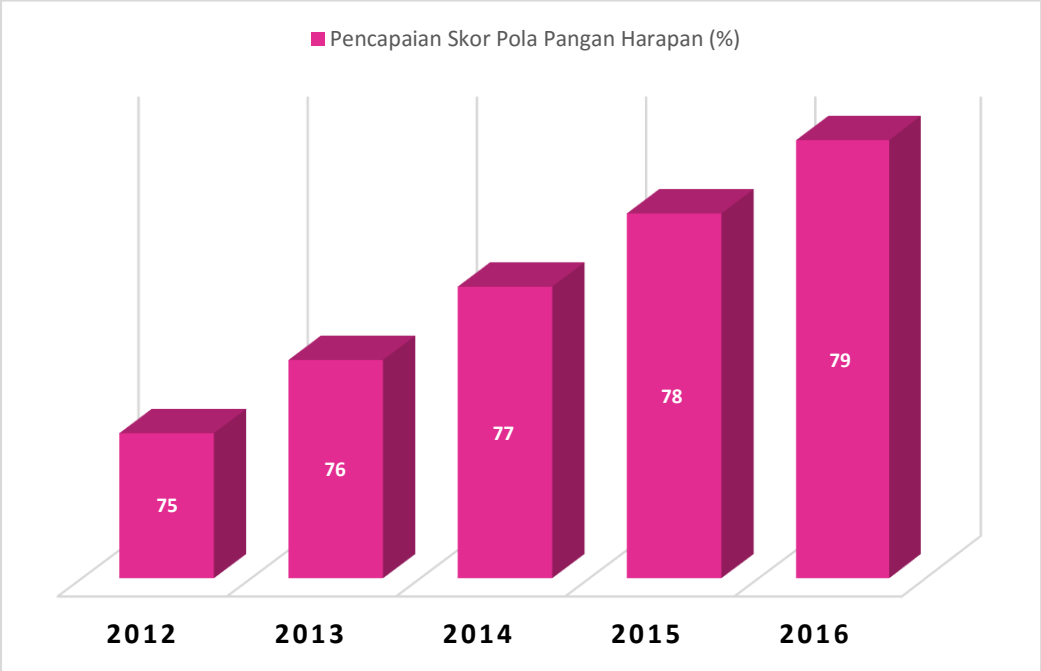

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol 2017

Gambar 2.20 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Gambar 2.20 menunujkkan bahwa skor pola pangan harapan tercapai sebesar 75 pesen pada Tahun 2012, Tahun 2013 sebesar 76 persen, Tahun 2014 sebesar 77 persen, Tahun 2015 sebesar 78 persen dan Tahun 2016 sebesar 79 persen. Setiap tahun naik sebesar 1 persen.

12. Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) dan Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB.

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB adalah persentase jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian / perkebunan terhadap jumlah PDRB. Kontribusi sektor pertanian (palawija), dan sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB adalah persentase perbandingan jumlah kontribusi dari sektor pertanian (palawija) dan sektor perkebunan (tanaman keras) dengan jumlah PDRB sektor pertanian / perkebunan. Data kontribusi untuk beberapa sektor ini terhadap PDRB dan terhadap PDRB Pertanian disajikan pada Tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.29
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) dan Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	5,71	5,31	4,94	4,57	4,43
2.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	32,27	32,90	33,14	32,07	30,20

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 29 diketahu kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB terus mengalami penurunan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Kontribusi sektor pertanian (palawija) rata – rata menurun sebesar 6,1 persen. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB sektor pertanian / perkebunan turun dari 32,27 persen menjadi 32,90 persen. Tahun 2014 naik menjadi 33,14 persen. Tahun 2015 dan tahun 2016 turun menjadi 32,07 persen dan 30,20 persen, rata – rata menurun sebesar 1,59 persen.

13. Produksi Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan

Produksi sektor pertanian dan sektor perkebunan adalah jumlah produksi komoditas perkebunan. Data produksi sektor pertanian dan sektor perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Produksi Sektor Pertanian dan Sektor Perkebunan

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Produksi sektor pertanian (Ton)	9.874,17	33.280,75	30.631,34	23.522,53	23.657,53
2.	Produksi sektor perkebunan (Ton)	259.640,73	136.514,83	229.050,76	31.836,92	32.119,91

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2017

Data pada Tabel 2.30 menunjukkan produksi sektor pertanian mengalami peningkatan pada Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012 menjadi 33.280,75 ton dari 9.874,17 ton. Tahun 2014 menurun menjadi 30.631,34 ton, Tahun 2015 menurun menjadi 23.522,53 ton dan Tahun 2016 naik menjadi 23.657,53 ton.

Produksi sektor perkebunan Tahun 2012 sebanyak 259.640,73 ton, Tahun 2013 sebanyak 136.514,83 ton, Tahun 2014 sebanyak 229.050,76 ton, dan menurun menjadi 31.836,92 ton, Tahun 2016 sebanyak 32.119,91 ton. Penurunan yang sangat besar terjadi pada Tahun 2015 karena penurunan produksi kelapa sawit akibat usia pohon sudah tua.

14. Kontribusi Sektor Pariwisata, Sektor Kelautan, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri terhadap PDRB

Kontibusi sektor pariwisata, sektor kelautan, sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi masing – masing sektor terhadap PDRB. Data mengenai kontribusi masing – masing sektor ini dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut:

Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Pariwisata, Sektor Kelautan, Sektor Perdagangan dan Sektor Industri terhadap PDRB

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,5	0,51	0,53	0,54	0,56
2.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	3,33	3,23	3,13	3,15	3,28
3.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,19	5,99	5,82	5,76	5,87
4.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	13,14	13,03	13,03	13,50	14,01

Sumber: SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB terus meningkat setiap tahun. Rata – rata peningkatan kontribusi sektor pariwisata adalah sebesar 2,88 persen. Sektor kelautan mengalami penurunan persentase kontribusi, tetapi pada Tahun 2016 naik dari 3,15 persen menjadi 3,28 persen. Kontribusi sektor perdagangan mengalami penurunan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2015. Tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2016 menjadi 5,87 persen. Sektor Industri memberikan kontribusi sebesar 13,14 persen, Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar 13,03 persen, Tahun 2014 naik menjadi sebesar 13,50 persen, Tahun 2016 naik menjadi 14,01 persen.

15. Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri dan Pertumbuhan Industri

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri adalah persentase perbandingan jumlah kontribusi dari sektor industri rumah tangga dengan jumlah PDRB sektor industri.

Pertumbuhan industri adalah persentase pertumbuhan jumlah industri setiap tahun. Data kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri dan pertumbuhan industri disajikan pada Tabel 2.32 berikut:

Tabel 2.32
Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri dan Pertumbuhan Industri

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	3,05	5,96	5,66	10,59	12,05
2.	Pertumbuhan Industri (%)	2,2	2,5	7	10	15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.32 menunjukkan data kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Tahun 2012 sebesar 3,05, Tahun 2013 naik menjadi 5,96 persen. Tahun 2014 turun tidak terlalu besar dibandingkan Tahun 2014 menjadi 5,66 persen. Tahun 2015 hingga Tahun 2016 terus mengalami kenaikan, masing – masing 10,59 persen dan 12,05 persen.

Pertumbuhan industri sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 mengalami kenaikan. Tahun 2012 bertumbuh sebesar 2,2 persen, Tahun 2013 sebesar 2,5 persen, Tahun 2014 sebesar 7 persen, Tahun 2015 sebesar 10 persen, dan tahun 2016 sebesar 15 persen.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

Pembangunan Bidang Seni Budaya sangat terkait erat dengan kualitas

hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Buol yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 11 (sebelas) desa 7 (tujuh) kelurahan, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Buol, sebagaimana Gambar 2.21.

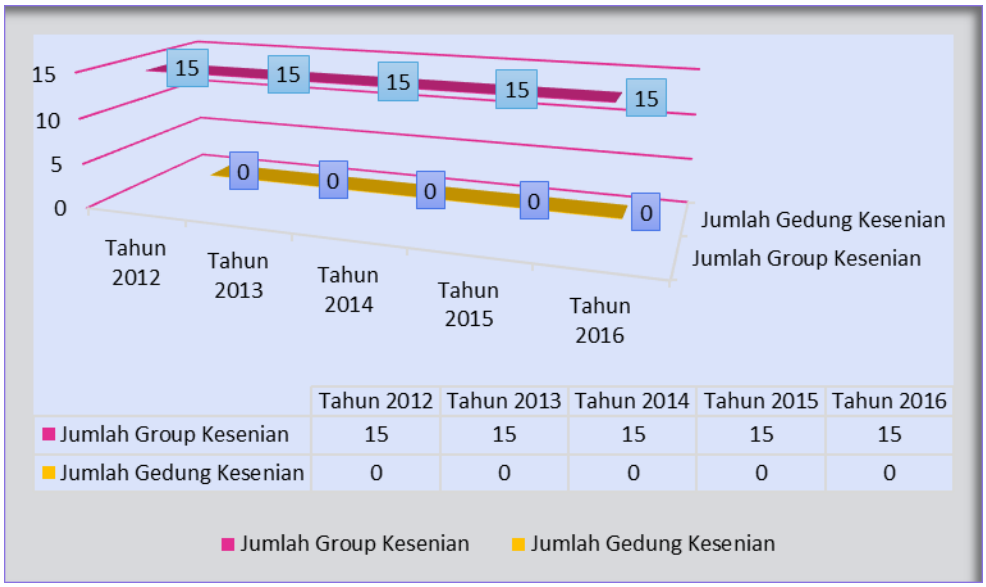

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Jumlah Group Kesenian	15	15	15	15	15
Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0

Sumber: *Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab Buol, 2017. Dinas Pendididkan dan Kebudayaan 2017*

Gambar 2.21 Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol

Berdasarkan Gambar 2.21, dapat dijelaskan perkembangan grup kesenian di Kabupaten Buol sejak Tahun 2012 sampai Tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) kelompok. Adapun persebaran jumlah grup tersebut adalah: 2 (dua) grup di Kecamatan Lakea, 4 (empat) grup di Kecamatan Biau dan masing – masing 1 (satu) grup di Kecamatan Momunu, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Paleleh dan Kecamatan Paleleh Barat.

2. Pemuda Olahraga

Guna mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang tangguh, berbobot dan sehat. Sebagaimana kata pepatah terkenal "*Men Sana In Corporesano*" yang artinya adalah "Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat". Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olahraga. Di bawah ini data tentang jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga yang ada di Kabupaten Buol sebagaimana Gambar 2.22 berikut:

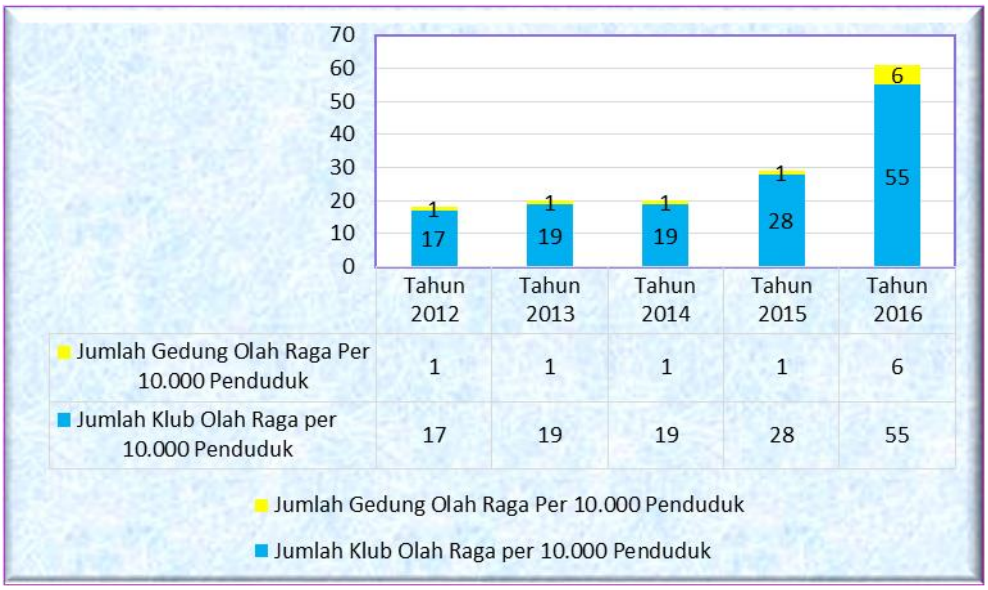

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga.Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kab Buol 2017

Gambar 2.22 Perkembangan Olahraga Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol

Gambar 2.22 di atas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah Klub Olah Raga di Kabupaten Buol pada Tahun 2012 sebanyak 17 (tujuh belas) klub dan terus mengalami peningkatan, Tahun 2013 menjadi 19 (sembilan belas) klub demikian pula pada Tahun 2014 jumlah klub olah raga tidak mengalami peningkatan dan pada Tahun 2015 meningkat menjadi 28 (dua puluh delapan) klub dimana peningkatan tersebut terus berlanjut sampai pada Tahun 2016 jumlah Klub Olah Raga menjadi 55 (lima puluh lima) klub. Adapun Klub Olah

Raga tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Buol yang terdiri dari 7 (tujuh) cabang olahraga yaitu: Sepak Bola, Bulu Tangkis, Bola Volli, Tenis Meja, Sepak Takraw, dan Futsal. Dari cabang olahraga tersebut tersedia prasarana dan sarana berupa gedung olahraga *indoor* baik yang dimiliki perseorangan, desa, Pemerintah Daerah, maupun Lembaga Pendidikan. Adapun untuk gedung olahraga dimasing – masing wilayah adalah sebagai berkut; 2 (dua) gedung di wilayah Kecamatan Biau yaitu 1 (satu) Gedung Stadion yang dimiliki pemerintah, 1 (satu) Gedung Bulutangkis milik perorangan, 1 (satu) Gedung Bulutangkis di Kecamatan Tiloan, 1 (satu) Gedung Bulutangkis di Kecamatan Bokat, 1 (satu) Gedung Bulutangkis di Kecamatan Bunobogu dan 1 (satu) Gedung Bulutangkis di Kecamatan Paleleh.

Adapun jumlah klub Olah Raga pada Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut; 5 (lima) klub di Kecamatan Lakea, 15 (lima belas) klub di Kecamatan Biau, 5 (lima) klub di Kecamatan Karamat, 5 (lima) klub di Kecamatan Momunu, 4 (empat) klub di Kecamatan Kecamatan Tiloan, 7 (tujuh) klub di Kecamatan Bokat, 3 (tiga) klub di Kecamatan Bukal, 3 (tiga) klub di Kecamatan Bunobogu, 4 (empat) klub di Kecamatan Gadung, 2 (dua) klub di Kecamatan Paleleh Barat dan 2 (dua) klub di Kecamatan Paleleh.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1 Fokus Urusan Layanan Wajib

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. SDM (Sumberdaya Manusia) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM

yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Tujuan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) memiliki dua fungsi. Pertama, membentuk anak indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perekmbanganya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar; kedua, tujuan penyerta, yaitu untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

Penididikan Anak Usia Dini adalah persentase perbandingan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak dengan jumlah anak usia 4 – 6 tahun.

Jumlah siswa anak usia dini di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.33, persentase PAUD disajikan pada Gambar 2.23.

Tabel 2.33
Jumlah Siswa Pendidikan Usia Dini
Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No	Uraian Data	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Siswa TK/PAUD	5.390	5.334	5.278	5.250	5.424

Sumber: Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas PendidikanDan Kebudayaan 2017

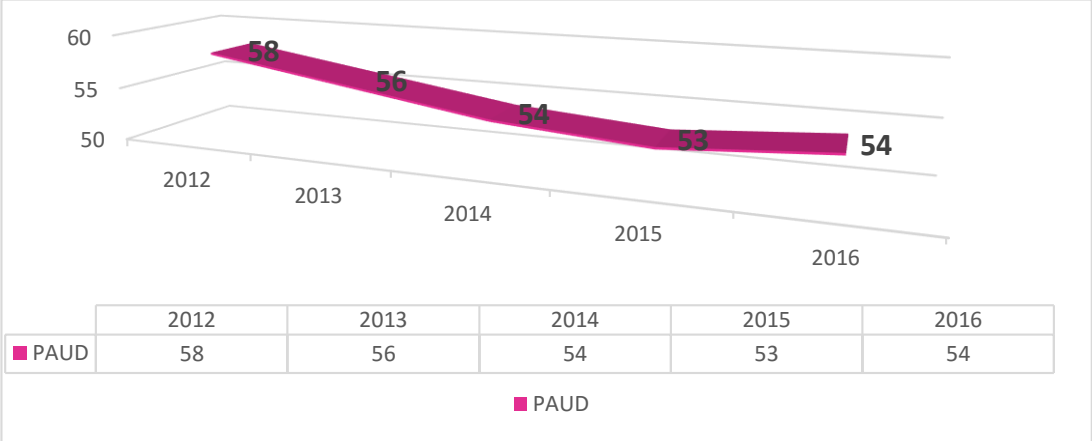

Sumber: Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2017

Gambar 2.23 Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan data pada Tabel 2.34 terlihat bahwa sejak Tahun 2012 hingga 2015 jumlah siswa PAUD terus mengalami penurunan. Tahun 2016 mengalami kenaikan sehingga persentase siswa PAUD dibandingan dengan jumlah anak usia 4 – 6 tahun seperti tersaji pada Gambar 2.23, Tahun 2012 sebesar 58 persen, Tahun 2013 sebesar 56 persen, Tahun 2014 sebesar 53 persen, dan Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 54 persen.

2) Angka Partisipasi Kasar

APK (Angka Partisipasi Kasar) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Untuk seluruh jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) menunjukan tren fluktuatif, sebagaimana tersaji pada Gambar 2.24.

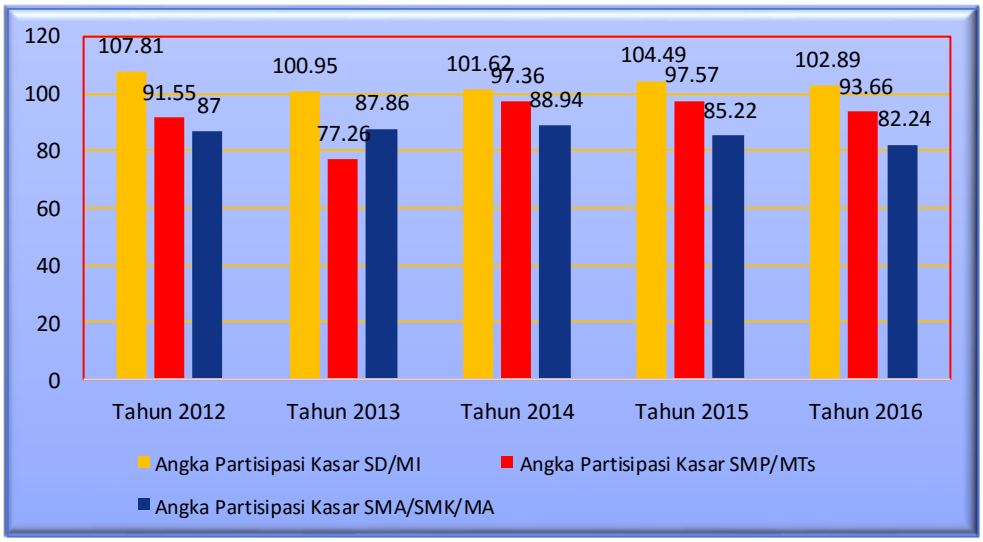

Sumber: SIPD Tahun 2016. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017

Gambar 2.24 APK (Perkembangan Angka Partisipasi Kasar) Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Gambar 2.24 mencerminkan bahwa, Angka Partisipasi Kasar penduduk Kabupaten Buol untuk seluruh jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) selama Tahun 2012-2016 cenderung berfluktuatif, dimana:

(1) APK SD/MI; 107,81 persen pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 100,95 persen di Tahun 2013, Tahun 2014 juga menurun menjadi 101,62 persen, Tahun 2015 naik lagi mencapai 104,49 persen sampai dengan Tahun 2016 menurun lagi menjadi 102,89 persen.

(2) APK untuk SMP/MTs; secara umum tren angka partisipasi kasar berflkutuatif, pada Tahun 2012 mencapai 91,55 persen kemudian menurun menjadi 77,26 persen Tahun 2013 dan terjadi peningkatan kembali Tahun 2014 menjadi 97,36 persen, Tahun 2015 naik menjadi 97,57 persen dan Tahun 2016 meningkat menjadi 93,66 persen. Data APK SMP/MTS selama 5 (lima) tahun menunjukan bahwa masih terdapat anak usia diatas dan bawah 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTS belum bersekolah sesuai dengan usia sekolah yang seharusnya.

(3) APK untuk SMA/SMK; dari 87 persen pada Tahun 2012, Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 87,86 persen, Tahun 2014 meningkat

menjadi 88,94 persen, Tahun 2015 menurun menjadi 85,22 persen dan Tahun 2016 menurun menjadi 82,24 persen.

3) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatakan adalah adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat /ijasah baik sekolah negeri maupun swasta.

Adapun tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2012 untuk tingkat SD mencapai 35,42 persen kemudian pada Tahun 2013 menurun menjadi 33,73 persen. Selanjutnya pada Tahun 2014 mencapai 33,20 persen dan pada Tahun 2015 naik menjadi 34,40 sementara pada Tahun 2016 mencapai 35, 20 persen. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat pada Tahun 2012 mencapai 18,44 persen kemudian meningkat mencapai 19,12 persen pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 terjadi peningkatan dengan capain 20,65 persen. Kondisi pada Tahun 2015 meningkat menjadi 20,95 persen dan pada Tahun 2016 peningkatan APT SMP sederajat mencapai 30 persen. Sementara untuk tingkat SMA sederajat tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Buol pada Tahun 2012 mencapai 15,9 persen naik mencapai 17,75 persen pada Tahun 2013, selanjutnya mencapai 17,86 pada Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 turun menjadi 17,40 kemudian naik lagi mencapai 17,57 persen pada Tahun 2016.

Untuk D1/D2/D3 pada Tahun 2012 mencapai 2,28 kemudian turun mecapai 1,40 pada Tahun 2013, kemudian naik mencapai 2,10 pada Tahun 2014, selanjutnya terjadi peningkatan capaian APT D1/D2/D3 dengan persentase sebesar 2,61 pada Tahun 2015 dan 2,70 pada Tahun 2016. Untuk tingkat Pendidikan S1-S3 pada Tahun 2012 mencapai 3,88 persen kemudian menurun menjadi 3,47 persen pada Tahun 2013 selanjutnya naik mencapai 4,91 persen pada Tahun 2014 dan turun kembali menjadi 4,75 persen pada Tahun 2015, sementara Tahun 2016 mencapai 4,80 persen.

4) Angka Partisipasi Murni

APM (Angka Partisipasi Murni) penduduk di Kabupaten Buol untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs cenderung menurun sedangkan untuk jenjang SMA/MA menunjukan tren meningkat, sebagaimana Gambar 2.25.

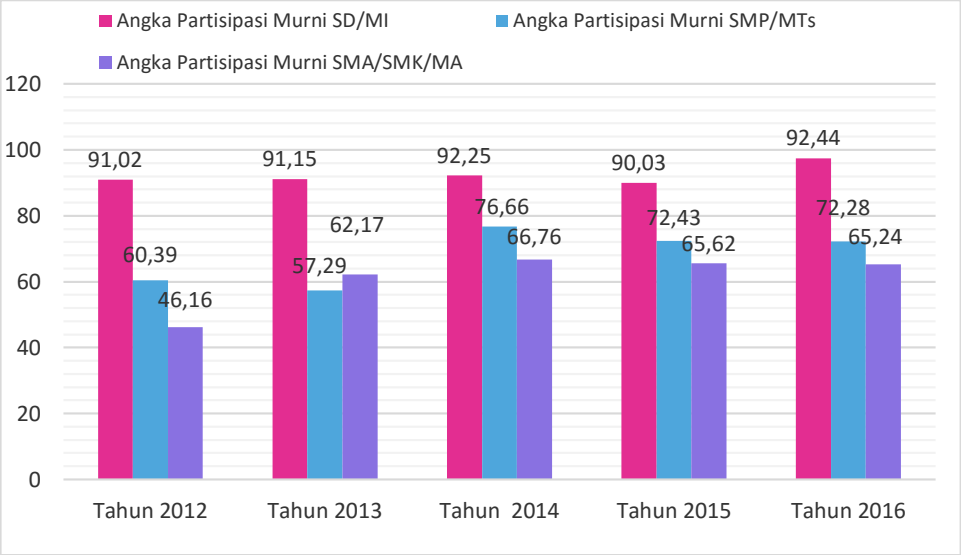

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017

Gambar 2.25 APM (Perkembangan Angka Partisipasi Murni) SD/MI, SMP/MTSn dan SMA/SMK/MA

Gambar 2.25 di atas menggambarkan bahwa Angka Partisipasi Murni Penduduk Kabupaten Buol untuk seluruh jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA) selama Tahun 2012-2016 cenderung meningkat, dimana:

(1) APM SD/MI; 91,02 persen pada Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 91,15 persen Tahun 2013, Tahun 2014 meningkat menjadi 92,25 persen, Tahun 2015 menurun menjadi 90,03 persen sedangkan Tahun 2016 naik menjadi 92,44 persen.

(2) APM untuk SMP/MTs; dari 60,39 persen pada Tahun 2012 menurun menjadi 57,29 persen pada tahun 2013, Tahun 2014 meningkat menjadi 76,66 persen, Tahun 2015 menurun menjadi 72,43 persen sedangkan pada Tahun 2016 menurun menjadi 72,28 persen.

(3) APM untuk SMA / SMK / MA; dari 46,16 persen pada Tahun 2012, Tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 62,67 persen, Tahun 2014 meningkat menjadi 66,76 persen, Tahun 2015 menurun menjadi 65,62

dan Tahun 2016 menjadi 65,24 persen.

Secara umum APM pada jenjang pendidikan SD/MI angka partisipasinya cukup tinggi demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sedangkan untuk tingkat SMA/SMK angka partisipasinya belum maksimal.

5) APS (Angka Partisipasi Sekolah)

a. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah.

Hasil analisis perkembangan APS Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.26.

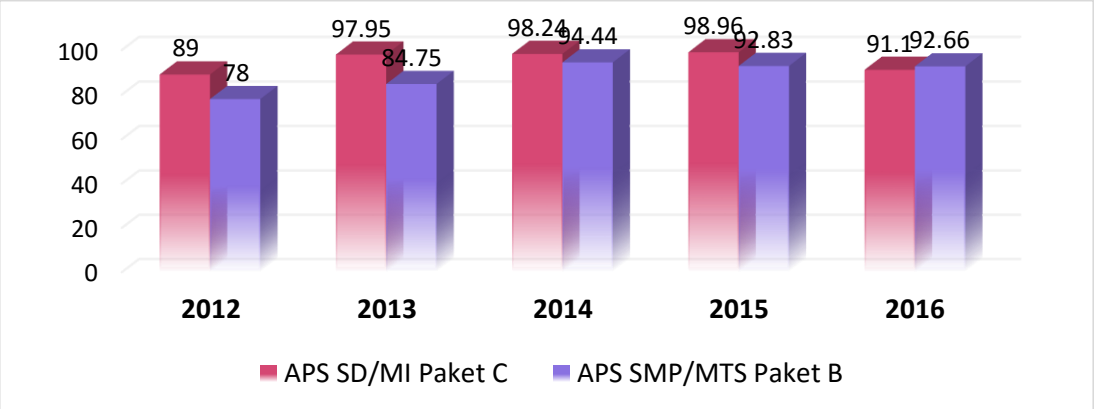

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buol 2017. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2017

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Gambar 2.26 menginformasikan bahwa APS untuk SD/MI Tahun 2012 sebesar 89 persen dan pada Tahun 2013 meningkat 97,95 persen dan pada Tahun 2014 mencapai 98,24 persen kemudian pada Tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 98,94 persen dan pada Tahun 2016 meningkat lagi mencapai 99,10 persen. Capaian ini menunjukan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah SD/MI hal ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan di sektor pendidikan walaupun masih terdapat 0,9 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum bersekolah.

Adapun untuk jenjang SMP/MTs APS pada Tahun 2012 adalah 78 persen dan mencapai 84,75 persen pada Tahun 2013. Tahun 2014 naik mencapai 94,44 persen kemudian terjadi penurunan 92,83 persen pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 terjadi penurunan menjadi 92,66 persen.

6) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah angka untuk menunjukan tingkat putus sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, berikut ini disajikan Angka Putus Sekolah Kabupaten Buol pada Tabel 2.34 berikut:

Tabel 2.34
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Buol
Jenjang Pendidikan SD/MI,SMP/MTS
Tahun 2012-2016

No.	Uraian Data		Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Angka Putus Sekolah						
	a.	SD/MI	0,52	0,51	0,54	0,45	0,49
	b.	SMP/MTs	0,56	0,57	0,58	1,01	0,56

Sumber : Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

(1) Angka Putus Sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI lebih banyak disebabkan oleh perpindahan orang tua siswa ke daerah lain, juga

disebabkan masih terdapatnya orang tua siswa yang tidak menekankan pentingnya pendidikan kepada anak, walaupun dari Dinas Pendidikan telah berusaha mendatangi langsung langsung orang tua siswa, sementara data siswa yang dimaksud telah terdata sebagai peserta UNAS (Ujian Nasional), selain itu juga terdapat siswa yang meninggal sebelum pelaksanaan UNAS.

(2) Semenara Angka Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs pada Tahun 2012 sebesar 0,56 persen, pada Tahun 2013 sebesar 0,57 persen, Tahun 2014 sebesar 0,58 persen, Tahun 2015 sebesar 1,1 persen dan pada Tahun 2016 sebesar 0,56 persen. Dengan demikian maka tingkat putus sekolah jenjang Pendidikan SMP/MTs Kabupaten Buol dalam setiap terus mengalami penurunan dan pada Tahun 2016 Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs.

7) Angka Kelulusan SD/MI-SMP/MTs

Angka lulus adalah satuan jumlah siswa yang dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian akhir pada tingkat pendidikan tertentu. Berikut ini disajikan rata - rata angka kelulusan siswa jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Angka Kelulusan SD/MI-SMP/MTs di Kabupaten Buol
Tahun 2012-2016

No.	Uraian Data	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Rata-rata Kelulusan (%)					
	a. SD/MI	98,54	98,60	98,50	98,68	97
	b. SMP/MTs	96,56	96,66	96,50	98,20	95

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017

Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan pada Tahun 2016. Hal ini terjadi karena peserta ujian pindah ke luar daerah dan meninggal dunia.

8) Angka Melanjutkan

AM (Angka Melanjutkan) dari SD/MI Ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka melanjutkan adalah satuan jumlah siswa yang dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan tertentu sebelumnya, kemudian melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari jenjang sebelumnya. Adapun angka melanjutkan pendidikan untuk siswa SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.36
Jumalah Angka Melanjutkan dari SD/MI Ke SMP/MTs dan SMP/MTS Ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No.	Uraian Data		Tahun Anggaran				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Angka Melanjutkan (%)						
	a.	SD/MI ke SMP/MTs	93	98	98	98	95
	b.	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93	95	95	95	98,20

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

9) Fasilitas Pendidikan

Adapun fasilitas pendidikan yang dimaksud adalah jumlah bangunan gedung sekolah yang dalam kondisi baik dalam pengertian dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut ini disajikan jumlah sekolah dari tingkat SD/MI sampai tingka SMA/SMK/MA di Kabupaten Buol, sebagaimana Gambar 2.27.

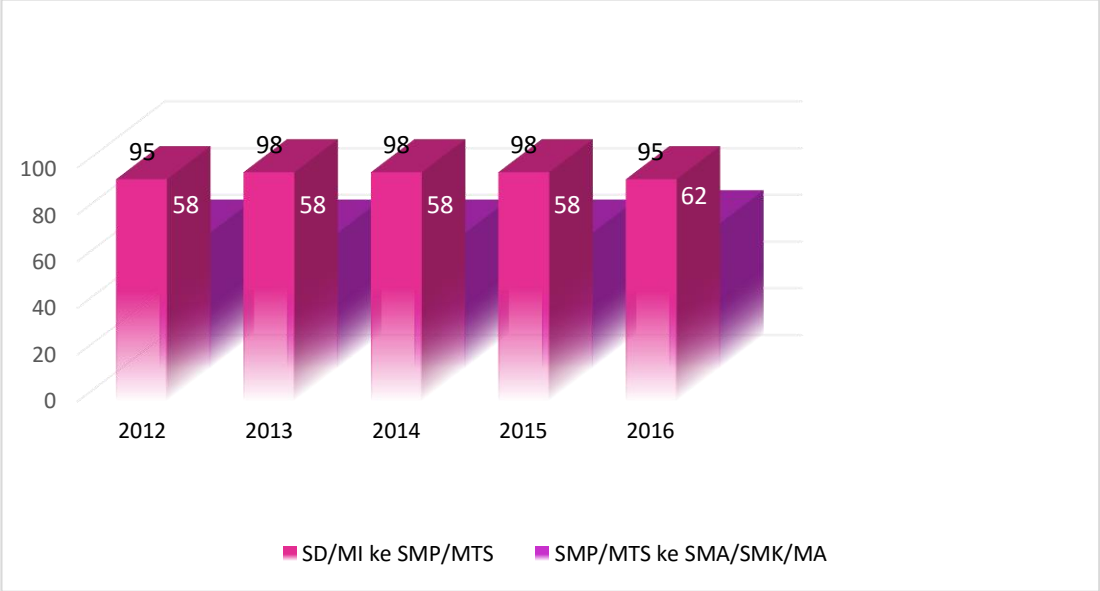

Sumber : SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.27 Bangunan Sekolah SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan data pada Gambar 2.27, dapat dilihat bahwa kondisi bangunan sekolah yang tersedia tidak mengalami peningkatan dari aspek jumlah bangunan, untuk SD/MI jumlah bangunan yang baik sebanyak pada Tahun 2012 sebanyak 93 persen, Tahun 2013 sebanyak 98 persen, Tahun 2014 sebanyak 98 persen, Tahun 2015 sebanyak 98 persen dan Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 95 persen. Untuk bangunan SMP/ MTs secara keseluruhan jumlah bangunan dalam kondisi baik Tahun 2012 hingga Tahun 2015 sebanyak 58 persen, dan mengalami kenaikan pada Tahun 2016 menjadi sebanyak 62 persen.

10) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

a. Pendidikan Dasar

Ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah gedung sekolah SD/MI, SMP/MTs	235	243	274	255	254
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun	27.245	27.869	28.512	29.425	28.746
3.	Rasio	86,25	87,19	96,10	86,66	88,36

Sumber : SIPD Kabupaten Buol 2016, Agregat Kependudukan Disdukcapil 2016, Kabupaten Buol dalam Angka 2015, Proyeksi BPS 2017

Berdasarkan data pada Tabel 2.37, Tahun 2012 rasio ketersediaan gedung sekolah pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs mencapai 86,25, Tahun 2013 mencapai sebesar 87,19, Tahun 2014 rasio ketersediaan gedung sekolah pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah mengalami peningkatan menjadi 96,10, Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 86,66 dan pada Tahun 2016 naik lagi menjadi 88,36.

b. Pendidikan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menegah.

Data mengenai Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Buol terdapat pada Tabel 2.38.

Tabel 2.38
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah gedung sekolah	20	16	16	23	23
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.105	5.283	5.550	8.459	11.187
3.	Rasio Per 10.000 Penduduk	32,76	30,29	28,83	27,19	20,56

Sumber : Data Agregat Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.38, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia menengah di Kabupaten Buol Tahun 2012 sebesar 32,76, Tahun 2013 sebesar 30,29, Tahun 2014 sebesar 28,83, Tahun 2015 sebesar 27,19 dan Tahun 2016 sebesar 20,56. Penurunan jterus terjadi setiap tahun karena pertumbuhan jumlah siswa menengah lebih besar daripada jumlah penambahan bangunan sekolah yang baru.

11) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kabupaten Buol, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid Se-Kabupaten Buol disajikan dalam Tabel 2.39 berikut:

Tabel 2.39
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol

Jenjang Pendidikan Dasar	Tahun									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
SD/MI	1.429	25.164	1.643	24.385	1.580	24.923	1.713	22.197	1.578	21.213
SMP/MTs	628	9.192	735	15.516	860	8.035	771	9.969	524	10.453
Total	2.057	34.356	2.378	39.901	2.440	32.958	2.484	32.166	2.102	31.666
Rasio	599		596		740		772		664	

Sumber : SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.39 terlihat bahwa untuk 10.000 murid sekolah pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs tersedia guru pada Tahun 2012 sebanyak 599; Tahun 2013 sebanyak 596; Tahun 2014 sebanyak 740; Tahun 2015 sebanyak 772; dan Tahun 2016 sebanyak 664.

12) Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Data mengenai Rasio Guru terhadap murid pada semua sekolah di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.40:

Tabel 2.40
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol

No	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Guru	301	427	585	592	597
2	Jumlah Siswa	5.283	7.612	5.244	6.476	4.746
3	Rasio	570	561	1.116	914	1.258

Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan pada Tabel 2.40 menunjukkan bahwa untuk 10.000 murid sekolah pendidikan menengah SMA/SMK/MA Tahun 2012 tersedia guru

sebanyak 570; Tahun 2013 sebanyak 561; Tahun 2014 sebanyak 1.116; Tahun 2015 sebanyak 914; dan Tahun 2016 sebanyak 1.258. hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buol masih sangat membutuhkan tambahan guru sekolah menengah.

13) Angka Melek Huruf Pendudik Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – laki

Melek huruf atau melek aksara adalah kemampuan membaca dan menulis huruf latin, jika diartikan secara luas, melek huruf/ aksara adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dan mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkanya dalam bentuk tulisan dan berbicara. Adapun perkembangan AMH (Angka Melek Huruf) penduduk usia 15 sampai 24 tahun seperti Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	23.099	23.801	24.646	25.070	25.090
2	Jumlah Penduduk Usia 15 - 24 Tahun	24.153	24.702	25.274	25.814	25.814
3	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun	95,64	96,35	97,51	97,12	97,20

Sumber : Statisitik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buol 2017

Berdasarakan Tabel 2.41 dapat dilihat bahwa perkembangan AMH (Angka Melek Huruf Penduduk) Kabupaten Buol cukup fluktuatif, pada Tahun 2012 sebesar 95,64 Tahun 2013 sebesar 96,35 Tahun 2014 naik menjadi 97,51 Tahun 2015 turun hingga pada angka sebesar 97,12 Tahun 2016 naik menjadi 97,20.

14) Penduduk yang Berusia Diatas 15 Tahun Melek Huruf (Tidak

buta Aksara)

Penduduk yang berusia diatas 15 Tahun melek huruf adalah jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf Se-Kabupaten Buol dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf Se–Kabupaten Buol. Data dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut:

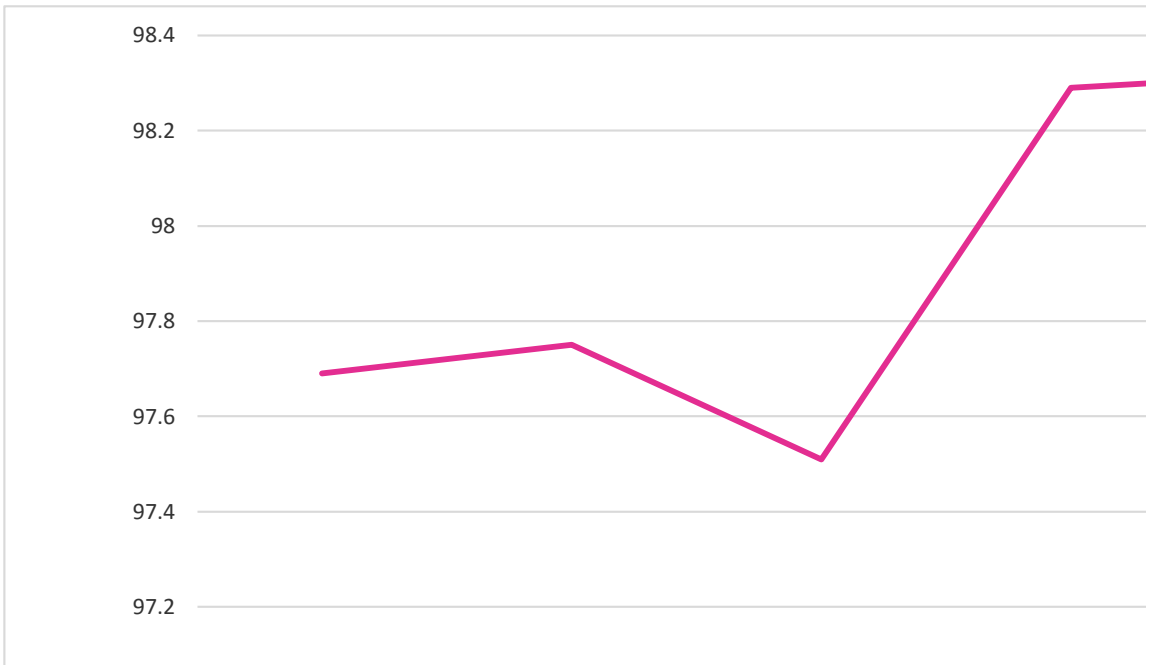

Sumber : Dinas Pendidikan kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.28 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun Tahun 2012-2016 Kabupaten Buol

Gambar 2.28 menunjukkan bahwa Tahun 2012 sebesar 97,69 Tahun 2013 sebesar 97,75 Tahun 2014 sebesar 97,51 Tahun 2015 naik menjadi 98,29 dan Tahun 2016 naik kembali menjadi 98,32.

15) Guru yang memenuhi Kualifikasi SI/D-IV

Peningkatan kompotensi guru menjadi salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilan sektor pendidikan, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan belajar/mengajar dimasa era teknologi sekarang ini telah mengalami pergeseran paradigma jika bandingkan dengan sepuluh tahun

yang lalu, dengan demikian maka peningkatan kemampuan guru idealnya harus sejalan dengan perkembangan zaman. Maka menjadi wajib hukumnya untuk setiap guru untuk dapat meningkatkan pendidikan ke jenjang SI/DIV bagi guru yang belum mencapai jenjang pendidikan tersebut, tentunya harus relevan dengan fungsi-fungsi sebagai tenaga pengajar baik guru kelas ataupun guru mata pelajaran.

Berikut ini perkembangan pendidikan guru Kabupaten Buol yang disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Guru yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Buol
Tahun 2012-2016

No	Uraian	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Kualifikasi S1/D4/Guru TK,SD/MI,SMP/MTs dan SMA/SMK/SMA					
1	Guru SD/MI	651	735	760	829	841
2	Guru SMP/MTs	411	433	491	503	507
3	Guru SMA/MA/SMK	259	297	347	362	393
4	Total Guru yang Memiliki Kuailifikasi S1/D-IV	1.321	1.465	1.598	1.694	1.741
5	Total Jumlah Guru	1.989	2.043	2.491	2.545	2.709
6	Guru yang Memiliki Kualifikasi S1/D-IV	66,42	71,71	64,15	66,56	64,27

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Buol 2013 s/d 2017

Berdasarkan Tabel 2.42 menunjukkan guru yang memiliki kualifikasi SI/D-IV pada Tahun 2012 sebesar 66,42 persen dari jumlah guru 1.989, Tahun 2013 sebesar 71,71 persen dari total 2.043 orang guru, Tahun 2014 sebesar 64,15 persen dari total 2.491 orang guru, Tahun 2015 naik menjadi sebesar 66,56 persen dari total 2.545 orang guru, dan Tahun 2016 sebesar 64,27 persen dari Total 2.709 orang guru.

2. Kesehatan

1) Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

AKB (Angka Kematian Bayi) per 1.000 Kelahiran Hidup menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan. Terdapat perbedaan antara kematian *Neo-Natal* dan kematian bayi yang lain. Karena kematian *Neo-Natal* disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian *Neo-Natal* adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dapat dilihat pada Gambar 2.29.

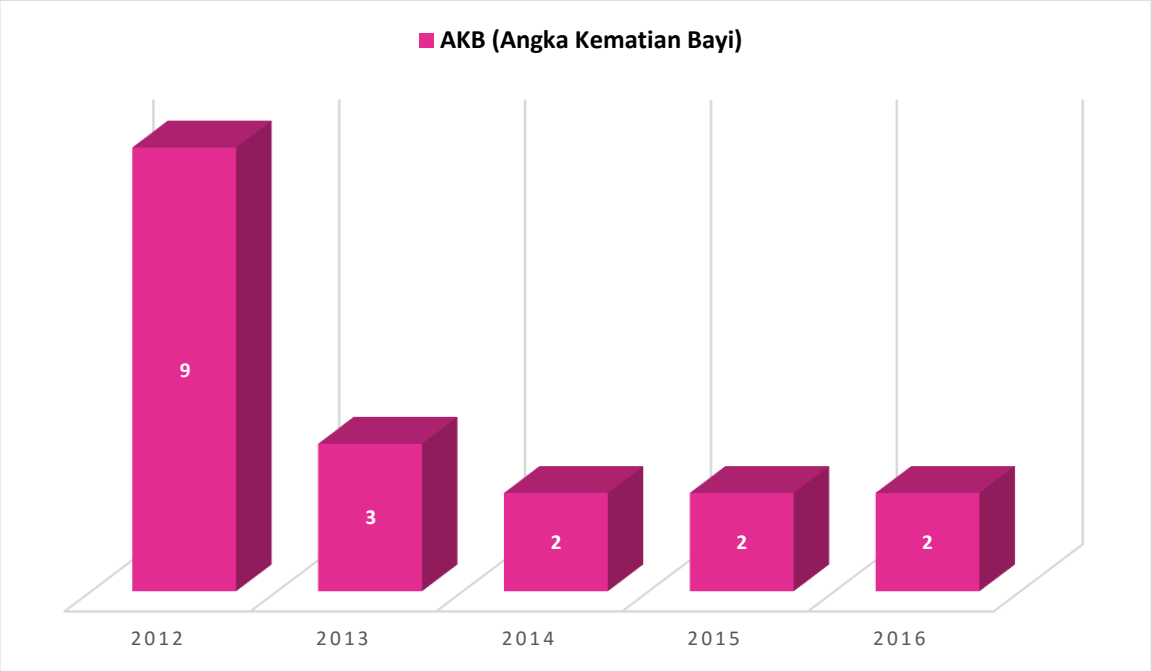

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Dari Gambar 2.29 terlihat bahwa AKB (Angka Kematian Bayi) di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 mengalami penurunan. Pada Tahun 2012 angka kematian Bayi dari dari 9 jiwa turun menjadi 2 jiwa hingga

Tahun 2016. Hal ini berarti semakin berkurang jumlah kematian bayi terjadi di Kabupaten Buol hingga Tahun 2016.

2) Angka Kelangsungan Hidup Bayi

AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 (Satu) Tahun. Data mengenai Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Buol terdapat pada Gambar 2.30.

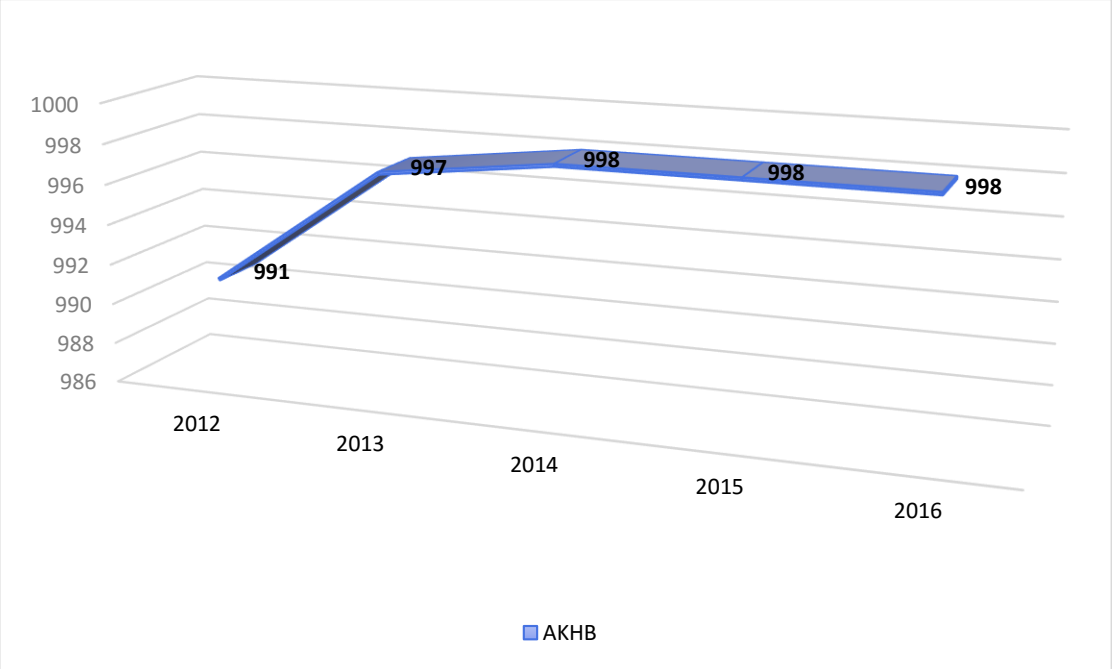

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.30 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2012 - 2016

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Buol menunjukkan tren yang cukup baik sepanjang Tahun 2012-2016. Tahun 2012 angka kelangsungan hidup bayi sebesar 991 bayi per 1.000 kelahiran hidup, naik menjadi 997 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Pada Tahun 2014 - 2016 meningkat lagi menjadi 998 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Dari data tersebut diatas terkait angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Buol makin meningkat, hal ini berarti frekuensi pelayanan antenatal sesuai dengan standar yang ada, disamping itu juga sebagian besar ibu bersalin di tangani oleh tenaga kesehatan.

3) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia sejak dini. Rasio per satuan balita diperoleh dari jumlah posyandu dibagi jumlah balita kali 1000. Data mengenai keadaan rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Buol terdapat pada Gambar 2.31.

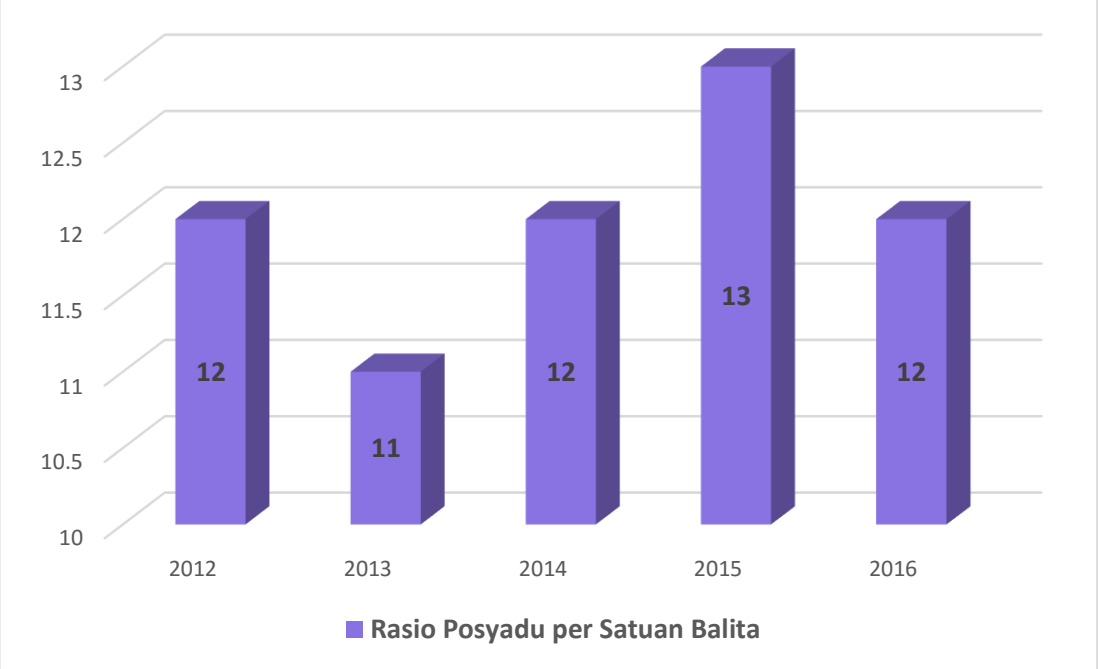

**) Balita Usia 12 – 59 Bulan*
Sumber: Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.31 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Gambar 2.31 tersebut di atas Rasio Posyandu per 1.000 Balita menunjukkan tren angka yang fluktuatif. Pada Tahun 2012 rasio posyandu sebesar 12 per 1.000 balita, Tahun 2013 menurun menjadi 11 posyandu per 1.000 balita. Tahun 2014-2015 naik menjadi 13 posyandu per 1.000 balita, dan Tahun 2016 kembali turun menjadi 12 posyandu per 1.000 balita. Data tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan posyandu per

1.000 balita di Kabupaten Buol sudah memenuhi standar, dimana idealnya satu posyandu melayani 100 Balita. Hanya saja perlu adanya pemerataan penyebaran jumlah posyandu berdasarkan jumlah balita di tiap wilayah, selain itu juga Pembentukan Posyandu baru sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

4) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk

Rasio sarana kesehatan memberikan data tentang aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu dibagi jumlah penduduk kali 1000. Rasio sarana kesehatan di Kabupaten Buol menunjukan angka yang fluktuatif selama 5 (Lima) Tahun terakhir. Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Tahun 2012 sebesar 0,56 per 1.000 penduduk, meningkat menjadi 0,65 per 1.000 penduduk Tahun 2013 dan meningkat kembali pada Tahun 2014 sebesar 0,68 per 1.000 penduduk. Pada Tahun 2015 menurun menjadi 0,60 per 1.000 penduduk dan pada Tahun 2016 menjadi 0,57 per 1.000 penduduk, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Buol

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Puskesmas	11	11	11	11	11
2.	Jumlah Poliklinik	1	1	2	3	3
3.	Jumlah Pustu	56	56	56	56	56
4.	Jumlah Penduduk	134.776	137.479	142.585	149.004	152.296
5.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan penduduk	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Berdasarkan Tabel 2.43 di atas, menunjukkan jumlah Puskesmas, Pustu dan Poliklinik menurut Kecamatan pada Tahun 2016, untuk setiap kecamatan memiliki 1 (satu) puskesmas, sedangkan pustu tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dengan jumlah yang berbeda-beda dan untuk poliklinik hanya ada di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Biau sebanyak 3 (tiga), dan Kecamatan Bokat sebanyak 1 (satu) sebagaimana terlihat pada Tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Buol

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1	*2*	*3*	*4*	*5=4/3*	*6*	*7=6/3*	*8*	*9=8/3*
1.	Biau	31729	1	0	3	0		0
2.	Momunu	15963	1	0	-	-	6	0.001
3.	Tiloan	11458	1	0	-	-	6	0.001
4.	Karamat	9547	1	0	-	-	2	0
5.	Lakea	10870	1	0	-	-	3	0
6.	Bukal	15520	1	0	-	-	10	0.001
7.	Bokat	14804	1	0	1	0	6	0
8.	Bunobogu	10144	1	0	-	-	5	0
9.	Gadung	13048	1	0	-	-	6	0.001
10.	Paleleh Barat	6187	1	0	-	-	3	0.001
11.	Paleleh	13026	1	0	-	-	5	0.001
Jumlah		**152.296**	**11**	**0**	**4**	**0**	**56**	**0.001**

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.44 menggambarkan masih kurangnya sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar di Kabupaten Buol khususnya Pustu, baiknya pustu berada di setiap desa yang ada di Kecamatan, karena pustu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya secara cepat.

5) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen

menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk menunjukan tren penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tanpa adanya penambanhan jumlah Rumah Sakit. Tahun 2012 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk sebesar 0,0074, menurun menjadi 0,0066 pada Tahun 2016, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Buol

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit					
6.	Jumlah Penduduk	134.776	137.479	142.585	149.004	152.296
7.	Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	0,0074	0,0073	0,0070	0,0067	0,0066

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

6) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk

yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Rasio dokter per 1.000 penduduk di Kabupaten Buol merupakan gabungan antara Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 5 (lima) Tahun terakhir, Tahun 2012 rasio dokter per 1.000 penduduk sebesar 0,193, naik menjadi 0,225 Tahun 2013, pada Tahun 2014 menurun menjadi 0,161 sampai 0,087 Tahun 2015 dan 0,098 Tahun 2016, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.32:

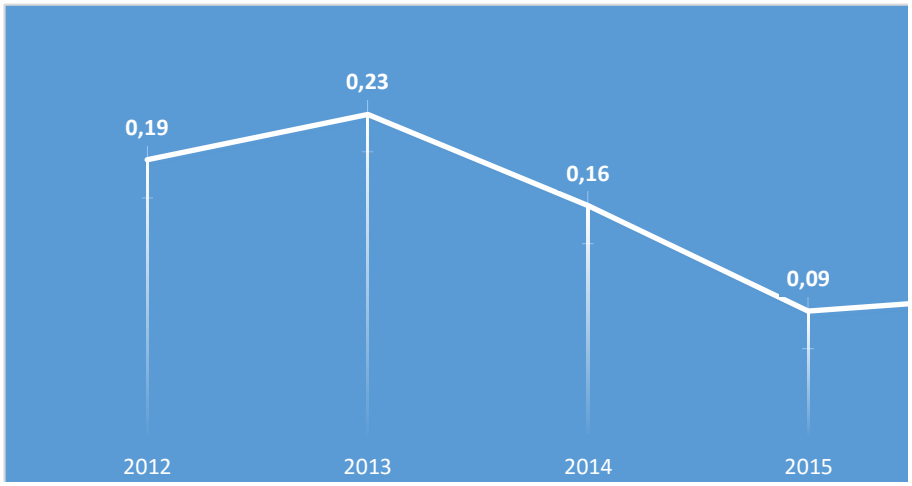

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Periode 2013 s/d 2017

Gambar 2.32 Rasio Dokter per 1.000 Penduduk Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Buol

Berdasarkan Gambar 2.32, jumlah dokter per Kecamatan Tahun 2016 sebanyak 15 tenaga Dokter yang terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Buol. Jumlah Dokter menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Buol
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter*
1	*2*	*3*	*4*
1.	Biau	31.729	10
2.	Momunu	15963	2
3.	Tiloan	11.458	0
4.	Karamat	9.547	0
5.	Lakea	10.870	0
6.	Bukal	15.520	0
7.	Bokat	14.804	2
1.	Bunobogu	10.144	1
2.	Gadung	13.048	0
3.	Paleleh Barat	6.187	0
4.	Paleleh	13.026	0
	Jumlah	**152.296**	**15**

*) Merupakan gabungan antara Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.46 memperlihatkan jumlah kebutuhan dokter untuk setiap kecamatan hingga Tahun 2016 belum mencukupi, dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada, hanya 4 (empat) Kecamatan yang memiliki tenaga dokter di pusat kesehatan masyarakat sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya belum memiliki tenaga dokter di pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Disamping itu, jumlah Dokter yang ada belum memenuhi standar pelayanan kesehatan terpadu.

7) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 menunjukan penurunan jumlah tenaga medis. Tahun 2012 rasio tenaga medis per 1.000 penduduk sebesar 5 tenaga medis, menurun menjadi 4 tenaga medis per 1.000 penduduk sampai Tahun 2016. Rasio tenaga medis per satuan penduduk disajikan pada Gambar 2.33 berikut:

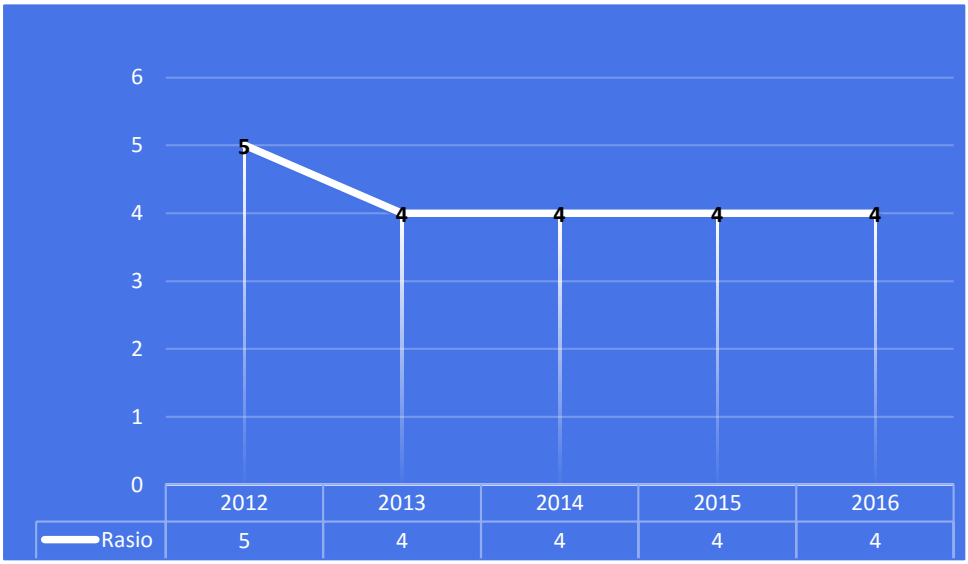

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.33 Jumlah Tenaga Medis Tahun di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Gambar 2.33 tersebut di atas, menunjukkan bahwa rasio tenaga medis per satuan penduduk masih sangat tinggi sehingga masih dibutuhkan penambahan tenaga medis. Penting adanya pemerataan tenaga medis sesuai dengan jumlah penduduk agar tidak terjadi kesenjangan pelayanaan kesehatan.

8) Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sepanjang Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut:

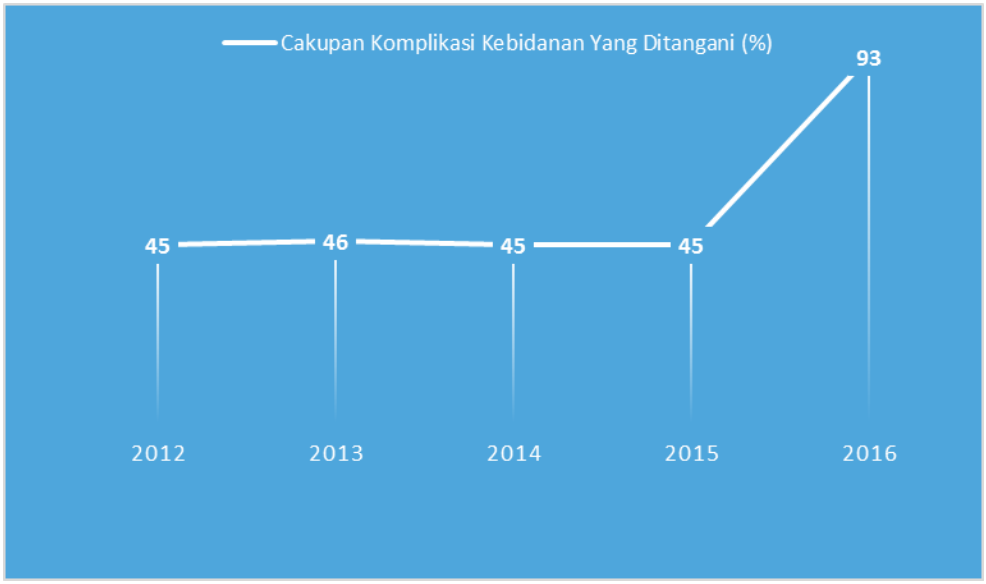

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.34 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.34 memperlihatkan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 memiliki nilai yang fluktuatif. Tahun 2012 persentase komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar yaitu 45 persen, meningkat menjadi sebesar 46 persen di Tahun 2013. Tahun 2014-2015 persentase komplikasi kebinanan yang ditangani turun menjadi sebesar 45 persen. Tahun 2016 terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 93 persen. Hasil capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah yang signifikan dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kehamilan seperti kesakitan pada ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi dapat ditangani.

9) Cakupan Desa/Kelurahan UCI (*Universal Child Immunization)*

Indikator keberhasilan program imunisasi dikatakan berhasil jika cakupan target imunisasi mencapai target *UCI* (*Universal Child Imunization*) untuk setiap desa/kelurahan. Cakupan jumlah Desa/Kelurahan UCI dapat disajikan pada Gambar 2.35 berikut:

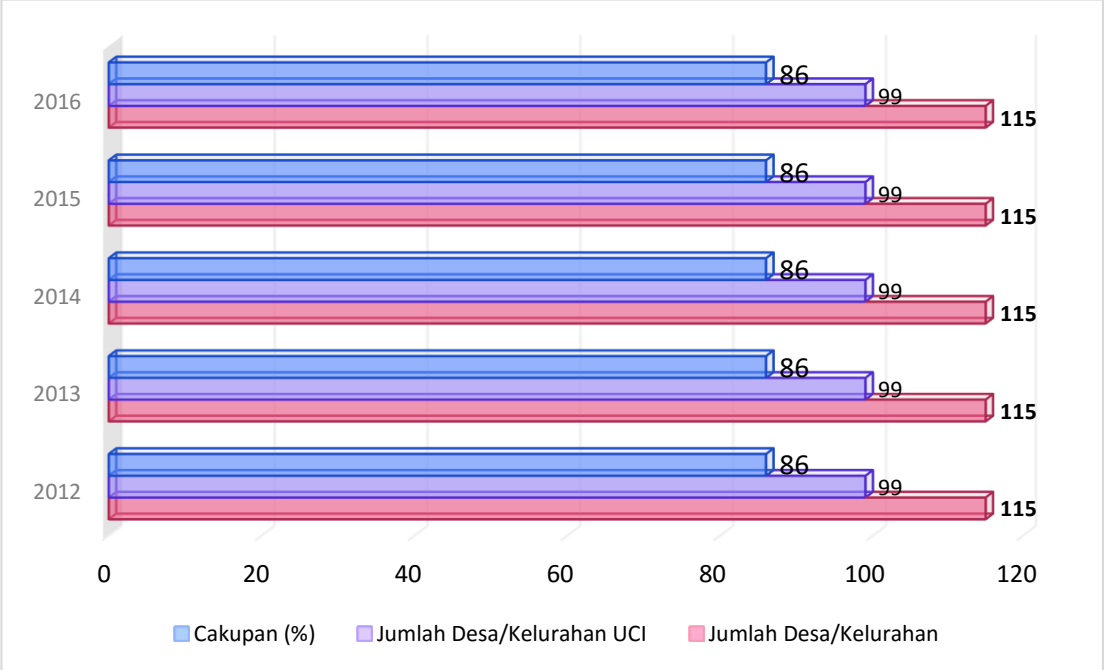

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.35 Cakupan Jumlah Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Buol Periode 2012-2016

Gambar 2.35 menyajikan cakupan desa/kelurahan UCI sepanjang Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol menunjukkan tren angka yang stagnan. Tahun 2012-2016 cakupan desa/kelurahan UCI sebesar 86 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa belum secara keseluruhan Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Buol mencapai cakupan Desa/Kelurahan UCI (100 persen), artinya belum secara keseluruhan bayi di wilayah kerja puskesmas Kabupaten Buol mendapat 5 (lima) pelayanan imunisasi dasar secara lengkap dan tepat waktu.

10) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.36 berikut:

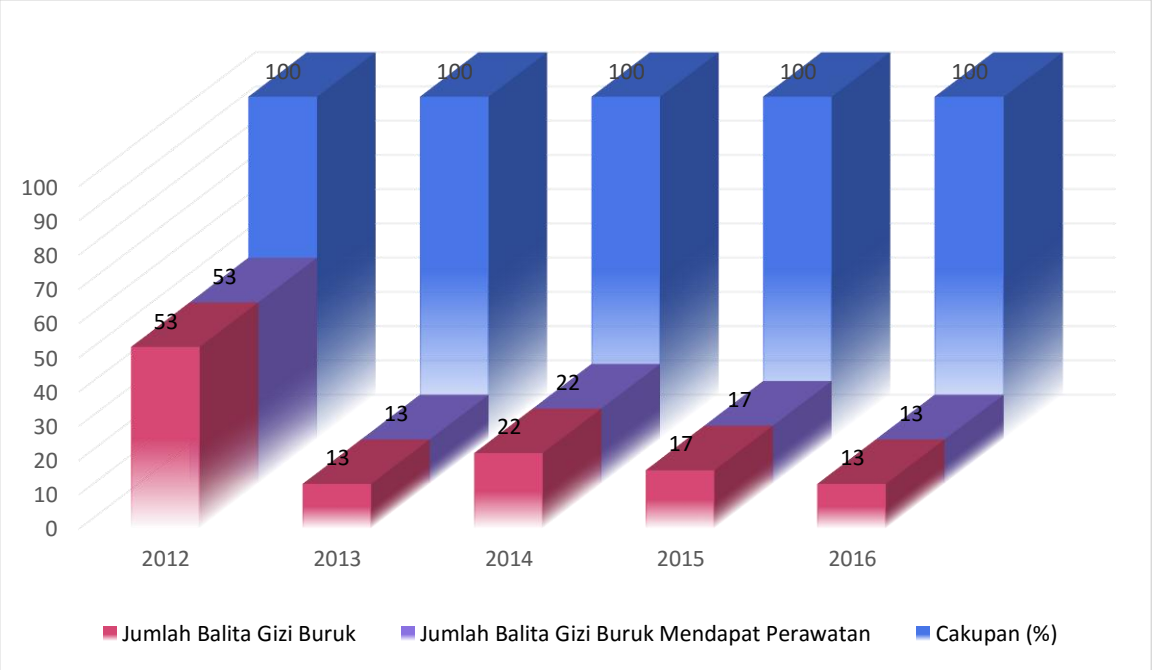

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol 2013 s/d 2017

Gambar 2.36 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Gambar 2.36 di atas, cakupan balita gizi buruk yang pernah ditemukan di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 secara keseluruhan mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Buol.

11) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA merupakan jumlah penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 (satu) Tahun. Perkiraan penderita baru TBC BTA positif dalam kurun waktu yang sama di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.37 berikut:

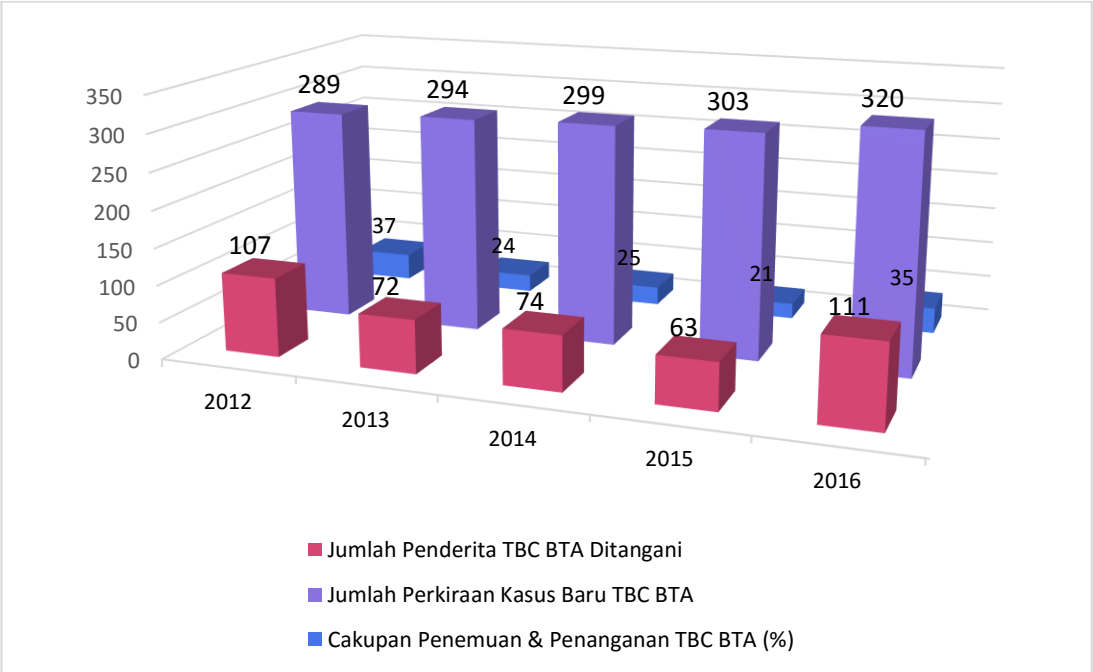

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.37 Cakupan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Gambar 2.37 menunjukkan peningkatan tren angka fluktuatif mengenai persentase cakupan penemuan penyakit TBC BTA di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016. Tahun 2012 sebesar dari 37 persen turun menjadi 24 persen di Tahun 2013. Pada tahun 2014 naik menjadi 25 persen, kemudian turun 21 persen di Tahun 2015. Pada Tahun 2016 kembali naik menjadi 35 persen. Artinya, sepanjang Tahun 2012-2016 penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA di Kabupaten Buol masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TBC BTA, namun secara keseluruhan dari penderita TBC BTA mendapatkan penanganan sesuai standar pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Buol.

12) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD merupakan jumlah penyakit DBD yang ditangani sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) di satu wilayah kerja selama 1 (satu) tahun, dan jumlah DBD yang ditemukan di

1 (satu) wilayah dalam kurun waktu yang sama. Persentase cakupan tersebut disajikan pada Gambar 2.38.

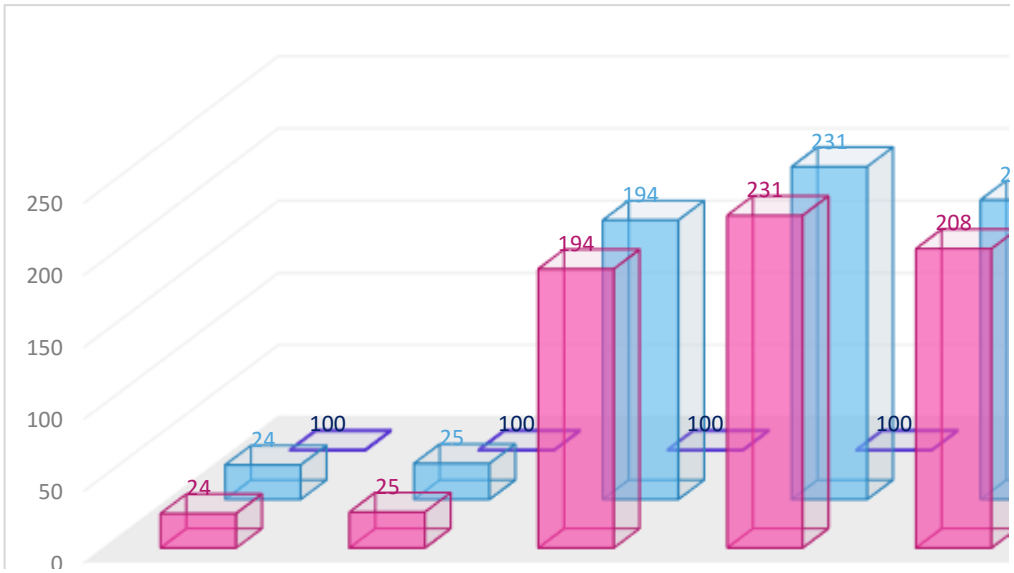

Sumber : Data Profil Kesehatan Kab. Buol 2013 s/d 2017 (Data diolah kembali)

Gambar 2.38 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Gambar 2.38 menunjukkan tren cakupan penemuan penderita penyakit DBD sepanjang Tahun 2012-2016 di Kabupeten Buol berfluktuatif. Tahun 2012 penderita penyakit DBD sebanyak 24 kasus, terjadi peningkatan di Tahun 2013 sebanyak 25 kasus. Tahun 2014-2015 penderita penyakit DBD meningkat cukup signifikan sebanyak 231 kasus. Tahun 2016 penderita penyakit DBD turun menjadi 208 kasus. Penemuan kasus penderita DBD tersebut secara keseluruhan dapat tertangani sesuai SOP pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Buol. Dengan kata lain bahwa secara keseluruhan kasus DBD yang terjadi dapat ditangani sesuai standar operasional prosedur.

13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan Strata 1 dibagi

dengan jumlah pasien masyarakat miskin di Kabupaten Buol kali seratus persen. Cakupan pelayanan tersebut disajikan pada Gambar 2.39.

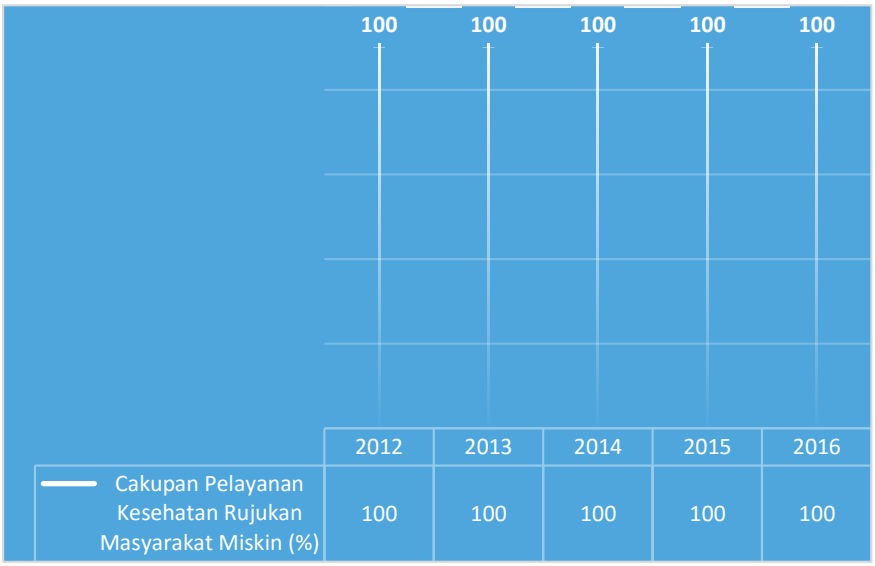

Sumber : Data Profil Kesehatan Kab. Buol Tahun 2013 s/d 2017 (Data diolah kembali)

Gambar 2.39 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.39 memperlihatkan persentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 sebesar 100 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat miskin yang daatng ke sarana kesehatan semuanya tertangani.

14) Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali seratus. Persentase cakupan kunjungan bayi disajikan pada Gambar 2.40 berikut:

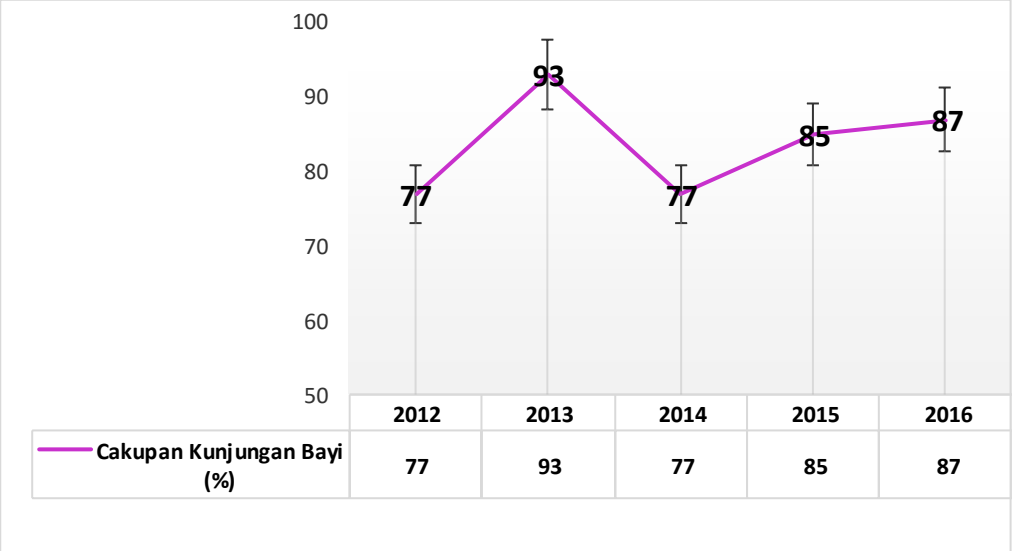

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.40 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.40 memperlihatkan persentase cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga 2016 fluktuatif. Tahun 2012 sebesar 77 persen, Tahun 2103 naik menjadi 93 persen, Tahun 2014 turun menjadi 77 persen. Sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 85 persen dan Tahun 2016 sebesar 87 persen.

15) Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas adalah jumlah puskesmas dibagi jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Buol di kali seratus. Cakupan puskesmas terhadap kecamatan menunjukan angka yang relatif stabil selama periode 5 (lima) tahun terakhir, dimana cakupan puskesmas sebesar 100 persen yang berarti di setiap kecamatan telah terdapat Puskesmas sampai Tahun 2016, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.41 berikut:

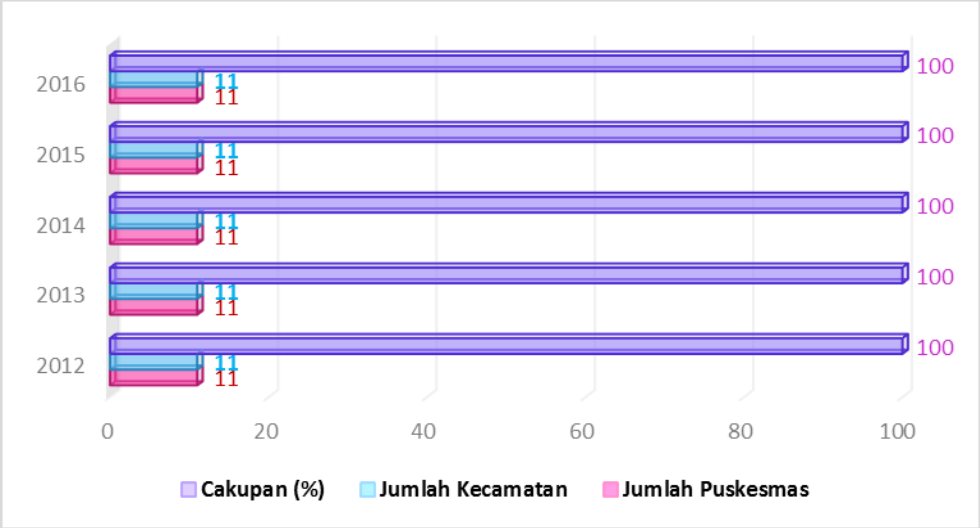

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.41 Cakupan Puskesmas Terhadap Kecamatan di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.41 memperlihatkan data cakupan puskesmas terhadap kecamatan sepanjang Tahun 2012-2016 adalah sebesar 100 persen. Artinya, secara keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Buol sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar pratama.

16) Cakupan Pembantu Puskesmas

Puskesmas Pembantu adalah jumlah seluruh puskesmas dibagi jumlah seluruh Kecamatan di Kabupaten Buol di kali seratus. Cakupan puskesmas pembantu terhadap desa sepanjang Tahun 2012-2016 belum memberikan peningkatan jumlah yang signifikan. Tahun 2012-2015 cakupan puskesmas pembantu sebesar 55 dari 115 desa yang ada, kemudian naik menjadi 56 pustu, seperti tersaji pada Gambar 2.42 berikut:

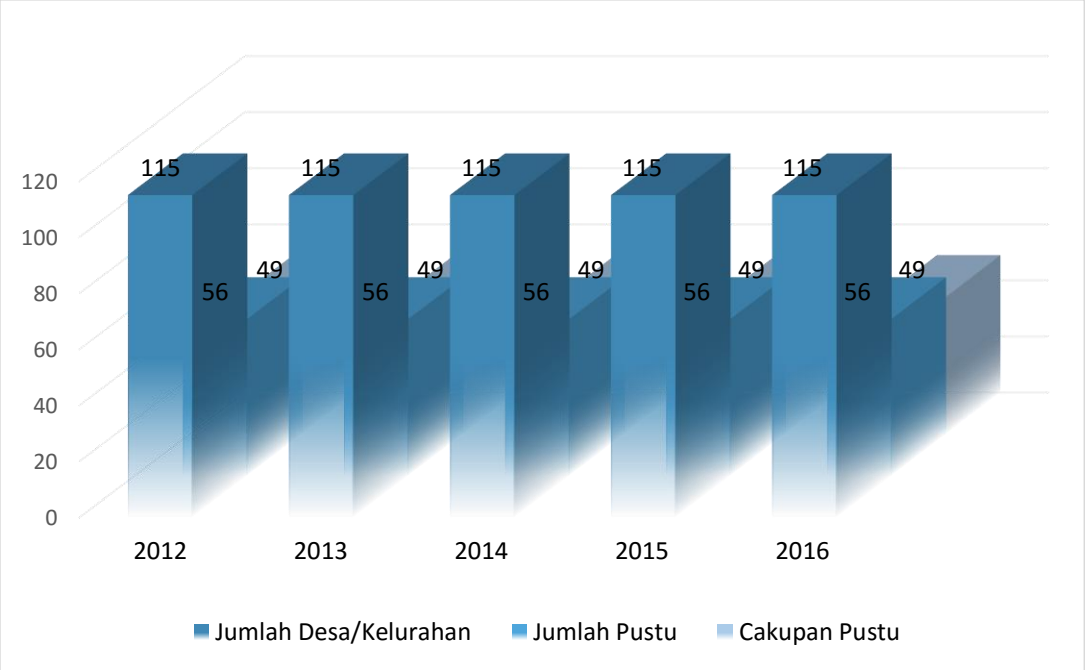

Sumber: Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.42 Cakupan Puskesmas Pembantu Terhadap Desa Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.41 tidak menunjukkan tren peningkatan cakupan puskesmas pembantu sepanjang Tahun 2012-2016 yaitu 46%. Perlu ada penambahan puskesmas pembantu, karena jumlah puskesmas pembantu yang ada sebesar 56 pustu belum mencakup jumlah Desa/Kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Buol sebesar 115 Desa/Kelurahan.

17) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 adalah jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu wilayah kerja pada waktu tertentu dibagi jumlah sasaran Ibu hamil di suatu wilayah dikali seratus persen. Persentase cakupan kunjungan Ibu hamil sepanjang Tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.43.

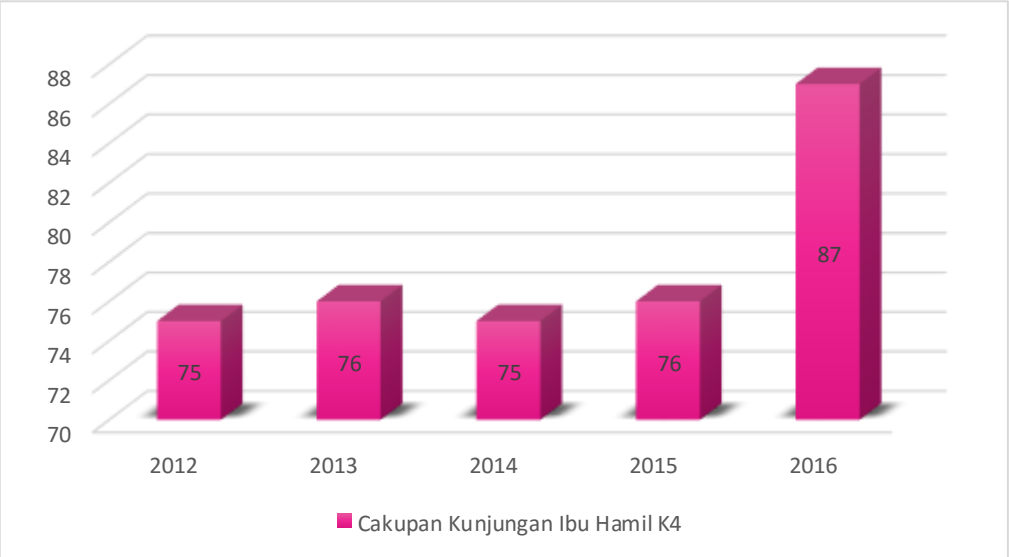

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017.

Gambar 2.43 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.43, dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan ibu hamil K4 sepanjang Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari 75 persen pada Tahun 2012 menjadi sebesar 87 persen di Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga kesehatan Ibu pada masa kehamilan sekaligus upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian Ibu di Kabupaten Buol semakin baik.

18) Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 (tiga) kali pelayanan nifas sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah seluruh Ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di kali seratus persen. Cakupan pelayanan nifas sepanjang Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol dapat disajikan pada Gambar 2.44.

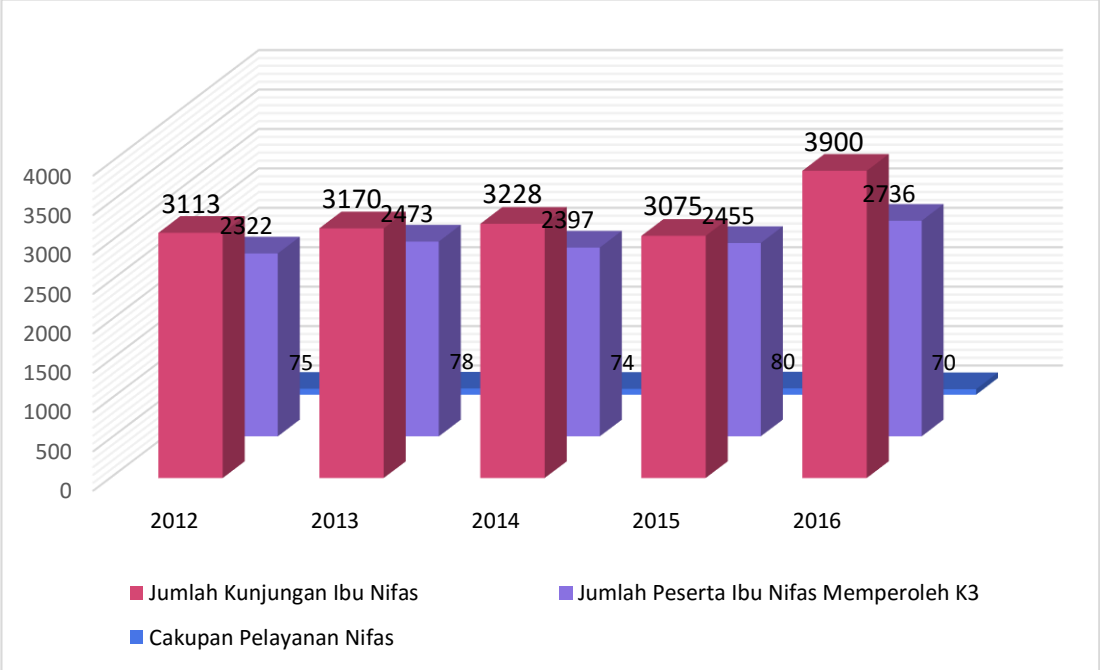

Sumber: Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2016 (Data diolah)

Gambar 2.44 Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.44, cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 berfluktuasi. Tahun 2012-2013 ibu nifas yang mendapat pelayanan sebesar 78 persen dari total jumlah ibu nifas, di Tahun 2014 jumlah Ibu nifas yang mendapat turun menjadi 74 persen. Tahun 2015 pelayanan pada Ibu nifas menjadi 78 persen, dan Tahun 2016 ibu nifas yang terlayani meningkat lagi menjadi sebesar 83 persen dari total jumlah ibu nifas di Kabupaten Buol. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan sesuai standar pada Ibu mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan sampai akhir Tahun 2016 sudah semakin baik.

19) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS adalah jumlah pasien HIV/AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 seperti pada Gambar 2.45.

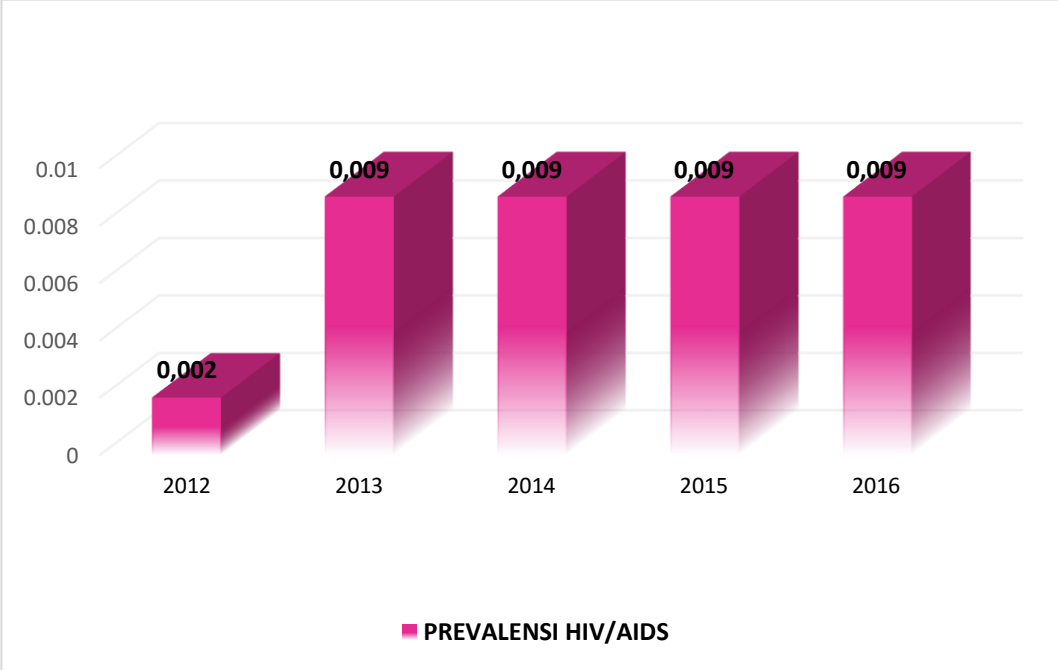

Sumber: Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.45 Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Buol

Berdasarkan Gambar 2.45, prevalensi HIV dan AIDS pada Tahun 2012 sebesar 0,002 persen. Pada Tahun 2013 – 2016 meningkat menjadi 0,009 persen.

20) Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani kurang dari 24 jam dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama di kali seratus persen. Persentase jumlah yang mengalami KLB di desa/kelurahan Tahun 2012-2016 di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.46.

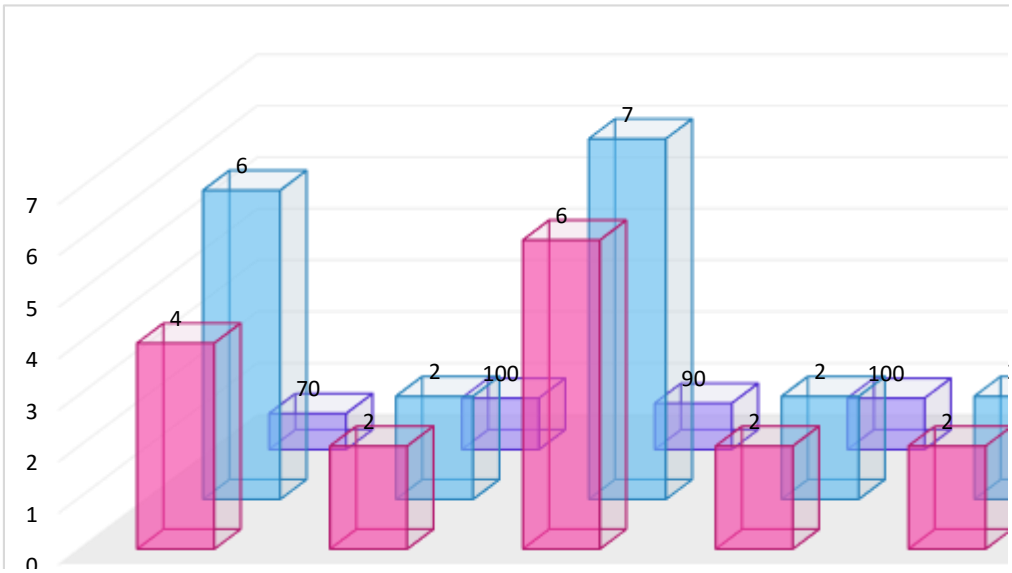

Sumber : Data Profil Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017.

Gambar 2.46 Persentase KLB di Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB Di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Berdasarkan Gambar 2.46, cakupan jumlah sasaran Desa/Kelurahan mengalami KLB (Kejadian luar biasa) yang dilakukan penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012-2016 sebahagian besar dapat tertangani. Hasil tersebut menunjukkan semakin baiknya penanganan KLB kurang dari 24 jam terhadap pasien penderita penyakit menular oleh tenaga kesehatan dalam periode/kurun waktu tertentu.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan keseluruhan di dalam Surat Keputusan tentang Jalan Tahun 2014 tidak sama dengan Surat Keputusan tentang Jalan Tahun 2016 karena setelah didata ada bebarapa ruas jalan yang tidak diketahui posisi lokasinya sepanjang 98,5 km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik disajikan pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Rasio)
di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Panjang Jalan Kondisi Baik (KM)	428,04	487,27	572,00	717,18	870,1
2.	Panjang Jalan Seluruhnya (KM)	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.322,69
3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,30	0,34	0,40	0,50	0,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol, Tahun 2017

Tabel 2.47 menunjukkan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik setiap tahunnya meningkat ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur bidang jalan baik itu peningkatan, dan pembangunan baru senantiasa dapat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada publik. Tahun 2012 sebesar 0,30 sisanya adalah jalan dalam kondisi sedang dan rusak berat sebesar 0,70, Tahun 2013 sebesar 0,34, sedangkan 0,66 adalah proporsi jalan kondisi sedang dan rusak berat, Tahun 2014 0,40, proporsi sisa 0,60 adalah jalan dengan kondisi sedang dan rusak berat, Tahun 2015 sebesar 0,50, sisanya adalah proporsi jalan kondisi sedang dan rusak berat sebesar 0,50 dan Tahun 2016 sebesar 0,66, sedangkan sisanya adalah jalan dengan kondisi sedang dan rusak berat sebesar 0,34.

Untuk panjang jalan di Kabupaten Buol masing-masing kewenangan disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Rasio)
Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Buol

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten (KM)	1.198,87	1.198,87	1.198,87	1.198,87	1.153,77
2.	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi (KM)	41,26	41,26	41,26	41,26	86,36
3.	Panjang Jalan Nasional/Negara (KM)	184,06	184,06	184,06	184,06	184,06
4.	Panjang Jalan Seluruhnya (KM)	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.322,69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.48 panjang jalan menurut kewenangan kabupaten dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah 1.198,87 km dan Tahun 2016 menjadi 1.153,77 km. Panjang jalan kewenangan kabupaten mengalami penurunan karena setelah diadakan pendataan jalan, ada beberapa ruas jalan yang tidak ditemukan, untuk jalan kewenangan provinsi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 sepanjang 41,26 km, Tahun 2016 sepanjang 86,36 km. Panjang jalan kewenangan provinsi bertambah dengan adanya penambahan ruas di Kecamatan Tiloan sepanjang 45,1 km, sedangkan panjang jalan nasional yang menjadi kewenangan pusat dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 sepanjang 184,06 km.

2) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 2.49 berikut:

Tabel 2.49
Proporsi Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

NO.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Panjang Jalan	1421,19	1421,19	1421,19	1421,19	1322,69
2.	Jumlah Penduduk	137.479	142.585	145.889	149.004	152.296
3.	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

3) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Kecepatan lebih dari 40 km/Jam)

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah perbandingan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikali seratus persen. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	21,87	25,18	30,92	41,62	58,97

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Buol Dalam Angka 2017

Berdasarkan pada Tabel 2.50, panjang jalan dalam kondisi baik yang bisa dilalui kendaraan dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam dari tahun ketahun mengalami peningkatan, rata-rata persentase kenaikannya adalah sebesar 35,71 persen.

4) Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 M)

Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (Minimal 1,5 m) adalah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) dibagi panjang seluruh jalan kabupaten (km). Adapun persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan dapat dilihat pada Tabel 2.51 berikut:

Tabel 2.51
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m) (km) di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Panjang Jalan yang memiliki trotoar (km)	0,20	0,20	0,20	0,43	0,74
2.	Panjang Jalan yang memiliki drainase (km)	1,65	4,70	5,72	7,29	10,52
3.	Panjang jalan keseluruhan (km)	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.322,69
4.	Persentase (%)	0,13	0,34	0,42	0,54	0,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol 2017

Berdasarkan Tabel 2.51, persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air Tahun 2012 sebesar 0,13 persen, Tahun 2013 sebesar 0,34 persen, Tahun 2014 sebesar 0,42 persen, Tahun 2015 sebesar 0,54 persen dan Tahun 2016 sebesar 0,85 persen. Rata-rata kenaikan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase adalah 0,46 persen.

5) Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar adalah panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km) dibagi panjang seluruh jalan

sempadan kabupaten (km) di kali seratus persen. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar disajikan pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar (KM)	2	2	2	2	2
2.	Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (M)	1.673,02	1.673,02	1.673,02	1.673,02	1.673,02
3.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2017 (data diolah)

Sempadan jalan adalah batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan. Tabel 2.52 menunjukkan persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar Tahun 2012 hingga Tahun 2016 adalah sebesar 0,12 persen.

6) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibandingkan jumlah seluruh rumah tinggal. Rumah tinggal bersanitasi adalah memenuhi memiliki saluran air limbah, tersedianya air minum, sistem persampahan dan drainase. Data persentase rumah tangga yang bersanitasi disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Buol
Tahun 2015 – 2016

No.	Uraian	2015	2016
1	*2*	*6*	*7*
1.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	36,74	35,58

Sumber : Sussenas Kor, BPS Tahun 2017.

Pelayanan dibidang sanitasi adalah salah satu kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi pengelolaan air limbah, drainase dan pesrampahan, persentase rumah tinggal bersanitasi sejak Tahun 2015 sebesar 36,74 persen, Tahun 2016 sebesar 35,58. Diharapkan tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan dengan berbagai dukungan program dan kegiatan untuk organisasi perangkat daerah terkait.

7) Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km) dibagi panjang seluruh sempadan sungai Kabupaten (km) dikali seratus persen. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*
1.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	7,40	7,1	6,87	6,56	6,35
2.	Panjang seluruh sempadan sungai Kabupaten (km)	360,99	360,99	360,99	360,99	360,99
3.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	2,05	1,97	1,90	1,82	1,76

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Sempadan sungai adalah batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as sungai. Tabel 2.54 menunjukkan persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar menunjukkan penurunan. Semakin berkurang sempadan sungai yang dipakai warga untuk mendirikan bangunan liar. Tahun 2012 sebesar 2,05 persen, Tahun 2013 sebesar 1,97 persen, Tahun 2014 sebesar 1,90 persen, Tahun 2015 sebesar 1,82 dan Tahun 2016 sebesar 1,76 persen.

8) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km) dibangi panjang seluruh drainase di kabupaten Buol di kali seratus persen. Persentase darinase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air yang Tidak Tersumbat di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	12	33	40	51	80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.55 menyajikan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mengalami tren kenaikan. Tahun 2012 sepanjang 12 persen, Tahun 2016 menjadi 80 persen. Rata-rata kenaikan drainase dalam kondisi baik adalah 43 persen.

9) Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor adalah jumlah lokasi pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikali seratus persen. Persentase pembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Persentase Pembangunan Turap dan Tanggul di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Turap/Tanggul Pantai (m)	0	280	1.892	381	334
2.	Turap/Tanggul Sungai (m)	385	1.998	279	20.287	921
3.	Persentase (%)	2,00	13,88	25,20	27,71	31,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Uumum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2017
Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.56 mengenai data persentase pembangunan turap dan tanggul di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang dibangun pada Tahun 2012 adalah 2,00 persen, Tahun 2013 sebesar 13,88, Tahun 2014 sebesar 25,20 persen, Tahun 2015 sebesar 27,71 dan Tahun 2016 sebesar 31,20.

10) Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten di kali seratus persen. Persentase irigasi Kabupaten Buol dalam kondisi baik disajikan pada Tabel 2.57 berikut:

Tabel 2.57
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	2.367	2.387	2.397	2.405	2.405
2.	Luas irigasi Kabupaten (Ha)	3.687	3.693	3.858	3.910	3.910
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Buol	64	65	62	62	62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.57 memperlihatkan data persentase luas irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Buol. Tahun 2012 sebesar 64 persen, Tahun 2013 sebesar 65 persen, Tahun 2014 hingga 2016 sebesar 62 persen. Terjadi penurunan persentase irigasi dalam kondisi baik karena masih kurangnya revitalisasi irigasi.

11) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan air mereka dengan menggunakan air bersih.

Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Buol berasal dari pasokan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Motanang, Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat), sumur gali, dan sumur suntik. Sedangkan data Rumah Tangga yang menggunakan sumber air lainnya untuk pasokan air bersih belum tersedia, sehingga tidak dapat disajikan. Data persentase penduduk berakses air minum disajikan pada Tabel 2.58 berikut:

Tabel 2.58
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Buol
Tahun 2015 - 2016

No	Uraian	2015	2016
1	*2*	*6*	*7*
1.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	21,42	24,08

Sumber : Susenas Kor BPS Tahun 2017

Tabel 2.58 menunjukkan informasi mengenai proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk berakses air minum Tahun 2015 sebesar 40,38 persen dan Tahun 2016 sebesar 51,88 persen. Terjadi kenaikan karena adanya program pamsimas.

12) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dibandingkan total volume sampah. Data tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna daur ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat	0	0	0	0	0

	pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (m³)					
2.	Total volume sampah (m³)	2.880	2.980	3.110	3.120	3.360
3.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.59 menampilkan bahwa persentase fasilitas pengurangan sampah perkotaan di Kabupaten Buol sepanjang 2012 – 2016 belum tersedia. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) direncanakan akan di bangun pada Tahun 2018, diharapkan dapat meningkatkan persentase sampah yang mengalami pengolahan/daur ulang.

13) Rasio Tempat Pemakaman Umum Per satuan Penduduk

Tempat pemakamam umum merupakan salah satu hal yang penting untuk di lihat kembali daya tampungnya karena terkait dengan pertambahan jumlah penduduk dan ketersediaan lahannya, untuk lebih jelasnya rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk di Kabupaten Buol dari Tahun 2012-2016 disajikan pada Gambar 2.47:

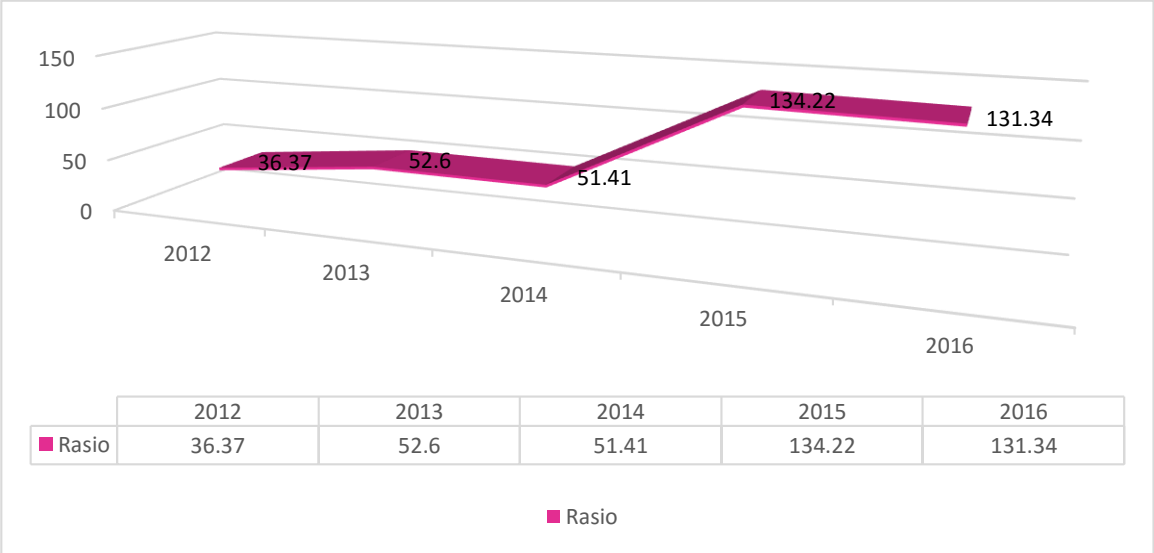

	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio	36.37	52.6	51.41	134.22	131.34

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Tahun 2017 (Data diolah)

Gambar 2.47 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per satuan Penduduk di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Gambar 2.47, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dibandingkan dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Data pada Gambar 2.45 terlihat bahwa rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk Tahun 2012 adalah sebesar 36,37, Tahun 2103 sebesar 52,6, Tahun 2014 sebesar 51,41, Tahun 2105 sebesar 134,22 dan Tahun 2016 sebesar 131,34.

14) Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk harus juga diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana tempat ibadah, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka sarana dan prasarana tempat ibadah juga harus tersedia, untuk lebih jelasnya rasio tempat ibadah persatuan penduduk di Kabupaten Buol dari Tahun 2012-2016 disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Tahun 2012 - 2016
Kabupaten Buol

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah tempat ibadah	257	257	332	332	332
2.	Jumlah penduduk	137.479	142.585	145.889	149.004	152.296
3.	Rasio	1,87	1,80	2,28	2,23	2,18

Sumber : SIPD Kabupaten Buol 2017 (Data diolah)

Tabel 2.60 menunjukkan rasio jumlah tempat ibadah per satuan penduduk, yang dihitung dari perbandingan jumlah tempat ibadah dan jumlah penduduk dikali 1.000. Rasio Tahun 2012 adalah sebesar 1,87, Tahun 2013 sebesar 1,80, Tahun 2014 sebesar 2,28, Tahun 2015 sebesar 2,23 dan Tahun 2016 sebesar 2,18. Seluruh agama yang ada di Kabupaten Buol memiliki

tempat ibadah, sekalipun umat Buddha yang merupakan penganut agama terkecil yaitu sejumlah 347 orang (BPS Kabupaten Buol, 2017).

15) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Melihat Kabupaten Buol secara keseluruhan terutama kawasan perkotaan, dimana kawasan perkotaan tersebut masih cukup luas untuk bisa dijadikan ruang terbuka hijau, dimana kawasan perkotaan Kabupaten Buol masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan yang wajar, belum bertumbuh secara tak terkendali. Untuk kawasan ruang terbuka hijau yang dibangun oleh pemerintah daerah baru seluas kurang lebih 1 Ha, untuk lebih jelasnya ruang terbuka hijau dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Buol
Tahun 2015 - 2016

No.	Uraian	2015	2016
1	*2*	*6*	*7*
1.	Luas ruang terbuka hijau	1	1
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	2.960	3.019
3.	Rasio ruang terbuka hijau	0,00034	0,00033

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buol Tahun 2017

Data luas ruang terbuka hijau Tahun 2012 hingga Tahun 2014 tidak tersedia sehingga rasio ruang terbuka hijau yang dapat dihitung hanya Tahun 2015 dan 2016, masing – masing yakni 0,00034 dan 0,00033.

16) Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber IMB (Izin Mendirikan Bangunan) per satuan bangunan adalah jumlah bangunan ber IMB di bagi jumlah bangunan dapat dilihat pada Tabel 2.62 berikut:

Tabel 2.62
Rasio Bangunan ber – IMB per Satuan Bangunan
Tahun 2012 - 2016 Kabupaten Buol

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	84	151	388	550	667
2.	Jumlah Bangunan	34.370	35.646	36.472	37.251	38.071
3.	Rasio bangunan ber-IMB (1:2)	0,0024	0,0024	0,011	0,015	0,018

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol Tahun 2017.

Berdasarkan Tabel 2.62, Rasio bangunan ber – IMB Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebesar 0,0024, Tahun 2014 sebesar 0,011, Tahun 2015 dan Tahun 2106 masing – masing sebesar 0,015 dab 0,018. Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB masih kurang, sehingga masih perlu upaya - upaya utuk mendorong masyarakat mengusus IMB.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan kondisi ideal dimana bangunan tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, juga memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding, atap, dan lantai, hingga memenuhi aspek pendidikan bagi sipapun yang menempatinya. Rasio rumah layak huni dihitung dengan membandingkan luas rumah layak huni dengan jumlah penduduk, disajikan pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63
Rasio Rumah Layak Huni

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

1.	Jumlah Rumah Layak Huni (RT)	20.199	21.625	22.483	23.375	24.971
2.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	137.479	142.889	145.889	149.004	152.296
3.	Rasio Rumah Layak Huni (1/2)	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16

Sumber : BPS Tahun 2013 s/d 2017 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.63 Jumlah rumah layak huni terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2012 hingga 2016. Pada rentang waktu tersebut, program pemerintah berupa BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) telah berjalan sejak Tahun 2016 merupakan salah satu faktor yang turut serta berperan meningkatkan kualitas rumah.

2) Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan antara luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman. Data luas permukiman layak huni adalah luas permukiman dikurangi luas kawasan kumuh. Data permukiman layak huni yang tersedia hanya Tahun 2106. Data mengenai rasio permukiman layak huni ini disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2016
1	*2*	*7*
1.	Luas pemukiman layak huni	1.757,55
2.	Luas wilayah pemukiman	1.840,70
3.	Rasio permukiman layak huni	0,955

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Buol Tahun 2017

Rasio permukiman layak huni Tahun 2016 adalah sebesar 0,955. Hal ini menunjukkan masih terdapat permukiman yang tidak layak huni di Kabupaten Buol.

3) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Data cakupan ketersediaan rumah layak huni Tahun 2012 hingga Tahun 2016 di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni (Unit)	20.199	21.625	22.483	23.375	24.971
2.	Jumlah rumah (Unit)	34.370	35.646	36.472	37.251	38.071
3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	58,77	60,67	61,64	62,75	65,59

Sumber : BPS Tahun 2013 s/d 2017 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.65, cakupan ketersediaan rumah layak huni sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 terus mengalami peningkatan dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 2,70 persen. Walaupun demikian , masih terdapat 34,41 persen rumah yang masuk kategori tidak layak huni.

4) Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kabupaten Buol masih terdapat lingkungan pemukiman kumuh perkotaan yang kualitas pemukimannya semakin menurun dan perlu segera ditangani. Tabel 2.66 menampilkan luas lingkungan pemukiman kumuh.

Luasan ini sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Buol Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Buol Tahun 2016.

Tabel 2.66
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Buol Tahun 2016

No.	Uraian	2016
1	*2*	*7*
1.	Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	83,15
2.	Luas Wilayah (Ha)	1.840,70
3.	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,04

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.66 diatas, data persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga Tahun 2015 tidak tersedia. Sejak Tahun 2016 diperoleh persentase lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,04 persen dengan rincian luasan lingkungan pemukiman kumuh adalah 83,15 hektar. Lokasi lingkungan pemukiman kumuh ada 3 (tiga) kelurahan, yaitu Kelurahan Buol (Kawasan Pasar Sentral Buol, Kawasan Buoyong dan Kawasan Kampung Bugis) Kecamatan Biau; Kelurahan Leok I (Kawasan Pelabuhan Leok) Kecamatan Biau; Kelurahan Kumaligon Kecamatan Biau. Di upayakan pada Tahun 2019 mencapai target *UA* (*Universal Access)* yaitu 100-0-100 (100 persen air minum sehat, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi layak).

5) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh perkotaan harus diminimalisir setiap tahun, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat semakin meningkat karena tersedia tempat tinggal yang sehat dan aman. Kabupaten Buol masih memiliki rumah

tangga kumuh. Data mengenai rumah tangga kumuh perkotaan disajikan pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan (Unit)	14.171	14.021	13.989	13.876	13.100
2.	Jumlah seluruh rumah (Unit)	34.370	35.646	36.472	37.251	38.071
3.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	41,23	39,33	38,36	37,25	34,41

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.67, sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan terus mengalami penurunan sesuai dengan yang diharapkan. Rata-rata penurunan adalah sebesar 4,65 persen setiap tahunnya. Tahun 2017 dan selanjutnya, diharapkan masih terjadi penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan nyaman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadang Kebakaran, serta fungsi merumuskan kebijakan dibidang penegakkan Peraturan Daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pembinaan Masyarakat Pembinaan Satuan Linmas dan Kebakaran. Adapun indikator kinerja

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat disajikan pada Tabel 2.68 berikut:

Tabel 2.68
Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kerja Tahun 2012-2016				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Cakupan petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat)	%	18	18	18	18	18
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	81	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	5	5	5	5	5
4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	%	0	0	0	0	0
5.	Persentase Penegakan PERDA	%	10	80	60	40	10

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.68, persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat Tahun 2012 hingga Tahun 2016 sebesar 18 persen. Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Tahun 2012 hingga Tahun 2014 sebesar 100 persen. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 81 persen diakibatkan berkurangnya laporan tentang

tingkat penyelesaian pelanggaran K3. Tahun 2016 kembali naik menjadi sebesar 100 persen.

Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sebesar 5 persen sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) rata rata presentasenya dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 adalah 0 persen hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi ditingkat masyarakat untuk mengantisipasi awal terjadinya kebakaran serta dukungan sarana dan prasarana yg masih kurang memadai. Persentase penegakan PERDA secara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 berfluktuasi. Tahun 2012 sebesar 10 persen, Tahun 2013 sebesar 80 persen, Tahun 2014 sebesar 60 persen, Tahun 2015 sebesar 40 persen dan Tahun 2016 sebesar 10 persen.

6. Sosial

1) Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial, Persentase PMKS yang Tertangani, Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial dan Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat

PMKS (Penyandang masalah kesejahteraaan sosial) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang

serasi dan kreatif dengan lingkunganya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial Tahun 2012 sampai Tahun 2016 di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Jumlah Penyandang dan Jenis PMKS di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No.	Jenis PMKS	Jumlah Orang/Tahun					Total
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Anak Jalanan (org)	-	-	-	-	-	
2.	Penderita Sakit Jiwa	-	-	-	-	5	5
3.	Pecandu Narkoba	-	-	-	-	15	15
4.	Anak Terlantar	6	6	3	83	96	194
5.	Lanjut Usia Terlantar	0	322	400	836	962	2.520
6.	Tuna Netra	-	-	-	5	30	35
7.	Tuna Rungu	-	-	-	-	73	73
8.	Tuna Daksa	-	-	-	-	165	165
9.	Tuna Susila	-	-	-	-	7	7
10.	Cacat Jiwa	-	-	-	36	36	71
11.	Catat Ganda	-	-	-	47	47	94
12.	Narapidana	-	-	50	91	91	232
13.	Pengungsi Banjir	-	842	-	10.638	729	12.209

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.69, diketahui bahwa terdapat 13 jenis PMKS yang ada di Kabupaten Buol dari 26 jenis PMKS yang masuk dalam ketentuan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Korban banjir (pengungsi) mendominasi jumlah jiwa PMKS dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (sebanyak 12.209 jiwa) disusul oleh lanjut usia terlantar (2.520 jiwa) dan narapidana (232 jiwa). Bencana alam seperti banjir memiliki potensi cukup besar dalam peningkatan jumlah PMKS. Hal ini disebabkan karena

meningkatnya jumlah lokasi bencana serta frekuensi terjadinya bencana selama kurun waktu 5 tahun terahir.

Berdasarkan uraian tersebut, penanganan PMKS sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70
Persentase Penanganan PMKS di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	100	81,03	62,78	97	45,17
2.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	0	0	0
3.	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0	100	0	75	80

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2017

Data sebaran lokasi bencana serta kerugian (materiil) yang ditimbulkan Tahun 2012 hingga Tahun 2016 di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Data Sebaran Lokasi Bencana di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Titik Bencana	37	13	27	54	11
2.	Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana	7	5	11	10	6
3.	Perkiraan Kerugian (Rp juta)	2.751	279	-	1.214	500

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.71 diketahui kerugian materiil terbesar akibat bencana alam terjadi pada Tahun 2012 (sebanyak ± 2.7 milyar) dengan jumlah titik bencana sebanyak 37 titik yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, disusul kerugian akibat bencana alam pada Tahun 2015 (sebanyak ± 1.2 milyar) dengan jumlah titik bencana sebanyak 54 titik yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Buol.

2) Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap adalah jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat. Bencana yang terjadi di Kabupaten Buol adalah bencana banjir, sehingga data korban bencana merupakan korban bencana banjir. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Data Pengungsi Bencana Alam dan Persentase Penanganan Korban Bencana Alam di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Korban Akibat Banjir (Orang)	-	650	-	7.866	500
2.	Jumlah korban bencana banjir yang dievakuasi menggunakan sarana tanggap darurat lengkap (Orang)	-	502	-	5.816	398
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana tanggap darurat lengkap (%)	-	77,20	-	73,94	79,56

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Buol, Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.72 dapat diketahui bahwa jumlah korban banjir terbanyak terjadi pada Tahun 2015 yakni sejumlah 7.866 orang, dan yang dievakuasi sebesar 73,94 persen. Sedangkan jumlah korban banjir terendah terjadi pada Tahun 2016 yakni sejumlah 500 orang, dan yang dievakuasi sebesar 79,56 persen. Berdasarkan data juga diketahui bahwa seluruh korban bencana, seluruhnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat, baik yang disalurkan oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

3) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menenerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah persentase perbandingan antara jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensialyang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun. Data persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta usia lanjut tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial disajikan pada Gambar 2.48.

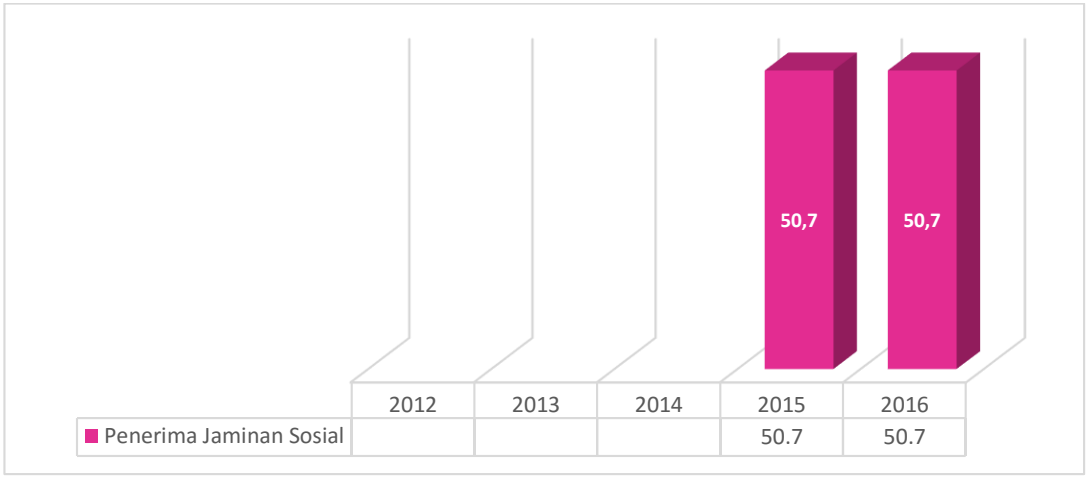

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Buol Tahun 2016 s/d 2017

Gambar 2.48 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Gambar 2.48 menampilkan data persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Data yang tersedia hanya Tahun 2015 dan Tahun 2016, yakni sebesar 50,7 persen.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja (Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama, Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan, Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek, Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan PB (Perjanjian Bersama) adalah persentase perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama dengan jumlah kasus yang dicatatkan. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah persentase perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar. Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek adalah persentase perbandingan jumlah pekerja / buruh Jamsostek dengan jumlah

pekerja / buruh. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat adalah persentase jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah perbandingan lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk di kali 10.000. Data mengenai tenaga kerja disajikan pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama, Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan, Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek, Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Rasio Lulusan S1/S2/S3

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	0	0	5	2	3
2.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	0	0	4,5	0	0
3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	0	0	15	15,96	17,03
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	0	85	80	85	70
5.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (Rasio per 10.000 penduduk)	0,011	0,012	0,012	0,013	0,012

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol Tahun 2017

Data pada Tabel 2.73 memperlihatkan bahwa tidak terdapat kasus yang diselesaikan pada Tahun 2012 dan Tahun 2013, Tahun 2014 sebesar 5 persen, Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing – masing 2 persen dan 3 persen. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Tahun 2014 sebesar 4,5 persen. Sedangkan Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak terdapat data mengenai besararn pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek Tahun 2012 dan Tahun 2103 tidak ada, Tahun 2014 sebanyak 15 persen, Tahun 2016 sebanyak 15,96 persen dan Tahun 2016 meningkat menjadi sebanyak 17,03 persen. Wsaslaupun terjadi peningkatan besaran buruh yang menjadi peserta Program jamsostek, tetapi masih perlu upaya untuk lebih meningkatkan lagi hingga 100 persen. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kecamatan Tahun 2012 tidak ada, Tahun 2013 sebesar 85 persen, Tahun 2014 sebesar 80 persen, Tahun 2015 sebesar 85 persen dan Tahun 2016 sebesar 70 persen. Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk pada Tahun 2012 adalah sebesar 0,011, Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar 0,012, Tahun 2015 sebesar 0,013 dan tahun 2016 sebesar 0,012.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah merupakan gambaran tentang proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II, III, dan IV seperti disajikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	2	1	0	2
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	14	22	19	11	11
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	116	80	71	6	62
4.	Pekerja perempuan di Lembaga pemerintah	2.329	2.320	2.422	2.361	2.304
5.	Jumlah pekerja perempuan	2.988	3.043	3190	3153	3.117
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%)	78	76	76	75	74

Sumber : BKPSDM Kabupaten Buol Tahun 2017, SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.74 menunjukkan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah menurun. Tahun 2012 sebesar 78 persen. Tahun 2013-2014 turun menjadi sebesar 76 persen dan kemudian turun menjadi sebesar 75 persen pada Tahun 2015. Tahun 2016 kembali turun menjadi sebesar 74 persen. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata proporsi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah sampai akhir Tahun 2016 sebesar 74 persen dari total jumlah pekerja perempuan setiap tahunnya, selebihya bekerja pada lembaga swasta yang ada di Kabupaten Buol.

2) Proporsi Kursi Yang Dididuduki Perempuan di DPR

Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) merupakan jumlah dari kursi DPRD yang dididuduki perempuan dibagi jumlah total kursi di keanggotaan DPRD di kali seratus persen. Adapun proporsi perempuan di DPRD Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2014 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.75 Data Tahun 2012 hingga Tahun 2013 tidak tersedia.

Tabel 2.75
Proporsi Kursi Yang Dididuduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Buol Tahun 2014-2016

No	Uraian	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	6	6	6
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	25	25	25
3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	24	24	24

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Tabel 2.75 terlihat bahwa proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kabupaten Buol Tahun 2014 hingga Tahun 2016 adalah sebesar 24 persen.

3) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah persentase perbandingan antara pekerja perempuan di lembaga swasta dengan jumlah pekerja perempuan. Data mengenai partisipasi perempuan di lembaga swasta disajikan pada Gambar 2.49.

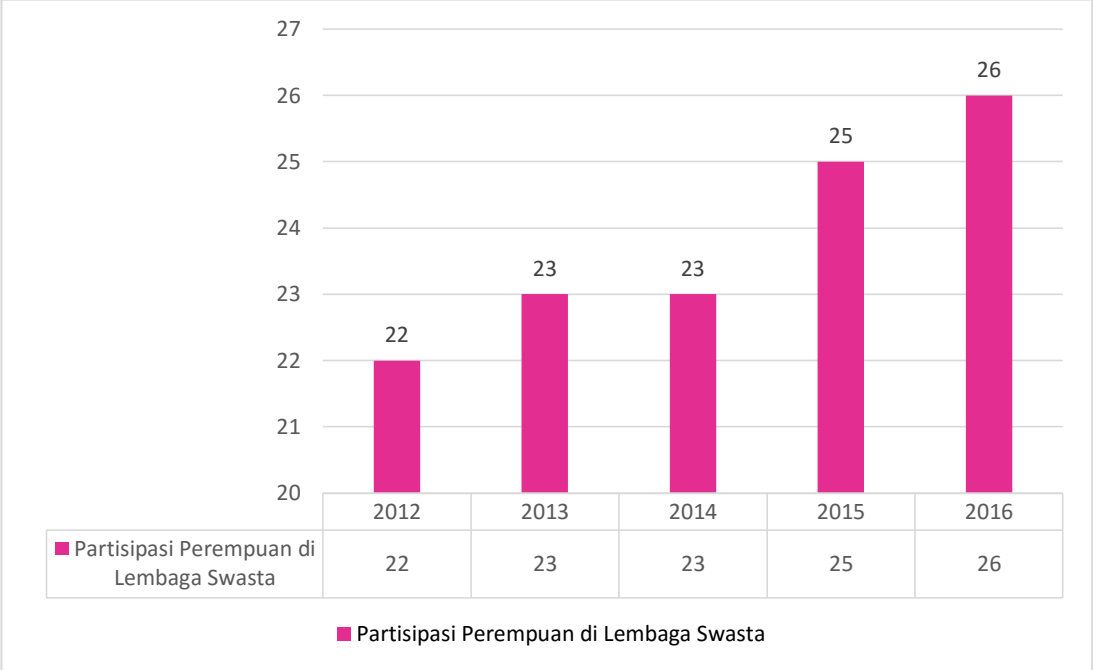

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.49 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Gambar 2.49 memperlihatkan persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 yang terus meningkat, berbanding terbalik dengan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Hingga akhir Tahun 2016 terdapat 26 persen.

4) Rasio KDRT

Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah persentase perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Data mengenai Rasio KDRT disajikan pada Gambar 2.50 berikut:

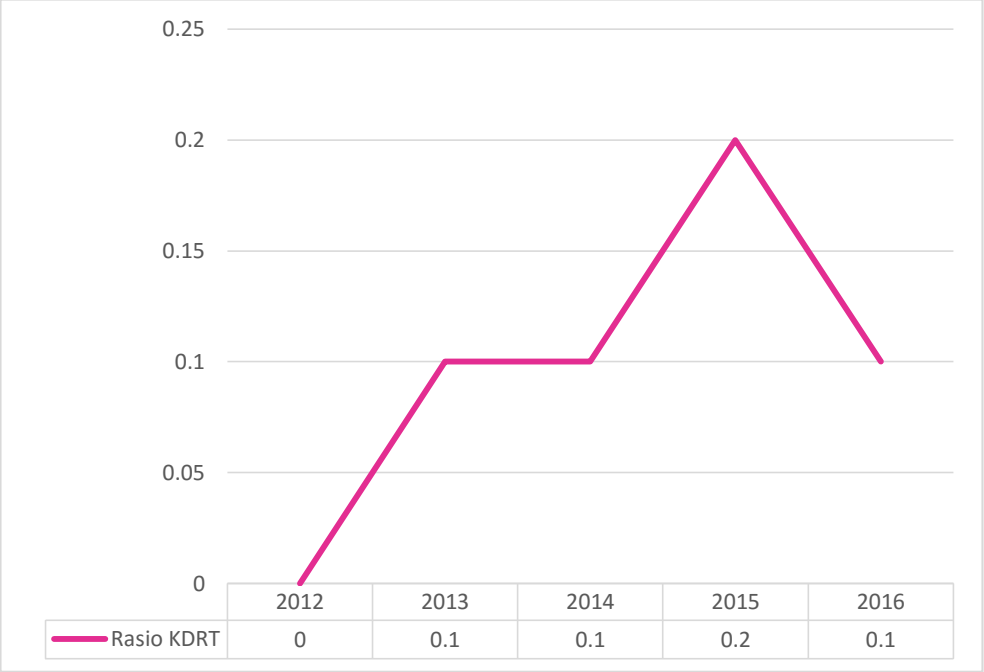

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013 s/d 2017.

Gambar 2.50 Rasio KDRT di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Gambar 2.50 memperlihatkan rasio KDRT di Kabupaten Buol pada Tahun 2012 0 persen karena tidak ada laporan, Tahun 2013 hingga Tahun 2014 sebesar 0,1 persen, Tahun 2015 meningkat menjadi 0,2 persen dan tahun 2016 menurun menjadi 0,1 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) Kekerasan fisik, (b) Kekerasan psiskis, (c) Kekerasan seksual, dan (d) Penalantaran rumah tangga.

3. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2014 – 2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaan pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu:

a) Sub sistem ketersediaan pangan, melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
b) Sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan analisis harga serta cadangan pangan;
c) Sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Program - program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah kabupaten buol melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buol sebagai tolok ukur keberhasilan Ketahanan Pangan diantaranya ketersediaan pangan utama. Adapun yang telah dicapai pemerintah Pemeritah Kabupaten Buol dalam hal ketersediaan pangan utama dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya disajikan pada Gambar 2.51.

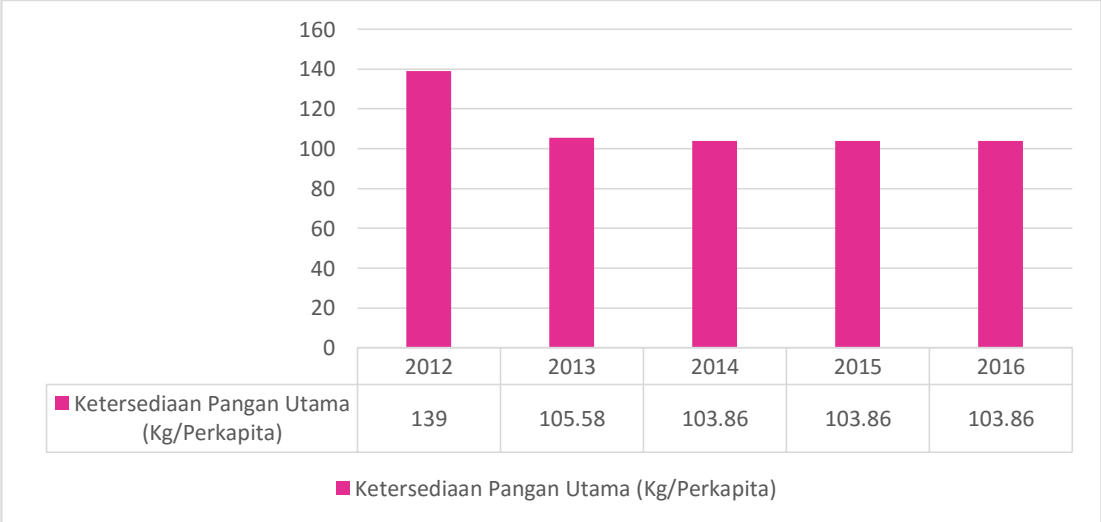

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buol Tahun 2017

Gambar 2.51 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Gambar 2.51 memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama kg/perkapita mengalami penurunan. Tahun 2012 sebesar 139 kg/perkapita, Tahun 2013 menurun menjadi 105,58 kg/perkapita, Tahun 2014 hingga Tahun 2016 sebesar 103,86 kg/perkapita.

4. Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah luas wilayah. Data mengenai pertanahan disajikan pada Tabel 2.81 sedangkan persentase luas lahan bersertifikat disajikan pada Gambar 2.76.

Tabel 2.76
Jumlah Sertifikat dan Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Sertifikat Kab. Buol (Buah)	40.863	43.412	45.557	48.711	55.768
2.	Luas Lahan Bersertifikat (M2)	316.545,763	324.338,200	496.450.270	506.313,160	553.610,905

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional Tahun 2017

Tabel 2.76 memperlihatkan bahwa jumlah sertifikat dan luas lahan bersertifikat setiap tahun mengalami peningkatan.

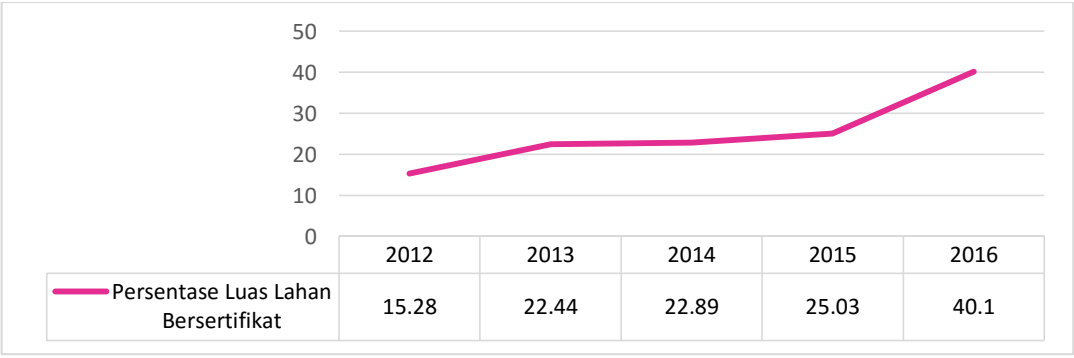

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.52 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Gambar 2.52 memperlihatkan persentase luas lahan bersertifikat yang semakin meningkat. Tahun 2012 sebesar 15,28 persen, Tahun 2013 sebesar 22,44 persen, Tahun 2014 sebesar 22,89 persen, Tahun 2015 sebesar 25,03 persen dan tahun 2016 sebesar 40,1 persen. Peningkatan signifikan terjadi sejak Tahun 2013 karena adanya program pemerintah yakni Taura (Tanah untuk rakyat) yang memfasilitasi masyarakat pemilik lahan untuk memperoleh sertifikat.

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah negara adalah persentase perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar. Data mengenai penyelesaian kasus tanah negara disajikan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan	1	5	3	2	7
2.	Jumlah kasus yang terdaftar	1	5	3	2	7
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional, Tahun 2017

Berdasarkan Data pada Tabel 2.77 memperlihatkan bahwa keseluruhan kasus tanah negara dapat diselesaikan dengan pencapaian sebesar 100 persen sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016.

3) Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian izin lokasi adalah persentase perbandingan jumlah izin lokasi dengan permohonan izin lokasi. Data penyelesaian izin lokasi di

Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.78 berikut:

Tabel 2.78
Penyelesaian Izin Lokasi Tahun di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah izin lokasi	2	0	0	0	0
2.	Permohonan izin lokasi	2	0	0	0	0
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Nasional, Tahun 2017

Tabel 2.78 memperlihatkan bahwa penyelesaian izin lokasi sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan pencapaian sebesar 100 persen.

5. Lingkungan Hidup

1) Tersusunnya RPPLH Kabupaten, Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten dan Terselenggaranya KLHS untuk K / R / P Tingkat Daerah Kabupaten

Dokumen perencanaan penting demi menjamin terselenggaranya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Data mengenai indikator – indikator pencapaian di Bidang Lingkungan Hidup disajikan pada Tabel 2.79 berikut:

Tabel 2.79
Tersusunnya RPPLH Kabupaten, Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten dan terselenggaranya KLHS untuk K / R / P Tingkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol Tahun 2017

Tabel 2.79 memperlihatkan bahwa belum adanya dokumen RPPLH Kabupaetn Buol sehingga tidak terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten / kota. Sedangkan untuk dokumen KLHS Kabupaten Buol sudah tersedia untuk Tahun 2012 hingga Tahun 2016.

2) Timbulan Sampah yang Ditangani

Isu lingkungan hidup menjadi isu strategis terutama menyangkut persolanan penangan sampah, dimana timbulan sampah mengikuti jumlah penduduk karana setiap jiwa/penduduk dapat menimbulkan 0,65 kg sampah tentunya harus pula disertai dengan dengan penangan sampah yang agresif atau ketersediaan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang cukup. Data timbulan sampah yang ditangani disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani (Ton/hari)	3.015	3.202	6.202	7.702	11.460
2.	Total timbulan sampah (Ton/hari)	24.36	92.680	94.827	96.852	98.950
3.	Timbulan sampah yang ditangani	12,37	3,45	6,54	7,95	11,58

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 (Diolah diolah)

Tabel 2.80 menunjukkan timbulan sampah yang ditangani setiap hari pada tahun berjalan mengalami peningkan hal ini diakibatkan perhatian pemerintah terhap pengangan sampah cukup baik dimana setiap tahun pemerintah mengangarkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) melalui Dinas Lingkungan Hidup.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buol, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas Otonomi Daerah. Adapun layanan Urusan Wajib Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai beberapa urusan /indikator adalah sebagai berikut:

1) Rasio penduduk ber – KTP per satuan penduduk

   Rasio penduduk ber – KTP per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 17 tahun yang ber – KTP dengan jumlah penduduk usia diatas 17 tahun atau telah menikah.

2) Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan antara jumlah bayi berakte kelahiran dengan jumlah bayi.

3) Rasio pasangan berakte nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan antara jumlah pasangan nikah berakte nikah dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah.

4) Ketersediaan *database* kependudukan skala provinsi

Ketersediaan *database* kependudukan indikator pencapaiannya adalah ada atau tidak ada.

5) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK indikator pencapaiannya adalah sudah atau belum.

6) Cakupan penerbitan KTP

Cakupan penerbitan KTP adalah persentase perbandingan antara jumlah KTP ber – NIK yang diterbitkan dengan jumlah penduduk wajib KTP.

7) Cakupan penerbitan akta kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah persentase perbandingan antara jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dengan jumlah kelahiran di tahun bersangkutan.

Seluruh data mengenai indikator - indikator Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian Kerja Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,86	0,49	0,55	0,48	0,55
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	1	1	1	1	1
3.	Rasio pasangan berakte nikah	1	1	1	1	1

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian Kerja Tahun 2012-2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,59	0,33	0,48	1	1
7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	6,78	15,48	11,54	18,01	26,60

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.81 maka dapat diketahui bahwa Rasio penduduk ber – KTP di Kabupaten Buol Tahun 2012 sebesar 0,86. Setelah Tahun 2012 mengalami tren fluktuatif. Tahun 2013 sebesar 0,49, Tahun 2014 sebesar 0,55, Tahun 2015 sebesar 0,48 dan Tahun 2016 naik menjadi 0,55. Rasio bayi berakte kelahiran dan rasio pasangan berakte nikah sudah mencapai 1. Hal ini berarti bahwa seluruh anak yang lahir sudah memiliki akte kelahiran serta seluruh pasangan sudah memiliki akte nikah. Database kependudukan skala provinsi sudah tersedia, penerapan KTP Nasional berbasis NIK juga sudah dilaksanakan. Untuk cakupan penerbitan KTP Tahun 2012 hingga Tahun 2014 masih rendah, yakni sebesar 0,59, 0,33 dan 0,48. Tahun 2015 dan Tahun 2016 mengalami kenaikan maksimal hingga mencapai angka 1. Sedangkan cakupan penerbitan angkta kelahiran hingga Tahun 2016 sebesar 26,60 persen.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari suatu proses pembangunan karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Pembedayaan masyarakat merupakan proses pembangunan sumberdaya manusia dalam bentuk penggalian kemampuan

pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.

1) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah persentase perbandingan jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa. Data mengenai cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik disajikan pada Gambar 2.53 berikut:

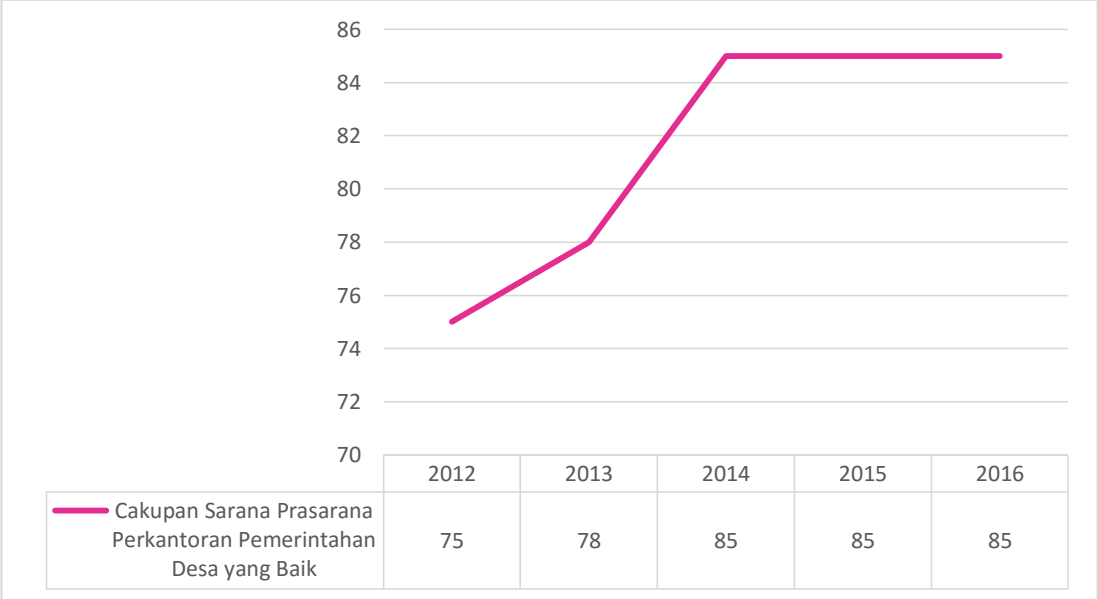

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.53 Cakupan Sarana Prasaran Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Dari Gambar 2.53 terlihat bahwa terjadi peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sejak Tahun 2102 hingga Tahun 2014 dan Tahun 2014 hingga Tahun 2016 tidak mengalami peningkatan. Walaupun demikian, masih perlu peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang baik hingga dapat mencapai 100 persen.

2) Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Rata – rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah perbandingan antara jumlah kelompok binaan LPM dengan jumlah LPM. Data mengenai rata – rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buol sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82
Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Kelompok Pemberdayaan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah LPM	108	108	108	108	108
2.	Jumlah kelompok binaan LPM	0	10	10	10	22
3.	Rata – rata jumlah kelompok binaan LPM	0	0,09	0,09	0,09	0,20

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol, Tahun 2017

Tabel 2.82 menunjukkan bahwa setiap desa di Kabupaten Buol telah memiliki lembaga LPM yang merupakan wadah musyawarah desa serta memiliki peran aktif dalam setiap musyawarah perencaanaan pembangunan desa. Keberadaan LPM desa menjadi sangat penting sebagai mitra kerja Kepala Desa terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan dana desa dalam membangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dari musyawarah rencana pembangunan desa.

Tahun 2012 tidak ada LPM yang dibina, Tahun 2013 hingga Tahun 2015 rata – rata jumlah kelompok binaan LPM adalah sebesar 0,09. Tahun 2016 terjadai peningkatan menjadi 0,20.

3) Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK, Persentase PKK Aktif dan Persentase Posyandu Aktif

Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Persentase PKK aktif adalah persentase jumlah PKK aktif dibandingkan dengan jumlah PKK. Persentase posyandu aktif adalah persentase jumlah posyandu aktif dibandingkan dengan total posyandu.

Data mengenai rata – rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Gambar 2.53 Data mengenai Persentase PKK aktif dan persentase posyandu aktif di Kabupaten Buol selama kurun waktu Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Gambar 2.54.

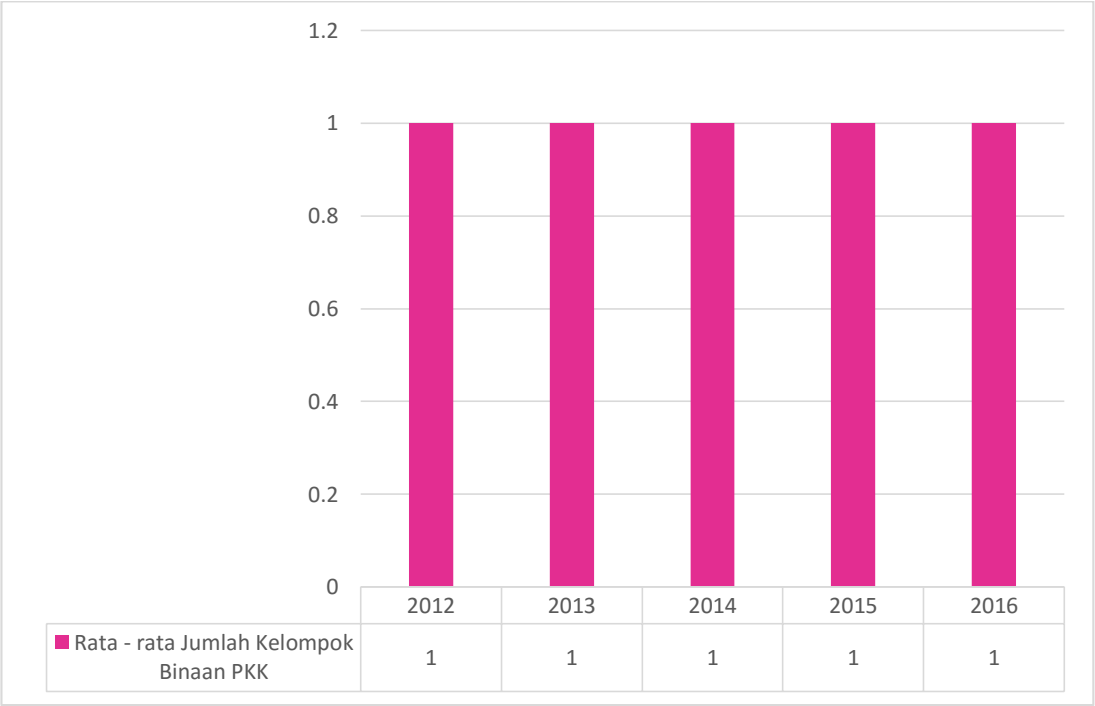

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol, Tahun 2017

Gambar 2.54 Rata – rata Kelompok Binaan PKK

Gambar 2.55 dibawah ini memperlihatkan bahwa seluruh PKK yang terbentuk di Kabupaten Buol telah mendapatkan pembinaan.

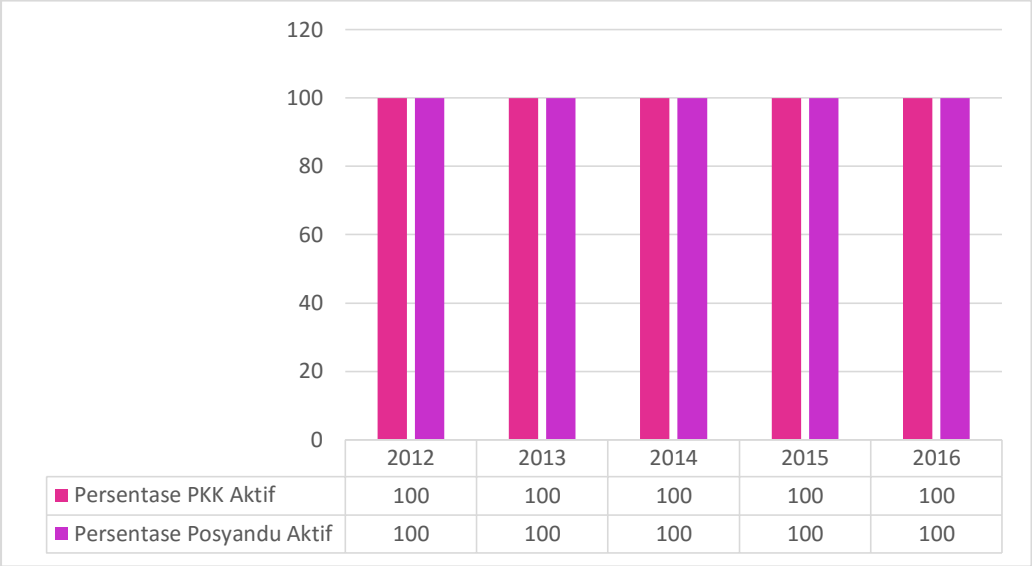

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol, Tahun 2017

Gambar 2.55 Persentase PKK Aktif dan Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Gambar 2.55 memperlihatkan bahwa seluruh PKK dan Posyandu yang ada di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 tergolong aktif.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Jumlah anak yang ada dalam setiap keluarga dihitung berdasarkan usia tanggungan bagi orang tua, dimana anak tersebut diperkirakan masih dalam usia bersekolah dengan batas jenjang pendidikan tertinggi yaitu sampai pada perguruan tinggi. Data mengenai Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.56 berikut:

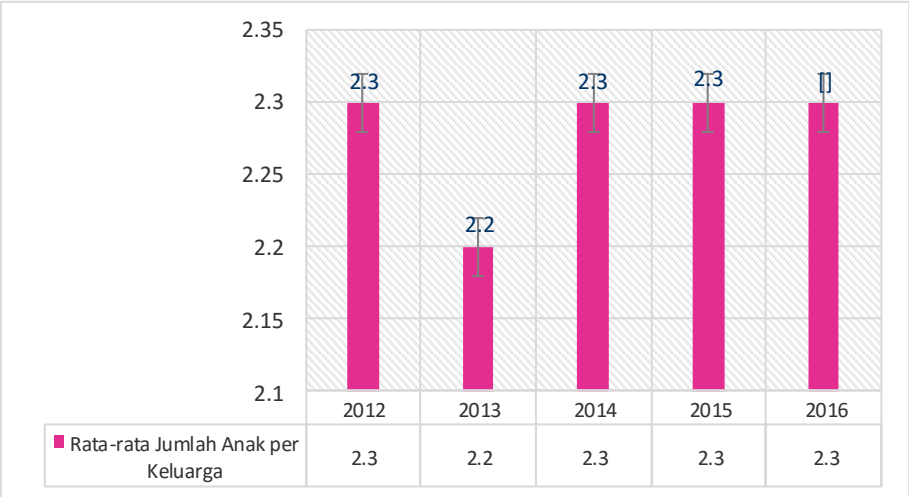

Sumber : DPPKB Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.56 Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Gambar 2.56 memperlihatkan bahwa setiap tahun jumlah anak pada setiap keluarga di Kabupaten Buol rata-rata adalah sebanyak 2 anak. Tahun 2012 dari 29.650 KK memiliki 48.448 anak, Tahun 2013 dari 31.972 KK memiliki 49.571 anak, Tahun 2014 50.663 KK memiliki 51.753 anak, Tahun 2015 dari 32.688 KK memiliki 51.753 anak, dan sampai Tahun 2016 dari 33.401 KK memiliki 50.633 anak. Data tersebut menunjukkan adanya keberhasilan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buol .

2) Ratio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah persentase jumlah akseptor KB dibandingkan jumlah pasangan usia subur. Data rasio akseptor KB di kabupaten Buol Tahun 2012 hingga 2016 disajikan pada Gambar 2.57 berikut:

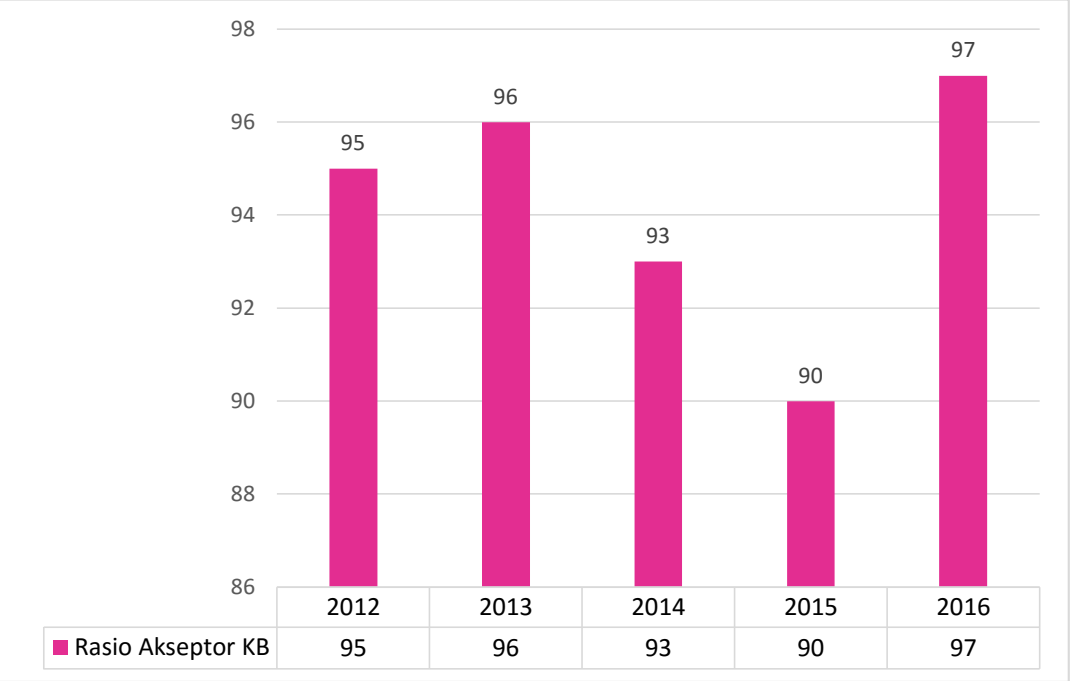

Sumber : Data Profil Kesehatan Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.57 Rasio Akseptor KB di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

Gambar 2.57 memperlihatkan Rasio Akseptor KB di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 menunjukkan angka fluktuatif. Tahun 2012 rasio akseptor KB sebesar 95 persen, mengalami peningkatan di Tahun 2013 menjadi sebesar 96 persen. Tahun 2014 rasio akseptor KB turun menjadi 93 persen, rasio akseptor KB kembali turn di Tahun 2015 sebesar 90 persen dan Tahun 2016 rasio akseptor KB naik menjadi sebesar 97 persen. Rasio Akseptor KB menunjukkan besarnya angka partisipasi KB (akseptor). Hal ini menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk, dimana data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan yang ada di Kabupaten Buol.

9. Perhubungan

1) Jumlah arus penumpang angkutan umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk /

keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Data jumlah arus penumpang angkutan umum sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Naik (Orang)	39.868	37.842	37.026	37.411	46.089
	- Darat	37.814	36.347	36.113	34.270	33.115
	- Udara	2.054	1.419	888	3.098	12.593
	- Laut	-	76	25	43	381
2.	Turun (Orang)	37.712	34.701	32.086	33.772	43.704
	- Darat	35.607	33.205	31.176	30.510	28.701
	- Udara	2.105	1.424	892	3.119	13.825
	- Laut	-	72	18	143	1.178
3.	Jumlah arus penumpang umum (Orang) (1 + 2)	77.580	72.543	69.112	71.183	89.793

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2017

Jumlah arus penumpang umum sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang terbanyak adalah pada Tahun 2016, yaitu sejumlah 89.793 orang, sedangkan yang paling sedikit terjadi pada Tahun 2014, yaitu sebanyak 69.112 orang.

Fluktuasi ini terjadi karena jumlah penumpang angkutan darat terus mengalami penurunan akibat jumlah angkutan darat juga terus mengalami penurunan. Penumpang udara mengalami kenaikan yang signifikan pada Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015.

2) Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek adalah perbandingan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Data rasio izin trayek disajikan pada Tabel 2.84 berikut:

Tabel 2.84
Rasio Izin Trayek

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah Izin Trayek	109	147	159	160	134
	- Perkotaan	10	13	9	12	4
	- Perdesaaan	99	134	150	148	130
2.	Jumlah Penduduk (orang)	137.479	142.889	145.889	149.004	152.296
3.	Rasio Izin Trayek	0,0008	0,0010	0,0011	0,0011	0,0009

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2017

Kategori data yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buol mengenai izin trayek terbagi atas izin trayek perkotaan dan izin trayek pedesaan. Menurut Tabel 2.91 jumlah izin trayek yang dikelurkan berfluktuasi, terutama izin trayek perdesaan mulai Tahun 2014 mulai mengalami penurunan karena makin banyak kendaraan pribadi, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi.

Rasio izin trayek pada Tahun 2012 adalah 0,0008 yang berarti bahwa setiap 1 (satu) orang penduduk, hanya tersedia 0,0008 angkutan umum (yang berizin trayek) atau 1 (satu) angkutan umum untuk 1.250 penduduk, Tahun 2013 rasio izin trayek sebesar 0,0010, sedangkan rasio izin trayek pada Tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 0,0011 yang berarti bahwa untuk setiap penduduk tersedia 0,0011 angkutan umum atau 1 (satu) angkutan umum tersedia untuk 910 orang. Rasio izin trayek pada Tahun 2015 juga sebesar 0,0011, Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,0009. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah angkutan umum masih kurang karena kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum, ataupun jika tersedia, masih sangat kurang yang berizin trayek.

3) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Data jumlah uji kir angkutan umum di Kabupaten Buol sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	- Truk	101	125	135	145	151
2.	- Bus	102	120	121	160	161
3.	- Mobil Penumpang	102	122	139	105	106
4.	Jumlah Uji KIR angkutan umum (1+2+3)	305	367	395	410	418

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.85, jumlah uji KIR yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buol sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 yang terbanyak adalah pada Tahun 2016 yakni sebanyak 418, paling sedikit pada Tahun 2012 yakni sebanyak 305. Terlihat pada Tabel 2.85 jumlah uji KIR yang dikeluarkan secara umum mengalami tren kenaikan.

4) Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis

Pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan terminal bis sejak Tahun 2012 hingga 2016 di Kabupaten Buol dalam hal jumlah tidak mengalami perubahan. Pelabuhan laut sebanyak 4 unit, pelabuhan udara 1 unit dan terminal bis sebanyak 3. Data mengenai jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86
Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah pelabuhan laut	4	4	4	4	4
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	3
4.	Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bis (Unit) (1+2+3)	8	8	8	8	8

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Berdasarkan Tabel 2.86, meskipun pelabuhan laut dan pelabuhan udara tidak mengalami ketambahan, masih perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya demi menunjang kelancaran transportasi bongkar / muat barang dan turun / naik penumpang / orang.

5) Persentase Layanan Angkutan Darat

Layanan angkutan darat adalah ketersediaan angkutan darat terhadap penumpang angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat diperoleh dengan cara menghitung persentase jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat. Persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Buol sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah angkutan darat (Unit)	109	147	159	160	134
2	Jumlah penumpang angkutan darat (Orang)	37.814	36.347	36.113	34.270	33.115

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
3	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,29	0,40	0,44	0,47	0,40

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2017

Pada Tahun 2012, setiap penumpang tersedia sebanyak 0,29 angkutan darat atau 1 angkutan darat melayani 3 orang penumpang, Tahun 2016 setiap penumpang tersedia sebanyak 0,40 angkutan darat atau 1 angkutan melayani 2 penumpang. Jumlah penumpang yang dilayani semakin menurun karena tren penggunaan alat transportasi pribadi semakin meningkat.

6) Pemasangan Rambu – Rambu

Rambu – rambu jalan dimaksudkan sebagai petunjuk dan peringatan bagi pengguna jalan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Data mengenai jumlah rambu – rambu jalan yang terpasang di Kabupaten Buol pada Tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88
Pemasangan Rambu – Rambu
Di Kabupaten Buol Tahun 2015

No.	Uraian	2015	2016
1	Jumlah pemasangan rambu – rambu	231	231

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2017

Pada Tabel 2.88 terlihat bahwa dalam rentang waktu Tahun 2012 hingga Tahun 2015 pemasangan rambu – rambu belum dilakukan, pada Tahun 2015 baru dilakukan pemasangan sebanyak 231 buah sampai akhir Tahun 2016.

7) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan. Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan disajikan pada Tabel 2.89

Tabel 2.89
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Panjang Jalan (KM)	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.421,19	1.322,69
2	Jumlah Kendaraan (Unit)	16.000	16.700	17.050	17.300	17.760
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (1/2)	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.89, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Tahun 2012 adalah sebesar 0,09. Setiap 0,09 KM terdapat 1 Unit kendaraan, atau setiap 1 KM terdapat 11 Unit kendaraan. Tahun 2016 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah sebesar 0,07. Setiap 0,07 KM terdapat 1 unit kendaraan, atau setiap 1 KM terdapat 14 Unit kendaraan. Peningkatan jumlah unit kendaraan per 1 KM panjang jalan menunjukkan laju pertumbuhan jumlah kendaraan melebihi laju pertumbuhan panjang jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

Salah satu urusan yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Buol sebagai upaya membuka isolasi wilayah dari keterbatasan informasi adalah di Bidang Komunikasi dan Informatika. Gambaran pelaksanaan kebijakan selama 5 (lima) tahun menunjukkan peningkatan terutama pada kinerja peningkatan cakupan pengembangan dan pemberdayaan jelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan yang sudah mencapai 100 persen pada Tahun 2016. Cakupan layanan telekomunikasi yakni pada Tahun 2015 dan tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 80 persen atau hampir sebagian besar wilayah telah tercakup dalam pelayanan komunikasi. Peningkatan lainnya ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan Hp/Telepon menjadi sebanyak 80 persen dan peningkatan proporsi akses

internet dalam rumah tangga yang pada Tahun 2016 mencapai angka 0,12. Sedangkan untuk proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi mencapai 0,25. Data mengenai Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90
Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	60	65	80	95	100
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (Rasio)	0,40	0,60	0,70	0,75	0,75
3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	29,08	34,07	37,30	39,85	41,45
4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Rasio)	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (Rasio)	0,13	0,25	0,30	0,35	0,38

Sumber: Dinas Komunikasi dan informasi, Statistik dan Persandian Tahun 2017, SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.90 dalam pelaksanaan dukungan kebijakan terhadap perkembangan kemajuan telekomunikasi dan informasi, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya menyediakan akses teknologi informasi secara konsisten. Kebijakan ini diambil mengingat perkembangan kemajuan teknologi informasi yang dinamis dan bergerak sangat cepat dalam memberi perubahan. Sebagai gambaran, meski jumlah penyedian jaringan komunikasi tidak bertambah tetapi dari 3 (tiga) penyedia yang ada mampu menjangkau sebagian besar wilayah.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Data mengenai persentase koperasi aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah koperasi aktif (unit)	52	99	105	118	126
2.	Jumlah seluruh koperasi (unit)	125	205	225	255	268
3.	Persentase koperasi aktif (%)	41,60	48,29	46,67	46,27	47,01

Sumber : Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.91, persentase koperasi aktif di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 fluktuatif yakni sebanyak 41,60 persen di tahun 2012 menjadi sebesar 47,01 persen pada Tahun 2016, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang aktif.

2) Persentase UKM non BPR/ LKM Aktif

Persentase UKM non BPR/LKM aktif adalah jumlah UKM non BPR di bandingkan dengan jumlah seluruh UKM non BPR di kali seratus persen. Data mengenai persentase UKM non BPR / LKM Aktif disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kabupaten Buol
Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif (unit)	376	612	992	1260	2470

2.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM (unit)	2.227	2.227	2.227	2.227	5.635
3.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	16,88	27,48	44,54	56,58	43,83

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.92, peningkatan persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 signifikan. Tahun 2012 sebanyak 16,88 persen, Tahun 2013 sebanyak 27,48 persen, Tahun 2014 sebanyak 44,54 persen, Tahun 2015 sebanyak 56,58 persen dan tahun 2016 sebanyak 43,83 persen.

3) Persentase BPR/LKM Aktif

Persentase BPR/LKM aktif adalah persentase jumlah BPR/LKM aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh BPR/LKM. Data mengenai persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012 hinggan Tahun 2016 disajikan pada Gambar 2.58.

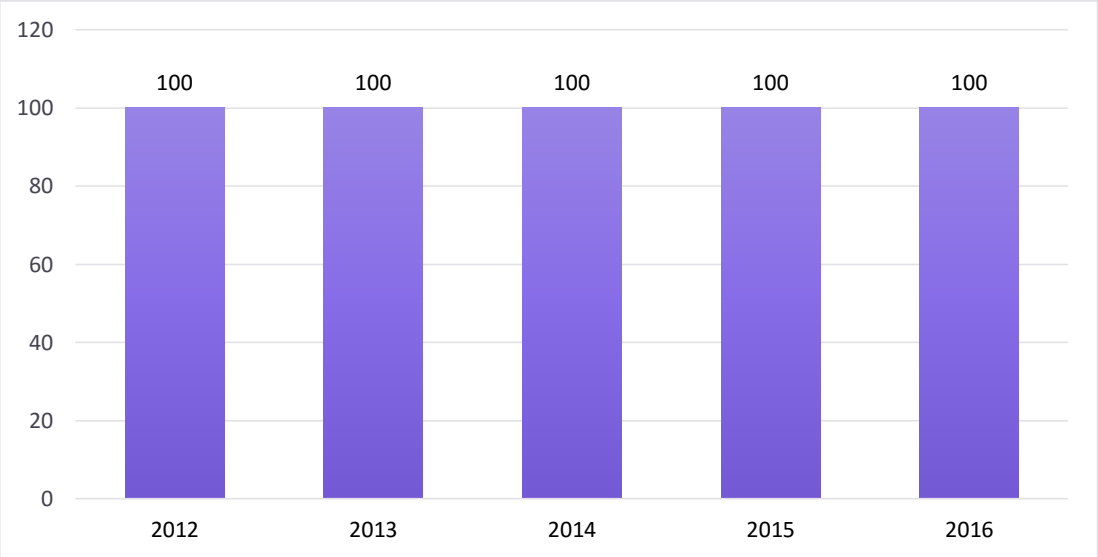

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tahun 2017

Gambar 2.58 Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Gambar 2.58 memperlihatkan persentase BPR/LKM aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga Tahun 2016 adalah sebesar 100 persen.

4) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil maupun usaha menengah merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh perorangaan atau badan usaha. Jumlah UKM menjadi aspek yang diperhitungkan dalam menganalisis kondisi perekonomian wilayah karena perannya dalam perekonomian rakyat yang mandiri. Data mengenai persentase usaha mikro dan kecil disajikan pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah usaha mikro dan kecil (unit)	122	122	147	178	216
2.	Jumlah seluruh UKM (unit)	537	873	1.417	1.798	3.530
3.	Persentase usaha kecildan mikro (%)	22,72	13,97	10,37	9,90	6,12

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.93, persentase usaha mikro dan kecil di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 201 hingga Tahun 2016 semakin menurun. Artinya, perlu upaya untuk makin menumbuhkan minat berwira usaha di kalangan masyarakat.

12. Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Adapun keberhasilan pembangunan Penanaman Modal di

Kabupaten Buol selama Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	4	6	6	2

Sumber data : Bappeda-PM Kab. Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.94, jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 cukup berfluktuatif yaitu sebanyak 3 investor di Tahun 2012 turun menjadi sebanyak 2 investor di Tahun 2016. Data tersebut menunjukkan adanya pengurangan jumlah Investor yang ada di Kabupaten Buol.

Belum optimalnya mekanisme perizinan dan masih rendahnya promosi dan investasi yang terkait dengan pengembangan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buol terutama pada bidang pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, pertambangan dan energi serta masih kurangnya APBD dalam penanganan urusan tersebut, oleh sebab itu maka diperlukan perbaikan dan simplikasi mekanisme sistem perizinan serta meningkatkan transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama dalam promosi dan investasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

1) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif adalah persentase jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dibandingkan dengan jumlah seluruh organisasi pemuda. Data mengenai persentase pemuda yang aktif disajikan pada Gambar 2.59.

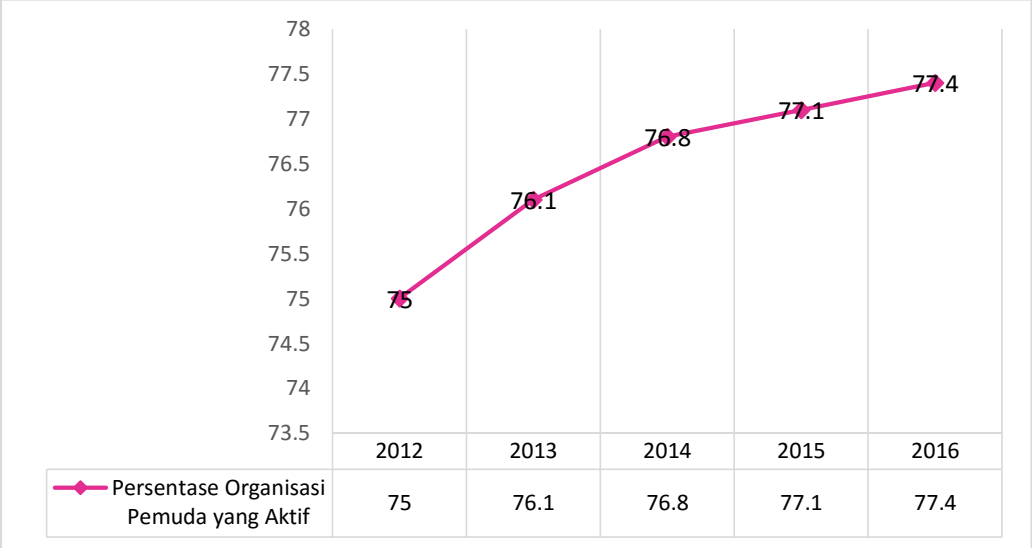

Sumber: Dinas Pemuda Olah Raga Tahun 2017

Gambar 2.59 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Gambar 2.59 memperlihatkan data mengenai persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Buol. Tahun 2012 sejumlah 75 persen, Tahun 2013 naik menjadi sejumlah 76,1 persen, Tahun 2014 sejumlah 76,8 persen, Tahun 2015 dan 2016 masing – masing sejumlah 77,1 persen dan 77,4 persen. Berarti, semakin banyak organisasi pemuda yang aktif menjalankan kegiatan kepemudaannya.

2) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda adalah persentase jumlah wirausaha muda dibandingkan dengan jumlah seluruh wirausaha. Data mengenai persentase wirausaha muda disajikan pada Gambar 2.60.

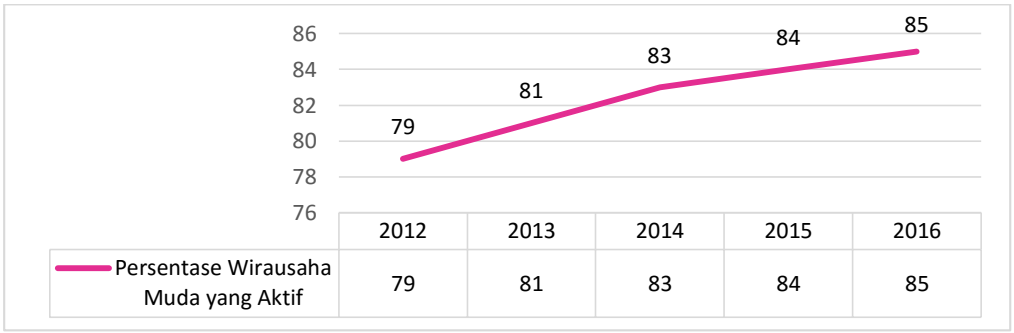

Sumber: Dinas Pemuda Olah Raga Tahun 2017

Gambar 2.60 Persentase Wirausaha Muda yang Aktif di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Gambar 2.60 menunjukkan bahwa persentase wirausaha muda di Kabupaten Buol meningkat sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Tahun 2012 sejumlah 79 persen, Tahun 2013 sejumlah 81 persen, Tahun 2014 sejumlah 83 persen, Tahun Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing – masing sejumlah 84 persen dan 85 persen. Wirausaha muda di Kabupaten Buol melakukan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan, Kontraktor, dan Pertanian.

3) Cakupan Pembinaan Olah Raga

Cakupan pembinaan olahraga adalah persentase jumlah cabang olahraga yang dibina dibandingkan dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang ada / terdaftar. Data mengenai cakupan pembinaan olahraga disajikan pada Gambar 2.61 berikut:

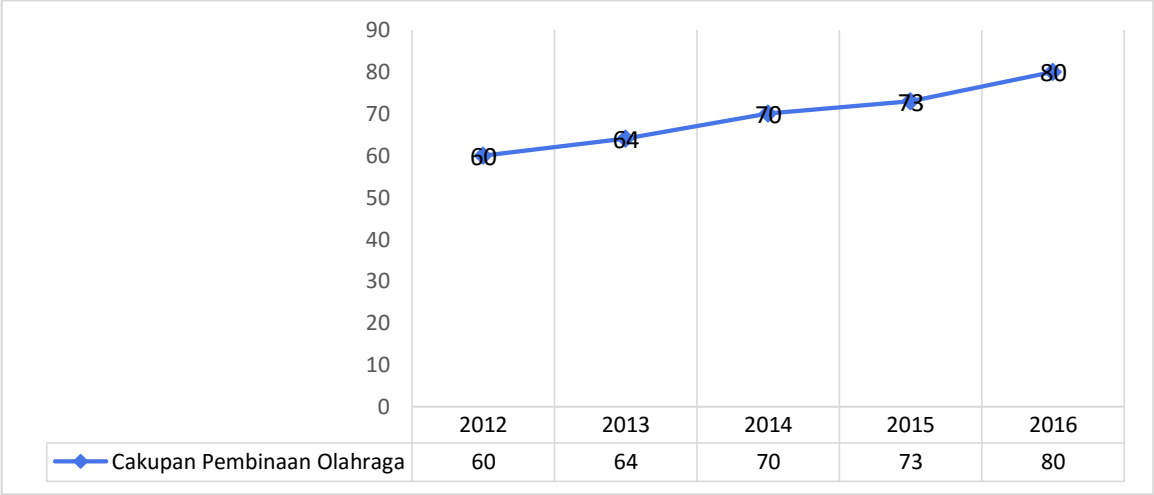

Sumber: Dinas Pemuda Olah Raga Tahun 2017

Gambar 2.61 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan Tabel 2.61 pembinaan olahraga di Kabupaten Buol sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 mengalami peningkatan, menunjukkan adanya perhatian Pemerintah Daerah untuk memajukan olahraga. Lapangan olahraga yang tersebar diseluruh Kabupaten Buol sejumlah 110 unit. Tersebar di seluruh kecamatan, yakni Kecamatan Paleleh, dari jumlah 12 desa yang

memiliki lapangan Olah Raga 9 desa, Kecamatan Paleleh barat dari 7 desa yang memiliki lapangan Olah Raga 7 Desa, Kecamatan Gadung dari 11 Desa semua memiliki lapangan Olah raga, Kecamatan Bunobogu dari 10 Desa semua memiliki lapangan, untuk Kecamatan Bokat dari 15 desa yang memiliki lapangan Olah Raga 14 Desa, Kecamatan Bukal dari 14 Desa semuanya memiliki lapangan, Kecamatan Momunu dari 16 Desa semuanya memiliki Lapangan, Kecamatan Tiloan 9 Desa semua memiliki lapangan, Kecamatan Karamat dari 7 Desa semua memiliki lapangan Olah Raga, Kecamatan Lakea dari 7 Desa hanya 6 Desa yang memiliki lapangan, untuk wilayah kelurahan dari wilayah kelurahan hanya 3 kelurahan yang memiliki sarana Lapangan Olah Raga. Selain menyediakan sarana dan prasarana, atlit juga sering mengikuti kejuaraan – kejuaraan di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Provinsi. Walaupun demikian, masih perlunya penambahan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga serta bimbingan pelatihan dari pelatih profesional.

14. Statistik

Salah satu bentuk dari perwujudan akuntabilitas pemerintahan adalah menyediakan data dan informasi yang dapat di akses sebagai sebuah acuan untuk melakukan evaluasi dan proyeksi kemajuan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buol telah menyediakan berbagai bentuk dokumen yang menjadi naskah rujukan dalam aktifitas pengambilan kebijakan. Wujud nyata kesadaran datatif yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buol adalah menyediakan Informasi terbaru tentang profil daerah dalam bentuk Kabupaten Buol Dalam Angka dan informasi Perkembangan perekonomian daerah dalam bentuk ketersediaan Buku PDRB (Produk Domestik Regional Bruto Daerah). Selain itu, upaya integrasi data dalam konsep "SATU DATA" sudah dilaksanakan efektif sejak Tahun 2013 dalam bentuk SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Integrasi data ini dilakukan secara lintas sektor dan didukung oleh mekanisme sistem secara *online*. Gambaran kebijakan penyediaan informasi statistik sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.95.

Tabel 2.95
Capaian Kinerja Statistik di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017 (Data diolah kembali)

Seperti disajikan pada Tabel 2.95, sistem data dan statistik yang terintegrasi belum tersedia di Kabupaten Buol pada Tahun 2012, tetapi sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2016 sudah tersedia. Buku Kabupaten Buol Dalam Angka dan Buku PDRB setiap tahun tersedia, Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol sebagai penyusun buku tersebut bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol.

15. Persandian

Indikator Bidang Urusan Persandian adalah persentase persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah yang dihitung dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah. Data mengenai indikator ini disajikan pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	0	0	4,3	4,3	4,3

Sumber : Data Diolah, Tahun 2017

Kebijakan persandian sebagai upaya membangun kerahasiaan beberapa urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sejak Tahun 2014 telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buol dengan melakukan koordinasi pengawasan dengan intelijen Negara dalam berbagai dokumen vital terenskripsi. Ada 2 (dua) perangkat daerah dengan persentase 4,3 persen yang telah menyelenggarakan hal ini dari total perangkat daerah.

16. Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah jumlah penyelenggaran festival seni dan budaya. Data indikator ini disajikan pada Gambar 2.62.

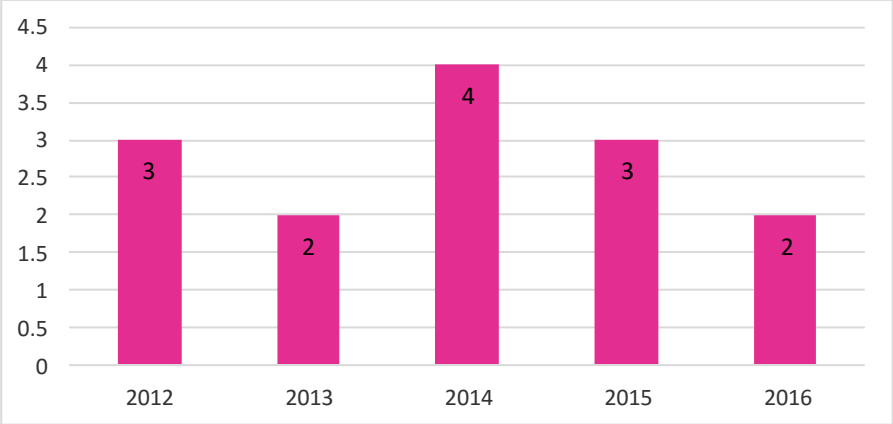

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buol, Laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Buol Tahun 2017.

Gambar 2.62 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Berdasarkan Gambar 2.62, penyelenggaraan Festival seni dan budaya di Kabupaten Buol dilaksanakan setiap tahun selama Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya pada Tahun 2013 dan 2016 hanya dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu Tahun sedangkan pada Tahun berikutnya yaitu Tahun 2014 dapat dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali.

2) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah persentase perbandingan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah. Data indikator ini disajikan pada Gambar 2.63.

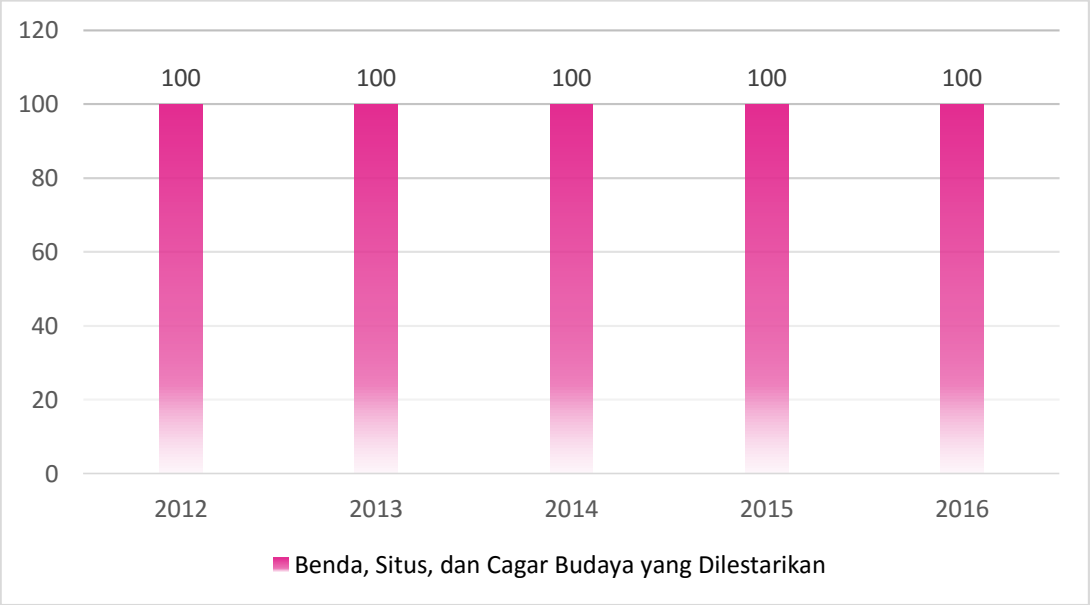

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buol, Laporan Pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.63 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan selama masa periode Tahun 2012 hingga Tahun 2016 diantaranya adalah Rumah Raja,

Tugu Leok, Tugu Bunobogu dan Makam Daiborle di Tanjung Dako. Keseluruhan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terdaftar dilestarikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

3) Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Jagar budaya merupakan warisan budaya Kabupaten Buol yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Buol disajikan pada Gambar 2.64 berikut:

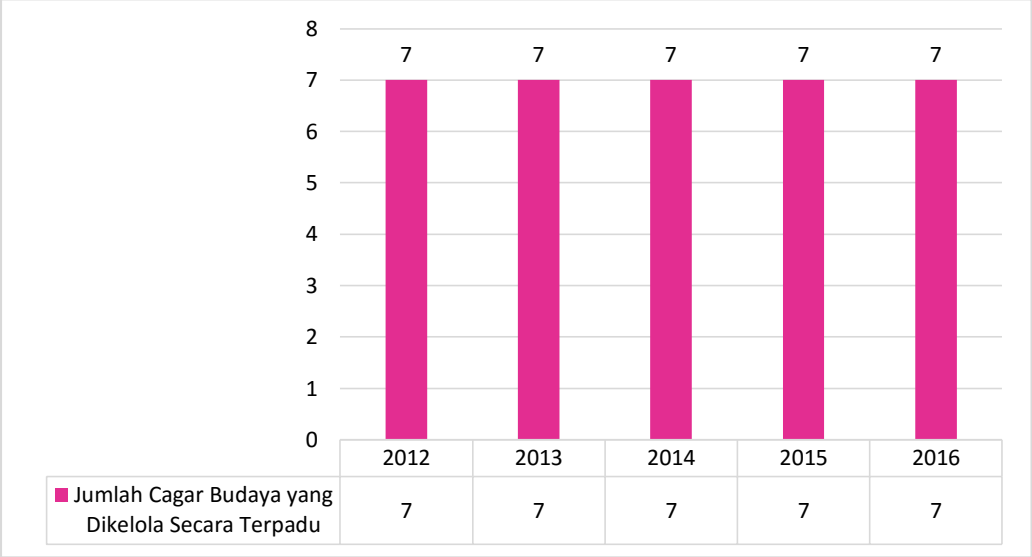

Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Buol, Laporan Pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.64 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu di Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Gambar 2.64, sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Buol tidak mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 7 cagar budaya.

17. Perpustakaan

Pelaksanaan pembangunan urusan perpustakaan terdiri dari 6 (enam) indikator yakni:

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun adalah perbandingan antara jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani**.**

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah adalah perbandingan antara jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah dengan jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah.

3) Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk adalah jumlah pustakawan dibandingkan dengan 1.000 orang penduduk.

4) Jumlah Rata – rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun

Jumlah rata – rata pengunjung perpustakaan / tahun adalah rata – rata jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

5) Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan adalah jumlah koleksi judul buku yang ada di perpustakaan.

6) Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat adalah persentase perbandingan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dengan jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai. Data mengenai indikator ke-1 hingga ke-6 disajikan pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016

1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Rasio)	1,93	0,75	1,24	0,65	0,61
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio)	0,15	0,17	0,17	0,17	0,21
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (Rasio)	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	967	559	1.244	651	912
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Buah)	3.070	3.753	3.753	3.780	5.280
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai (Persen)	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel 2.97 memperlihatkan berbagai capaian kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Buol Tahun 2012 hingga Tahun 2016 yakni:

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun

   Jumlah pengunjung perpustakaan di awal periode RPJMD mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.934, namun pada Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2016 mengalami penurunan jumlah pengunjung, namun jumlah ini tetap melampai target akhir RPJMD yang sebanyak 0,23 orang.
2. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

   Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 mengalami peningkatan , hal ini meunjukkan bahwa capaian kinerja pada urusan

perpustakaan dalam kategori baik walaupun masih perlu penambahan judul dan jumlah buku demi peningkatan kaulitas perpustakaan.

3. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

   Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rasio perpustakaan persatuan penduduk terus mengalami peningkatan. Selain Perpustakaan Daerah, tersedia perpustakaan di sekolah – sekolah yang turut memberikan kontribusi peningkatan rasio perpustakaan per satuan penduduk.

4. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan /Tahun

   Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/Tahun dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 fluktuatif. Jumlah yang paling kecil adalah pada Tahun 2014 yakni hanya mencapai 559 pengunjung per tahun. Jumlah terbanyak adalah pada Tahun 2014 yakni mencapai 1.244 pengunjung. Masih relatif rendahnya jumlah rata – rata pengunjung perpustakaan per tahun antara lain karena pada periode tersebut belum tersedia sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah yang memadai.

5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

   Koleksi judul buku perpustakaan dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan tetapi pada Tahun 2013-2014 jumlah koleksi buku perpustakaan tetap pada jumlah 3.753 ini dikarenakan tidak ada pengadaan ataupun bantuan pada tahun tersebut.

6. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat masih pada angka 0 persen karena belum ada pustakawan, tenaga teknis dan penilai di Kabupaten Buol yang bersertifikat.

18. Kearsipan

Pelaksanaan pembangunan Urusan Kearsipan terdiri dari 2 (dua) indikator, yakni:

1) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku adalah persentase perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dengan jumlah Perangkat Daerah.

2) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan SDM pengelola kearsipan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian kinerja Urusan Kearsipan disajikan pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98
Capaian Urusan Kearsipan di Kabupaten Buol
Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	78	83	85	87	88
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Jumlah Kegiatan)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 2017 (Data Diolah Kembali)

Berdasarkan Tabel 2.98, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 sebesar 78 persen meningkat hingga 88 pesen pada tahun 2016. Sedangkan kegiatan peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan sepanjang Tahun 2012-2016 belum terlaksana. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas sumber daya yang mengelola kearsipan.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

1) Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2016, dimana Tahun 2012 hanya sebanyak 2.565 kunjungan atau sebesar 51 persen menjadi sebesar 15.403 atau sebesar 86 persen kunjungan. Data mengenai kunjungan wiasata disajikan pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99
Kunjungan Wisata di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se Kabupaten dan Kota	2.565	5.040	13.568	14.244	15.403
2	Jumlah Kunjungan Wisata YangDirencanakan se Kabupaten/Kota	5.000	7.500	16.500	17.000	18.000
3	Kunjungan Wisata (%)	51,30	67,20	82,23	83,67	85,57

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2017

2) Lama Kunjungan Wisata

Rata-rata lama kunjungan wisata adalah rata – rata kunjungan wisata dalam satu tahun. Data mengenai lama kunjungan wisata disajikan pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100
Lama Kunjungan Wisata
Tahun 2012-2016

No.	Uraian Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Lama Kunjungan wisata (Hari)	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol Tahun 2017

Rata – rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Buol sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 adalah selama 3 (tiga) hari.

3) PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sektor Pariwisata

PAD sektor pariwisata adalah persentase PAD sektor pariwisata dibandingkan dengan total PAD.

Kontribusi PAD sektor pariwisata terdiri dari sub sektor hotel dan restoran. Data mengenai PAD sektor pariwisata disajikan pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101
PAD Sektor Pariwisata
Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Hotel (Rp)	44.031.500	36.743.000	70.336.900	49.310.932	26.693.409
2.	Restoran (Rp)	106.378.937	526.790.638	803.260.122	1.005.018.757	829.085.621
3.	Total PAD sektor Pariwisata (Rp)	150.410.437	563.533.638	873.597.022	1.054.329.689	855.779.030
4.	Total PAD (Rp)	16.321.800.882	29.981.344.209	35.113.223.860	46.077.409.009	53.259.653.066
5.	PAD sektor Pariwisata (%)	0,92	1,88	2,49	2,29	1,61

Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Buol Tahun 2017

Data pada Tabel 2.101 menunjukkan bahwa PAD sektor pariwisata Tahun 2012 sebesar 0,92 persen, Tahun 2013 naik menjadi 1,88 persen, Tahun 2014 sebesar 2,49 persen, Tahun 2015 sebesar 2,29 persen dan Tahun 2016 sebesar 1,61 persen.

2. Pertanian

1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB merupakan Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan dibagi Jumlah PDRB dikali 100 persen. Capaian kontribusi PDRB pada bidang pertanian/perkebunan disajikan pada Tabel 2.102.

2) Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB adalah persentase jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap jumlah PDRB sektor pertanian / perkebunan.

3) Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadapa PDRB adalah persentase jumlah kontribusi perkebunan (tanaman keras) terhadap jumlah PDRB sektor pertanian / perkebunan. Data mengenai kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB disajikan pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB dan Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	44,03	44,21	44,06	42,65	40,93
2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	5,71	5,31	4,94	4,57	4,53
3.	Kontribusi sektor pertanian (tanaman Keras) terhadap PDRB (%)	32,38	32,92	33,14	32,07	30,32

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Buol, Tahun 2017 (Data diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 2.102, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB merupakan yang paling dominan diantara semua sektor. Tahun 2012 sebesar 44,03 persen, Tahun 2013 sebesar 44,21 persen, Tahun 2014 sebesar 44,06 persen, Tahun 2015 sebesar 42,65 persen dan Tahun 2016 sebesar 40,93 persen. Walaupun masih dominan, tetapi yang terjadi adalah tren penurunan. Oleh sebab itu uapaya -upaya peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB masih perlu ditingkatkan.

4) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktifitas tanaman padi sawah dan padi lading di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

Tahun	Produksi Tanaman (Ton)		Luas Areal Tanaman (Ha)		Produktivitas per Hektar (Ton/Ha)	
	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang	Padi Sawah	Padi Ladang
2012	6.140	6,88	1.390	5	4,41	0,04
2013	27.404	738,5	4.028	566	6,80	1,30
2014	19.019	1.366	4.275	561	4,44	2,43
2015	15.516	864,11	3.304	486	4,69	1,77
2016	19.955	1.035	6.242	459	3,19	2,25

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2017, (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.103 diatas, Pada akhir Tahun 2016 diperoleh total produktivitas padi sawah sebesar 3,19 ton/ha dan padi ladang sebesar 2,25 ton/ha.

5) Cakupan Bina Kelompok Petani

Cakupan bina kelompok petani adalah persentase jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda Tahun n dibandingkan dengan jumlah kelompok petani. Data mengenai cakupan bina kelompok petani disajikan pada Gambar 2.65.

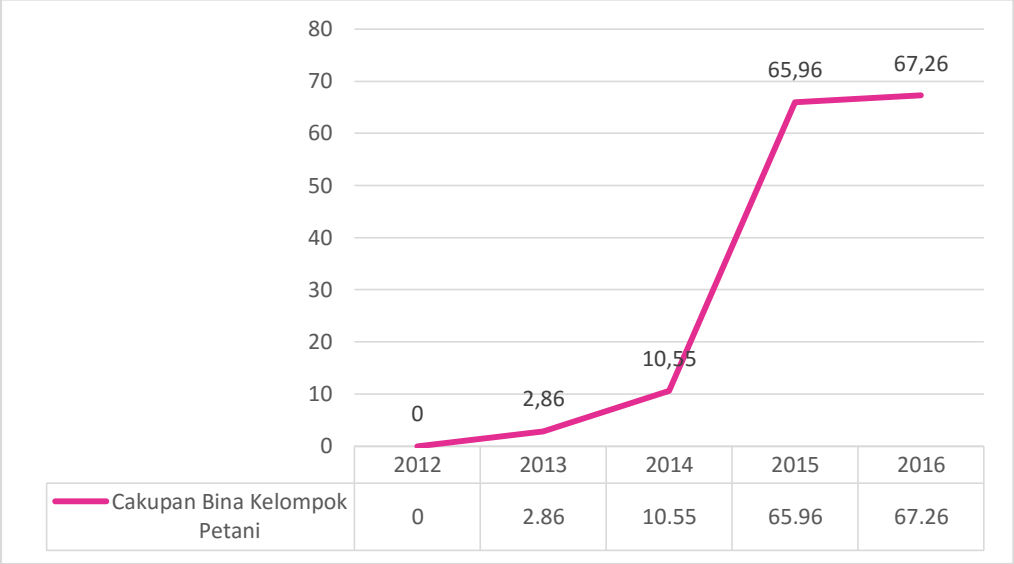

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.65 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 2.65, Tahun 2012 belum terdapat kelompok petani yang dibina oleh Pemda, Tahun 2013 sebesar 2,86 persen, Tahun 2014 sebesar 10,55 persen, Tahun 2015 sebesar 65,96 dan Tahun 2106 sebesar 67,26 persen.

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik adalah persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga. Data persentase rumah tangga pengguna listrik disajikan pada Gambar 2.66.

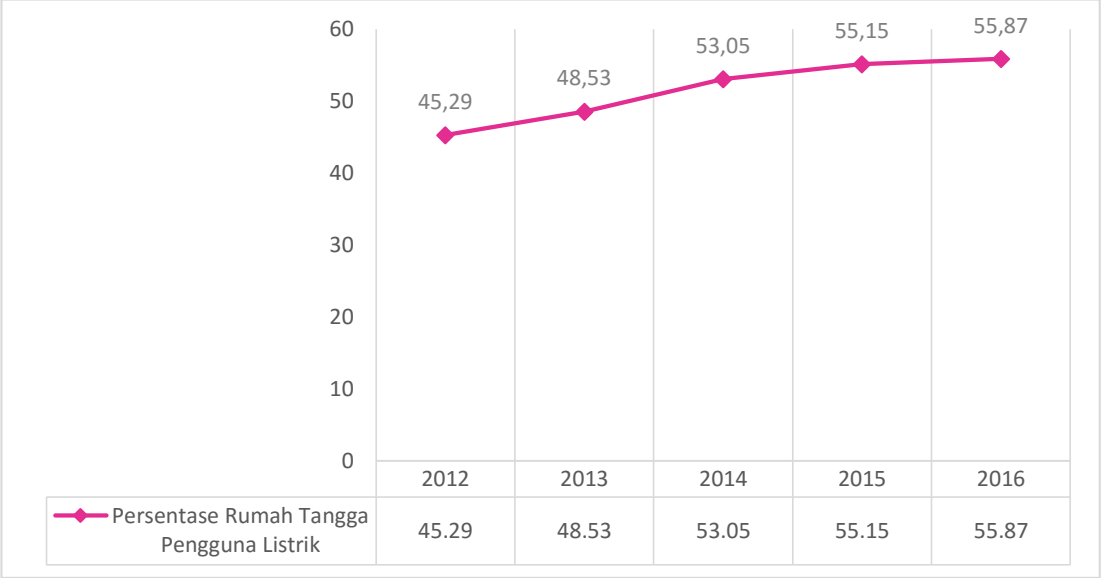

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.66 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan Gambar 2.66, persentase rumah tangga pengguna listrik, dalam hal ini adalah yang disediakan oleh PT PLN Cabang Sulutenggo, Ranting Leok sejumlah 45,29 persen pada Tahun 2012, meningkat menjadi 55,87 persen pada Tahun 2016.

2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik merupakan Jumlah daya listrik terpasang dibagi dengan Jumlah kebutuhan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104
Rasiao Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata Daya PLTD Terpasang	3.760	6.050	7.050	5.350	8.600
2	Daya Dibutuhkan	12.034	17.553	19.861	19.721	2.763
3	Rasio Ketersediaan Listrik	0,31	0,34	0,35	0,27	0,41

Sumber: SIPD Kab. Buol Tahun 2017

Tabel 2.104 tersebut di atas, menunjukkan tren rasio keterdiaan daya listrik setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 rasio ketersediaan daya listrik sebesar 0,31 kva, dan terjadi peningkatan di Tahun 2013 sebesar 0,34 kva. Pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 0,35 kva, namun terjadi penurunan ketersediaan daya listrik di Tahun 2015 sebesar 0,27 kva. Pada Tahun 2016 rasio ketersediaan daya listrik kembali meningkat sebesar 0,41 kva. Data rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Buol sampai tahun 2016 menunjukkan perubahan yang cukup baik, dimana pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2012 hingga Tahun 2015 daya PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang terpasang tidak sesuai dengan daya yang dibutuhkan, namun di Tahun 2016 ketersediaan daya listrik yang terpasang sudah melebihi daya yang dibutuhkan. Artinya daya listrik yang terpasang dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara maksimal.

3) Persentase Pertambangan Tanpa Izin

Persentase pertambangan tanpa izin adalah persentase luas penambangan liar yang ditertibkan dibandingkan dengan luas area penambangan liar. Data mengenai persentase pertambangan tanpa izin disajikan pada Gambar 2.67 berikut:

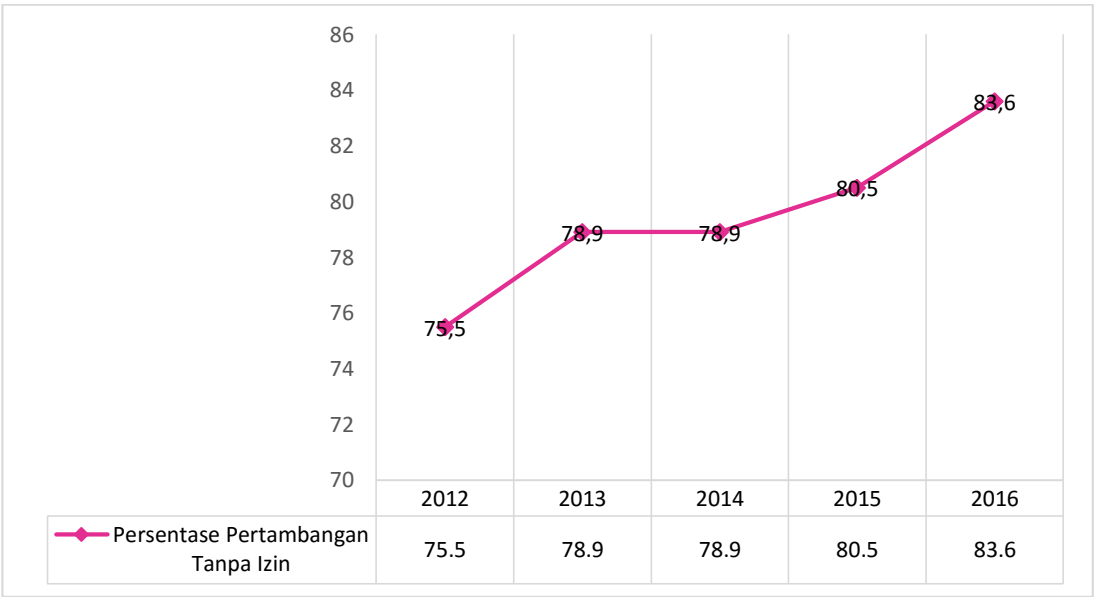

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Gambar 2.67 Persentase Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Gambar 2.67 memperlihatkan makin banyak pertambangan liar yang ditertibkan oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2012 sebanyak 75,5 persen, Tahun 2016 menjadi sebanyak 83,6 persen.

4. Perdagangan

1) Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah persentase jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pada Tahun n dibandingkan dengan jumlah kelompok pedagang/usaha informal. Data mengenai cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal disajikan pada Gambar 2.68.

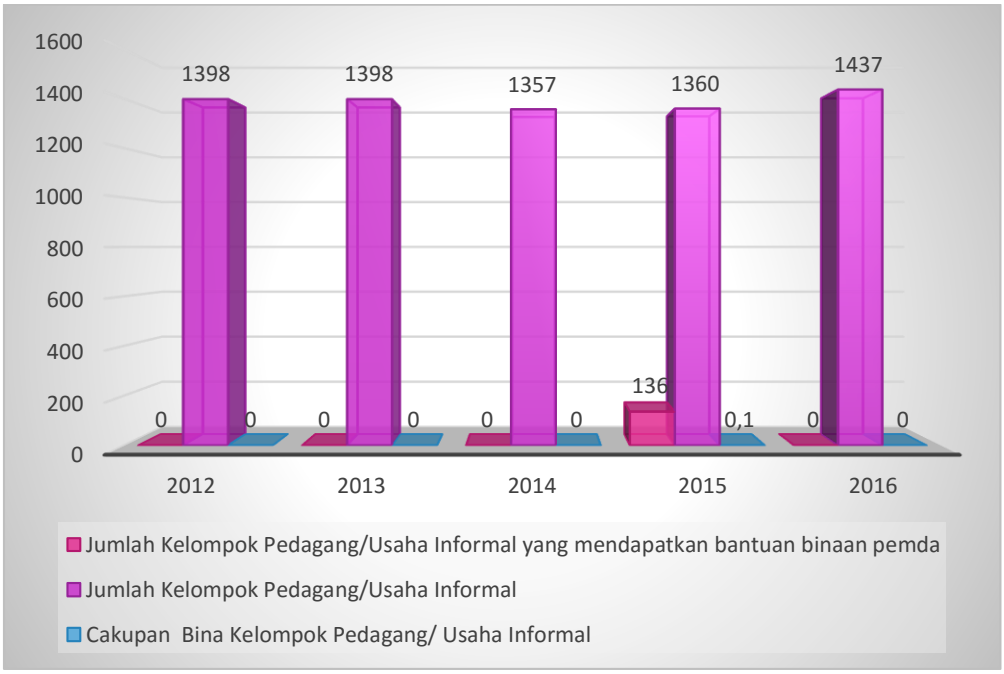

Sumber : Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017

Gambar 2.68 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Di Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

Gambar 2.68 menunjukkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, terlihat hanya pada Tahun 2015 sebesar 0,1 persen kelompok pedagang/usaha informal yang dibina oleh Pemerintah Daerah.

5. Perindustrian

1) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin merupakan Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah tahun berkenaan dibagi dengan jumlah kelompok pedagang atau usaha informal dikali 100 persen. Data cakupan bina kelompok pengrajin disajikan pada Gambar 2.69.

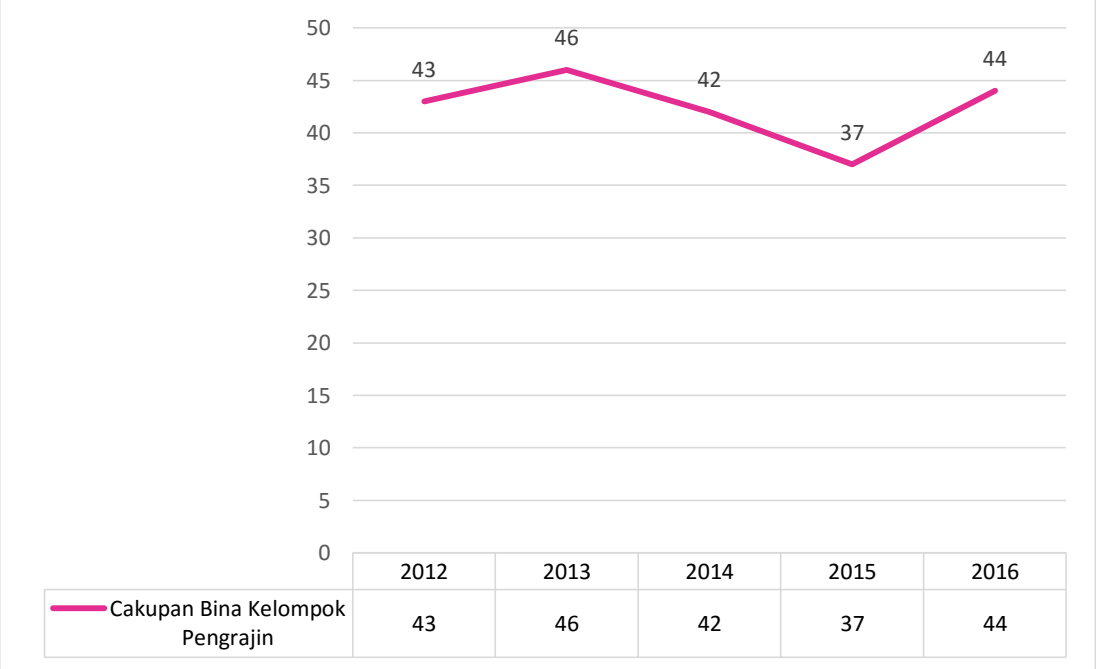

Sumber : Dinas koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017

Gambar 2.69 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2013 s/d 2017

Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 berfluktuasi. Tahun 2012 sebanyak 43 persen, Tahun 2013 sebesar 46 persen, Tahun 2014 sebesar 42 persen, Tahun 2015 sebesar 37 persen dan Tahun 2016 sebesar 44 persen.

6. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Buol dengan luas wilayah 4.043,57 KM² dan panjang pantai ± 167 KM² serta 6 buah pulau kecil, dengan potensi lestari 37.627,7 ton / tahun dan luas zona laut ± 3.777 km² memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat menyokong peningkatan pendapatan daerah. Potensi tersebut meliputi perikanan dasar laut, pesisir hingga daratan yang mencakup perairan umum, tambak dan budidaya air tawar serta dengan komoditas ikan tuna, tenggiri, selar, kembung, katombo, lajang, dan lain- lain. Data mengenai capaian Bidang Kelautan dan Perikanan disajikan pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105
Capaian Kinerja Kelautan Dan Perikanan

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Produksi perikanan	%	67,92	86,79	81,56	66,48	73,29
2.	Konsumsi ikan	%	43,90	68,29	70,73	73,17	92,68
3.	Cakupan Bina kelompok nelayan	%	25,56	30,11	97,89	40,00	24,62
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas perikanan Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.105 diatas dapat terlihat bahwa produksi perikanan fluktuatif. Tahun 2012 sebesar 67,92 persen, Tahun 2013 sebesar 86,79 persen, Tahun 2014 sebesar 81,48 persen. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 66,48 persen dan Tahun 2016 meningkat kembali menjadi 73,29 persen. Konsumsi ikan terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Tahun 2012 hanya 43,90 persen naik menjadi 92,68 pada Tahun 2016. Cakupan bina kelompok nelayan Tahun 2012 sebanyak 25,56 persen, Tahun 2013 sebanyak 30,11 persen, Tahun 2014 meningkat menjadi 97,89 persen, Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing – masing sebanyak 40,00

dan 24,62 persen. Untuk produksi perikanan kelompok nelayan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 tidak mengalami peningkatan, berada pada angka 15 persen setiap tahun.

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Capaian perencanaan pembangunan diukur dengan menggunakan beberapa indikator, diantaranya adalah ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan ketersediaan dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA. Data mengenai capaian pada Bidang Perencanaan Pembangunan disajikan pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106
Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

No.	URAIAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol, Tahun 2017

Data pada Tabel 2.106 memperlihatkan bahwa pada Tahun 2012 hingga Tahun 2016 seluruh dokumen perencanaan telah disusun dan ditetapkan dengan PERDA.

2. Keuangan

Indikator – indikator yang meniliai capaian Bidang Keuangan adalah:

1) Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK terhadap laporan keuangan adalah hasil opini BPK terhadap hasil kinerja keuangan daerah.

2) Persentase SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Persentase SILPA adalah perbandingan antara total SILPA dengan total APBD.

3) Persentase SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

Persentase SILPA terhadap APBD adalah perbandingan antara total SILPA dengan total APBD.

4) Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana adalah perbandingan antara jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan dengan total program dalam APBD.

5) Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan adalah perbandingan antara jumlah belanja bidang urusan pendidikan dengan total APBD.

6) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan adalah perbandingan antara jumlah belanja urusan kesehatan dengan total APBD.

7) Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah perbandingan antara persentase belanja langsung terhadap APBD dengan

persentase belanja tidak langsung terhadap APBD. Data mengenai capaian bidang urusan keuangan disajikan pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107
Capaian Bidang Urusan Keuangan di Kabupaten Buol
Tahun 2012 – 2016

No.	URAIAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	*Disclaimer*	WDP	WDP	WTP
2.	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	0,83	3,4	4,09	4,36	0,92
3.	Persentase belanja pendidikan (20%)	37,18	34,38	32,43	26,33	23,45
4.	Persentase belanja kesehatan (10%)	9,53	10,02	10,78	11,18	15,18
5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	0,761	1,042	1,048	1,151	0,989
6.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,1	0,09	0,08	0,1	0,01
7.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 s/d 2017

Data pada Tabel 2.107 terlihat bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan Tahun 2012 WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tahun 2013 *disclaimer,* Tahun 2014 hingga Tahun 2015 WDP dan Tahun 2016 berhasil memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Persentase SILPA terhadap APBD Tahun 2012 sebesar 0,83 persen, Tahun 2013 sebesar 3,4 persen, Tahun 2014 sebesar 4,09 persen, Tahun 2015 sebesar 4,36 persen dan Tahun 2106 hanya sebesar 0,92 persen. Persentase belanja pendidikan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 berhasil melebihi persentase minimal, yaitu Tahun 2012 sebesar 37,18 persen, Tahun 2013 sebesar 34,38 persen, Tahun

2014 sebesar 32,43 persen, Tahun 2015 sebesar 26,33 persen dan tahun 2016 sebesar 23,45 persen. Persentase belanja kesehatan Tahun 2012 tidak memenuhi target 10 persen, yakni 9,53 persen, Tahun 2013 hingga Tahun 2016 melebihi target, yakni Tahun 2013 sebesar 10,02 persen, Tahun 2014 sebesar 10,78 persen, Tahun 2015 sebesar 11,18 persen dan Tahun 2016 sebesar 15,18 persen. Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung berfluktuasi. Tahun 2012 dan 2016 belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Sedangkan Tahun 2013 hingga Tahun 2015 belanja langsung melebihi jumlah belanja tidak langsung. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2012 sebesar 0,1 persen, Tahun 2013 sebesar 0,09 persen, Tahun 2014 sebesar 0,08 persen, Tahun 2015 sebesar 0,1 persen dan tahun 2016 sebesar 0,01 persen. Penetapan APBD sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 tepat waktu.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan memiliki 6 (enam) indikator. Data mengenai capaian urusan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan disajikan pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108
Capaian Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

No.	URAIAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (hari)	14	14	14	14	14
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	64,89	65,96	71,45	73,01	76,21

3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	0,75	0,84	0,94	3,99	8,92
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	34	37	36	36
5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.808	1.772	1.517	1.989	1.883
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.745	2.709	2.614	2.495	2.487

Sumber : BPKSDM Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Tabel 2.108 memperlihatkan data rata – rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 adalah selama 14 hari. Persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal hingga Tahun 2016 mencapai 76,21 persen sedangkan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat sedikit, yakni Tahun 2016 baru mencapai 8,92 persen. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah sejumlah 36 pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 serta Tahun 2016. Tahun 2013 dan Tahun 2014 masing – masing sejumlah 34 dan 37 jabatan. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2012 sejumlah 1.808 jabatan, Tahun 2013 sejumlah 1.772 jabatan, Tahun 2014 sejumlah 1.517 jabatan, Tahun 2015 sejumlah 1.989 jabatan dan Tahun 2016 sejumlah 1.883 jabatan. Jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2012 sejumlah 2.745 jabatan, Tahun 2013 sejumlah 2.709 jabatan, Tahun 2014 sejumlah 2.614 jabatan, Tahun 2015 sejumlah 2.495 jabatan dan Tahun 2016 sejumlah 2.487 jabatan.

4. Penelitian dan pengembangan

1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbagan

Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan jumlah kelitbangan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dibagi dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dikali seratus persen. Rencana implementasi kelitbangan sepanjang Tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Gambar 2.70.

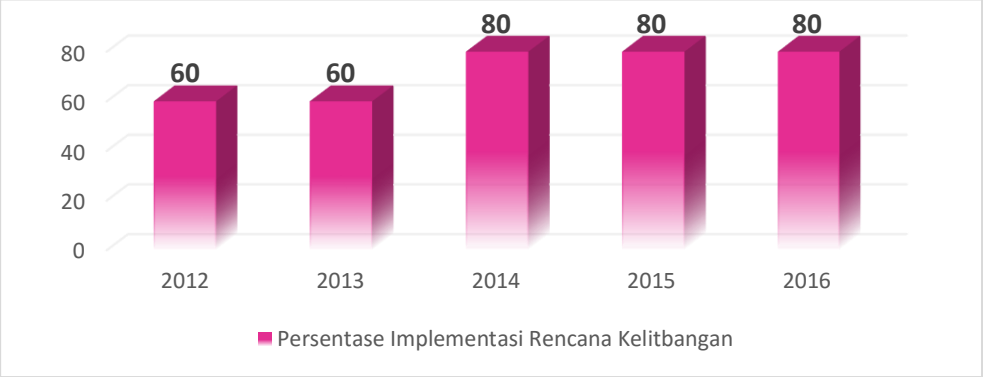

Sumber: Bappeda Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.70 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2012 - 2016

Berdasarkan Gambar 2.70, terjadi peningkatan persentase implementasi kelitbangan dari 60 persen pada Tahun 2012 menjadi 80 persen hingga Tahun 2016.

2. Persentase Pemenfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemenfaatan hasil kelitbagan merupakan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kelitbangan dalam rencana kerja perangkat daerah dikali dengan seratus persen. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 2.71.

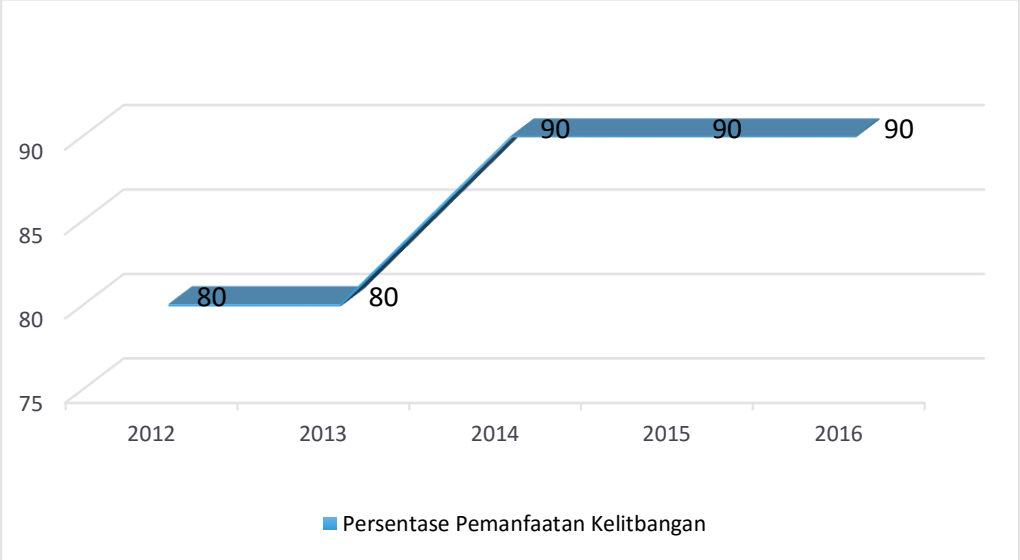

Sumber: Bappeda Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.71 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Buol Tahun 2012 -2106

Berdasarkan Tabel 2.71, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan meningkat dari Tahun 2012 sebesar 80 persen menjadi 90 persen hingga Tahun 2016.

5. Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat mempunyai beberapa fungsi pertama Perencanaan Program Pengawasan. kedua, meruuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan. Ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

Adapun indikator Pengawasan dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.109.

Tabel 2.109
Persentase Tindak Lanjut, Pelanggaran dan Jumlah Temuan BPK

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Presentase tindak lanjut	%	86,33	69,23	51,21	95,70	36,36
2.	Presentase Pelangaran Pegawai	%	0,11	2,79	4,24	3,08	0,68

3.	Jumlah Temuan BPK	Jumlah	21	27	39	26	15

Sumber: Kantor Inspektorat Kabupaten Buol Tahun 2013 s/d 2017

Untuk indikator Presentase tindak lanjut didapat berdasarkan jumlah temuan yang ditindak lanjuti dibagi dengan jumlah total temuan di kali 100 persen sehingga pada Tahun 2012 mendapatkan jumlah 86,33 persen, kemudian pada Tahun 2013 sampai Tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 51,21 persen, namun pada Tahun 2015 meningkat menjadi 95,70 persen, tetapi pada tahun 2016 terjadi lagi penurunan sebesar 36,36 persen. Kemudian Presentase Pelangaran Pegawai didapatkan berdasarkan jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dikenai sangsi di bagi dengan jumlah total ASN kali 100 persen sehingga pada tahun 2012 mencapai 0,11 persen, kemudian pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 mengalami peningkatan tetapi pada Tahun 2016 terjadi penurunan. Selanjutnya Jumlah Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2012 berjumlah 21 temuan sampai Tahun 2015 terjadi peningkatan namun pada Tahun 2016 tidak terjadi peningkatan.

6. Sekretariat Dewan

Hasil pencapaian Bidang Sekretariatan Dewan sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110
Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Dewan

No.	URAIAN	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Buol Tahun 2017

Pada Tabel 2.110 terlihat bahwa sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016 sudah tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buol, Sudah tersusun dan terintegrasinya program – program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Tahunan Kabupaten Buol, serta sudah terintegrasi program–program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi umum aspek daya saing daerah merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator capaian yang telah diolah pada tahapan perumusan, khususnya indikator yang dapat

menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Data dan informasi hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Buol dapat dilihat pada Tabel 2.111 berikut:

Tabel 2.111
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2016

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,31	7,33	6,09	6,06	3,64	5,5	<
2	Laju inflasi	6,03	7,2	6,59	7,03	4,38	<10	=
3	PDRB Perkapita	23.503.695	26.028.893	28.621.583	30.720.583	31.700.727	32.000.000	<
4	Indeks Gini	0,35	0,33	0,32	0,31	0,30	0,37	<
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	84,01	84,97	85,82	83,64	83,32	85	<
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,98	64,5	65,41	65,61	66,37	66,37	=
7	Angka melek huruf	97,69	97,75	97,51	98,29	98,32	98,32	=
8	Angka rata - rata lama sekolah (tahun)	7.92	8,04	8,3	8,32	8,62	9	<
9	Angka usia harapan hidup	65,86	65,95	66,66	66,96	66,93	68	<
10	Persentase balita gizi buruk	0,39	0,09	0,16	0,14	0,10	0,40	>
11	Prevalensi balita gizi kurang	0,8	0,8	0,5	0,4	0,1	0,50	>
12	Cakupan desa siaga aktif	58	67	67	67	90	90	=
13	Angka partisipasi angkatan kerja	68	66	69	67	64	64	=
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,74	66,18	66,31	67.89	68.32	58,32	>
15	Tingkat pengangguran terbuka	2,26	1,74	1,99	3,58	2,52	2,52	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
16	Rasio penduduk yang bekerja	0,98	0,96	0,97	0,99	0,96	0,96	=
17	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	44	50	58	68	61	46	<
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	3,42	5,34	5,60	5,52	5,90	5,90	=
19	Opini BPK	WDP	*Disclaimer*	WDP	WDP	WTP	WTP	=
20	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75	76	77	78	79	79	=
21	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	52,06	51,77	51,16	49,68	48,06	52	<
22	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	5,71	5,31	4,94	4,57	4,43	5,5	<
23	Produksi sektor pertanian	9.874,17	33.280,75	30.631,34	23.522,53	23.657,53	26.701,50	>
24	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	32,27	32,90	33,14	32,07	30,20	35	<
25	Produksi sektor perkebunan	259.640,73	136.514,83	229.050,76	31.836,92	32.119,91	37.225,06	<
26	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,5	0,51	0,53	0,54	0,56	1	<
27	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	3,33	3,23	3,13	3,15	3,28	3,4	<
28	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,19	5,99	5,82	5,76	5,87	7	<
29	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	13,14	13,03	13,03	13,5	14,01	15	<
30	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	3,05	5,96	5,66	10,59	17,05	15	<
31	Pertumbuhan Industri	2,2	2,5	7	10	15	15	=
ASPEK DAYA SAING DAERAH								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	247	283	327	393	618	618	=
2	Nilai Tukar Petani	-	-	-	-	-	-	
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita					41,92	41,92	=
4	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	33,33	40,2	47	52	57	65	<
5	Angka kriminalitas yang tertangani	6	4	21	27	32	35	<
6	Rasio ketergantungan	0,50	0,7	0,95	0,7	0,59	0,59	=
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Pendidikan								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58	56	54	53	54	60	<
2	Angka partisipasi kasar SD / MI	107,81	100,95	101,62	104,49	102,89	100	>
3	Angka partisipasi kasar SMP / MTs	91,55	77,26	97,36	97,57	93,66	90	>
4	Angka partisipasi kasar SMA / MA	87	87,86	88,94	85,22	82,24	80	>
	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1	SD/sederajat	35,42	33,73	33,20	34,40	35,20	35,20	=
2	SLTP/Sederajat	18,44	19,12	20,65	20,95	30,00	30	=
3	SLTA/Sederajat	15,9	17,75	17,86	17,40	17.57	20,00	>
4	Diploma (D1/D2/D3)	2,28	1,40	2,10	2,61	2,70	2,80	<
5	Sarjana (S1/S2/S3)	3,88	3,47	4,91	4,75	4,80	5,00	<
	Angka Partisipasi Murni							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	91,02	91,15	92,25	90,03	92,44	96	>
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	60,39	57,29	76,66	72,43	72,28	70	>
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	46,16	62,17	66,76	65,62	65,24	64	>
5	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	89	97,95	98,24	98,94	99,1	100	>
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	78	84,75	94,44	92,83	92,44	95	<
	Angka Putus Sekolah:							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,52	0,51	0,54	0,45	0,49	<7	>
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,56	0,57	0,58	1,01	0,56	0	<
4	**Angka Kelulusan:**							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	98,54	98,6	98,5	98,68	97	98	<
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	96,56	96,66	98,5	98,2	95	95	=
5	**Angka Melanjutkan (AM): (%)**							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	93	98	98	98	95	100	<
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA(%)	93	95	95	95	98,2	100	<
	Fasilitas Pendidikan:							
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	95	98	98	98	95	100	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	58	58	58	58	62	75	<
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	86,25	87,19	96,1	86,66	88,36	95	<
5	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	32,76	30,29	28,83	27,19	20,56	30	<
6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	599	596	740	772	664	300	<
7	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	570	561	1,116	914	1,258	350	<
8	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	599	596	740	772	664	320	<
9	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	95,64	96,35	97,51	97,12	97,2	96	=
10	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97.69	97.75	97.51	98.29	98.32	98	=
11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	66.42	71.71	64.15	66.56	64.27	68	<
Kesehatan								
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	9	3	2	2	2	2	=
2	Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 Kelahiran Hidup	994	997	998	998	998	998	=
3	Rasio posyandu per satuan balita	12	11	12	13	12	10	>
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,8	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
5	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0074	0,0073	0,007	0,0067	0,0066	0,007	>
6	Rasio dokter per satuan penduduk	0,19	0,23	0,16	0,09	0,10	0,25	<
7	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	5	4	4	4	4	5	>
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	45	46	45	45	93	93	=
9	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	86	86	86	86	86	90	<
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37	24	25	21	35	20	>
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	=
13	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	=
14	Cakupan kunjungan bayi	77	93	77	85	87	90	=
15	Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100	100	=
16	Cakupan pembantu puskesmas	49	49	49	49	49	50	<
17	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	75	76	75	76	87	85	>
18	Cakupan pelayanan nifas	75	78	74	80	70	85	>
19	Prevalensi HIV/AIDS	0,002	0,009	0,009	0,009	0,009	0	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
20	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi <24 Jam	70	100	90	100	100	100	=
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Pekerjaan Umum:								
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,3	0,34	0,4	0,5	0,66	0,75	<
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	=
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0	0	0	0	0	0	=
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	21,87	28,18	30,92	41,62	58,97	75	>
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,13	0,34	0,42	0,54	0,85	1	<
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,12	0,12	0.12	0,12	0,12	<0,5	>
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	-	36,74	35,58	50	<
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	2,05	1,97	1,9	1,82	1,76	<2,5	>
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	12	33	40	51	80	85	<
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	0	0	0	0	0	0	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	2	13,88	25,2	27,71	31,2	50	<
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	64	65	62	62	62	75	<
13	Rasio Jaringan Irigasi	64	65	62	62	62	75	<
14	Persentase penduduk berakses air minum	-	-	-	40,88	51,88	75	<
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	-	-	-	40,38	51,88	76	<
16	Persentase areal kawasan kumuh	0	0	0	0	8.31	10,71	<
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0	0	0	0	0	20	<
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	36,37	52,60	51,41	134,22	131,34	100	>
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,87	1,80	2,28	2,23	2,18	2,18	=
Penataan Ruang:								
1	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,0024	0,0024	0,011	0,015	0,018	0,02	<
2	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0	=
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
1	Rasio rumah layak huni	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,25	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2	Rasio permukiman layak huni	0	0	0	0	0,95	1	
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	58,77	60,67	61,64	62,75	65,59	70	<
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0	0	0	0	0,02	0,02	=
5	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	41,23	39,33	38,36	37,25	34,41	25	>
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	18	18	18	18	18	18	=
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	81	100	100	=
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	5	5	5	5	5	7,5	=
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0	0	0	0	0	0	=
5	Persentase Penegakan PERDA	10	80	60	40	10	100	=
Sosial								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	81,03	62,78	97	45,17	50	<
2	Persentase PMKS yang tertangani	100	81,03	62,78	97	45,17	50	<
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	0	0	0	0	10	<
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	0	100	0	75	80	100	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	77,2	0	73,93	79,56	100	<
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	0	0	0	50,7	50,7	75	<
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
Tenaga Kerja								
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0	5	2	3	10	<
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0	0	4,5	0	0	30	<
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	0	0	15	15,96	17,03	20	<
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	85	80	85	70	75	<
5	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,011	0,012	0,012	0,013	0,012	0,015	<
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	78	76	76	75	74	85	<
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	24	24	24	24	24	24	=
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	22	23	23	25	26	30	<
4	Rasio KDRT	0	0,1	0,1	0,2	0,1	0	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
Pangan								
1	Ketersediaan pangan utama (kg/perkapita)	139	105,58	103,86	103,86	103,86	132	<
Pertanahan								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	15,28	22,44	22,89	25,03	40,01	50	<
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	100	100	100	100	100	100	=
3	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100	100	<
Lingkungan Hidup								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	<
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	<
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
4	Timbulan sampah yang ditangani	12,37	3,45	6,54	7,95	11,58	15	<
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,86	0,49	0,55	0,48	0,55	0,64	=
2	Rasio bayi berakte kelahiran	1	1	1	1	1	1	=
3	Rasio pasangan berakte nikah	1	1	1	1	1	1	=
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,59	0,33	0,48	1	1	1	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	6,78	15,48	11,58	18,01	26,6	40	=
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	75	78	85	85	85	90	<
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	0,09	0,09	0,09	0,2	0,5	<
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1	1	1	1	=
4	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	=
5	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	=
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,2	2,3	2.3	2,3	2	<
2	Ratio Akseptor KB	95	96	93	90	97	90	>
Perhubungan								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	77,580	72,543	69,112	71,183	89,793	85.000	>
2	Rasio ijin trayek	0,0008	0,0010	0,0011	0,0011	0,0009	0,001	<
3	Jumlah uji kir angkutan umum	305	367	395	410	418	500	>
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	8	8	8	8	8	8	=
5	Persentase layanan angkutan darat	0,29	0,40	0,44	0,47	0,40	0,4	>
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,09	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
Komunikasi dan Informatika								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60	65	80	95	100	100	=
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,40	0,60	0,70	0,75	0,75	1,0	<
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	20,08	34,07	37,30	39,85	41,45	45	>
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,25	<
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,13	0,25	0,3	0,35	0,38	0,25	>
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
1	Persentase koperasi aktif	41,6	48,29	46,57	46,27	47,01	60	<
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	16,88	27,48	44,54	56,58	43,83	60	<
3	Persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	100	=
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	22,72	17,97	10,37	9,90	6,12	25	<
Penanaman Modal								
1	Jumlah investor berskala nasional	3	4	6	6	2	5	=
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional	-	-	-	319,206	343,975	450,000	<
3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	3,30	3,15	3,15	=
Kepemudaan dan Olah Raga								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	75	76.1	76.8	77.1	77.4	75	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2	Persentase wirausaha muda	79	81	83	84	85	75	>
3	Cakupan pembinaan olahraga	60	64	70	73	80	85	=
Statistik								
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
Persandian								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	5	<
Kebudayaan								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	2	4	3	2	2	=
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	7	7	7	7	7	7	=
Perpustakaan								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Rasio)	1,93	0,75	1,24	0,65	0,6	0,23	>
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Rasio)	0,15	0,17	0,17	0,17	0,21	0,118	>
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (*1000)	0,07	0,07	0,07	0,08	0,10	0,055	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	967	559	1244	651	912	997	<
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3,070	3,753	3,753	3,780	5,280	3,500	>
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (Persen)	0	0	0	0	0	2	<
kearsipan								
1	Persentase perangkat yang mengolah Arsip secara baku	78	83	85	87	88	85	>
2	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	10	<
Layanan Urusan Pilihan								
Pariwisata								
1	Kunjungan Wisata	51,30	67,20	82,23	83,67	85,57	80	>
2	Lama kunjungan Wisata (Hari)	3	3	3	3	3	3	=
3	PAD sektor pariwisata	0,92	1,88	2,49	2,29	1,61	2	<
Pertanian								
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	44,03	44,21	44,06	42,05	40,95	50	<
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	5,71	5,31	4,94	4,57	4,53	5	<
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	32,38	32,92	33,14	32,07	30,22	30	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	29,31	30,7	33,38	37,19	30,28	35	<
5	Cakupan bina kelompok petani	0	2,86	10,55	65,96	67,26	65	>
Energi dan Sumberdaya Mineral								
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	45,29	48,53	53,05	55,15	55,87	75	<
2	Rasio ketersediaan daya listrik	0,31	0,34	0,35	0,27	0,41	0,65	<
3	Persentase pertambangan tanpa izin	75,5	78,9	78,9	80,5	83,6	85	<
Perdagangan								
1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0	0	0	0,1	0	20	<
Perindustrian								
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	43	46	42	37	44	20	<
Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi perikanan	67,92	68,79	81,56	66,48	73,29	100	<
2	Konsumsi ikan	43,90	68,29	70,73	73,17	92,68	100	<
3	Cakupan bina kelompok nelayan	25,56	30,11	97,89	40,00	24,62	35	<
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	15	15	15	15	15	15	=
Penunjang Urusan								
Perencanaan Pembangunan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	=
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100	100	=
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100	100	=
Keuangan								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	*Disclaimer*	WDP	WDP	WTP	WTP	=
2	Persentase SILPA terhadap APBD	0,83	3,4	4,09	4,36	0,92	<3	>
3	Persentase belanja pendidikan	37,18	34,38	32,43	26,33	23,45	>20	=
4	Persentase belanja kesehatan	9,53	10,02	10,78	11,18	15,18	>10	=
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	9,76	1,04	1,05	1,15	0,99	1	>
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,1	0,09	0,08	0,1	0,01	0,01	=
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	14	14	14	14	14	14	=
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	64,89	65,96	71,45	73,01	76,21	75	>
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,75	0,84	0,94	3,99	8,92	20	<
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	34	37	36	36	36	<
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.808	1.772	1.517	1.989	1.883	1.883	=
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2.745	2.709	2.614	2.495	2.487	2.487	=
Penelitian dan pengembangan								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	60	60	80	80	80	85	<
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	60	80	90	90	90	90	<
Pengawasan								
1	Persentase Tindak Lanjut	86,33	69,23	51,21	95,70	36,36	59,34	<
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,11	2,79	4,24	3,08	0,68	0,51	>
3	Jumlah Temuan BPK	21	27	39	26	15	13	<
Sekretariat Dewan								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

Berdasarkan Tabel 2.111, capaian indikator pada akhir periode RPJMD 2012-2017 belum sepenuhnya sesuai target yang ingin dicapai. Dari 239 indikator, terdapat 82 indikator yang telah sesuai target yang ditentukan, 55 indikator sudah melampaui target yang telah ditentukan dan 102 indikator yang belum mencapai target. Capaian indikator yang belum memenuhi target RPJMD periode sebelumnya menjadi fokus pemerintah dalam menentukan target RPJMD periode selanjutnya yang dituangkan kedalam rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran indikator program kegiatan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain masih perlu adanya peningkatan dibidang Perekonomian, angka kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur (Permukiman, jalan), peningkatan nilai tambah pertanian/perkebunan, sektor industri, sektor pariwisata, perdagangan dan

perindustrian, swasembada pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perhubungan (rasio izin trayek), komunukasi dan informatika, usaha kecil menengah, persandian, perpustakaan dan kearsipan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan.

Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang menurun pada periode sebelumnya disebabkan oleh dominasi di sektor perkebunan yang dikelola langsung pihak swasta, dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh penurunan nilai produksi perkebunan. Permasalahan selanjutnya adalah tingginya angka kemiskinan disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk, tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi, tingkat pengangguran terbuka, kriminalitas, angka putus sekolah dan kesempatan pendidikan, kesehatan (stunting), fasilitas jalan dan listrik pedesaan, kapasitas sumber daya manusia, sektor pariwisata yang belum terkelola, kurangnya sektor-sektor industri.

1. Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga per Kapita

Tingkat pengeluaran atau per kapita penduduk terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan non makanan, dimana sampai dengan Tahun 2016 tingkat pengeluaran per kapita untuk makanan penduduk Kabupaten Buol senantiasa lebih tinggi dari pengeluaran untuk non makanan dengan nilai selisih sebesar 99.866 rupiah.

Tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Buol menunjukan tren peningkatan selama periode 5 (lima) Tahun terakhir, dimana pada Tahun 2012 tingkat pengeluaran perkapita sebesar Rp. 246.738 dan Tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 479.028, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kabupaten Buol Tahun 2012 - 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Makanan	140.065	162.731	184.873	222.649	359.096
2	Non Makanan	106.673	120.512	141.749	169.997	259.230
Total		**246.738**	**283.243**	**326.622**	**392.646**	**618.326**

Sumber: SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.111 diatas, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita semakin meningkat sejak Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Tahun 2012 Rp 246.738 meningkat menjadi Rp 618.326 pada Tahun 2016.

2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita adalah perbandingan antara total pengeluaran rumah tangga non pangan dengan total pengeluaran. Tahun 2016 mencapai 41,92 persen.

3. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah jumlah desa atau kelurahan berswasembada dibandingkan dengan jumlah desa atau kelurahan. Data persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa disajikan pada Gambar 2.72.

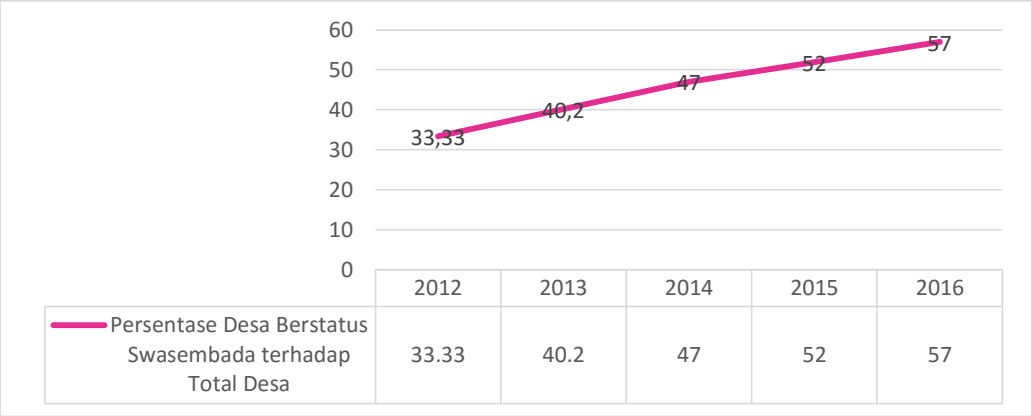

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol Tahun 2017

Gambar 2.72 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Tahun 2012 sebesar 33,33 persen, Tahun 2013 sebesar 40,2 persen, Tahun 2014 sebesar 47 persen, Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing – masing sebesar 52 persen dan 57 persen.

4. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas adalah jumlah kasus kriminalitas yang ditangani dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Angka kriminalitas di Kabupaten Buol sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2015 disajikan pada Gambar 2.73.

Sumber Data : Badan Kesbangpol Tahun 2017

Gambar 2.73 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Buol Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan Gambar 2.73 terlihat bahwa angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Buol Tahun 2012 sebesar 6, Tahun 2013 turun menjadi 4. Mulai Tahun 2014 hingga Tahun 2016 naik masing – masing 21, 27 dan 32.

5. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besaranya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif, yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk yang berusia 65 tahun (karena umumnya sudah melewati masa pensiun). Data rasio ketergantungan sepanjang Tahun 2012 hingga Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.113.

Tabel 2.113
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Buol
Tahun 2012 - 2016

NO.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah penduduk usia < 15 Tahun	36.278	53.330	54.328	53.330	52.755
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 Tahun	4.231	4.257	25.267	4.257	5.451
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	40.509	57.587	79.595	57.587	58.206
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	80.811	82.330	83.867	82.330	98.974
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,50	0,70	0,95	0,70	0,59

Sumber : SIPD Kabupaten Buol Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.111, Rasio Ketergantungan atau DR (Dependency ratio) merupakan salah satu indikator yang penting. Semakin tingginya presentase rasio menunjukan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka rasio ketergantunggan Tahun 2012 sebesar 0,50, untuk usia yang tingkat tidak produktif usia < 15 tahun dan usia >64 sebesar 40.509 jiwa dan jumlah penduduk yang produktif 15-64 sebesar 80,81 sedangkan pada Tahun 2016 rasio ketergantungan sebesar 0,59, usia yang tingkat tidak produktif usia < 15 Tahun dan usia > 64 sebesar 52.755 jiwa dan jumlah penduduk yang produktif 15-64 tahun sebesar 98.974 jiwa.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah dituntut agar lebih inovatif dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah dijabarkan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup keuangan daerah ini meliputi: hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan pada azas umum bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadian, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Secara tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna didukung dengan bukti-bukti aministrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Taat pada peraturan perundangan-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;

4. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
5. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;
6. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
7. Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
8. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyekitf;
9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; dan
10. Manfaat untuk masyarakat dalam arti bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran meliputi: a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Implementasinya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A) Pendapatan Daerah

Kinerja keuangan daerah diindikasikan dengan kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; sumber kedua adalah dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sumber pendapatan daerah juga dapat berasal dari pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Pendapatan daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan pendapatan daerah akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan keengganan berinvestasi. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang cukup besar.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan

komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil usaha daerah akan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah. Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek pendapatan asli daerah. Arah pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penertiban sistem dan prosedur pemungutan pendapatan daerah termasuk diantaranya berbasis pada teknologi informasi;
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah termasuk diantaranya dengan memberikan kemudahan dalam perijinan;
c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
d. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
e. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
f. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah; dan
g. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.

Sebagaimana disebutkan diatas, upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah diantaranya dilakukan dengan kebijakan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah. Namun demikian manajemen pengelolaan dan audit kinerja juga menjadi komponen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan menerapkan manajemen pengelolaan dan audit kinerja yang objektif maka akan berdampak pada efisiensi, transparansi dan efektif menutup kebocoran-kebocoran. Intensifikasi dan ekstensifikasi juga direncanakan dengan selalu

mempertimbangkan keseimbangan objek pajak dan retribusi dengan beban yang ditanggung masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buol telah melakukan berbagai upaya dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	**PENDAPATAN**	**478,711.33**	**560,953.23**	**626,648.52**	**835,030.99**	**902,028.57**	**17.54**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**16,351.80**	**29,981.34**	**35,113.22**	**46,077.41**	53,259.65	**36.80**
1.1.1.	Pajak Daerah	3,041.03	10,642.87	6,718.15	6,118.24	6,896.35	54.22
1.1.2.	Retribusi Daerah	8,245.64	10,755.58	3,078.89	3,434.64	2,557.19	(13.73)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,499.58	1,289.65	1,232.54	1,644.59	2,221.36	12.52
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3,565.55	7,293.24	24,083.64	34,879.94	41,584.74	99.68
1.2.	**Dana Perimbangan**	**425,041.20**	**485,302.38**	**530,676.79**	**691,109.69**	**713,728.17**	**14.26**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24,619.99	29,425.28	22,431.09	20,519.45	21,205.80	(2.36)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	359,941.57	405,310.34	454,371.72	472,180.19	531,825.93	10.32
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	40,479.64	50,566.76	53,873.98	198,410.05	160,696.44	70.18
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**37,318.33**	**45,669.50**	**60,858.50**	**97,843.89**	**135,040.75**	**38.61**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	1,283.02	763.22	-	-	(35.13)
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12,969.65	11,029.83	13,176.48	10,041.52	19,044.80	17.59
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	23,060.58	30,204.34	41,919.36	73,769.15	113,690.57	49.96
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1,288.10	2,476.54	3,175.00	10,075.11	663.41	61.09
1.3.5.	Pendapatan Lainnya	-	675.78	1,824.44	3,958.11	1,641.97	57.10

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Tabel 3.1. di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp478.711.331.992,90,-, meningkat menjadi sebesar Rp560.953.229.171,69,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp626.648.519.846,95,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp835.030.991.971,02,- di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar Rp902.028.567.650,15,-. Jika dibandingkan besaran realisasi pendapatan daerah antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun 2016 Kabupaten Buol masih berada pada posisi kesepuluh dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dan secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

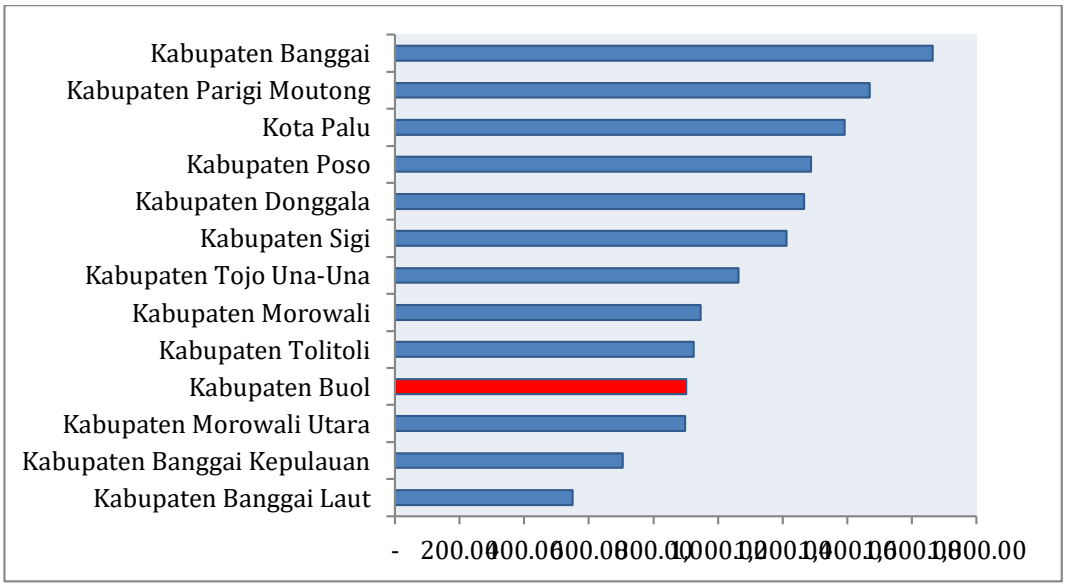

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 daerah yang memiliki realisasi pendapatan daerah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai sebesar Rp1.663.759.377.324,43,-, kemudian diikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp1.469.285.280.816,05,- dan Kota Palu sebesar

Rp1.392.215.925.000,57,-. Kemudian dengan besaran Rp549.817.139.479,67,- pada Tahun 2016 menjadikan Kabupaten Banggai Laut sebagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki realisasi pendapatan daerah terendah. Sementara itu, kecepatan perkembangan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tertentu dapat dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

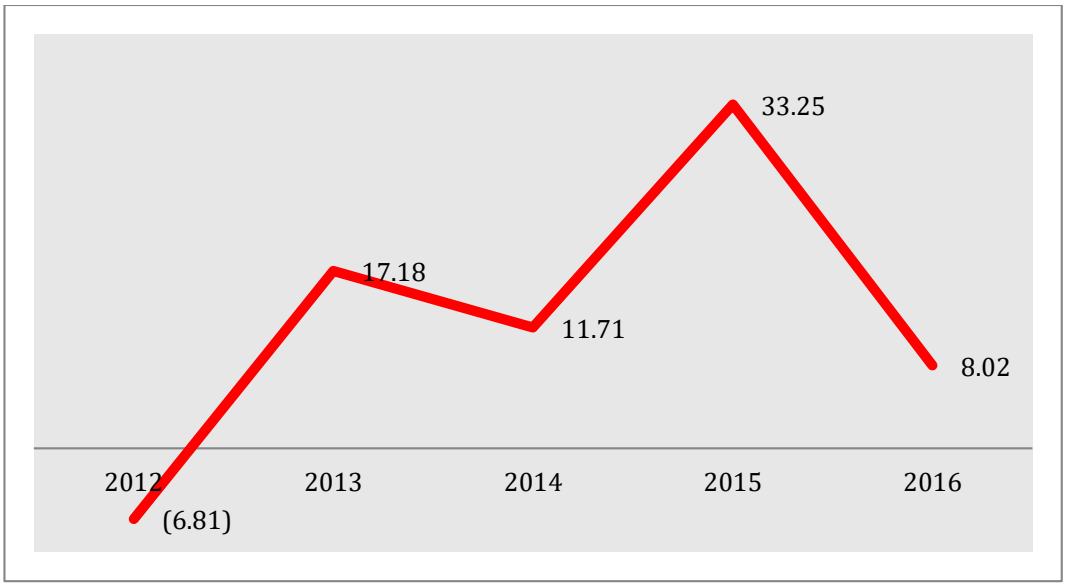

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol secara umum memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat pertumbuhannya selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2012 pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebesar -6,81 persen, meningkat menjadi sebesar 17,18 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar 11,71 persen, meningkat kembali menjadi sebesar 33,25 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 8,02 persen. Kemudian proporsi

realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

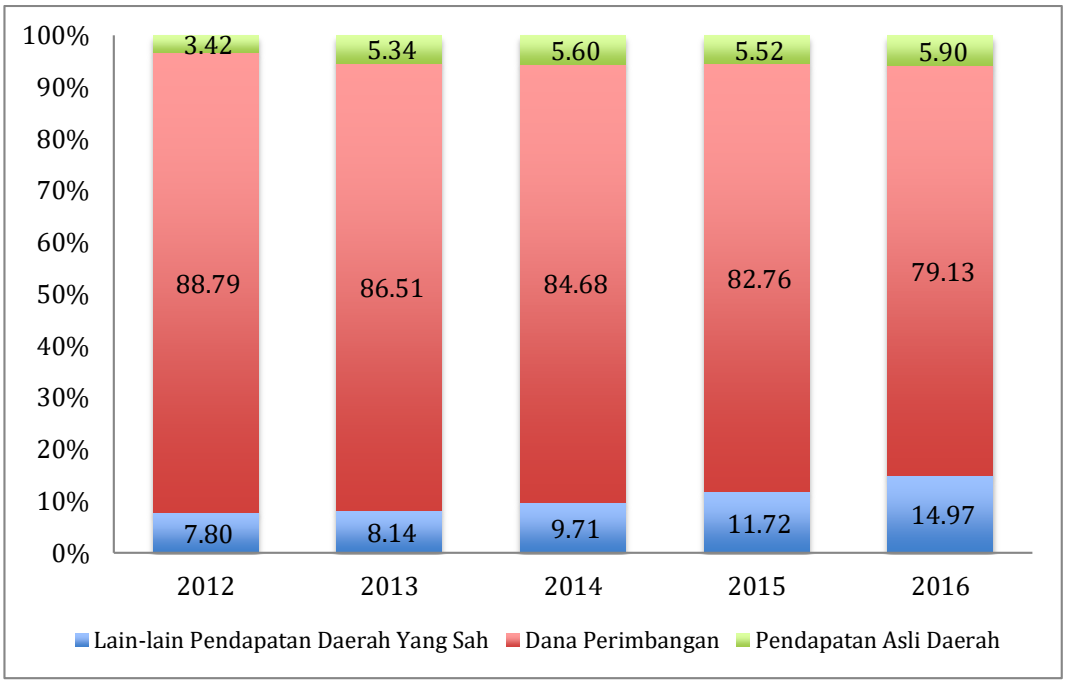

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.3. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Gambar 3.3. di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi realisasi pendapatan daerah walaupun masih didominasi oleh dana perimbangan namun terjadi penurunan setiap tahunnya yakni pada Tahun 2012 sebesar 88,79 persen, menurun menjadi sebesar 86,51 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun lagi menjadi sebesar 84,68 persen, menurun menjadi sebesar 82,76 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun lagi menjadi sebesar 79,13 persen. Kontribusi pendapatan asli daerah tergolong masih sangat rendah namun mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni pada Tahun 2012 sebesar 3,42 persen, meningkat menjadi sebesar 5,34 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 5,60 persen, meningkat lagi menjadi sebesar 5,52 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 5,90 persen. Secara detail,

kinerja pelaksanaan komponen pembentuk pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pendapatan Asli Daerah

Sebagai komponen dari pendapatan daerah, pendapatan asli daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan pendapatan asli daerah berfungsi maksimal, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Strategi peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, mempelajari pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah lain maupun dengan badan swasta berupa kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan serta penyertaan modal pada badan usaha milik pemerintah atau merintis pembentukan perseroan daerah.

Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol selama periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp16.351.800.881,90,-, meningkat menjadi sebesar Rp29.981.344.208,69,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp35.113.223.859,95,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 46.077.409.009,02,-, di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp53.259.653.065,62,-. Kemudian perbandingan besaran realisasi pendapatan asli daerah antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

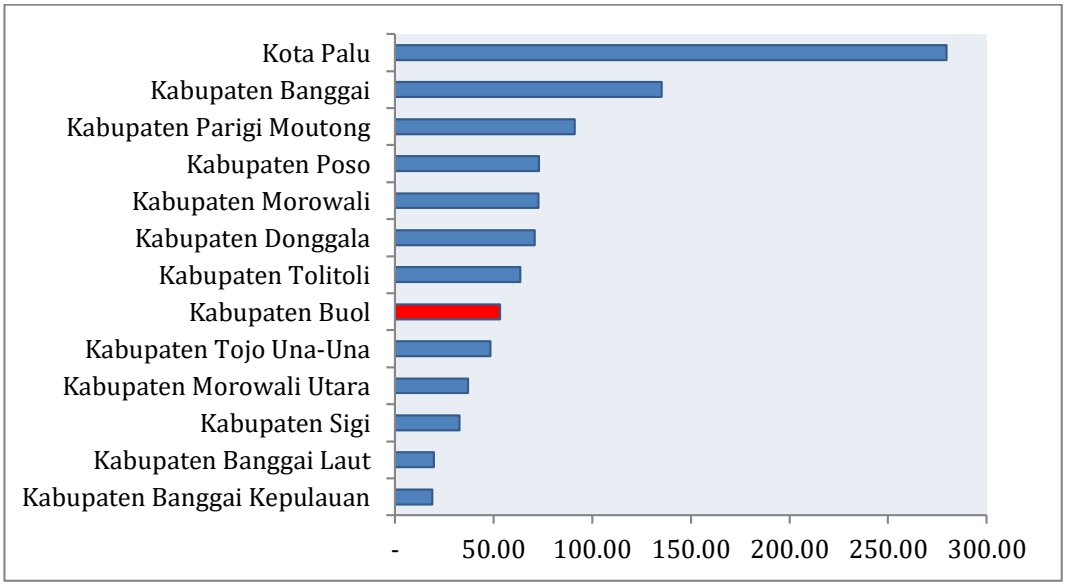

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.4. Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar 3.4. di atas diketahui bahwa jika dibandingkan besaran realisasi pendapatan asli daerah antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun 2016 Kabupaten Buol masih berada pada posisi kedelapan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2016 Kota Palu merupakan daerah yang memiliki realisasi pendapatan asli daerah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp279.586.962.580,57,-, kemudian diikuti oleh Kabupaten Banggai sebesar Rp135.255.638.703,43,- dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp91.176.502.632,05,-. Kemudian dengan besaran Rp18.882.843.132,69,- pada Tahun 2016 menjadikan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki realisasi pendapatan asli daerah terendah. Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

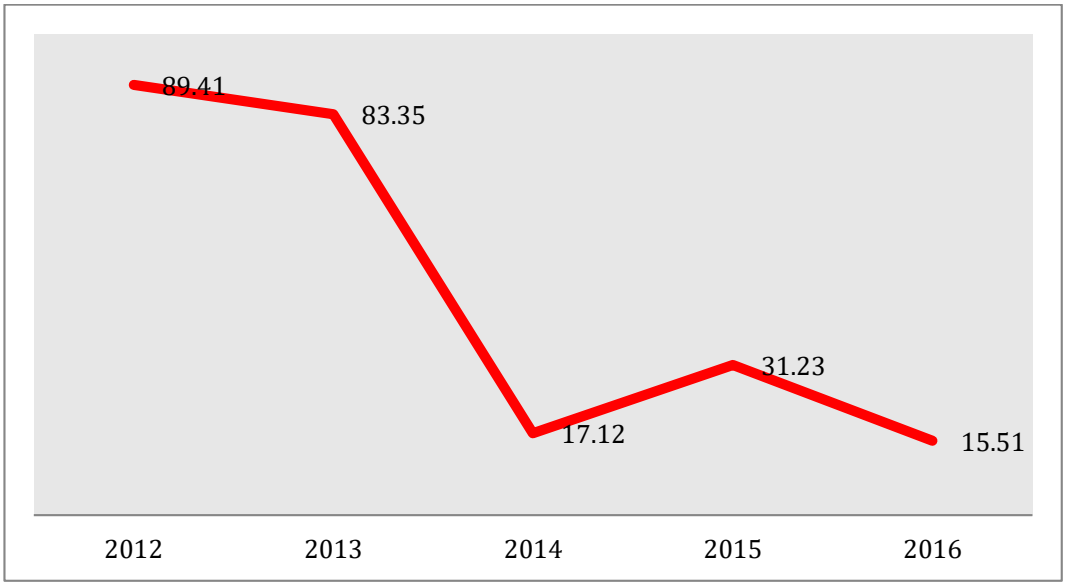

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.5. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami tren fluktuatif, yakni pada Tahun 2012 pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 89,41 persen, menurun menjadi sebesar 83,35 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun drastis menjadi sebesar 17,12 persen, meningkat menjadi sebesar 31,23 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 15,51 persen.

Kontribusi realisasi pendapatan asli daerah didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni pada Tahun 2012 sebesar 21,81 persen, meningkat menjadi sebesar 24,33 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 68,59 persen, meningkat menjadi sebesar 75,70 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 78,06 persen. Proporsi realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

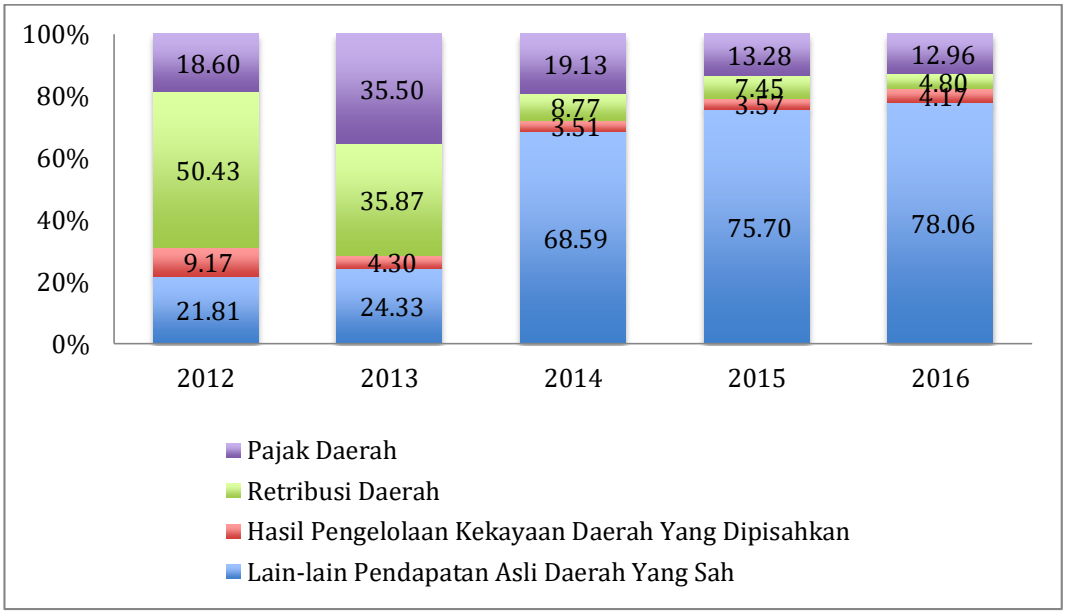

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.6. Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

(b) Dana Perimbangan

Realisasi dana perimbangan Kabupaten Buol selama periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp425.041.197.180,00,-, meningkat menjadi sebesar Rp485.302.382.225,00,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp530.676.792.099,00,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp691.109.692.078,00,-, di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp713.728.166.572,00,-. Jika dibandingkan besaran realisasi dana perimbangan antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun 2016 Kabupaten Buol masih berada pada posisi kesebelas dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dan secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

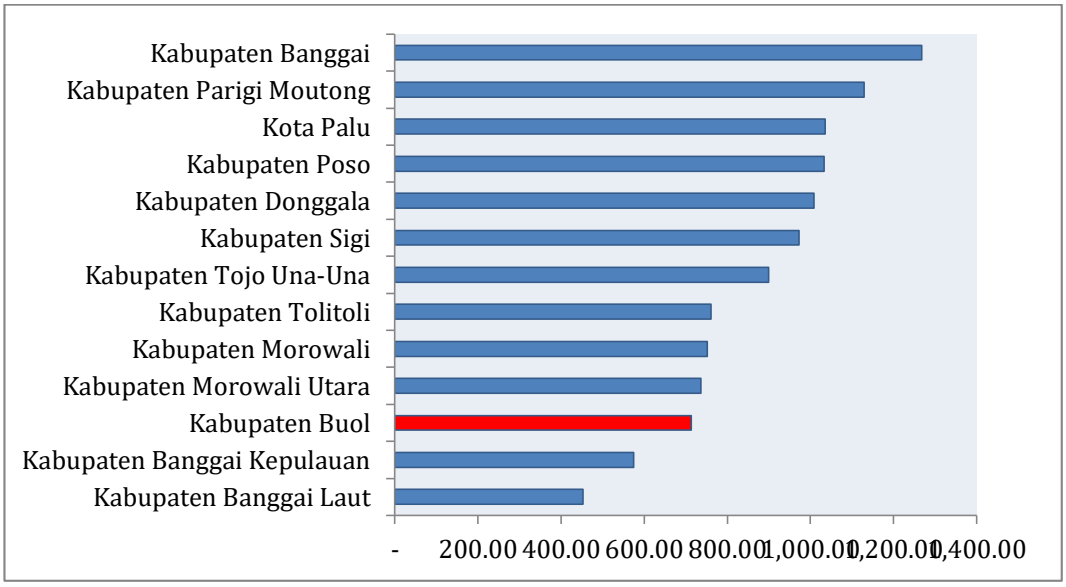

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.7. Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa pada Tahun 2016 daerah yang memiliki realisasi dana perimbangan tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai sebesar Rp1.268.265.659.448,00,-, kemudian diikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp1.128.642.215.189,00,- dan Kabupaten Poso sebesar Rp1.035.430.761.259,00,-. Kemudian dengan besaran Rp453.010.035.242,00,- pada Tahun 2016 menjadikan Kabupaten Banggai Laut sebagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki realisasi dana perimbangan terendah. Sedangkan pertumbuhan realisasi dana perimbangan Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

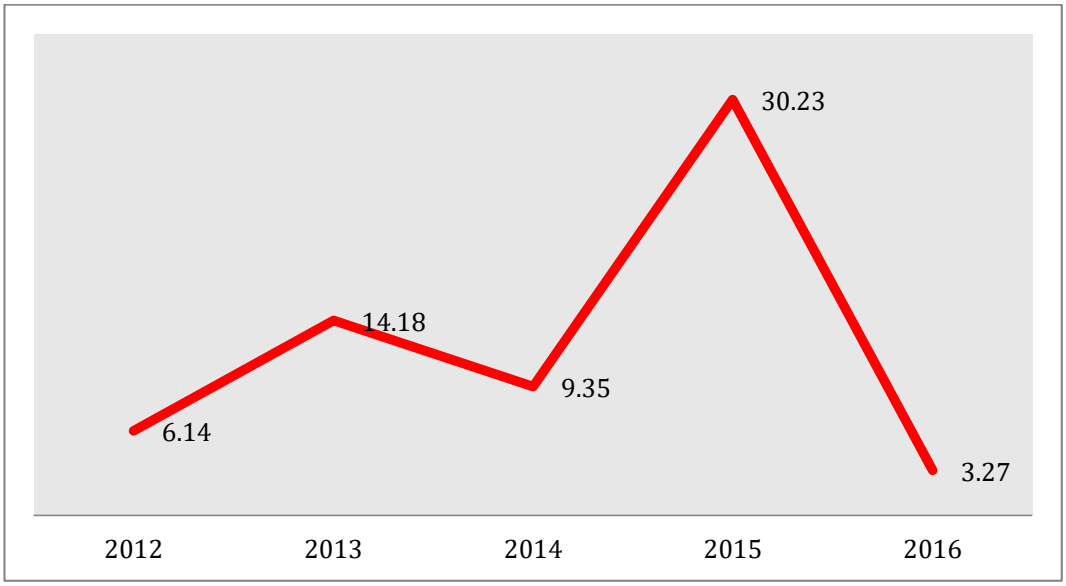

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.8. Pertumbuhan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Gambar 3.8. di atas menunjukkan bahwa realisasi dana perimbangan Kabupaten Buol secara umum memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat pertumbuhannya selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2012 pertumbuhan realisasi dana perimbangan sebesar 6,14 persen, meningkat menjadi sebesar 14,18 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun kembali menjadi sebesar 9,35 persen, meningkat menjadi sebesar 30,23 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 3,27 persen. Kemudian proporsi realisasi dana perimbangan Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

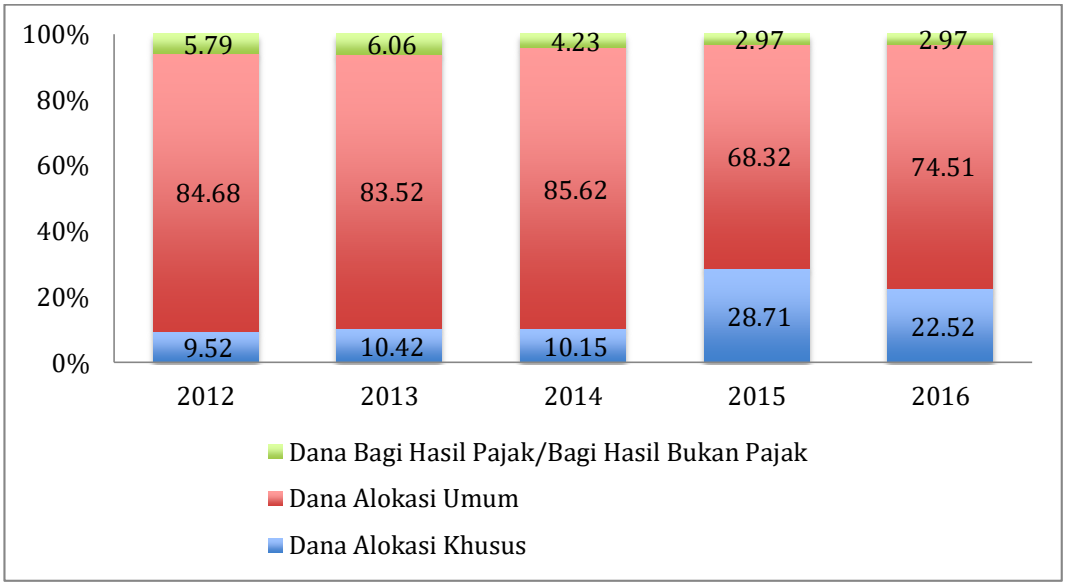

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.9. Proporsi Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Berdasarkan gambar 3.9. di atas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi realisasi dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum yakni pada Tahun 2012 sebesar 84,68 persen, menurun menjadi sebesar 83,52 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 85,62 persen, menurun kembali menjadi sebesar 68,32 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 74,51 persen.

(c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Buol selama periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp37.318.333.931,00,-, meningkat menjadi sebesar Rp45.669.502.738,00,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp60.858.503.888,00,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp97.843.890.884,00,-, di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp135.040.748.012,53,-. Kemudian perbandingan besaran realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah

antara Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

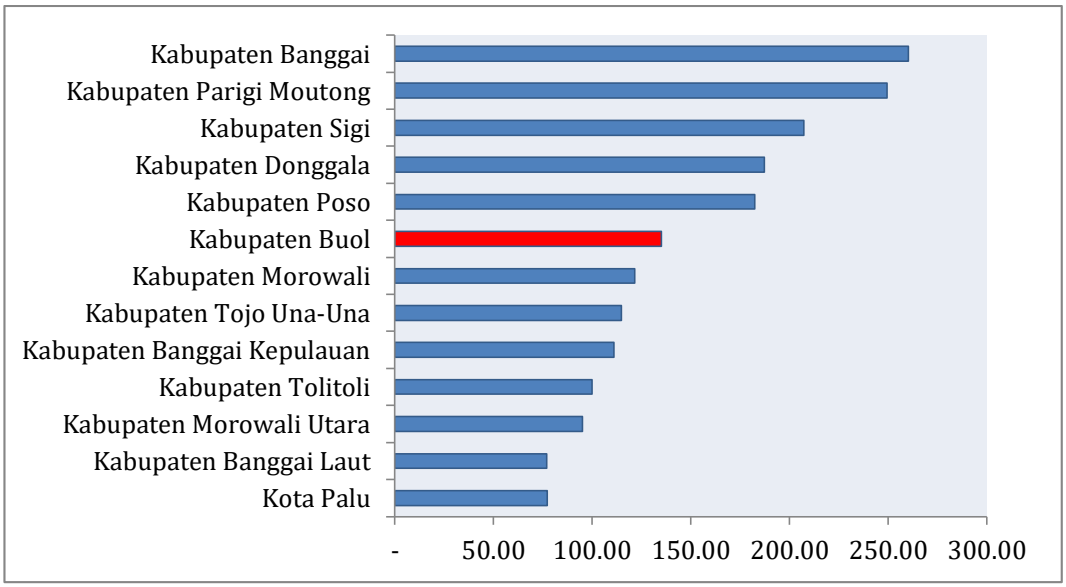

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.10. Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Gambar di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan besaran realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun 2016 Kabupaten Buol masih berada pada posisi keenam dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2016 Kabupaten Banggai merupakan daerah yang memiliki realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp260.238.079.173,00,-, kemudian diikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp249.466.562.995,00,- dan Kabupaten Sigi sebesar Rp207.252.759.102,00,-. Kemudian dengan besaran Rp77.198.201.161,00,- pada Tahun 2016 menjadikan Kota Palu sebagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah terendah. Pertumbuhan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

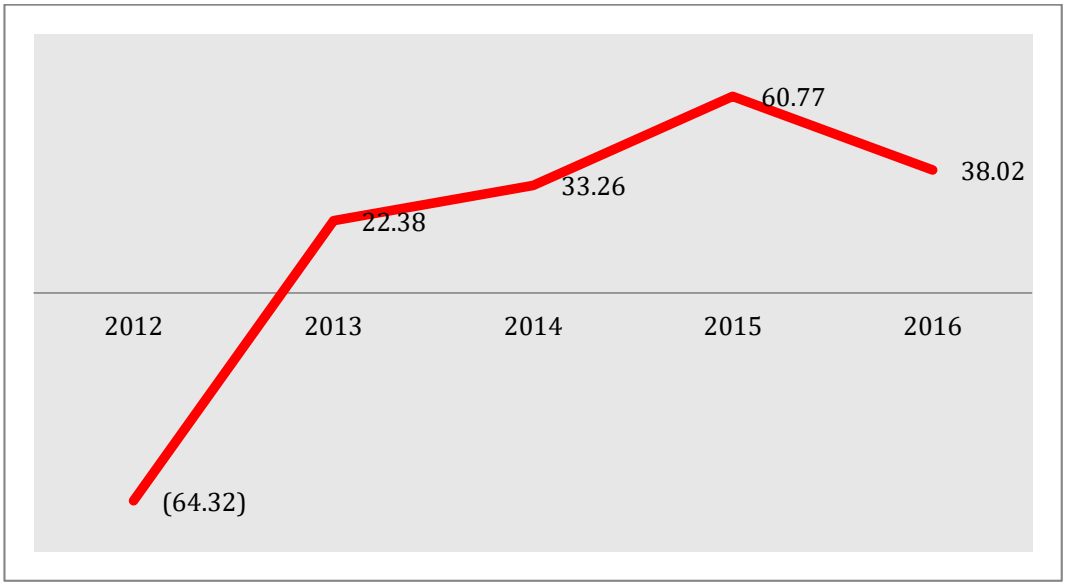

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.11. Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Buol selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami tren fluktuatif, yakni pada Tahun 2012 pertumbuhan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar -64,32 persen, meningkat drastis menjadi sebesar 22,38 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 33,26 persen, meningkat lagi menjadi sebesar 60,77 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 38,02 persen.

Kontribusi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah didominasi oleh dana penyesuaian dan otonomi khusus yakni pada Tahun 2012 sebesar 61,79 persen, meningkat menjadi sebesar 66,14 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 68,88 persen, meningkat menjadi sebesar 75,39 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 84,19 persen. Proporsi realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

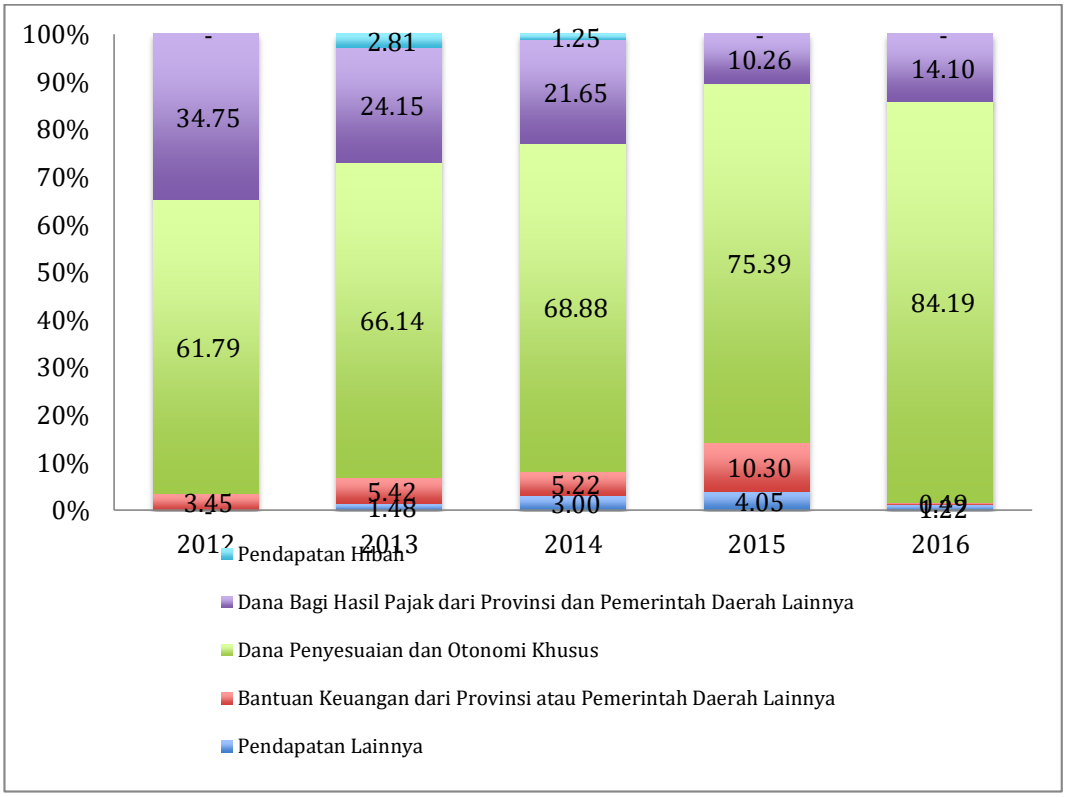

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.12. Proporsi Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

B) Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti misalnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun yang dimaksud dengan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

seperti misalnya belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (Performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Selama lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Buol telah mengalokasikan belanja daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Realisasi Belanja Daerah (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
2.	**BELANJA**	**469,231.97**	**528,399.07**	**599,755.91**	**812,062.99**	**953,368.64**	**19.73**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**266,395.26**	**258,778.73**	**292,859.78**	**377,549.23**	**479,219.77**	**16.54**
2.1.1.	Belanja Pegawai	234,363.64	240,077.93	267,411.16	291,837.72	320,240.00	8.17
2.1.2.	Belanja Hibah	26,039.22	9,777.96	2,614.56	579.40	28,348.29	1,144.78
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	5.00	5,175.91	7,344.81	25,865.00
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	457.03	501.05	470.92	776.03	117.81	(4.10)
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	4,056.08	8,087.15	21,574.81	78,967.07	123,059.86	147.00
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	1,479.29	334.65	783.33	213.11	108.99	(16.24)
2.2.	**Belanja Langsung**	**202,836.71**	**269,620.33**	**306,896.13**	**434,513.75**	**474,148.87**	**24.36**
2.2.1.	Belanja Pegawai	42,716.57	46,895.63	37,890.64	43,624.87	48,730.48	4.35
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63,970.38	96,874.62	129,753.33	135,002.36	175,387.19	29.83
2.2.3.	Belanja Modal	96,149.76	125,850.09	139,252.16	255,886.52	250,031.19	30.75

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Tabel 3.2. di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Buol secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp469.231.973.284,14,-, meningkat menjadi sebesar Rp528.399.067.871,22,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp599.755.914.727,27,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp812.062.985.588,69,- di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar Rp953.368.636.440,60,-. Jika dibandingkan besaran realisasi belanja daerah antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun 2016 Kabupaten Buol masih berada pada posisi kedelapan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dan secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

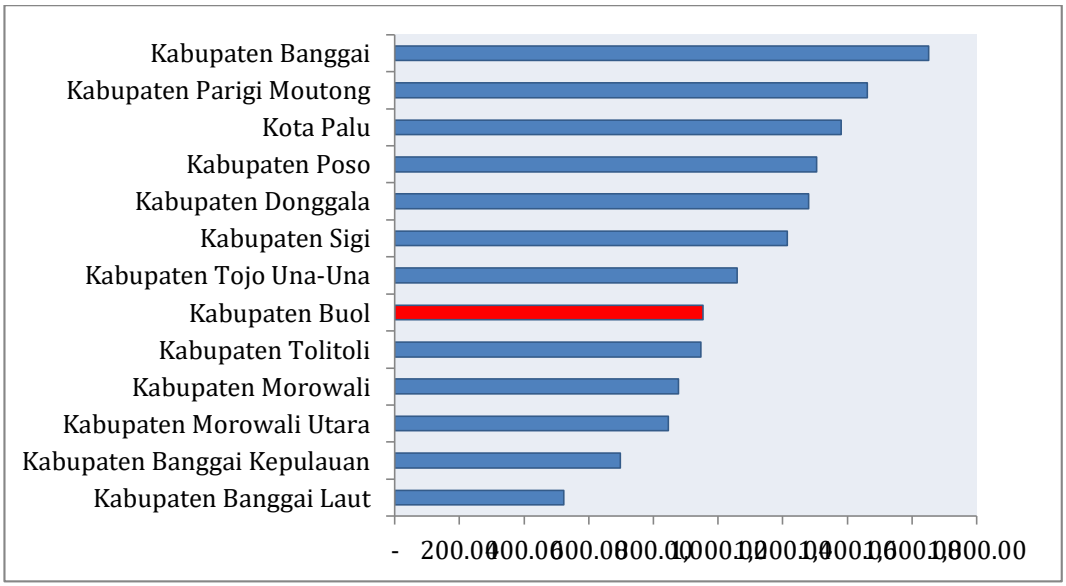

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.13. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Gambar 3.13. di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 daerah yang memiliki realisasi belanja daerah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai sebesar Rp1.651.569.241.662,86,-, kemudian diikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp1.461.272.504.564,35,- dan Kota Palu sebesar Rp1.381.081.485.920,21,-

Kemudian dengan besaran Rp523.149.371.470,26,- pada Tahun 2016 menjadikan Kabupaten Banggai Laut sebagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki realisasi belanja daerah terendah. Sementara itu, kecepatan perkembangan realisasi belanja daerah selama kurun waktu tertentu dapat dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

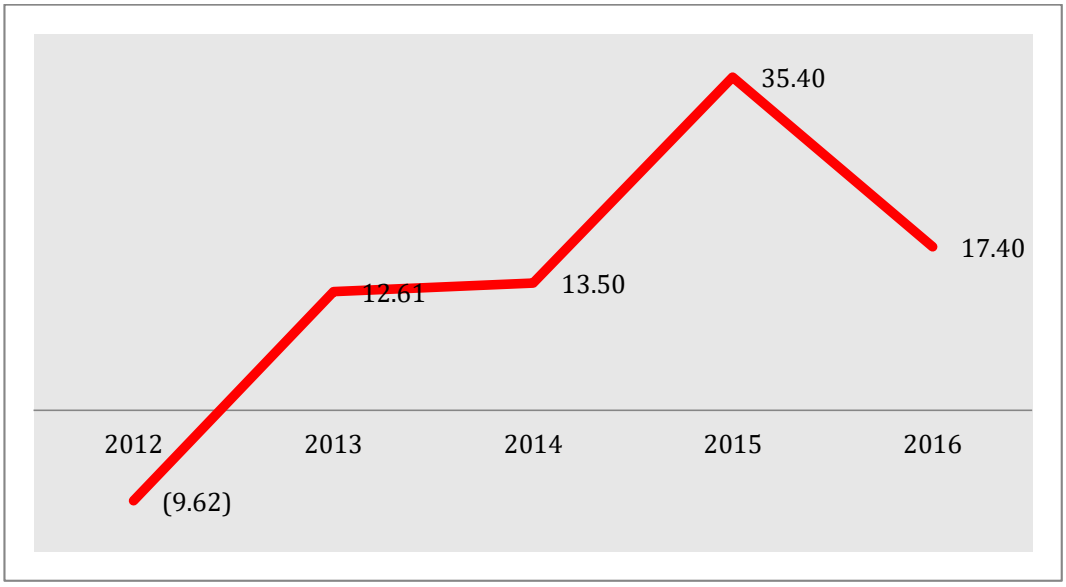

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.14. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Berdasarkan gambar 3.14. di atas diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Buol secara umum memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat pertumbuhannya selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2012 pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sebesar -9,62 persen, meningkat menjadi sebesar 12,61 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 13,50 persen, meningkat drastis menjadi sebesar 35,40 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 17,40 persen. Kemudian

proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

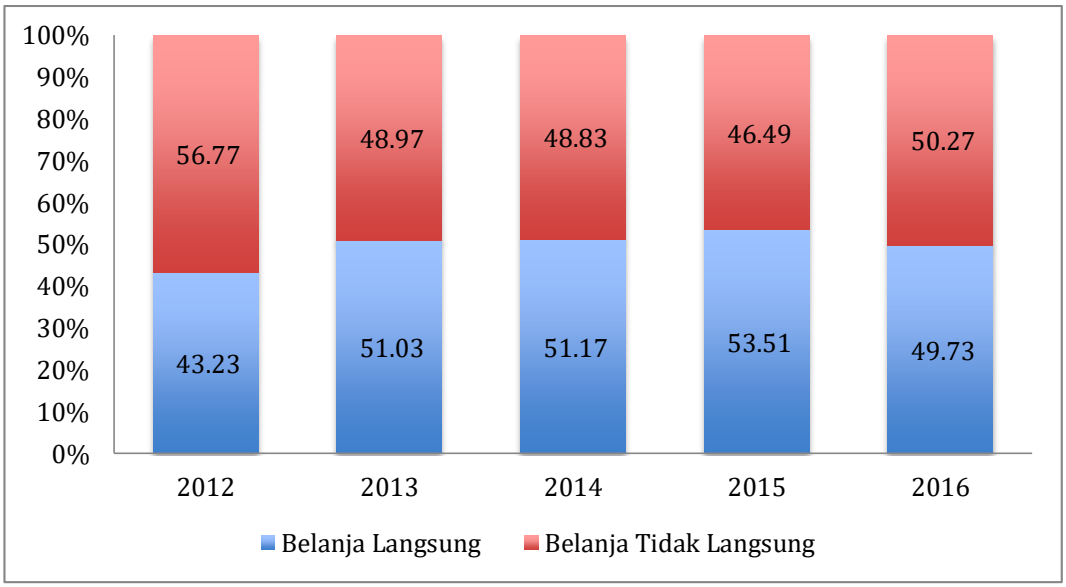

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.15. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi realisasi belanja daerah walaupun masih didominasi oleh belanja langsung yakni pada Tahun 2012 sebesar 43,23 persen, meningkat menjadi sebesar 51,03 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 51,17 persen, meningkat menjadi sebesar 53,51 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 49,73 persen. Secara detail, kinerja pelaksanaan komponen pembentuk belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Buol selama periode 2012-2016 cenderung mengalami tren fluktuatif, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp266.395.259.634,00,-, menurun menjadi sebesar Rp258.778.733.588,02,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi sebesar Rp292.859.781.215,78,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp377.549.233.725,34,-, di Tahun 2015, dan pada Tahun

2016 meningkat menjadi sebesar Rp479.219.768.327,77,-. Kemudian perbandingan besaran realisasi belanja tidak langsung antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

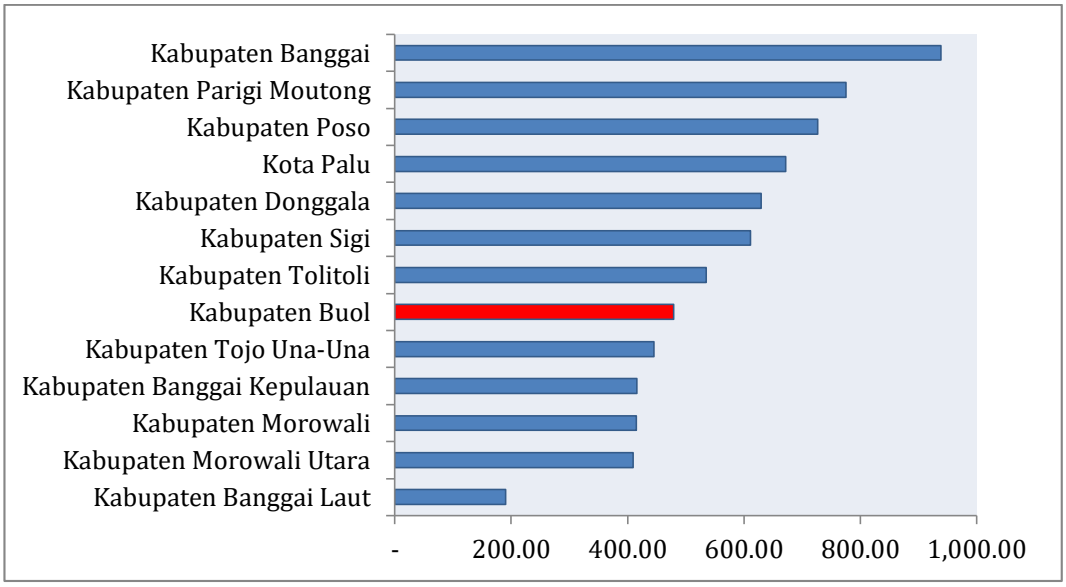

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.16. Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jika dibandingkan besaran realisasi belanja tidak langsung antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun 2016 Kabupaten Buol masih berada pada posisi kedelapan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2016 Kabupaten Banggai merupakan daerah yang memiliki realisasi belanja tidak langsung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp938.844.439.974,34,-, kemudian diikuti oleh Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp775.262.934.675,85,- dan Kabupaten Poso sebesar Rp726.978.981.328,31,-. Kemudian dengan besaran Rp190.587.748.362,00,- pada Tahun 2016 menjadikan Kabupaten Banggai Laut sebagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki realisasi belanja tidak langsung terendah. Pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

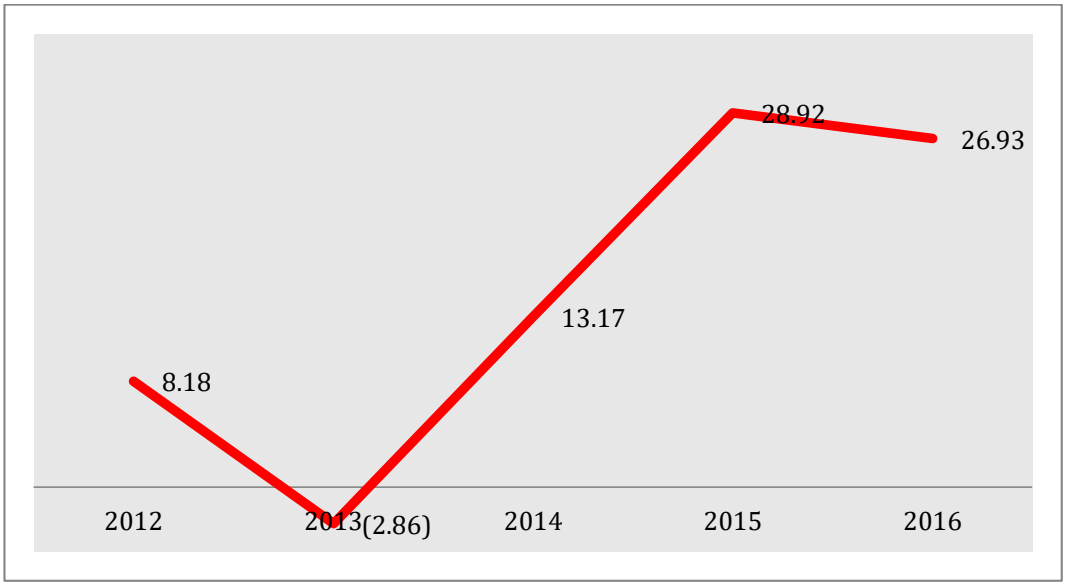

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.17. Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Gambar 3.17. di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Buol selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami tren fluktuatif, yakni pada Tahun 2012 pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sebesar 8,18 persen, menurun menjadi sebesar -2,86 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 13,17 persen, meningkat lagi menjadi sebesar 28,92 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 26,93 persen.

Kontribusi realisasi belanja tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yakni pada Tahun 2012 sebesar 87,98 persen, meningkat menjadi sebesar 92,77 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar 91,31 persen, menurun lagi menjadi sebesar 77,30 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun lagi menjadi sebesar 66,83 persen. Proporsi realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

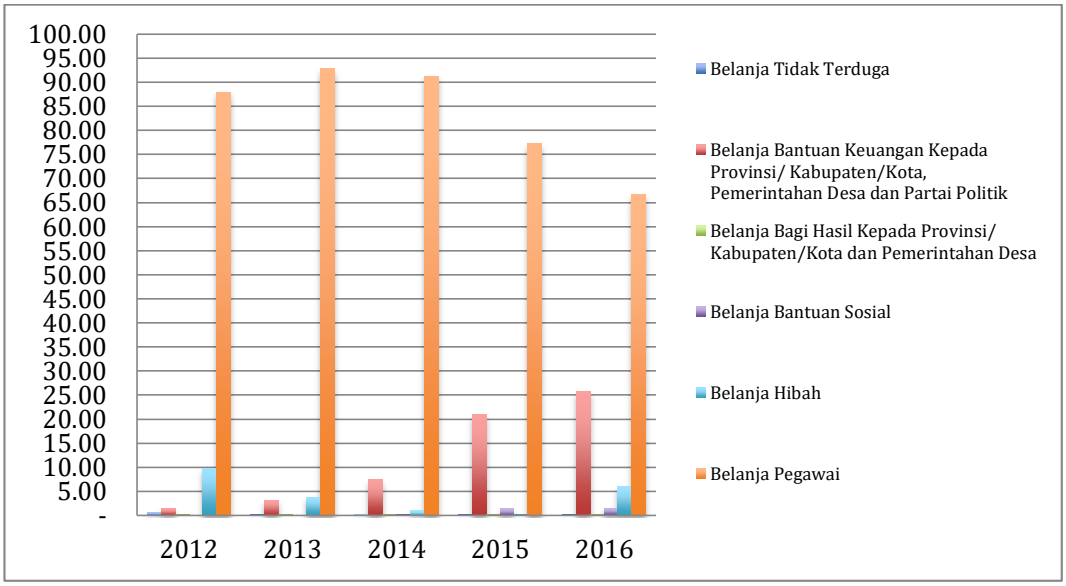

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.18. Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

(b) Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung Kabupaten Buol selama periode 2012-2016 terus mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp202.836.713.650,14,-, meningkat menjadi sebesar Rp269.620.334.283,20,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp306.896.133.511,49,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp434.513.751.863,35,-, di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp474.148.868.112,83,-. Jika dibandingkan besaran realisasi belanja langsung antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pada Tahun 2016 Kabupaten Buol masih berada pada posisi kedelapan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dan secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

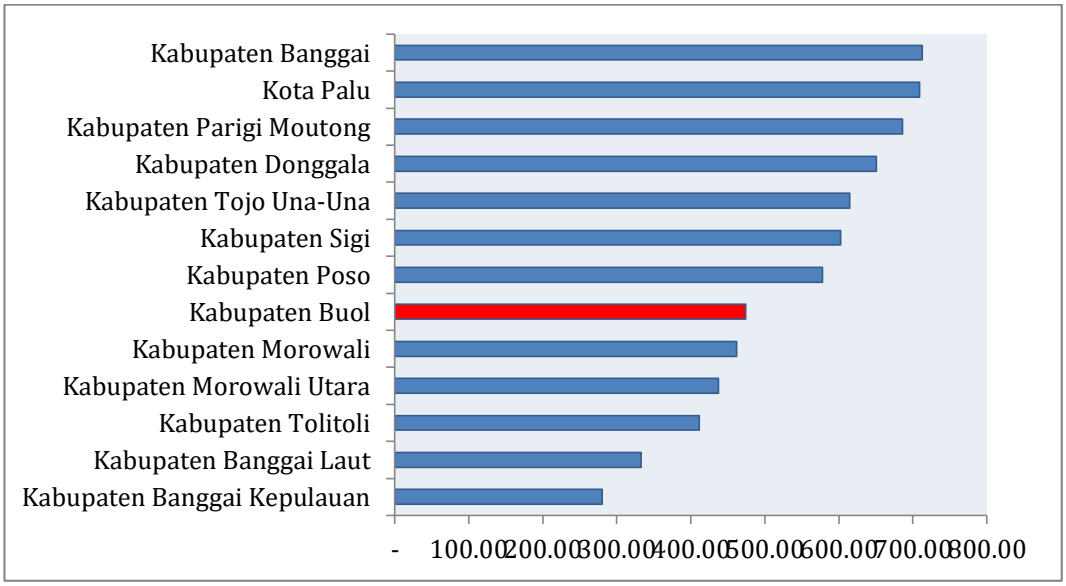

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.19. Perbandingan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar 3.19. di atas diketahui bahwa pada Tahun 2016 daerah yang memiliki realisasi belanja langsung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai sebesar Rp712.724.801.688,52,-, kemudian diikuti oleh Kota Palu sebesar Rp709.206.051.534,00,- dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp686.009.569.888,50,-. Kemudian dengan besaran Rp280.538.528.972,00,- pada Tahun 2016 menjadikan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki realisasi belanja langsung terendah. Sedangkan pertumbuhan realisasi belanja langsung Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

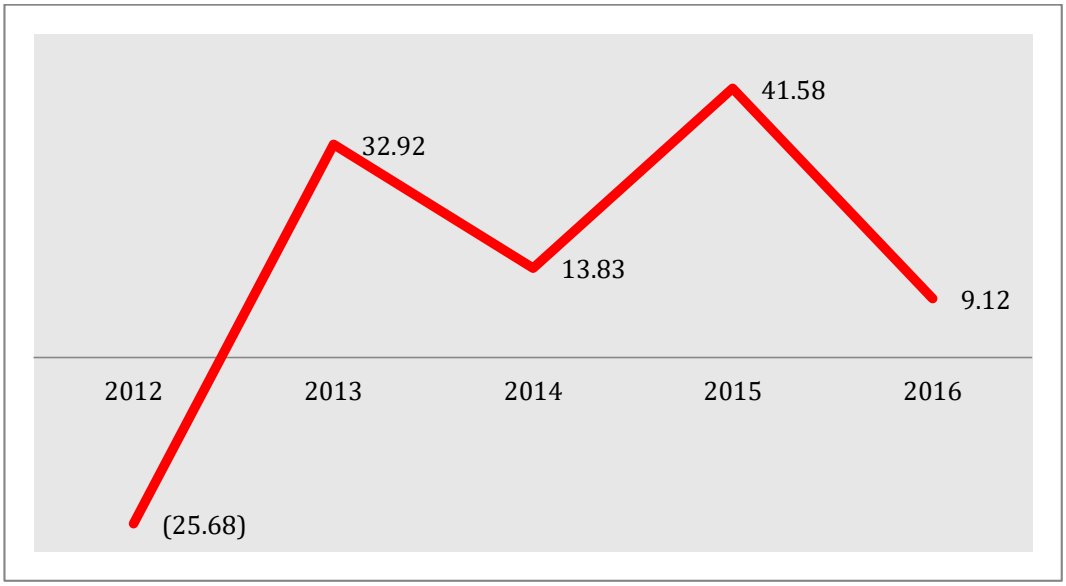

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.20. Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja langsung Kabupaten Buol secara umum memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat pertumbuhannya selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2012 pertumbuhan realisasi belanja langsung sebesar -25,68 persen, meningkat drastis menjadi sebesar 32,92 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar 13,83 persen, meningkat kembali menjadi sebesar 41,58 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 9,12 persen. Kemudian proporsi realisasi belanja langsung Kabupaten Buol dapat dilihat pada gambar berikut:

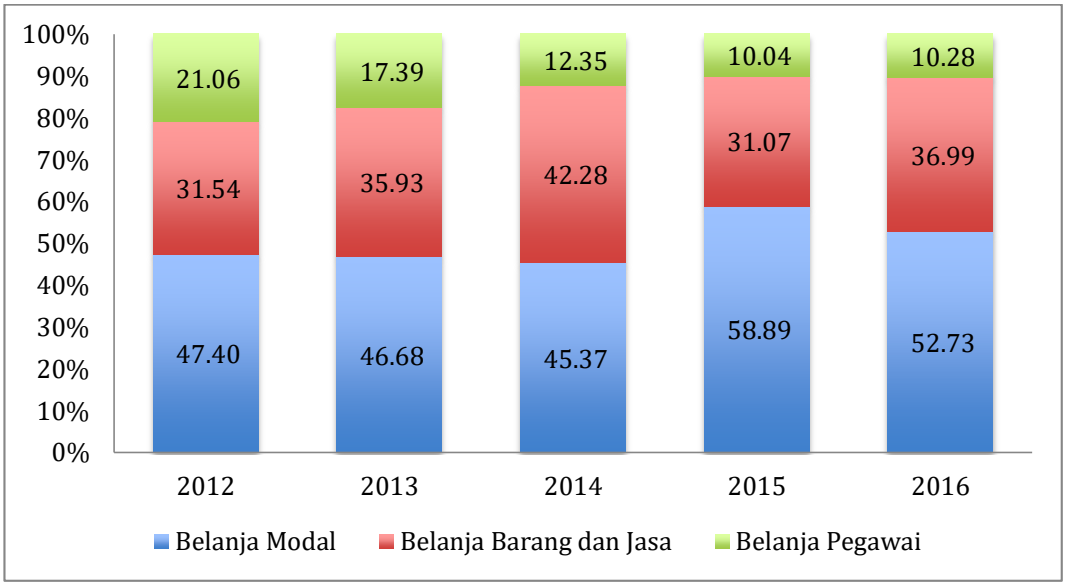

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Gambar 3.21. Proporsi Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Persen)

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi realisasi belanja langsung masih didominasi oleh belanja modal yakni pada Tahun 2012 sebesar 47,40 persen, menurun menjadi sebesar 46,68 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun lagi menjadi sebesar 45,37 persen, meningkat menjadi sebesar 58,89 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 52,73 persen.

C) Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi pembiayaan sumber pendapatannya sangat terbatas.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Kinerja pembiayaan daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**2,814.20**	**6,782.43**	**37,350.95**	**52,134.32**	**74,092.42**	**168.35**
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,814.20	6,782.43	37,307.25	52,134.32	74,092.42	168.23
3.1.2.	Piutang Daerah	-	-	43.70	-	-	(25.00)
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**4,400.00**	**2,000.00**	**12,109.24**	**918.91**	**4,985.48**	**200.26**
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,400.00	1,000.00	6,040.00	327.00	1,000.00	134.49
3.2.2.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	591.91	3,985.48	143.33
3.2.3.	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	6,069.24	-	-	(25.00)
3.2.4.	Subsidi Penerbangan	-	1,000.00	-	-	-	(25.00)
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	**7,893.56**	**37,336.59**	**52,134.32**	**74,092.42**	**17,813.13**	**1.45**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Penerimaan pembiayaan Tahun 2012-2016 sebagian besar berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan sebagian besar untuk penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada Tahun 2013 hanya sebesar Rp1.000.000.000,00,-, mengalami penurunan yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp4.400.000.000,00,-, kemudian meningkat kembali pada Tahun 2014 sebesar Rp6.040.000.000,00,-, namun menurun kembali di Tahun 2015 sebesar Rp327.000.000,00,-, dan mengalami peningkatan di Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00,-, dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan dari Tahun 2012-2016 sebesar 134,49 persen.

Berdasarkan realisasi pembiayaan Tahun 2012-2016, diketahui bahwa pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol tergantung pada sisa lebih perhitungan anggaran baik sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan. Pada masa mendatang diharapkan bahwa sumber-sumber pembiayaan dapat dikembangkan melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

Kebijakan pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, namun dari sisi sumber pendapatannya sangat terbatas. Untuk itu perlu didorong dan terus dikembangkan upaya-upaya peningkatan investasi daerah, antara lain dengan:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buol;
2. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta atau pemerintah lain;
3. Kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah dengan pihak swasta;

4. Mendorong investasi masyarakat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melibatkan peran masyarakat secara luas; dan
5. Meningkatkan investasi melalui fasilitasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan otonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis keuangan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu: analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah, semakin besar pula kebutuhan dana yang harus dihimpun oleh pemerintah daerah, kebutuhan dana tersebut tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh dana yang bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah suatu daerah itu mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka terlebih dahulu harus

mengetahui keadaan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pemerintah daerah mempunyai kinerja yang baik apabila mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Untuk mengidentifikasi kemampuan dan kinerja keuangan daerah, maka dilakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan metode perhitungan rasio-rasio tertentu. Adapun hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Tahun Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
A.	**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah**					
1.	Kemampuan Keuangan Daerah (Permendagri No. 62 Tahun 2017)					
	a. Kategori	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
	b. Nilai Rupiah (c-d)	168,879,674,346.90	227,256,566,178.69	247,040,559,614.95	248,877,737,594.02	287,946,151,804.62
	c. Pendapatan Umum Daerah	400,913,358,061.90	464,716,966,433.69	511,916,040,958.95	538,777,051,087.02	606,291,384,637.62
	d. Belanja Pegawai	232,033,683,715.00	237,460,400,255.00	264,875,481,344.00	289,899,313,493.00	318,345,232,833.00
2.	Rasio Pajak (*Tax Ratio*)	0.09	0.29	0.16	0.13	0.14
	a. Realisasi Pajak Daerah	3,041,025,146.93	10,642,868,422.02	6,718,148,419.54	6,118,235,659.97	6,896,351,644.64
	b. PDRB adhb	3,276,932,000,000.00	3,711,330,000,000.00	4,175,569,000,000.00	4,577,490,000,000.00	4,827,894,000,000.00
3.	Derajat Desentralisasi Fiskal	3.42	5.34	5.60	5.52	5.90
	a. Realisasi Pendapatan Daerah	16,351,800,881.90	29,981,344,208.69	35,113,223,859.95	46,077,409,009.02	53,259,653,065.62
	b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	478,711,331,992.90	560,953,229,171.69	626,648,519,846.95	835,030,991,971.02	902,028,567,650.15

No.	Uraian	Tahun Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
B.	**Analisis Kinerja Keuangan Daerah**					
1.	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	65.51	107.86	133.75	116.26	100.07
	a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	24,960,080,385.35	27,796,272,938.43	26,251,975,566.55	39,632,815,414.55	53,223,611,695.60
	b. Target Pendapatan Asli Daerah	16,351,800,881.90	29,981,344,208.69	35,113,223,859.95	46,077,409,009.02	53,259,653,065.62
2.	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	18.36	13.88	12.96	7.31	8.17
	a. Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah	3,002,214,796.00	4,160,319,272.00	4,549,485,974.87	3,368,176,177.00	4,349,856,126.00
	b. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	16,351,800,881.90	29,981,344,208.69	35,113,223,859.95	46,077,409,009.02	53,259,653,065.62
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	3.55	5.69	5.99	5.95	6.29
	a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah	16,351,800,881.90	29,981,344,208.69	35,113,223,859.95	46,077,409,009.02	53,259,653,065.62
	b. Realisasi Pendapatan Transfer	461,071,427,111.00	526,536,551,471.00	585,772,636,088.00	774,920,361,589.00	847,126,940,979.00

No.	Uraian	Tahun Anggaran				
		2012	2013	2014	2015	2016
4.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	96.32	93.86	93.48	92.80	93.91
	a. Realisasi Pendapatan Transfer	461,071,427,111.00	526,536,551,471.00	585,772,636,088.00	774,920,361,589.00	847,126,940,979.00
	b. Realisasi Pendapatan Daerah	478,711,331,992.90	560,953,229,171.69	626,648,519,846.95	835,030,991,971.02	902,028,567,650.15
5.	Rasio Keserasian Belanja Operasi	79.10	76.02	76.57	68.37	60.84
	a. Realisasi Belanja Operasi	371,145,892,958.83	401,713,279,904.53	459,249,491,462.24	555,187,327,257.72	580,050,770,576.95
	b. Realisasi Belanja Daerah	469,231,973,284.14	528,399,067,871.22	599,755,914,727.27	812,062,985,588.69	953,368,636,440.60
6.	Rasio Keserasian Belanja Modal	20.49	23.82	23.22	31.51	26.23
	a. Realisasi Belanja Modal	96,149,761,372.31	125,850,089,460.69	139,252,163,652.03	255,886,522,305.97	250,031,194,455.88
	b. Realisasi Belanja Daerah	469,231,973,284.14	528,399,067,871.22	599,755,914,727.27	812,062,985,588.69	953,368,636,440.60

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Melalui tabel diatas dapat diambil beberapa kesimpulan terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Buol yang didasarkan atas analisis yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, bahwa yang dimaksudkan dengan kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2012 sebesar Rp168.879.674.346,90,-, meningkat menjadi sebesar Rp227.256.566.178,69,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar Rp247.040.559.614,95,-, meningkat menjadi sebesar Rp248.877.737.594,02,- di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar Rp287.946.151.804,62,-. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buol selama lima tahun terakhir dapat dikelompokkan “rendah”.

2) Rasio pajak (*tax ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu tahun, dan di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto sangat erat kaitannya dengan pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto yang akan digunakan dalam analisis ini

adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai rasio pajak Kabupaten Buol pada Tahun 2012 sebesar 0,09 persen, meningkat menjadi sebesar 0,29 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar 0,16 persen, menurun lagi menjadi sebesar 0,13 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 0,14 persen.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rasio pajak Kabupaten Buol tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Buol dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari perpajakan belum berjalan secara efektif, dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan perpajakan nasional maupun yang dilakukan oleh daerah. Kebijakan pajak daerah yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerapkan pendekatan *closed list* untuk jenis pajak daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk memungut 5 jenis pajak dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak. Dengan adanya kewenangan pemungutan pajak tersebut, diharapkan akan menambah peluang bagi daerah untuk meningkatkan nilai rasio pajak Kabupaten Buol pada masa akan datang.

3) Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang

sebelumnya tersentralisasi. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan Negara kepada pemerintah di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses intensifikasi peran dan pemberdayaan daerah dalam pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Buol pada Tahun 2012 sebesar 3,42 persen, meningkat menjadi sebesar 5,34 persen di Tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 5,60 persen, menurun menjadi sebesar 5,52 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 5,90 persen. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Buol masuk dalam kategori sangat rendah (skala 0–25 persen). Rendahnya derajat desentralisasi fiskal tersebut, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum secara optimal mampu mengelola dana transfer pusat untuk meningkatkan nilai pendapatan asli daerah. Namun apabila kita melihat dari persfektif pertumbuhan dan respon daerah dalam rangaka peningkatan kemampuan otonomi, maka pada dasarnya Kabupaten Buol sedang menunjukkan kinerja proses menuju kemandirian yang baik.

4) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan asli daerah

dengan target pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas pendapatan asli daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100 persen. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pada Tahun 2012 nilai rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Buol sebesar 65,51 persen, meningkat menjadi sebesar 107,86 persen di Tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 133,75 persen, menurun menjadi sebesar 116,26 persen di Tahun 2015 dan pada tahun 2016 menurun lagi menjadi sebesar 100,06 persen.

Hasil perhitungan pada rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Buol selama beberapa tahun terakhir masuk dalam kriteria "efektif", hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pada beberapa tahun terakhir pula, Pemerintah Kabupaten Buol juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.

5) Rasio efisiensi pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah dengan meminimalisasi pemakaian biaya untuk memperolehnya. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi pendapatan asli daerah diperlukan data tentang biaya pemerolehan pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari sepuluh persen.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pada Tahun 2012 nilai rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol sebesar 18,36 persen, mengalami penurunan menjadi sebesar 13,88 persen

di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun lagi menjadi sebesar 12,96 persen, menurun lagi menjadi sebesar 7,33 persen di Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 8,17 persen. Hasil perhitungan pada rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Buol selama beberapa tahun terakhir masuk dalam kriteria "efisien", hal ini disebabkan karena pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah sangat besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan asli daerah tersebut.

6) Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buol pada Tahun 2012 sebesar 3,55 persen, meningkat menjadi sebesar 5,69 persen di Tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi sebesar 5,99 persen, menurun menjadi sebesar 5,95 persen di Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 6,29 persen.

   Menurut hasil perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buol masuk kategori pola hubungan "Instruktif", yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buol dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kemandirian keuangan Kabupaten Buol secara keseluruhan dapat

dikatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya satu sama lain karena pendapatan per kapita Kabupaten Buol sebesar Rp31.700.727,00,- hanya merupakan 66,10 persen dari pendapatan per kapita Indonesia yakni sebesar Rp47.960.000,00,-. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga satu dari beberapa hal yang menyebabkan pendapatan asli daerah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Buol belum dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah pada sektor-sektor potensial.

7) Rasio ketergantungan keuangan daerah diukur untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pada Tahun 2012 nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Buol sebesar 96,32 persen, menurun menjadi sebesar 93,86 persen di Tahun 2013, kemudian pada tahun 2014 menurun lagi menjadi sebesar 93,48 persen, mengalami penurunan menjadi sebesar 92,80 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 93,91 persen.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buol pada Tahun 2012-2016, walaupun memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun akan tetapi capaiannya masih masuk dalam kriteria "Tinggi", dan ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Buol dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penerimaan daerah yang memiliki andil sangat besar pembiayaan pembangunan di Kabupaten Buol bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi pada beberapa tahun terakhir seperti: dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan untuk berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada maupun mengidentifikasi potensi-potensi yang baru.

8) Rasio keserasian belanja operasi menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin, semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90 persen. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi

cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio keserasian belanja operasi Kabupaten Buol pada Tahun 2012 sebesar 79,10 persen, menurun menjadi sebesar 76,02 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 76,57 persen, menurun kembali menjadi sebesar 68,37 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 60,84 persen.

Menurut hasil perhitungan rasio keserasian belanja operasi diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buol masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Besarnya alokasi anggaran untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya kebutuhan operasional organisasi perangkat daerah dan alokasi belanja pegawai untuk gaji aparatur sipil negara. Perlu diketahui bahwa sebagai daerah pemekaran yang baru berusia 18 tahun, format organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol relatif besar bila dibandingkan dengan luasan pelayanan (jumlah penduduk dan luas wilayah) yang menjadi tanggung jawabnya. Format organisasi yang relatif besar itu menjadi faktor dominan yang membuat belanja operasional menjadi besar. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan lebih melaksanakan rasionalisasi format organisasi dalam bentuk perampingan organisasi dan sumber daya manusia sehingga beban belanja operasional dapat ditekan dan memprioritaskan alokasi anggaran kepada belanja modal guna memenuhi pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Harus terbangun kesadaran bersama bahwa pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

9) Rasio keserasian belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja

pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti persentase belanja operasi yang digunakan untuk pembiayaan rutinitas perkantoran cenderung semakin kecil. Rasio keserasian belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20 persen. Berdasarkan hasil perhitungan, pada Tahun 2012 nilai rasio keserasian belanja modal Kabupaten Buol sebesar 20,49 persen, meningkat menjadi sebesar 23,82 persen di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar 23,22 persen, meningkat kembali menjadi sebesar 31,51 persen di Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 menurun kembali menjadi sebesar 26,23 persen.

Hasil perhitungan rasio keserasian belanja modal tersebut diketahui bahwa alokasi dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buol untuk kebutuhan belanja modal tergolong relatif kecil. Analisis sepintas akan bermuara kepada kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Buol lebih condong mengalokasikan anggarannya pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buol relatif kecil atau belum terpenuhi. Maka kedepannya, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Buol dapat meningkatkan alokasi belanja modal untuk memenuhi sarana dan parsarana guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), pihak legislatif daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Adapun perkembangan neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Buol tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel 3.5. di atas terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

A) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi, sedangkan Aset Tetap adalah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Buol selama periode Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,06 persen. Aset lancar pemerintah Kabupaten Buol mengalami tren pertumbuhan pada Tahun 2012 hingga 2016 dengan rata-rata kenaikan sebesar 47,35 persen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Buol mengalami tren pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 20,45 persen, serta jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Buol selama Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,34 persen. Total aset tetap Kabupaten Buol pada Tahun 2012 adalah Rp1.236.746.670.102,78,-, dan meningkat menjadi Rp1.444.890.787.349,41,- pada Tahun 2016.

B) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah

daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Perkembangan kewajiban Pemerintah Kabupaten Buol pada Tahun 2012-2016 adalah merupakan kewajiban jangka pendek yang merupakan kewajiban berupa hutang perhitungan pihak ketiga dan hutang jangka pendek lainnya sedangkan kewajiban jangka panjang tidak ada. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Buol selama periode Tahun 2012-2016 mengalami kenaikan dengan rata-rata 326,95 persen, ini terjadi dikarenakan Hutang Jangka Pendek terutama Utang jangka Pendek Lainnya mengalami kenaikan secara signifikan yaitu di Tahun 2012 sebesar Rp0,00,- menjadi sebesar Rp28.235.364.247,26,- di Tahun 2016.

C) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas meliputi: (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Perkembangan ekuitas Kabupaten Buol selama Tahun 2012-2016 tumbuh rata-rata sebesar 7,03 persen, yakni pada Tahun 2012 sebesar Rp1.284.954.599.665,21,-, dan Tahun 2016 sebesar Rp1.490.913.167.835,65,-.

Untuk mengidentifikasi kualitas pengelolaan keuangan daerah, dilakukan analisis rasio keuangan. Hasil analisis rasio akan menjadi dasar pertimbangan dan membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam pencapaian pembangunan daerah dan prospeknya di masa datang. Selain dari pada itu, hasil analisis

rasio akan berfungsi untuk menilai risiko dan peluang pada masa yang akan datang. Analisis rasio yang dapat dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini yaitu melalui perhitungan rasio atas Neraca. Hasil analisis rasio keuangan Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Analisis Neraca Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Analisis Neraca					
1.	Rasio Likuiditas:					
a.	Rasio Lancar	32.12	5.17	44.84	11.63	1.35
	- Aktiva Lancar	35,442.74	68,642.77	87,686.85	113,468.83	48,133.03
	- Kewajiban Jangka Pendek	1,103.59	13,288.10	1,955.37	9,759.53	35,595.45
b.	Rasio Quick	30.53	4.73	41.32	10.78	1.16
	- Aktiva Lancar	35,442.74	68,642.77	87,686.85	113,468.83	48,133.03
	- Persediaan	1,746.15	5,820.08	6,899.16	8,263.75	6,759.32
	- Kewajiban Jangka Pendek	1,103.59	13,288.10	1,955.37	9,759.53	35,595.45
2.	Rasio Solvabilitas:					
a.	Rasio Hutang Terhadap Aset	0.001	0.01	0.001	0.01	0.02
	- Total Hutang	1,103.59	13,288.10	1,955.37	9,759.53	35,595.45
	- Total Aset	1,286,058.19	1,264,160.45	1,477,422.06	1,326,830.22	1,526,508.62
b.	Rasio Hutang Terhadap Modal	0.001	0.01	0.001	0.01	0.02
	- Total Hutang	1,103.59	13,288.10	1,955.37	9,759.53	35,595.45
	- Total Ekuitas	1,284,954.60	1,251,030.41	1,475,466.69	1,112,051.94	1,490,913.17
3.	Rasio Aktivitas:					
a.	Rata-rata Umur Piutang	11.46	15.44	14.62	11.46	9.68

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	- Jumlah Hari	365	365	365	365	365
	- Perputaran Piutang	31.84	45.76	48.76	62.47	85.51
	- Pendapatan Daerah	478,711.33	560,953.23	626,648.52	835,030.99	902,028.57
	- Rata-rata Piutang	15,033.35	12,257.33	12,851.17	13,367.01	10,548.22
	- Saldo Awal Piutang	7,118.16	0.02	0.02	0.03	0.03
	- Saldo Akhir Piutang	22,948.53	24,514.64	25,702.31	26,734.00	21,096.42

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Melalui tabel diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Buol yang didasarkan atas analisis rasio yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar (*current ratio*) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Kabupaten Buol dapat melunasi hutang jangka pendek. Jika nilai rasio kurang dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah akan mengalami kesulitan dalam membayar hutang jangka pendeknya, sedangkan kalau lebih besar maka pemerintah dapat mudah untuk mencairkan aset lancarnya untuk membayar tagihan kewajiban jangka pendeknya. Dari hasil perhitungan, nilai rasio lancar pada Tahun 2012 sebesar 32,12, namun pada Tahun 2016 menurun menjadi sebesar 1,35. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buol mengalami kesulitan dalam mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Dari sisi rasio lancar menunjukkan bahwa neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Buol dalam kondisi tidak baik dan ke depan harus memperbaiki pengelolaan aset lancar terutama yang terkait dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio quick yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai rasio quick sebesar 30,53 di Tahun 2012 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 1,16 di tahun 2016. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

2) Rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset secara langsung membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah kewajiban jangka pendek dibagi dengan aset. Semakin kecil nilai rasio maka semakin baik rasio kewajiban terhadap aset. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio sebesar 0,001 pada Tahun 2012 dan 0,02 pada Pahun 2016. Nilai tersebut relatif kecil karena dibawah angka 0,75 sehingga kemampuan keuangan daerah cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Buol melakukan pinjaman kepada kreditur.

   Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Semakin kecil nilai rasio maka akan semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio sebesar 0,001 pada Tahun 2012 dan 0,02 pada Tahun 2016. Nilai tersebut hampir sama dengan rasio kewajiban terhadap aset. Nilai tersebut relatif kecil karena dibawah angka 0,75 sehingga kemampuan keuangan daerah cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kabupaten Buol melakukan pinjaman kepada kreditur.

3) Untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien

digunakan rasio aktivitas. Rasio ini dapat mengukur efisiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa rata-rata umur piutang pada Tahun 2016 adalah 9,68 hari, artinya Pemerintah Kabupaten Buol memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau mengubah piutang menjadi kas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2012-2016 meliputi kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang secara detail dipaparkan sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2012-2016, memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran; 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil; dan 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, tetapi ada

beberapa pendapatan yang tidak dapat diukur karena harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat salah satunya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kebijakan pendapatan daerah untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pendapatan asli daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi: a) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan pendapatan asli daerah, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah; b) Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian, dan melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya; c) Penataan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah; d) Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; e) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Perangkat Daerah Penghasil; f) Meningkatkan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah; g) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan h) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

2. Dana perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari dana perimba**n**gan adalah sebagai berikut: a) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan; dan b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan dana perimbangan.
3. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**,** yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi dan instansi terkait lainnya.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2012-2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2012-2016 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Buol yang terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik;

3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Buol;

4) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

5) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

6) Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesahatan sebesar 10 persen dari volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahunnya dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

7) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

8) Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga di bawah 10 persen diantaranya melalui penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;

9) Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

10) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;

11) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Buol, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;

12) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; c) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya; d) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; e) Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal desa dalam melaksanakan otonomi daerah; f) Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari daerah kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Buol.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2012-2016 adalah: (a) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan

diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten; dan (b) Jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2012-2016 adalah: Penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerjanya dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk mengidentifikasi tingkat efektifitas penggunaan anggaran daerah, pada bagian ini akan dipaparkan hasil analisis terhadap perbandingan atau proporsi penggunaan anggaran. Penilaian proporsi dilakukan terhadap dua aspek yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

A) Proporsi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, teridentifikasi bahwa hampir seluruh komponen belanja daerah belum terserap secara optimal. Informasi detail mengenai proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Buol dalam kurun lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Proporsi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2.	**BELANJA**	**505,898.21**	**469,231.97**	**92.75**	**559,879.77**	**528,399.07**	**94.38**	**646,384.37**	**599,755.91**	**92.79**	**882,739.85**	**812,062.99**	**91.99**	**1,035,356.51**	**953,368.64**	**92.08**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**275,709.19**	**266,395.26**	**96.62**	**269,017.23**	**258,778.73**	**96.19**	**303,496.91**	**292,859.78**	**96.50**	**393,482.97**	**377,549.23**	**95.95**	**496,342.53**	**479,219.77**	**96.55**
2.1.1.	Belanja Pegawai	239,015.67	234,363.64	98.05	248,725.11	240,077.93	96.52	275,965.36	267,411.16	96.90	305,524.64	291,837.72	95.52	334,937.85	320,240.00	95.61
2.1.2.	Belanja Hibah	29,895.39	26,039.22	87.10	10,706.39	9,777.96	91.33	2,910.00	2,614.56	89.85	724.40	579.40	79.98	28,448.29	28,348.29	99.65
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	200.00	5.00	2.50	5,510.15	5,175.91	93.93	8,004.55	7,344.81	91.76
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	683.55	457.03	66.86	603.55	501.05	83.02	603.55	470.92	78.03	1,181.44	776.03	65.69	914.42	117.81	12.88
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	4,077.25	4,056.08	99.48	8,125.00	8,087.15	99.53	22,049.99	21,574.81	97.84	79,388.60	78,967.07	99.47	123,337.41	123,059.86	99.77
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	2,037.33	1,479.29	72.61	857.18	334.65	39.04	1,768.00	783.33	44.31	1,153.75	213.11	18.47	700.00	108.99	15.57
2.2.	**Belanja Langsung**	**230,189.02**	**202,836.71**	**88.12**	**290,862.54**	**269,620.33**	**92.70**	**342,887.46**	**306,896.13**	**89.50**	**489,256.87**	**434,513.75**	**88.81**	**539,013.98**	**474,148.87**	**87.97**
2.2.1.	Belanja Pegawai	44,131.29	42,716.57	96.79	49,347.15	46,895.63	95.03	39,987.41	37,890.64	94.76	46,279.51	43,624.87	94.26	50,675.24	48,730.48	96.16
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73,766.31	63,970.38	86.72	107,049.21	96,874.62	90.50	140,698.17	129,753.33	92.22	148,068.63	135,002.36	91.18	187,830.10	175,387.19	93.38
2.2.3.	Belanja Modal	112,291.42	96,149.76	85.63	134,466.17	125,850.09	93.59	162,201.89	139,252.16	85.85	294,908.72	255,886.52	86.77	300,508.64	250,031.19	83.20

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Pada aspek belanja tidak langsung, dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 96,36 persen. Jika ditinjau per komponen, belanja bantuan sosial memiliki rata-rata penyerapan anggaran terrendah dengan persentase serapan sebesar 37,64 persen. Angka tersebut mengindikasikan masih banyaknya anggaran yang belum tersalurkan untuk kegiatan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial terkait dengan pengajuan bantuan sosial secara langsung oleh individu/kelompok masyarakat/lembaga melalui proposal kegiatan pada tahun n-1. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja bantuan sosial, kemungkinan besar diakibatkan masih rendahnya animo masyarakat untuk mengajukan bantuan sosial kepada pemerintah daerah dan/atau proposal yang masuk setelah diverifikasi ternyata tidak layak/memenuhi persayaratan untuk mendapatkan bantuan.

Komponen pada belanja tidak langsung yang memiliki persentase penyerapan anggaran tertinggi yaitu komponen belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik. Dalam kurun lima tahun terakhir, rata-rata persentase serapan yaitu sebesar 99,22 persen. Tingginya angka serapan menunjukkan efektifnya pengalokasian anggaran dalam meningkatkan pembangunan perdesaan.

Pada aspek belanja langsung, rata-rata anggaran yang terealisasi baru sekitar 89,42 persen. Komponen belanja langsung yang persentase penyerapannya terrendah yaitu komponen belanja modal dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 87,01 persen. Sedangkan komponenn belanja langsung yang persentase penyerapannya paling tinggi yaitu komponen belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah. Rata-rata persentase penyerapan belanja pegawai pada komponen belanja langsung selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 95,40 persen.

B) Proporsi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Implementasi rencana pembangunan terkait erat dengan ketersediaan sumber daya aparatur. Salah satu indikator efektivitas pembangunan dapat ditinjau dari tingkat penyerapan anggaran belanja bagi pemenuhan kebutuhan aparatur. Secara detail, informasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Buol dalam kurun waktu Tahun 2012-2017 yaitu:

Tabel 3.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Buol Tahun 2012-2016

No.	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Rp.)	Proporsi (%)
1.	Tahun 2012	313,731,246,499.77	473,631,973,284.14	66.24
2.	Tahun 2013	330,007,884,604.06	530,399,067,871.22	62.22
3.	Tahun 2014	387,469,525,047.90	611,865,151,054.27	63.33
4.	Tahun 2015	373,958,337,107.67	812,981,892,791.69	46.00
5.	Tahun 2016	419,341,462,736.27	958,354,117,329.08	43.76

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tampak terjadi peningkatan jumlah total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Kendati demikian, jika dibandingkan terhadap total pengeluaran, proporsi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Secara garis besar, gambaran proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Buol dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat secara konsisten dari Rp313.731.246.499,77,- pada Tahun 2012 menjadi Rp419.341.462.736,27,- pada Tahun 2016 atau meningkat rata-rata 7,81 persen per tahun. Sementara itu, dilain pihak total pengeluaran meningkat secara konsisten pula, yaitu dari Rp473.631.973.284,14,-

pada Tahun 2012 menjadi Rp958.354.117.329,08,- pada Tahun 2016 atau meningkat rata-rata 19,52 persen per tahun;

2) Implikasi dari rata-rata persentase meningkatnya total pengeluaran yang lebih tinggi dari pada rata-rata persentase meningkatnya belanja aparatur menjadi semakin kecil, yaitu dari 66,24 persen pada Tahun 2012 menjadi 43,76 persen pada Tahun 2016; dan

3) Menurunnya persentase belanja aparatur dalam total pengeluaran menjadikan persentase belanja publik menjadi semakin besar. Hal ini menunjukkan perubahan yang nyata dari pengelolaan belanja belanja daerah kepada orientasi pada belanja publik.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis terhadap pembiayaan daerah akan menghasilkan keputusan mengenai besarnya surplus yang perlu disalurkan atau defisit yang harus ditutup. Penentuan keputusan tersebut ditentukan dengan membandingkan antara total pendapatan dan belanja daerah. Secara lengkap penjelasan analisis pembiayaan daerah pada Tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Juta Rp.)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	478,711.33	560,953.23	626,648.52	835,030.99	901,992.57
	Dikurangi Realisasi:					
2.	Belanja Daerah	469,231.97	528,399.07	599,755.91	812,062.99	953,368.64
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,400.00	2,000.00	12,109.24	918.91	4,985.48
	Defisit Riil	**5,079.36**	**30,554.16**	**14,783.37**	**22,049.10**	**(56,361.55)**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Selama kurun waktu 2012-2016, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buol mengalami 4 (empat) tahun berturut-turut mengalami surplus dan 1 (satu) kali defisit anggaran. Pada Tahun 2012 surplus anggaran mencapai Rp5.079.358.708,76,-, meningkat menjadi sebesar Rp30.554.161.300,47,- di Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 menurun menjadi sebesar Rp14.783.368.792,68,-, meningkat kembali menjadi sebesar Rp22.049.099.179,33,- di Tahun 2015, dan defisit di Tahun 2016 mencapai Rp56.361.549.678,93,- Terjadinya defisit anggaran disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Peningkatan belanja didominasi oleh peningkatan belanja aparatur, dan disisi lain defisit anggaran juga merupakan adanya indikasi pemborosan anggaran. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan melihat komposisi penutup defisit rill anggaran Kabupaten Buol, yakni pada Tahun 2016 mencapai sebesar Rp74.092.416.868,50,- Hal ini sangat jelas sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Juta Rp.)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,814.20	6,782.43	37,307.25	52,134.32	74,092.42
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Tahun Anggaran (Juta Rp.)				
		2012	2013	2014	2015	2016
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	43.70	-	-
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	2,814.20	6,782.43	37,350.95	52,134.32	74,092.42

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memeperoleh gambaran secara rill sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasistas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 terlihat sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Rp.	% Dari SILPA	Rp.	% Dari SILPA	Rp.	% Dari SILPA	Rp.	% Dari SILPA	Rp.	% Dari SILPA
1.	Jumlah SiLPA	2,814.20	100	6,782.43	100	37,336.59	100.08	52,134.32	100	74,092.42	100
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	364.60	5.38	(29.34)	(0.08)	-	-	-	-
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	1,392.26	20.53	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan Lanjutan	-	-	5,025.56	74.10	-	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan perlu dilakukan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada lima tahun terakhir, maka dapat dilakukan analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode Tahun 2018-2022.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat meliputi pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sementara itu belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Ditinjau berdasarkan komponen penyusunnya, pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat berada dalam komponen belanja langsung, maupun belanja tidak langsung. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap data pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Buol lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung yang sifatnya wajib dan mengikat dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,93 persen. Pengeluaran ini didominasi oleh belanja pegawai, yang antara lain meliputi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Adapun untuk komponen belanja langsung, dalam kurun lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan belanja langsung yang bersifat wajib mengikat yaitu sebesar 12,01 persen. Komponen belanja ini didominasi oleh belanja pegawai (berupa honorarium khusus guru dan tenaga kesehatan, serta beasiswa pendidikan aparatur sipil negara) serta belanja modal (berupa belanja jasa kantor, belanja sewa gedung kantor, dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor).

Secara keseluruhan, pengeluaran wajib dan mengikat pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 20,93 persen. Informasi detail mengenai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Buol disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12.
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Buol Tahun 2012-2016 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Realisasi Pengeluaran Wajib (Juta Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
	TOTAL (A+B+C)	**208,366.97**	**228,767.33**	**253,242.72**	**354,974.72**	**436,796.86**	**20.93**
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**198,830.00**	**221,514.10**	**242,368.45**	**341,891.94**	**419,421.39**	**21.14**
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	192,781.89	211,365.91	218,762.72	260,588.84	294,703.71	11.34
2.	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1,535.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,540.00	0.09
3.	Belanja Bagi Hasil	457.03	501.05	470.92	776.03	117.81	(4.10)
4.	Belanja Bantuan Keuangan	4,056.08	8,087.15	21,574.81	78,967.07	123,059.86	147.00
B.	**Belanja Langsung**	**9,536.97**	**7,253.23**	**10,874.27**	**12,490.88**	**13,389.99**	**12.01**
1.	Belanja Honorarium PNS dan Non PNS (Khusus Guru dan Tenaga Medis)	8,286.80	4,400.25	7,852.86	8,474.33	9,360.46	12.48
2.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.00	1,217.75	345.75	260.00	270.00	560.73
3.	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor Seperti: Listrik, Air, Telepon dan Sejenisnya)	1,200.17	1,635.23	2,675.66	3,756.55	3,759.52	35.09
C.	**Pembiayaan Pengeluaran**	**-**	**-**	**-**	**591.91**	**3,985.48**	**143.33**
1.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	591.91	3,985.48	143.33

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017, Data Diolah Kembali

3.3.2. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk mengidentifikasi gambaran kemampuan keuangan Kabupaten Buol dalam lima tahun kedepan, dilakukan proyeksi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi disusun dengan menarik *trend* perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir yaitu Tahun 2012 hingga 2016. Di dalam analisis proyeksi, tingkat pertumbuhan dari data keuangan daerah lima tahun terakhir diidentifikasi. Hasil identifikasi terhadap trend pertumbuhan tersebut digunakan sebagai basis untuk menarik perkiraan nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buol lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan proyeksi ini, mengeluarkan asumsi terjadinya gejolak perkonomian ekstrim seperti misalnya krisis ekonomi. Dengan demikian, hasil proyeksi tidak terlalu berfluktuasi. Informasi detail mengenai hasil proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Juta Rp.)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Pendapatan**	**8.83**	**979,923.37**	**984,310.35**	**1,111,682.89**	**1,229,616.02**	**1,346,772.28**	**1,492,581.23**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**8.01**	**84,061.42**	**71,074.95**	**80,488.00**	**91,058.00**	**103,961.00**	**122,493.00**
1.1.1.	Pajak Daerah	19.04	6,086.30	7,333.73	9,389.00	10,746.00	12,428.00	14,486.00
1.1.2.	Retribusi Daerah	17.50	3,036.20	4,435.52	4,204.00	4,811.00	5,564.00	6,485.00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.50	2,464.65	3,049.65	3,309.00	3,612.00	3,978.00	4,415.00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.24	72,474.27	56,256.05	63,586.00	71,889.00	81,991.00	97,107.00
1.2.	**Dana Perimbangan**	**7.60**	**773,575.60**	**773,469.57**	**844,637.89**	**931,323.02**	**1,011,911.28**	**1,112,145.23**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.75	32,131.75	41,373.57	43,442.25	45,614.37	47,895.08	50,289.84
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	7.81	527,418.46	528,033.35	576,823.64	632,025.66	694,596.20	765,653.39
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	6.90	214,025.39	204,062.64	224,372.00	253,683.00	269,420.00	296,202.00
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**16.40**	**122,286.35**	**139,765.83**	**186,557.00**	**207,235.00**	**230,900.00**	**257,943.00**
1.3.1.	Pendapatan Hibah		2,931.74	6,000.00	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.89	19,761.39	20,160.54	26,441.00	29,947.00	34,139.00	38,919.00
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19.81	85,221.76	113,605.30	151,905.00	167,744.00	185,586.00	205,908.00
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(8.52)	14,371.46	-	5,026.00	5,962.00	7,118.00	8,499.00
1.3.5.	Pendapatan Lainnya	7.91	-	-	3,185.00	3,582.00	4,057.00	4,617.00
2.	**Belanja**	**8.46**	**993,236.51**	**996,795.47**	**1,106,682.89**	**1,223,866.02**	**1,340,272.28**	**1,485,081.23**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**7.52**	**487,379.80**	**474,319.50**	**540,378.18**	**587,251.07**	**638,802.22**	**695,545.11**
2.1.1.	Belanja Pegawai	9.56	317,111.20	317,003.75	373,458.05	410,844.18	451,987.75	497,278.06
2.1.2.	Belanja Hibah	(0.89)	10,376.00	9,316.60	9,154.89	9,383.76	9,618.36	9,858.82

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Juta Rp.)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	5.63	8,270.76	9,304.01	10,061.41	10,312.95	10,570.77	10,835.04
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	45.90	943.63	399.14	1,359.30	1,555.70	1,799.20	2,097.10
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.42	148,178.22	136,795.99	144,844.52	153,654.48	163,326.14	173,976.09
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga		2,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.2.	**Belanja Langsung**	**9.37**	**505,856.70**	**522,475.97**	**566,304.71**	**636,614.96**	**701,470.06**	**789,536.12**
2.2.1.	Belanja Pegawai	(3.09)	54,121.25	50,540.99	28,315.24	31,830.75	35,073.50	39,476.81
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.87	210,765.24	197,125.77	237,847.98	267,378.28	294,617.43	331,605.17
2.2.3.	Belanja Modal	11.68	240,970.22	274,809.20	300,141.50	337,405.93	371,779.13	418,454.14
	Surplus/(Defisit)		**(13,313.13)**	**(12,485.11)**	**5,000.00**	**5,750.00**	**6,500.00**	**7,500.00**
3.	**Pembiayaan**							
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**(20.93)**						
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**10.91**	17,813.13	16,985.11	-	-	-	-
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		4,500.00	4,500.00	5,000.00	5,750.00	6,500.00	7,500.00

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Pendapatan daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp979.923.373.786,00,-, diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp984.310.354.946,00,-, di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 akan meningkat menjadi sebesar Rp1.111.682.889.000,00,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.229.616.023.000,00,- di Tahun 2020, kemudian pada Tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp1.346.772.282.000,00,-, dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.492.581.227.000,00,- di Tahun 2022 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
   a. Pajak Daerah dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buol dengan elastisitas 1,05 sampai dengan 1,10;
   b. Retribusi Daerah dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buol dengan elastisitas 0,80 sampai dengan 0,90;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun sebelumnya dengan elastisitas 0,5;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buol dengan elastisitas 1,10 sampai dengan 1,20;
   e. Bertambahnya jumlah dan ragam unit usaha mengakibatkan pertambahan objek dan wajib pajak dan retribusi; dan
   f. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
2. Terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, sepanjang tidak ada perubahan mendasar dari pemerintah pusat, dengan uraian sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Berlaku Kabupaten Buol yang rata-rata tumbuh sebesar 12,53 persen per tahun;

b. Dana Alokasi Umum cenderung meningkat setiap tahun dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dengan elastisitas 0,9 sampai dengan 1,0; dan
c. Dana Alokasi Khusus dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dengan elastisitas 1,0 sampai dengan 1,2.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan uraian sebagai berikut:
   a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah;
   b. Dana Penyesuaian dipengaruhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dengan elastisitas 0,7 dan Dana Otonomi Khusus diperoleh dari proyeksi Pemerintah Pusat tentang Dana Desa; dan
   c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Tengah.

Proyeksi belanja daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp993.236.507.272,16,-, diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp996.795.465.897,00,- di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 akan meningkat menjadi sebesar Rp1.106.682.889.000,00,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.223.866.023.000,00,- di Tahun 2020, kemudian pada Tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp1.340.272.282.000,00,-, dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.485.081.227.000,00,- di Tahun 2022 dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari pemenuhan kenaikan gaji, penambahan jumlah pegawai, kenaikan gaji berkala, dan penyesuaian pangkat/golongan Aparatur Sipil Negara;
2. Penyesuaian belanja gaji, tunjangan, belanja penunjang komunikasi intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan kategori "sedang";
3. Penyesuaian belanja penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yaitu sebesar 0,40 persen dari pendapatan asli daerah;
4. Kebutuhan belanja hibah selalu meningkat untuk pemenuhan bantuan operasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan bantuan kepada badan/lembaga/organisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
5. Kebutuhan belanja bantuan sosial untuk pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pertanian;
6. Kebutuhan belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa baik berupa dana desa, maupun alokasi dana desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Menekan proporsi alokasi anggaran untuk belanja operasi yang membiayai penyelenggaraan rutinitas perkantoran;
8. Meningkatkan proporsi alokasi anggaran untuk belanja modal guna memenuhi kebutuhan publik yang semakin meningkat; dan
9. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Untuk memperkirakan penyaluran surplus dan menutup defisit anggaran yang mungkin akan terjadi maka perlu dibuat proyeksi pembiayaan. Proyeksi pembiayaan di masa yang akan datang dari sisi

penerimaan menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan dari sisi pengeluaran berupa penyertaan modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,91 persen setiap tahunnya dalam rangka pemenuhan kewajiban.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendaaan dilakukan dalam rangka mengukur kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan terus meningkat sepanjang tahun 2018-2022, yakni pada Tahun 2018 sebesar Rp522.475.968.234,99,-, meningkat menjadi sebesar Rp566.304.713.796,73,- di Tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp636.614.956.531,73,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp701.470.063.642,37,- di Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp789.536.120.241,18,-. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama lima tahun mendatang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (Rp.)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendapatan Daerah	984,310.35	1,111,682.89	1,229,616.02	1,346,772.28	1,492,581.23
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Peraturan Daerah)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	16,985.11	-	-	-	-
	Total Penerimaan	1,001,295.47	1,111,682.89	1,229,616.02	1,346,772.28	1,492,581.23
	Dikurangi:					
4.	Belanja Tidak Langsung	474,319.50	540,378.18	587,251.07	638,802.22	695,545.11
5.	Pengeluaran Pembiayaan	4,500.00	5,000.00	5,750.00	6,500.00	7,500.00

No.	Uraian	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (Rp.)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**522,475.97**	**566,304.71**	**636,614.96**	**701,470.06**	**789,536.12**

Sumber: *Hasil Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022*

Berdasarkan data proyeksi sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buol selama lima tahun ke depan rata-rata sebesar 56,09 persen dari total pendapatan daerah, dan hal ini tentu saja diharapkan akan berimplikasi positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buol, karena dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut dapat digunakan sebagai modal pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas I, dan prioritas II sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022 (Juta Rp.)

No.	Uraian	Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan (Rp.)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	522,475.97	566,304.71	636,614.96	701,470.06	789,536.12
	Dikurangi:					
	Rencana Alokasi Prioritas I:					
2.	Alokasi Belanja Langsung Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; Pangan; Lingkungan Hidup; Pertanian; Perikanan; dan Penanggulangan Bencana	375,608.76	412,644.27	463,876.62	511,134.02	575,304.34
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	146,867.21	153,660.44	172,738.34	190,336.05	214,231.78

No.	Uraian	Proyeksi Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan (Rp.)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Dikurangi:					
	Rencana Alokasi Prioritas II:					
3.	Alokasi Belanja Program Organisasi Perangkat Daerah - Alokasi Belanja Langsung Urusan Terkait Prioritas I	146,867.21	153,660.44	172,738.34	190,336.05	214,231.78
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang	-	-	-	-	-

Sumber: *Hasil Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022*

Kebijakan alokasi anggaran seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas merupakan serangkaian upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka akan ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas. Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I dan prioritas II. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

a. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan kepala daerah dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; Pangan; Lingkungan Hidup; Pertanian; Perikanan; dan Penanggulangan Bencana.
b. Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah yang paling

berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Pembangunan di Daerah Kabupaten Buol dalam kurun waktu Tahun 2017-2022 telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai bidang. Namun berdasarkan hasil evaluasi, pada sisi lainnya harus diakui, masih terdapat berbagai masalah penting dan mendasar yang harus segera diatasi, dan berbagai permasalahan lainnya yang berkembang seiring dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan tersebut.

Permasalahan-permasalahan mendasar tersebut antara lain: persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, masih relatif sedang distribusi pendapatan, masih rendahnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan hak-hak dasar manusia yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara merata dan adil, kondisi infrastruktur yang belum memadai, kondisi produk barang dan jasa yang tingkat produktivitasnya masih rendah.

Permasalahan lainnya yang berkembang adalah meningkatnya tingkat kebutuhan akan pelayanan, globalisasi dan dicanangkannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dengan berbagai dampak ikutannya, perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pada realitas tersebut, tantangan yang menghadang dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tidak hanya berorientasi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi perlu didukung dengan penanggulangan kemiskinan melalui pemodelan struktur pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang diiringi dengan pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja.

Ikhtiar penanganannya akan dilaksanakan dengan pertimbangan pendekatan sektoral maupun kewilayahan serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Buol. Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi segenap potensi daerah, dibutuhkan sebuah rencana pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Kabupaten Buol dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pembangunan Daerah adalah pencerminan aspirasi rakyat dengan mengembangkan kehidupan masyarakat maju yang mandiri untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang terus menerus dan merata. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan dan pengembangan potensi daerah serta menimbang dan mengingat perlunya penyusunan program pembangunan yang lebih fokus, terarah, teintegratif dan holistik dengan pendekatan kondisi spasial kewilayahan daerah.

Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Pada bagian atau tahap perumusan isu - isu strategis, permasalahan – permasalahan pembangunan prioritas saja yang menjadi agenda utama rencana pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Lima tahun pertama dan lima tahun kedua RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Buol telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2012-2017.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1) Urusan Pendidikan

1. Kurangnya jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) terutama TK pembina di tiap Kecamatan (kekurangan 6 Sekolah).
2. Meningkatnya APK dan APM SD/MI menyebabkan jumlah siswa per Rombongan Belajar (Rombel) bertambah;
3. Meningkatnya APK dan APM SMP/MTS menyebabkan jumlah siswa per Rombongan Belajar (Rombel) betambah;
4. Belum tuntasnya peningkatan kualifiaksi pendidikan Guru ke jenjang SI/D4;

5. Masih terdapat tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak linier dengan Pendidikan;
6. Sarana dan prasarana Pendidikan pada umumnya masih terbatas terutama ruang kelas masih banyak dalam kondisi rusak, terbatasnya ruang Guru, ruang Kepala Sekolah, MCK dan ruang UKS;

2) Urusan Kesehatan

1. Sarana dan prasarana kesehatan pada umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima;
2. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesehatan medis dan non medis masih terbatas dan belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pelaksanaan tugas belum mencapai tingkat maksimal;
3. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan perilaku masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih belum mendukung;
4. Penyebaran tenaga medis dan paramedis khususnya di Kabupaten Buol belum merata;
5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang;
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), disamping itu, tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat masih rendah;
7. Ketersediaan tenaga medis dan para medis masih terbatas;
8. Ketersediaan obat masih perlu ditingkatkan, dan juga perlu adanya pengawasan obat-makanan yang lebih intensif.
9. Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
11. Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;

12. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah;
13. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat mengenai hak reproduksi perempuan;
14. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan yang kurang mantap masih tinggi terutama jalan kewenangan Kabupaten dan Desa;
   Masih terdapat jalan dalam kondisi tidak baik (34%);
2. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase masih sangat rendah (0,85%);
3. Irigasi pengairan sebagian besar kondisinya menurun (62% kondisi baik);
4. Persentase rumah tinggal bersanitasi masih sangat rendah (29,59);
5. Bangunan sarana prasarana pengendali banjir, dan pengamanan abrasi pantai saat ini sangat terbatas jumlahnya;
6. Layanan air baku belum optimal dan merata (24,08%);
7. Kinerja kelembagaan pengelolaan sumber daya air belum optimal;
8. Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, sarana dan prasarana pengendali masih terbatas (31,2%);
9. Rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur;

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Masih terdapat Rumah Tangga yang menempati rumah tidak layak huni, 34 persen;
2. Terbatasnya ketersediaan air bersih, 37 persen;
3. Masih terbatas penyedia air minum baik oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan non-PDAM;

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan air limbah yang layak;
5. Penanganan sampah di lingkungan perumahan belum optimal, 12 persen;
6. Cakupan sistem drainase masih kurang untuk wilayah permukiman;
7. Pembangunan sarana dan prasarana masih belum memperhitungkan kebutuhan lansia, penyandang disabilitas, perempuan menyusui dan anak, terutama dilingkungan publik.

5) Urusan Katenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi diera demokrasi;
2. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakukan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu;
3. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Lemahnya Kesadaran Hukum oleh Masyarakat dalam menciptakan ketertiban Umum dan Ketenraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah
5. Lemahnya SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
6. Sarana dan Prasarana dalam pelaksanan Tugas Satuan Poilisi Pamong Praja belum memadai

6) Urusan Sosial

1. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang memperoleh bantuan 45,17 persen;

2. Rendahnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat;
3. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada pada masalah kerawanan sosial;
4. Meningkatnya kasus anak yang berhadapan dengan masalah hukum dan korban konflik yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan;
5. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.
6. Alokasi dana daerah maupun APBD 1 yang masih sangat rendah dalam meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

7) Urusan Tenaga Kerja

1. Tingginya tingkat pengangguran;
2. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan pencari kerja;
3. Lapangan kerja yang tersedia sebahagian besar pada pertanian yang kurang diminati oleh para pencari kerja sehingga menimbulkan urbanisasi dari desa ke kota yang membuat masalah baru di perkotaan ;
4. Sarana dan prasarana pendukung tenaga kerja terutama BLK belum ada (0);
5. Kurangnya jejaringan pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi (60);
6. Minimnya informasi bagi hak ketenagkerjaan khususnya bagi perempuan tenaga kerja wanita, termasuk perlindungan dan hak perempuan;

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terdapat kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan kemampuan penanganannnya yang belum optimal;
2. Tingginya jumlah tenaga kerja yang masih dibawah umur;

3. Partisipasi anggkatan kerja perempuan yang belum optimal (26%);
4. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender;
5. Masih kurangnya advokasi pengarustamaan gender di berbagai aspek dalam mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

9) Urusan Pangan

1. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk ;
2. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan oleh makanan lain;
3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial;
4. Keandalan sistem irigasi semakin menurun;
5. Perubahan iklim global akibat pemanasan global menyebabkan perilaku iklim semakin sulit diprediksi;
6. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat Degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan *upstream* (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;
7. Fenomena gizi buruk di masyarakat masih mengancam.

10) Urusan Pertanahan

1. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum kabupaten belum optimal;
2. Lahan yang memiliki sertifikat masih kurang (25,03%);
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal;
4. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten belum optimal;

5. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten belum optimal;
6. Penyelesaian Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan belum optimal;
7. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Desa dalam 1 (satu) Wilayah Kecamatan belum optimal.

11) Urusan Lingkungan Hidup

1. Terjadinya degradasi lingkungan akibat meningkatnya kegiatan masyarakat yang mencemari air;
2. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Meningkatnya suhu udara, menipisnya persediaan air dan perubahan cuaca;
4. Meningkatnya timbulan sampah yang tidak diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai.

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penyusunan *profile* kependudukan provinsi belum optimal;
2. Rasio penduduk ber-KTP masih rendah (0,55);
3. Cakupan penerbitan akte kelahiran masih rendah (26,6%).

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa;
2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;
3. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri;

4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;
5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa;
7. Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal;
9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan tekbologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;
10. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;
11. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan.
12. Rata-rata kelompok binan PKK masih rendah (0,2).

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB (3%);
2. Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana.
3. Rata-rata jumlah anak per keluarga masih diatas 2.

15) Perhubungan

1. Belum terintegrasinya moda transportasi di Kabupaten Buol;
2. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan berupa rambu lalu lintas jalan, pagar pengaman maupun marka jalan nasional dan provinsi;
3. Masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya dibidang transportasi;
4. Belum terbangunnya *database* perhubungan ;
5. Belum adanya pola pembinaan terhadap perusahaan jasa angkutan laut dan darat;
6. Tata ruang perhubungan belum responsif terhadap pengguna jalan termasuk penyandang disabilitas;
7. Terbatasnya layanan Bis sekolah dan sebagian sudah tidak layak operasi (45%).

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Layanan multi media dalam rangka pemenuhan hak tahu publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum optimal;
2. Kesenjangan persepsi antara kalangan birokrasi dengan pihak pers dalam membangun nilai-nilai demokrasi untuk menciptakan *check and balances*.
3. Sangat terbatasnya kualitas dan kuantitas peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, baik yang di gunakan untuk penunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan Teknologi Informasi seperti Jaringan, baik LAN (*Local Area Network), WAN (Wilde Area Network), VPN (Virtual Private Network)* dan Pemanfaatan Intranet dan Internet;
4. Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi disektor TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);

5. Belum terjalinnya komunikasi berbasis elektronik diantara instansi Pemerintah, antara Pemerintah dengan Pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan;
6. Minimnya kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan informasi berbasis teknologi.

17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi yang aktif masih rendah (47,01%);
2. Manajemen dalam koperasi masih lemah;
3. Sistem pengawasan terhadap koperasi masih lemah;
4. Kemampuan usaha koperasi belum mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan swasta;
5. UKM non BPR/LKM aktif masih rendah (44%);
6. Pengembangan ekonomi usaha, mikro, kecil dan menengah masih belum optimal (6,12 %).

18) Urusan Penanaman Modal

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang investasi di daerah;
2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Buol (2 PMDN/PMA);
3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik;
4. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia;

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih sumberdaya untuk pembinaan olahraga dan pembinaan kepemudaan, hal ini berpengaruh pada semua aspek yang terkait dengan pembangunan keolahragaan dan pemuda baik yang bersifat fisik/ sarana

dan prasarana maupun aspek sistem pembinaan yang lebih maju dengan berbagai kebutuhannya;

2. Masih rendahnya rasa memiliki dan tanggungjawab pemuda bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang beriman dan berahlak mulia dalam suasana kehidupan yang *pluralistic* serta masih rendahnya jiwa dan semangat sebagai penerus kelangsungan pembangunan daerah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Derasnya penetrasi tata nilai budaya melalui berbagai macam media yang secara langsung mempengaruhi tata nilai budaya yang selama ini dijunjung dan memberi identitas keramahtamahan, solidaritas, indikasi dampak negatif yang menimbulkan masalah antara lain penggunaan psikotropika dan napza serta berbagai perilaku yang menyimpang berwujud kekerasan, tawuran dan lainnya yang menyimpang dari tata nilai budaya.

20) Urusan Statistik

1. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten belum optimal.

21) Urusan Persandian

1. Kurangnya sarana dan prasarana persandian yang memadai;
2. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dibidang persandian masih relatif kurang;
3. Persandian belum menjadi minat dan pilihan karir yang menarik.

22) Urusan Kebudayaan

1. Menurunnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi;
2. Masih rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah;
3. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah;

4. Minimnya pengarsipan/dokumentasi sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Buol.
5. Belum diterbitkanya dasar hukum kawasan cagar budaya Kabupaten Buol karena terkendala status kepemilikan lahan.
6. Belum ada Perda tentang Lagu Daerah.

23) Urusan Perpustakaan

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu di perpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka;
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan diperpustakaan masih perlu ditingkatkan;
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas;
4. Belum optimalnya kebijakan menyangkut perwujudan gerakan gemar membaca bagi masyarakat Buol.
5. Belum optimalnya kinerja dan manajemen SDM berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan Perpustakaan
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung modernisasi layanan Perpustakaan.
7. Belum optimalnya integrasi dan koordinasi urusan perpustakaan dengan OPD yang terkait.

24) Urusan Kearsipan

1. Belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia yang ada;
2. Belum optimalnya manajemen Sumber Daya Manusia berbasisi teknologi informasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Terbatasnya anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga;

5. Belum optimalnya koordinasi urusan perpustakaan dan arsip dengan OPD terkait;
6. Belum optimalnya integrasi dan validitas data perencanaa.

25) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;
2. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik, perseorangan dan perusahaan;
3. Tata letak (lay out) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;
4. Pola tanam tidak teratur dan sepenuhnya mengandalkan alam;
5. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun;
6. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk;
7. Tekhnologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;
8. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal;
9. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan;
10. Terbatasnya sarana produksi sepeerti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;
11. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon;
12. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di Kabupaten Buol;
13. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.

14. Produksi perikanan belum mencapai target (73,29%);
15. Kelompok nelayan yang dibinan masih rendah (24,62%).

26) Urusan Pariwisata

1. Belum dikenal secara luas baik lokal maupun ergional obyek-obyek wisata yang ada (Pulau Busak, Pulau Boki, *Mangrove* di desa Taat, Pantai Nelam);
2. Belum adanya RIPOW (Rencana Induk Pengelolaan Obyek Wisata) untuk tiap obyek wisata;
3. Terbatasnya saran dan prasarana penunjang pariwisata;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan.

27) Urusan Pertanian

1. Meningkatnya kebutuhan tanaman pangan sebagai bahan makanan pokok sejalan dengan pertambahan penduduk menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi, selain itu meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan produksi pertanian semakin menurun, untuk itu perlu dilakukan diversifikasi tanaman serta menggunakan teknologi tepat guna;
2. Permasalahan lainnya adalah faktor pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkat kesejahteraan petani, untuk itu diharapkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat berperan lebih optimal melayani kebutuhan petani akan sarana produksi dan kredit serta menampung hasil produksi;
3. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, disamping kurangnya modal;
4. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik;

5. Menurunnya produktifitas air irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup dan perubahan iklim;
6. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani;
7. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan;
8. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional;
9. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak;
10. Konsumsi daging dan telur masih dibawah standar gizi;
11. Tata niaga ternak masih belum optimal;
12. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin.
13. Cakupan bina kelompok petani masih rendah (67,26%).

28) Urusan Kehutanan

1. Maraknya pencurian kayu dihutan Negara, khususnya pada areal HPH;
2. Pemanfaatan jasa lingkungan (air,wisata, carbon trade) dihutan produksi dan hutan lindung masih rendah;
3. Pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan belum optimal.

29) Urusan Energi dan sumberdaya Mineral

1. Adanya beberapa KP (Kuasa Pertambangan) yang tumpang tindih antara KP (Kuasa Pertambangan) dengan KK (Kontrak Karya) maupun kuasa pertambangan dengan Kawasan Hutan;
2. Maraknya PETI (Pertambangan tanpa izin) di daerah dalam wilayah kontrak karya sehingga di khawatirkan dapat mengganggu lingkungan sekitarnya;

3. Masih terbatasnya data yang akurat mengenai sumber daya mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Air dan Tanah, karena masih kurangnya kegiatan eksplotasi dan studi kelayakan.
4. Persentase rumah tangga pengguna listrik masih rendah (55,87%);
5. Ketersediaan daya listrik masih rendah (41%).

30)Urusan Perdagangan

1. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;
2. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;
3. Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;
4. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah;
5. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu;
6. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memberikan jaminan keamanan dan responsive bagi kebutuhan perempuan, anak dan lansia.
7. Belum ada pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.

31) Urusan Perindustrian

1. Kulitas SDM (Sumber Daya Manusia) industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap

perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen;
2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;
3. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal;
4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;
5. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk;
6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
7. Pembinaan terhadap kelompok pengrajin masih rendah (44%).

32) Urusan Transmigrasi

1. Aksesibilitas calon transmigran ke lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi masih belum memadai;
2. Bimbingan dan penyuluhan masih belum optimal;
3. Rasa keterkaitan penduduk calon transmigrasi dengan penduduk lokal masih rendah;
4. Keterlambatan penyiapan lahan dan bangunan pemukiman bagi transmigrasi;
5. Adanya tumpang tindih lahan.

4.1.2 Penelaahan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Buol Tahun 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005 – 2025 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, karena RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 merupakan Tahapan Ketiga pelaksanaan pembangunan dari RPJPD Kabupaten Buol. Alur tahapan dan penetapan skala prioritas yang

ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Oleh karena itu, tekanan pada skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda , tetapi semua terus berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buol Tahun 2005-2025 adalah **"KABUPATEN BUOL MANDIRI, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA DALAM TATANAN MASYARAKAT BUOL BERKAH".** Berkenaan dengan visi tersebut, maka Misi RPJPD Kabupaten Buol adalah berikut:

1. Mewujudkan tatanan masyarakat BERKAH sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang terampil, berilmu pengetahuan teknologis, produktif, mandiri, dan maju;
3. Mewujudkan *good governance* dan *clean governanc*e dengan aparatur negara yang profesional melayani masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
5. Mewujudkan pembangunan yang Berkeadilan dan Inklusif;
6. Mewujudkan Kabupaten Buol yang asri dan lestari, bersih dan indah;
7. Mewujudkan Kabupaten Buol aman, damai dan bersatu.

RPJPD Tahun 2005-2025 pada tahun RPJMD Kabupaten Buol merupakan masa periode ke-3 yaitu Tahun 2015-2020, diarahkan dengan tetap berpegang pada capaian kinerja pada RPJMD Periode ke-2. Sesuai dengan hasil implementasi, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, maka pada RPJMD ke-3 ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian yang didukung oleh suasana aman dan damai dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup tinggi terutama tingkat menengah keatas dan kejuruan di samping itu pula terbukanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada berkurangnya angka pengangguran.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin tinggi sehingga usia harapan hidup turut meningkat, kecukupan gizi serta hilangnya penyakit seperti TBC, BCG, campak dan polio di masyarakat.

Daya saing perekonomian semakin kuat dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan, terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah daerah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh mantapnya jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.

Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 maka dalam pelaksanaan RPJMD Periode ke-3 ini, hubungannya dapat digambarkan seperti pada Gambar 4.1 berikut:

MISI RPJPD 2005-2025			MISI RPJMD 2017-2022	
MISI 1	Mewujudkan tatanan masyarakat BERKAH sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Falsafah Pancasila	→	MISI 2	Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Maju, Mandiri dan Berkepribadian serta Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
MISI 2	Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas yang terampil, berilmu pengetahuan teknologis, produktif, mandiri, dan maju			
MISI 3	Mewujudkan *good governance* dan *clent governanc*e dengan aparatur negara yang profesional melayani masyarakat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	→	MISI 1	Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi
MISI 7	Mewujudkan Kabupaten Buol aman, damai dan bersatu			
		→	MISI 3	Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan
MISI 4	Mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	→	MISI 4	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing
MISI 5	Mewujudkan pembangunan yang Berkeadilan dan Inklusif	→	MISI 5	Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan
		→	MISI 6	Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota (Balancing Lingkages)
MISI 6	Mewujudkan Kabupaten Buol yang asri dan lestari, bersih dan indah	→	MISI 7	Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development).

Gambar 4.1 Hubungan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2002-2025 dengan RPJMD Tahun 2017 - 2022

4.1.3 Penalaahan RPJMN & RPJMD Provinsi

1) Penelaahan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015 – 2019

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2019 mengemban Visi "Terwujudnya Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dalam Rangka Mewujudkan visi tersebut, maka RPJMN menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeribebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berlandaskan pada visi dan misi tersebut, maka agenda pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 terumuskan dalam "Nawacita" yang memuat antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

3. Membangunan Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negaara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategsi ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agar memperjelas kesesuaian dan harmonisasi hubungan serta sinergitas Visi, Misi antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, dapat dilihat pada Gambar 4.2, sedangkan hubungan agenda prioritas nawacita pemerintah dengan misi pembangunan Kabupaten Buol dapat dilihat pada Gambar 4.3.

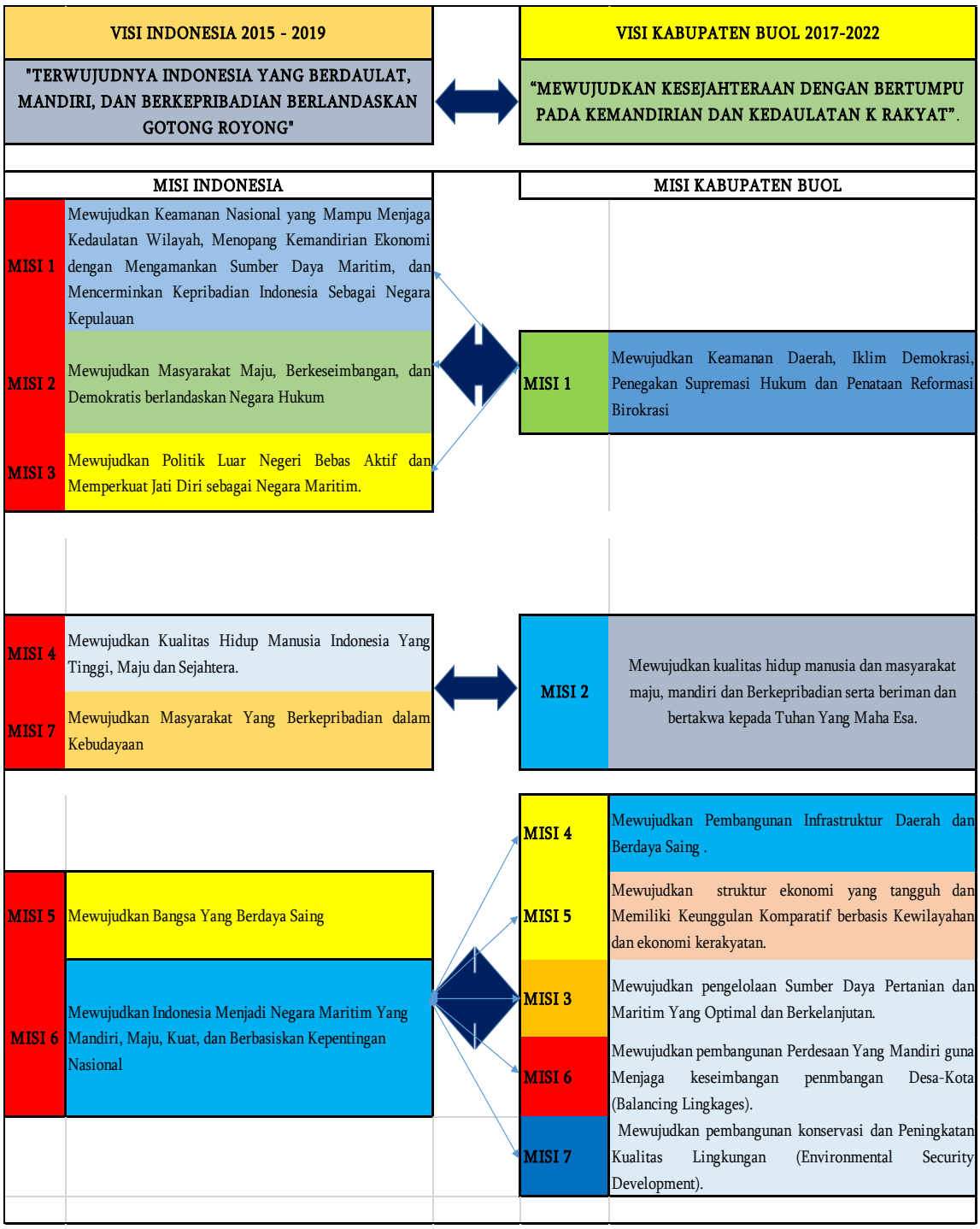

Gambar 4.2 Kesesuaian Visi, Misi Pemerintah Tahun 2015-2019 dan Pemerintah Kabupaten tahun 2017-2022.

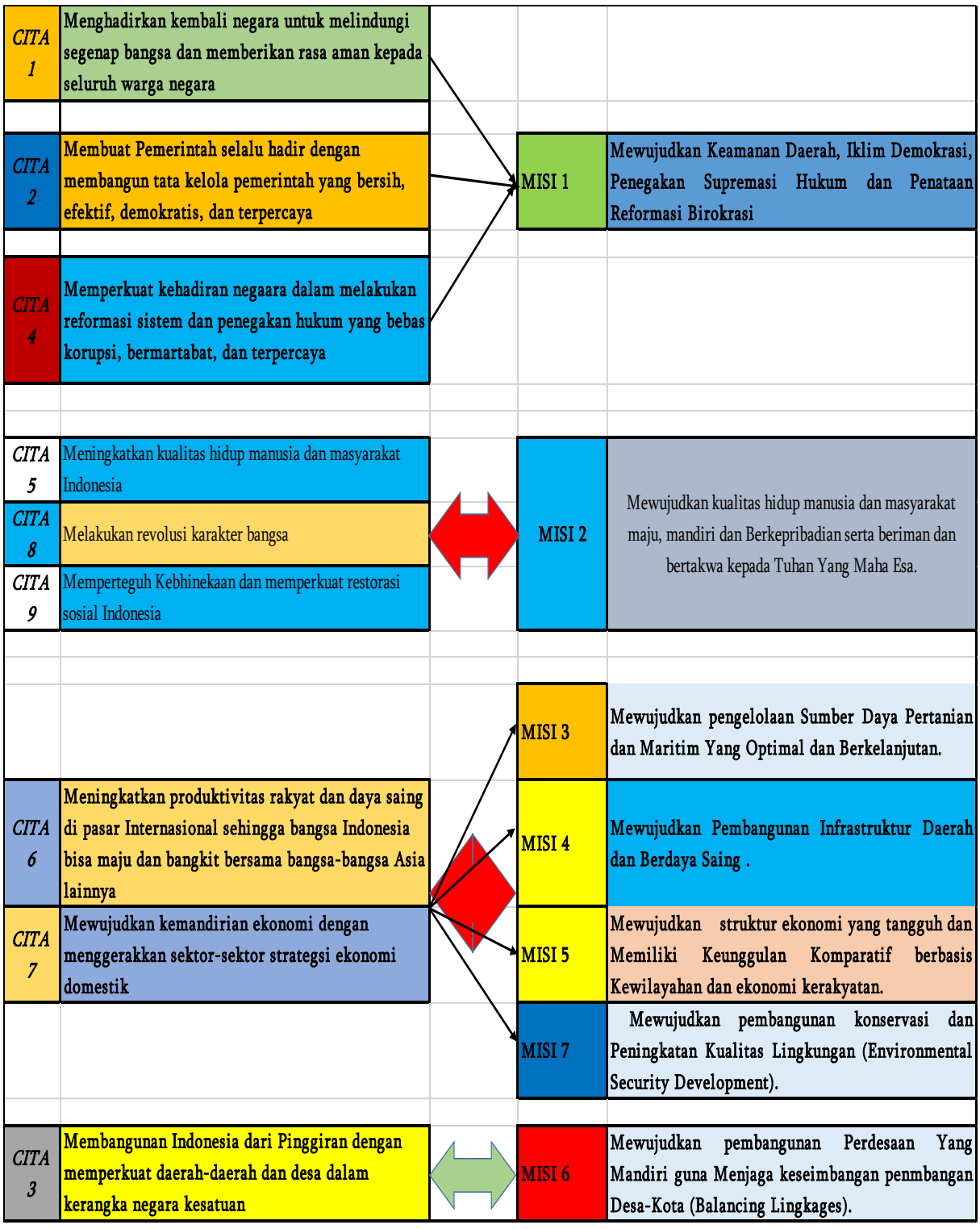

Gambar 4.3 Hubungan Agenda Prioritas Nawacita Pemerintah dengan Misi Pembangunan Kabupaten Buol.

2) Penelaahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021

Visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 adalah **"Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing"**. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan pada 5 (lima) Misi berikut:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim yang optimal dan berkelanjutan sejajar dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

Adapun berdasarkan penelaahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, urgensitas pembangunan pada kontekstual Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Menjaga Tabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Penegakkan dan Supremasi Hukum
6. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pendidikan Politik dan Prilaku Organisasi

7. Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pendidikan Politik dan Prilaku Demokrasi
8. Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
9. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
10. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal
11. Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
13. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
14. Peningkatan Perlindungan Sosial dan Masyarakat
15. Peningkatan kesadaran dan toleransi masyarakat akan keragaman RAS
16. Peningkatan Ketersediaan Stok dan distribusi Pangan
17. Peningkatan Kesejahteraan Petani
18. Peningkatan Produktivitas Pertanian
19. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan
20. Peningkatan Produktivitas Perikanan
21. Pengembangan potensi sumber daya alam unggulan lokal dalam pengembangan industri kecil menengah sebagai pemasok utama pasar regional
22. Peningkatan ketersediaan infrastruktur sosial yang berdaya saing
23. Peningkatan ketersediaan infrastruktur ekonomi yang berdaya saing
24. Peningkatan Kemandirian Energi dan EBT (Energi Baru Terbarukan)
25. Peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi
26. Pengembangan ekonomi berbasis sektor-sektor unggulan dan pariwisata
27. Pengembangan pertumbuhan IKM, UKM dan Koperasi yang mandiri
28. Pengembangan dan pemanfaatan potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat
29. Peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat
30. Pembentukan Desa Mandiri
31. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
32. Peningkatan Kualias sarana dan prasaran perdesaan

33. Peningkatan kualitas Lingkungan
34. Peningkatan Luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik

Berikut dapat dijelaskan hubungan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 4.4 berikut:

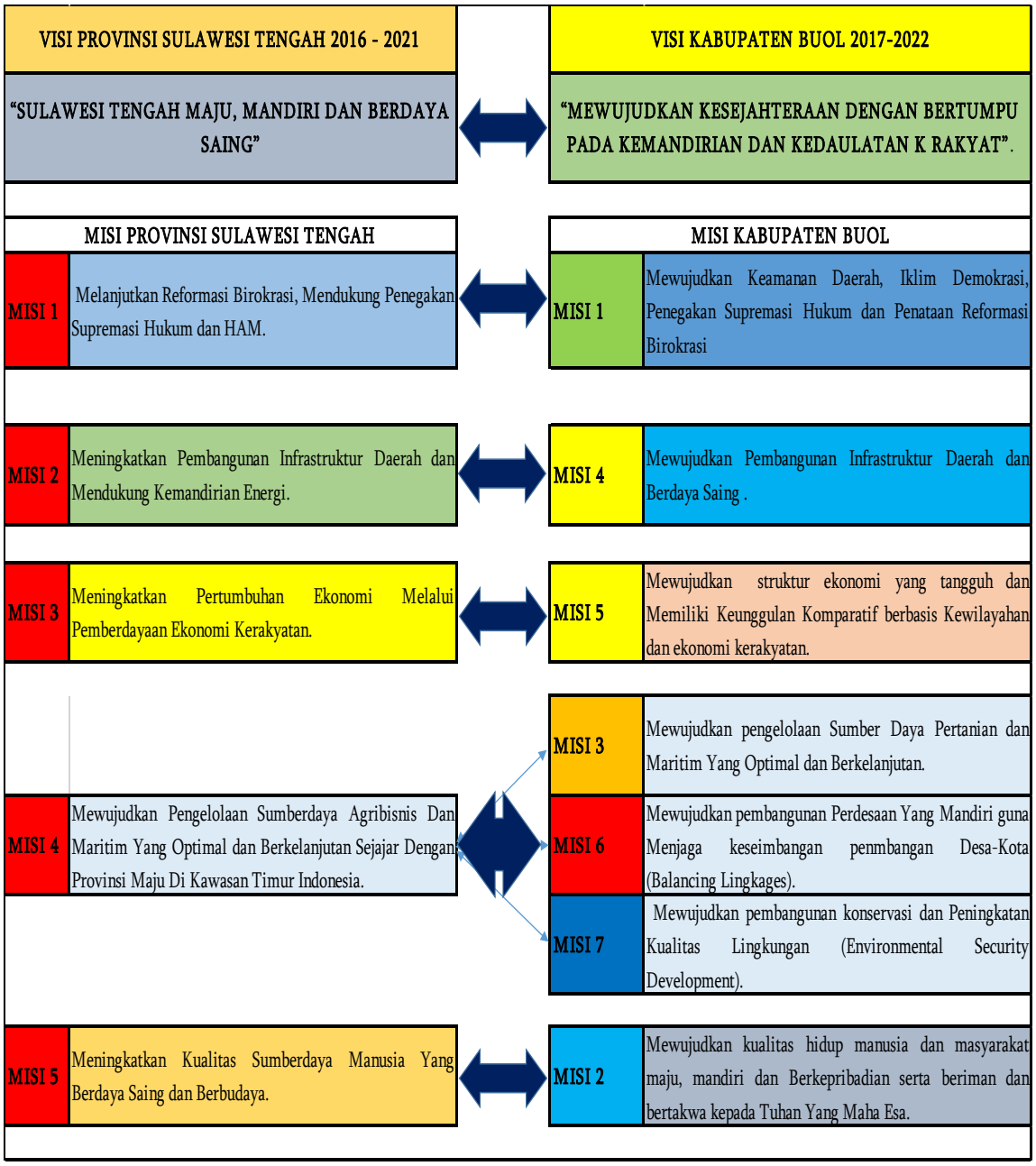

CITA 1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	AP.2	Pembangunan Ketentraman, ketertiban , demokrasi dan harmonisasi politik
CITA 2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	AP.1	Penataan Reformasi Birokasi menuju Birokrasi Yang Kuat, efektif dan Bersih berlandaskan Kepastian Hukum dan perlindungan HAM
CITA 3	Membangunan Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	AP.10	Pembangunan Perdesaan Yang Maju dan Mandiri
CITA 4	Memperkuat kehadiran negaara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		
CITA 5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	AP.3	Membuat Pemerintah selalu Hadir dalam Pembangunan Pedidikan Gratis Berkualitas yang afirmatif
CITA 8	Melakukan revolusi karakter bangsa	AP.4	Membuat Pemerintah selalu Hadir dalam Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Gratis Berkualitas
CITA 9	Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia		
CITA 6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	AP.5	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan Kewilayahan
		AP.6	Pembangunan Infrastruktur Daerah Berkualitas dan Berdaya Saing
		AP.7	Mendukung Percepatan Kemandirian Energi Baru Terbarukan
CITA 7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategsi ekonomi domestik	AP.8	Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan Kemiskinan melalui Kemandirian ekonomi dan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Lokal.
		AP.9	Pemantapan Iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif

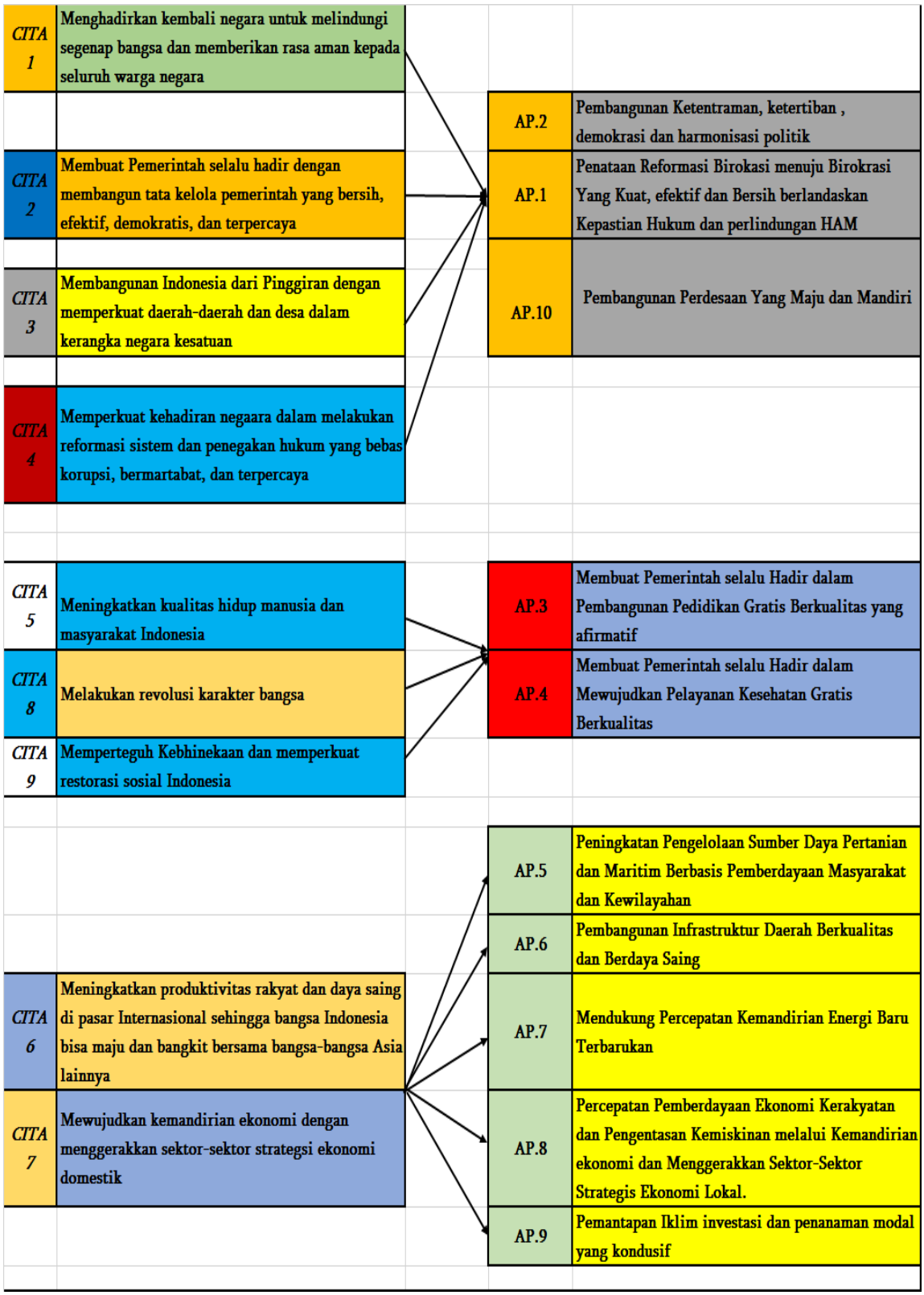

Gambar 4.4 Hubungan Harmonisasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Buol

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

6.2.1 Isu Strategis Global dan Nasional

1) Geo – Ekonomi

Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

***Pertama,* proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat**. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara

itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh besarnya obligasi pemerintah dan belum adanya rencana penyesuaian ekonomi jangka menengah.

***Kedua,* pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik**. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) negara berkem-bang terhadap PDB Dunia pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 persen; dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1 persen. Hal tersebut mengakibatkan aliran modal asing ke negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Selain itu, pertumbuhan ekspor negara berkembang akan semakin kuat, seiring dengan momentum pemulihan perdagangan global. Rantai suplai global dan regional pun akan terus berkembang, karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi akan menyebabkan fragmentasi rantai produksi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Kondisi ini akan mempengaruhi dinamika FDI (*Foreign Direct Investment*) antarnegara dan trend integrasi perdagangan sehingga akan mendorong ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

***Ketiga,* trend perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang**, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan men-jadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara

pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan.

***Keempat,* harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat.** Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain, indeks harga komoditas non-energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019 (Sumber: Bank Dunia, *Commodity Price Forecast*). Hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspornya, dari berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur.

***Kelima*, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspo**r. Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa NTMs (*Non Tariff Measures)* dan NTBs (*Non Tariff Barriers*). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di dunia meningkat dengan sangat pesat, seperti berupa *Sanitary-and-Phytosanitary measures* dan *export taxes/restriction*. Dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin.

***Keenam,* implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).** Dengan MEA, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA, peningkatan daya saing perekonomian

nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA bagi kepentingan pembangunan nasional.

Ketujuh, **Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.** Hal ini bermula dari kesadaran bahwa kerjasama *plurilateral* dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (*noodle bowl syndrome)* akibat banyaknya kesepakatan bilateral. Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti pada tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tiga kesepakatan kerjasama ekonomi yang sedang dalam proses perundingan diperkirakan akan menjadi tiga Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block),* yaitu: TPP (*Trans Pacific Partnership)* yang saat ini beranggotakan 13 negara Asia dan Pasifik*, TTIP (Trans Atlantic Trade and Investment Partnership)* yang terdiri dari Amerika dan EU (*European Union*)*,* dan *RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)* yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra ASEAN. Ketiga mega blok perdagangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arsitektur perdagangan dan investasi global.

2) Konstelasi Geo-politik Global

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia. Upaya penyeimbangan kembali oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (*Rebalancing Asia Pacific*) merupakan salah satu perkembangan geo-politik saat ini**.** Perluasan kekuatan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dilakukan dengan menggelar lebih banyak armada di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga memperkuat kerja sama militer dengan Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Singapura, India, New Zealand, Vietnam dan Indonesia; dan mengupayakan kerjasama militer dengan Tiongkok. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam

menggalang keikut sertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam *Trans Pacific Partnership (TPP),* meningkatkan bantuan luar negeri ke Asia Pasifik, serta meningkat-kan volume perdagangan dengan negara di Asia Pasifik.

3) Lingkungan Strategis Nasional

Di antara negara-negara tetangga, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dalam konteks regional, dan terbesar ketiga di dunia. Pada konteks geo-politik nasional, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi yang memperkaya Indonesia, terutama dalam menjadikan Indonesia faktor penting dalam konteks regional maupun global. Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggangkan, bahkan memecah ikatan persaudaraan kebangsaan. Bahkan tidak jarang, faktor yang merenggangkan adalah kepentingan politik-ideologis yang datang dari luar Indonesia, termasuk persaingan Blok Barat-Blok Timur dan perang dingin di masa lalu, dan pada masa sekarang menghadapi pengaruh gagasan ideologi tertentu yang membenarkan tindakan terorisme untuk mendirikan negara baru melawan Pancasila.

4) Bonus Demografi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati 'bonus demografi', yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada

penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

5) Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015–2030; (b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Dari pengalaman era MDGs (2000–2015), Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalansi AIDS dan HIV.

Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2030 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan Sulawesi Tengah pada khususnya.

6.2.2 Isu Strategis Regional Sulawesi

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, pengembangan wilayah Sulawesi yang didasarkan pada potensi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah dengan tema pengembangan wilayah adalah sebagai berikut :

- Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- Pengembangan industri berbasis logistik;
- Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industry berbasis kakao, padi, jagung;
- Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sulawesi, maka tema besar *Pembangunan Wilayah Sulawesi adalah:*

- sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia;
- Pengembangan industri berbasis logistik;
- Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung;
- Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari**.**

6.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun isu-isu strategis Pemerintah Provisni Sulawesi Tengah, dalam menghadapi tantangan ke depan, adalah sebagai berikut:

1) Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum Dan HAM (Hak Azasi Manusia)

Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis, saat ini kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupun fungsi kelembagaan belum efektif dan efisien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal, disamping itu rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari filossofi *good governance*, hal ini akibat penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum professional dan belum memiliki indikator dan pola yang jelas.

Dari sisi hukum masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagi akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu masih dirasakan kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah dibidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat.

2) Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Mendukung Kemandirian Energi

Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah pedesaan, daerah pedalaman dan terpencil sekaligis sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadai aksebilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikkan.

Seiring dengan peningkatan arus pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta mulai tingginya konsumtif masyarakat, untuk itu pemerintah daerah kabupaten/kota telah membangun beberapa infrastruktur khususnya dibidang transportasi udara, Untuk di kota palu saat ini telah memiliki Bandar Udara Mutiara Palu yang memiliki landasan pacu 2.250 m sehingga bisa didarati oleh pesawat jenis Boeing 737-900, disamping itu beberapa kabupaten telah membangun Bandar udara seperti Bandar Udara Amirudin Amir di Banggai, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Lalos di Toli-Toli, Bandara Pogogul di Buol, dan Bandara Tanjung Api di Tojo Una-una yang masih perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam memacu akselerasi pembangunan di bidang transportasi udara di daerah Kabupaten-kabupaten,

Sementara dibidang transportasi darat secara fungsional kondisi jalan di Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2015 adalah: jalan nasional sepanjang 2.373,40 Km dengan kondisi mantap 93,83 persen dan tidak mantap 6,17 persen, jalan provinsi dengan panjang 1.619,26 Km dengan kondisi mantap 57,70 persen dan tidak mantap 42,30 persen. Dari data ini kondisi jalan provinsi masih banyak dalam kondisi tidak mantap. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya fiscal daerah dalam mendanai program kegiatan infrastruktur.

3) Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum optimal dalam pelaksanaannya untuk itu upaya pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk memeratakan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkesinambungan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional namun

pertumbuhan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor primer pertanian dan pertambangan tetapi relative masih belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan kedepan pertumbuhan ekonomi dapat beralih dan terbagi secara merata pada sektor sekunder lainnya yaitu industri, perdagangan dan jasa. Salah satu alasan rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian pada sektor sekunder adalah masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat pada teknologi tepat guna, serta akses pasar yang sangat minim sehingga dalam pemasaran hasil produksi unggulan keluar daerah belum dapat dioptimalkan.

Hasil pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi selama ini masih belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah, walaupun didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, daerah-daerah masih belum bisa mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu salah satu antisipasi permasalahan kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah yaitu dengan cara mendorong penyebaran industri ke daerah-daerah, dengan melakukan terobosan pengembangan kawasan industri yang berbasis pada kompetensi inti dan produk-produk unggulan di setiap daerah.

Daerah yang telah mencoba melakukan klaster industri adalah Kota Palu yang membangun kawasan industri terpadu dan saat ini telah dikembangkan menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Pertimbangan dalam mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Palu yang di arahkan pada KEK (Kawasan Ekonomi Kusus), sesuai dengan arah kebijakan industri nasional.

4) Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal Dan Berkelanjutan Sejajar Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia

Permasalahan pemanfaatan sumber daya alam hingga saat ini tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan

daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan secara ilegal serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan perumahan dan ekonomi lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan serta masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya.

5) Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Dan Berbudaya

Dalam menganalisis kualitas mutu modal manusia dapat mengunakan berbagai macam indikator penilaian kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator penilaian yang digunakan adalah dengan melihat dan membandingkan kondisi IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di setiap daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Pembangunan Manusia masih tergolong rendah. Ini ditandai dengan masih lebih rendahnya nilai IPM Sulawesi Tengah dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Tahun 2015, IPM Sulawesi Tengah sebesar 66,76 poin yang masih dibawah rata-rata nasional 69,55 poin. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah masih tertinggal dibanding pembangunan manusia provinsi lainnya di Indonesia.

Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2015 berjumlah 406.340 jiwa atau 14,07 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Karena itu dibutuhkan prioritas-prioritas dan sasaran

dalam melakukan perencanaan pembangunan secara serius dan konsisten di bidang kualitas sumber daya manusia agar dapat sejajar dengan daerah lainnya.

6.2.4 Isu Strategis Kabupaten Buol

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMN sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.
Adapun isu-isu strategis Kabupaten Buol adalah sebagai berikut:

1) Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi dan pembangunan hukum serta ketentraman dan ketertiban adalah merupakan salah satu agenda penting pemerintah daerah 5 tahun ke depan yaitu karena pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen yang penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Reformasi tersebut kiranya dapat membuahkan hasil yang

positif khususnya dalam perbaikan palayanan publik, efektifitas dan akuntanbilitas.

Dalam pembangunan hukum mencakup proses pembuatan peraturan daerah, proses pengawasan dan juga penegakannya, serta memfasilitasi hukum bagi masyarakat. Pembangunan hukum ini juga mencakup suasana dan kepastian hukum sehingga tercapainya ketentraman dan ketertiban.

a. **Keamanan Daerah, Tingkat keamanan di Kabupaten Buol** selama kurun waktu 5 (lima)Tahun terakhir ini, yaitu Tahun 2012-2016, dapat dikategori Aman dan kondusif. Konflik Ramadhan Berdarah yang terjadi tahun 2010, berangsur-angsur dapat di tangani dan diatasi sehingga tidak berkepanjangan, aktivitas dan harmonisasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum (Kepolisian) semakin harmonis dan tercipta dengan konusif. Disisi lain frekuensi kejadian kriminalisasi sangat rendah dan tidak terjadi peristiwa yang sangat luar biasa yang berakibat perpecahan antar kelompok di daerah ini lagi, atau kondisi keamanan dan ketertiban daerah dapat terjaga. Namun demikian bukan berarti pembangunan perlindungan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban diabaikan, akan tetapi masih banyak agenda yang harus dilakukan untuk benar-benar jaminan keamanan dan ketertiban harus terjaga.
b. **Iklim Demokrasi, Kondisi demokrasi di Kabupaten Buol** semakin meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peristiwa pemilihan umum presiden, pemilihan calon legislative dan terakhir pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan damai, sukses dan iklim keamanan dan ketertiban yang sangat kondusif. Penciptaan Iklim Demokrasi yang kondusif dan bermartabat harus ditingkatkan, Pembelajaran Politik dan Demokrasi harus terus menerus dilakukan, ditingkatkan dan disosialisasikan.
c. **Supremasi Hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol** sangat menjunjung tinggi supremasi hukum ditegakkan, Oleh karena itu tugas

pemerintah kedepan harus memfasilitasi dan membentuk penyusunan produk-produk hokum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan yang terpenting dapat melindungi kehidupan dan perikehidupan masyarakat dalam bermasyarakat, pembangunan maupun dalam matapencahariannya. Aparat penegak hokum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja kinerja harus lebih dioptimalkan baik fungsi pelayanannya maupun tugas sebagai pamong praja.

d. **Penataan Reformasi Birokrasi**, adalah pemerintah daerah harus cepat melakukan adaptasi dan penyesuian –penyesuaian dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, dimana Penataan reformasi Birokrasi Kelembagaan Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah harus disusun berdasarkan tipologi wilayah daerah sehingga diperoleh *type* organisi perangkat daerah yang lebih dinamis, efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rencana Aksi Daerah tentang Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buol sudah sesegera mungkin disusun dan diiplementasikan.

2) Kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan adalah merupakan salah satu agenda yang menjadi prioritas dimasa pemerintahan mendatang. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dapat dilihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tersebut seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan daya saing serta akan memacu terciptanya

kreatifitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menciptakan sumber daya manusia berdaya saing sehingga akan tercapainya pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Dalam bidang kesehatan juga melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan turunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

3) Pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya pertanian dan maritim yang optimal dan berkelanjutan adalah Memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Buol hingga saat ini masih dapat dikatakan sebagai Kabupaten yang berbasis pertanian dimana sekitar 59 persen PDRB-nya merupakan kontribusi sektor pertanian, dan penduduk usia kerja berprofesi sebagai petani, sebagian besar Rumah Tangga Miskin berasal dari sektor pertanian dan berbagai indikator sektor pertanian yang ada, dan disisi lain pula bahwa Kabupaten Buol memiliki Derajat Kesehatan Masyarakat yang masih sangat rendah dari 10 (sepuluh) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

4) Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing.

Pembangunan infrastruktur adalah merupakan kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagaan listrik, energi, pos telekomunikasi dan informatika, sumber daya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembangunan infrastrukur memerlukan pendanaan yang sangat besar sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan

anggaran melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan pemerintah daerah melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), serta melalui investor swasta dengan salah satu model *Publik Private Partnership*.

5) Pengembangan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka yang menjadi prioritas pemerintah daerah 5 tahun kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buol, dimana pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,31 persen, Tahun 2013 naik menjadi 7,32 persen, Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 6,15 persen akibat pengaruh kondisi perekonomian global dengan adanya situasi resesi ekonomi dunia, akan tetapi Tahun 2015 kembali bergerak naik menjadi ... persen dan Tahun 2016 turun mencapai 3,6 persen.

Berdasarkan struktur PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu sejumlah 59,0 persen pada Tahun 2015, sehingga sektor pertanian diharapkan akan menjadi primemover atau penggerak perekonomian Kabupaten Buol 5 tahun ke depan.

6) Pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan pembangunan Desa-Kota (Balancing Lingkages)

Pembangunan perdesaan yang mandiri guna menjaga keseimbangan pembangunan antara Desa dan Kota (*Balancing Lingkages*) adalah bagaimana tetap peningkatan kualitas SDM perdesaan, menjaga warisan budaya lokal, PCPPD (Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Desa),

peningkatan kualitas sarana prasarana perdesaan, dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi serta menjadikan setiap tindakan dan pengalaman masyarakat Desa sebagai pengetahuan yang berharga bagi upaya mendukung proses kemandirian Desa.

7) Pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development).

Memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dengan memperhatikan pembangunan konservasi dan pembangunan berbasis ekologi yang berorientasi pada pememenuhan kebutuhan generasi masa kini dengan tanpa mengorbankan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan generasi masa mendatang dalam artian pembangunan berkelanjutan merupakan upaya dan tindakan yang dilakukan dalam proses pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan konsep *"Membangun tanpa merusak tatanan lingkungan hidup, menjamin kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang paling tidak sama dengan kualitas lingkungan hidup yang kita rasakan hari ini, good governance, keterbukaan, persamaan/kesetaraan hak dan Gender dalam setiap kegiatan pembangunan"*.

BAB V
VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Keberadaan Visi Pemerintah Kabupaten Buol juga merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit *(leverage)* bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bersama yang dicita-citakan.

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Buol.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa visi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Kabupaten Buol adalah gambaran kondisi Kabupaten Buol yang ingin dicapai pada akhir periode 2017-2022. RPJMD Kabupaten Buol 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2005-2025.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Buol, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJMNas Tahun 2015-2019 serta prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Buol maka visi Pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Buol periode Tahun 2017-2022 yaitu pasangan **Hi. dr. Amirudin Rauf, S.POG, M.Si dan Hi. Abdullah Batalipu, S.Sos, M.Si** dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DENGAN BERTUMPU PADA KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN RAKYAT"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondii yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Buol dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (*keywords*) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Kabupaten Buol. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah ***Kesejahteraan, Mandiri dan Kedaulatan Rakyat,*** Pokok-pokok visi akan dijelaskan lebih detail dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Pokok-Pokok Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
Tahun 2017-2022

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DENGAN BERTUMPU PADA KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN RAKYAT"	**Kesejahteraan**	Kesejahteraan dalam arti yakni kita dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua rakyat untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah, yang mana dapat diakuinya hak-hak dasar masyarakat dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat, melalui usaha pemerintah hadir untuk mengusahakan rakyat mampu bekerja secara produktif dan pula dapat memberikan jaminan sosial

		/bantuan kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya.
	Kemandirian	Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemandirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memnuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.
	Kedaulatan Rakyat	**Kedaulatan Rakyat** dalam arti bahwa mendudukan rakyat sebagai agen pembangunan dapat secara demokratis memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan mendistribusikannya kembali kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol tanpa pengecualian melalui upaya-upaya penyediaan dan memberikan aksesibilitas kepada seluruh masyarakat terhadap sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya (termasuk Hukum) dan pemerintahan yang bersih. Dan Juga Kedaulatan Rakyat adalah dimana rakyat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

5.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buol 2017-2022. Adapun Ketujuh misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi**
2. **Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.**
3. **Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan.**
4. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing .**
5. **Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.**
6. **Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota *(Balancing Linkages)*.**
7. **Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan *(Environmental Security Development)*.**

Ketujuh butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Misi 1

Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terdapat masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan keamanan daerah, iklim demokrasi dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional yang berlandaskan supremasi hukum termasuk penataan

kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *good dan clean governace*, seperti pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Diagram Sasaran Misi 1

5.2.2 Misi II

Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu variabel yang menentukan tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pembangunan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan dan layanan

dasar lainnya menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal seperti pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2 Diagram Tujuan Misi 2

5.2.3 Misi III

Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan.

Pengelolaan sumber Daya Pertanian dan Maritim yang optimal dan berkelanjutan diperlukan peran/pemberdayaan masyarakat untuk turut serta beran aktif dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Buol. Pemberdayaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan di daerah terutamanya dalam pengelolaan Sumber Daya strategis terutama bidang Pertanian dan Maritim Kabupaten Buol, seperti pada gambar 5.3.

Gambar 5.3 Diagram Sasaran Misi 3

5.2.4 Misi IV

Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing .

Pembangunan Infrastruktur daerah perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah, sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Buol dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan ketersediaan energi melalui pengembangan energi terbarukan bersumber dari potensi sumber daya alam yang tersedia, sehingga dapat mendukung penacapaian kemandirian energi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti pada Gambar 5.4.

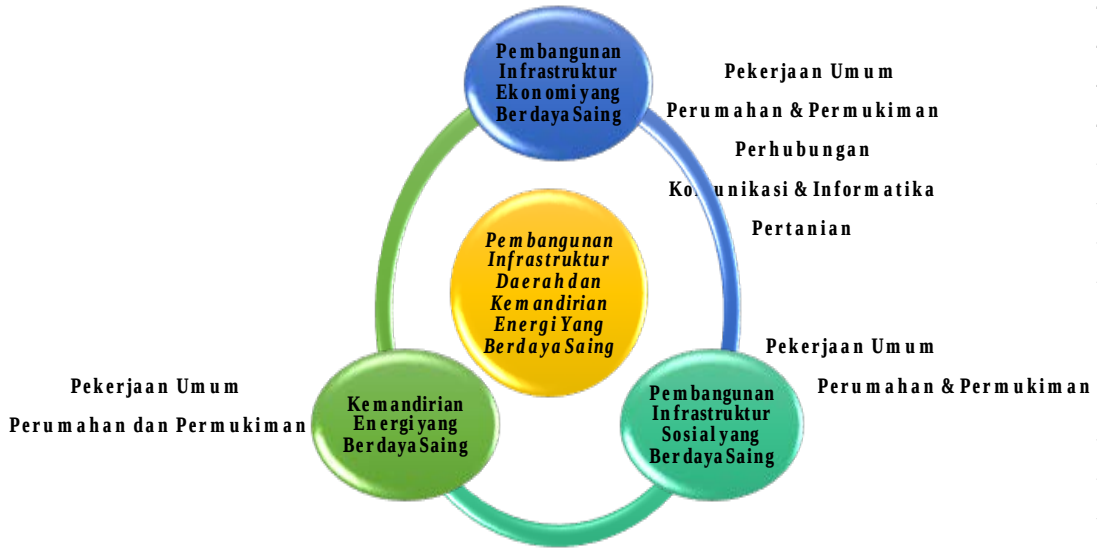

Gambar 5.4 Diagram Tujuan Misi 4

5.2.5 Misi V

Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Bumi Pogogul Kabupaten Buol baik yang tersimpan di dalam maupun di permukaan bumi serta potensi di lautan Buol mampu menambah nilai guna perekonomian bagi kehidupan masyarakat. Nilai guna tersebut diperoleh melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta membuka peluang investasi bagi pihak swsata baik dalam maupun luar negeri, seperti pada Gambar 5.5.

Gambar 5.5 Diagram Tujuan Misi 5

5.2.6 Misi VI

Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan pengembangan Desa-Kota (Balancing Linkages).

Untuk membentuk Desa Mandiri di Kabupaten Buol adalah merupakan tujuan pembangunan kabupaten Buol yang berkelanjutan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, membentuk kapasitas pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan dengan didukung dengan pembangunan sumber daya manusia , pemberdayaan dan penguatan modal sosial budaya masyarakat, pengmbangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi serta pengembangan pembangunan kawasan perdesaan. Hal ini pula merupakan kehadiran pemerintah daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimun di desa dengan penguatan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dalam rangka guna menjaga keseimbangan pengembangan Desa dan Kota (Ibukota Kabupaten Buol), seperti pada Gambar 5.6.

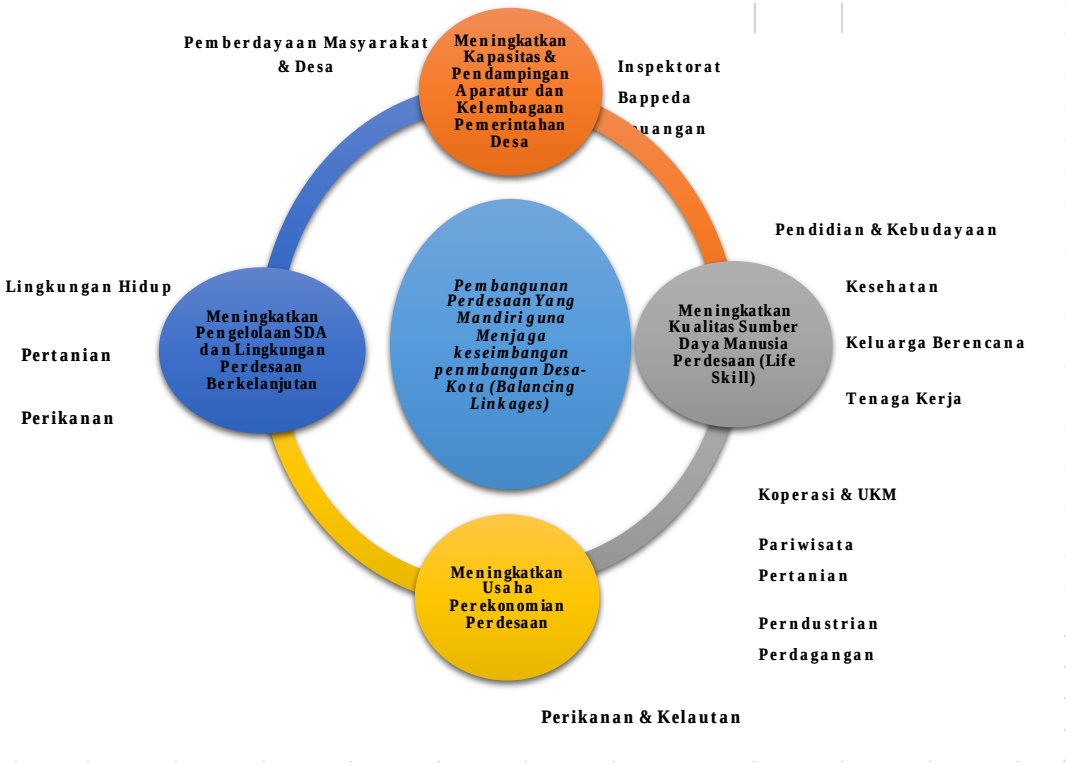

Gambar 5.6 Diagram Tujuan Misi 6

5.2.7 Misi VII

Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development).

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh makhluk yang ada di lingkungan dan kemampuan Daya tampung lingkungan untuk menampung, menerima dan menyerap limbah dan pencemaran serta gangguan (hingga kualitas lingkungan tidak mengalami degradasi) yang dihasilkan oleh pembangunan daerah berdasarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Daerah dengan memperhatikan dan mengukur seluruh faktor yang ikut menentukan daya dukung dan daya tampung suatu lingkungan hingga lingkungan wilayah agar tidak mengalami degradasi, dengan melakukan substitusi atau pemanfaatan sumber-sumber materi dan energi yang dapat diperbarui seperti pemanfaatan energi sinar matahari dan energi air untuk mengganti penggunaan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui sebagai upaya terpadu untuk melestarikan keberadaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam usaha meningkatkan kesejahteraan khususnya sumber daya Pertanian, Laut, Sungai, Hutan, Pesisir pantai, Kota yang dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab guna kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan Hidup, seperti pada Gambar 5.7.

Gambar 5.7 Diagram 1 Tujuan dan Sasaran Misi 7

5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berangkat daripada Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

5.3.1 Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka pencapaian misi ke-1 Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan seperti Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran Misi I Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Tujuan		Sasaran	
1.1	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Masyarakat	**1.**	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Berbasis Prakarsa Bersama
		2.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat
1.2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik	**3.**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		4.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
		5.	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
		6.	Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan Daerah

		7.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur yang Adaptif, Responsif, Peduli dan Melayani

5.3.2 Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pencapaian misi ke-2 Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan seperti pada Tabeel 5.3.

Tabel 5.3
Tujuan dan Sasaran Misi II Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Tujuan		Sasaran	
2.1	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	**1.**	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan
		2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
2.2	Meningkatkan Layanan BidangKesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	**3.**	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Kesehatan
		4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan
2.3	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga dan Reproduksi Kesehatan Keluarga Berencana	**5.**	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga
2.5	Meningkatkan Parstisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	**6.**	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan dan Kegiatan Olahraga

2.6	Meningkatkan Pemenuhan Dasar Layanan Sosial	**7.**	Meningkatnya Perlindungan Perlindungan Perempuan dana Anak untuk membentuk Keluarga Kecil Berkualitas

5.3.3 Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian misi ke-3 Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan seperti Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Tujuan dan Sasaran Misi III Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Tujuan		Sasaran	
3.1	**Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang Optimal dan Berkelanjutan**	**1.**	Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan
		2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani
		3.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian
3.2	**Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan**	**4.**	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan
		5.	Meningkatnya Produktivitas Hasil Perikanan
		6.	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan yang Terjaga
		7.	Meningkatnya Industri Kelautan dan Perikanan

5.3.4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing .

Dalam rangka pencapaian misi ke-4 ***Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing***, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan seperti Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Tujuan dan Sasaran Misi IV Pembangunan Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Tujuan		Sasaran	
4.1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang Berdaya Saing	**1.**	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi Berdaya Saing
		2.	Tersedianya Energi Terbarukan
4.2	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Berdaya Saing	**3.**	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sosial yang Berdaya Saing

5.3.5 Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka pencapaian misi ke-5 ***Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.***, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan seperti Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Tujuan dan Sasaran Misi V Pembangunan Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Tujuan		Sasaran	
5.1	**Mengembangkan Struktur Ekonomi yang yang Tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif Berbasis Kewilayahan dan**	1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran

	Ekonomi Kerakyatan	**3.**	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN
		4.	Berkembangnya Pertumbuhan UKM dan Koperasi yang Mandiri
		5.	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat
		6.	Berkembangnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Perdagangan
5.2	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**7.**	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah
		8.	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah

5.3.6 Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota (Balancing Linkages).

Dalam rangka pencapaian misi ke-6 Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota (*Balancing Linkages*), maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan seperti pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Tujuan dan Sasaran Misi VI Pembangunan Daerah
Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Tujuan		**Sasaran**	
6.1	Meningkatkan Kapasitas dan Pendampingan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	1.	Tersedianya Kapasitas Pemerintahan Desa
6.2	Meningkatkan Usaha Perekonomian Perdesaan	2.	Meningkatnya Kualitas kapasitas Ekonomi Perdesaan

6.3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Perdesaan (Life Skill)	3.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.4	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Perdesaan Berkelanjutan	4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Desa Berkelanjutan

5.3.7 Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development).

Dalam rangka pencapaian misi ke-7 ***Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development).***, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan seperti pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Tujuan dan Sasaran Misi VII Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Tujuan		Sasaran	
7.1.	Meningkatkan Pembangunan Konservasi dan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development)	**1.**	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
		2.	Tersedianya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik

Tabel 5.9
Visi Misi Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Jangka Menengah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

VISI : "*TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DENGAN BERTUMPU PADA KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN RAKYAT*".

I. MISI I :

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022
I.	**Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi**	1.1	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Masyarakat	Indeks Gotong Royong	**1.**	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Berbasis Prakarsa Bersama	**1.**	Indeks Gotong Royong	65,00	70,00	73,00	75,00	77,00	80,00	80,00
					2.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	**2.**	Persentase Menurunnya Jumlah Konflik di Masyarakat	90,00	95,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1.2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan sesuai	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	**3.**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**3.**	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,67	97,00	97,50	98,00	99,00	100,00	100,00

			semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	**4.**	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	**4.**	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	B	BB	A	A	A	A
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**5.**	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	**5.**	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					6.	Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan Daerah	**6.**	Persentase Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					7.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur yang Adaptif, Responsif, Peduli dan Melayani	**7.**	Nilai Pelaksanaan LPPD	2,7053	2,7387	3,1153	3,2200	3,3300	3,4150	3,1450

II. MISI II

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
									Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022	
I.	**Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**	I.1	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	1.	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	1.	Indeks Pembangunan Manusia	66,37	66,8	67,3	68,9	70,87	80	80	**Poin**
				Indeks Pendidikan			2.	Indeks Pendidikan	65,04	67,86	70,15	73,45	75,63	79,37	80,25	%
					2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54	57	60	63	66	69	69	%
							4.	Harapan Lama Sekolah	13,06	13,78	14,11	14,57	14,87	15,2	15,2	%
		I.2	Meningkatkan Layanan BidangKesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	3.	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Kesehatan	5.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100	100	%

			Bagi Seluruh Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup			6.	Angka Usia Harapan Hidup	67,2	67,47	67,74	68,01	68,28	68,55	68,55	%
							7.	Angka Kematian Bayi	2	0	0	0	0	0	0	%
					4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	8.	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0.0066	0.0067	0.0069	0,007	0,0073	0,0077	0,0077	%
							9.	Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,12	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26	0,26	%
							10.	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	4	10	20	30	40	50	50	%
		1.3	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga dan Reproduksi Kesehatan Keluarga Berencana	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	5.	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga	11.	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	87	90	92	95	98	100	100	%

		'1.5	Meningkatkan Parstisipasi Pemuda Dalam Pembangunan		6.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan dan Kegiatan Olahraga	12.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	77,4	80	83	86	90	92	92	%
		1.6	Meningkatkan Pemenuhan Dasar Layanan Sosial		7.	Meningkatnya Perlindungan Perlindungan Perempuan dana Anak untuk membentuk Keluarga Kecil Berkualitas	13.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100	100	100	100	100	100	100	%

III. MISI III

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
									Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022	
3.	**Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan**	**3.1**	**Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang Optimal dan Berkelanjutan**	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	1.	Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan	1.	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	80	82	85	87	88	90	90	%
				Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama			2.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1,45	1,48	1,8	1,85	1,87	1,88	1,88	%

				Lokal lainnya per Hektar											
				Produksi Jagung per Tahun	2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	3.	Nilai Tukar Petani	101	102	105	107	110	112	112	
				Produktivitas Ternak Sapi per Tahun	3.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian	4.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar	21.030	26.000	32.000	35.000	40.000	50.000	50.000	Ton
				Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB			5.	Produksi Jagung per Tahun	36.000	50.000	75.000	85.000	95.000	110.000	110.000	Ton
							6.	Produktivitas Ternak Sapi per Tahun	22.288	27.288	32.000	38.000	44.000	50.000	50.000	Ekor
							7.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	48,3	48	47,43	47	46	45	45	%
		3.2	**Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan**	Nilai Tukar Nelayan	4.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	8.	Nilai Tukar Nelayan	101	103	104	105	109	112	112	
				Produksi Perikanan	5.	Meningkatnya Produktivitas Hasil Perikanan	9.	Produksi Perikanan	73,29	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00	85,00	%

					6.	Meningkatnya Luasan Kawasan Konservasi Perairan yang Terjaga	10.	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial	3,2	4,2	5,00	5,50	6,00	7,00	7,00	Ha
					7.	Meningkatnya Industri Kelautan dan Perikanan	11.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	31,26	49,00	67,85	75,00	77,00	80,00	80,00	%

IV. MISI IV

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
									Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022	
4.	**Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing**	**4.1**	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang Berdaya Saing	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	**1.**	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi Berdaya Saing	1.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	66	67	68	69	71	75	75	%
				Rasio Gedung Kantor Pemerintahan			2.	Indeks Angka Kecelekaan lalu Lintas	12,33	11,75	10	9,4	9	8,5	8	%
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum			3.	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	62	63	66	70	73	75	75	%

								danTeknis							
							4.	Persentase Cakupan Jangkauan Sistem Informasi Daerah	80	82	85	87	90	95	95	%
							5.	Rasio Gedung Kantor Pemerintahan	92	94	98	100	100	100	100	%
							6.	Rasio Rumah Layak Huni	0,173	0,178	0,184	0,190	0,196	0,202	0,202	Rasio
							7.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	24,08	33,02	43,08	64	65	70	70	%
					2.	Tersedianya Energi Terbarukan	8.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	55,87	61,49	67,6	74,36	81,8	89,97	89,97	%
		4.2	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Berdaya Saing	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	**3.**	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sosial yang Berdaya Saing	9.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	50	60	65	75	85	90	90	%

V. MISI V

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
									Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022	
5	Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan	5.1	Mengembangkan Struktur Ekonomi yang yang Tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif Berbasis Kewilayahan dan Ekonomi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1.	Pertumbuhan Ekonomi	3,64	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00	%
				Tingkat Pengangguran Terbuka			2.	Laju Inflasi	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	
					2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	3,10	3,02	2,90	2,75	2,64	2,64	%
					3.	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	4.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	343.975	412.770	495.324	594.389	693.454	832.145	832.145	(Rp. Juta)
					4.	Berkembangnya Pertumbuhan UKM dan Koperasi yang Mandiri	5.	Persentase Koperasi Aktif	60	60	62	65	66	67	67	%
							6.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	38,25	44,75	52,35	61,26	64,32	85,06	85,06	%
					5.	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan	7.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,58	0,62	0,78	1,20	1,85	2,10	2,10	%

						Bagi Masyarakat	8.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	1,61	1,77	1,95	2,14	2,35	2,5	2,5	%
					6.	Berkembangnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Perdagangan	9.	Kontribusi Sektor Industri Olahan terhadap PDRB	14,01	15,10	16,05	17,27	18,35	19,16	19,16	%
							10.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	5,87	6,39	6,91	7,43	7,95	8,47	8,47	%
		5.2	**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	Indeks Gini Rasio	7.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	11.	Indeks Gini Rasio	0,301	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,260	Poin
					8	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah	12.	Angka Kemiskinan Menurun	16,68	15,48	13,28	11,08	10,23	8,82	8,82	%

VI. MISI VI

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
									Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022	
6.	**Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota (Balancing Lingkages)**	1.	Meningkatkan Kapasitas dan Pendampingan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	1.	Tersedianya Kapasitas Pemerintahan Desa	1.	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	91,7	94,4	97,2	100,0	100	100	100	%
							2.	Persentase Penurunan Desa Tertinggal	12,96	11,11	9,26	7,41	4,46	0,0	0,0	%
		2.	Meningkatkan Usaha Perekonomian Perdesaan	Cakupan Produk Unggulan Desa	2.	Meningkatnya Kualitas kapasitas Ekonomi Perdesaan	3.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	63	70	77	84	91	98	98	BUMDes
							4.	Cakupan Produk Unggulan Desa	45	50	55	60	65	70	70	
		3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Perdesaan *(Life Skill)*	Indeks Desa Membangun (IDM)	3.	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,638	0,671	0,732	0,768	0,821	0,853	0,853	

		4.	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Perdesaan Berkelanjutan	Rata - Rata Kepemilikan Lahan Petani	4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Desa Berkelanjutan	6.	Rata - Rata Kepemilikan Lahan Petani	1	1,2	1,5	1,7	1,8	2	2	Ha
							7.	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	2	3	4	5	6	6	Kawasan

VII. MISI VII

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022	
7.	**Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development)**	7.1.	Meningkatkan Pembangunan Konservasi dan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development)	Indeks Kualitas Lingkungan	***1.***	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	1.	Indeks Kualitas Lingkungan	0,18	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28	0,28	Poin
				Rasio ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HP/HGB			2.	Persentase DAS yang terpelihara	50,0	50,0	66,7	83,3	85,6	88,2	88,2	%
					2.	Tersedianya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik	3.	Rasio ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HP/HGB	38,43	40,27	42,57	44,29	46,35	48,43	48,43	Rasio

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

6.1 Strategi Umum

Dalam upaya mencapai misi RPJMD 2017-2022 sesuai tujuan dan sasran yang sudah dijelaskan di Bab V, maka Pemerintah Kabupaten Buol menetapkan strategi umum/dasar untuk mencapai visi misi tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Strategi pertama adalah membangun sinergi dan kemitraaan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Ini didasari oleh fakta keterbataan sumber daya finansial pemerintah di satu sisi, sedangkan di sisi lain kita memilik potensi sumber daya alam yang harus dikelola bersama secara berkelanjutan. Mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah, maka strategi sinergi dan kemitraan ini menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Strategi kedua adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan adaptif, sebagai perwujudan konsep “negara hadir” dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, dan memenuhi aspirasi masyarakat. Strategi ini salah satunya bertujuan agar proses reformasi birokasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak sekedar merupakan kesibukan dan kebutuhan Pemerintah semata.

3. Strategi ketiga adalah pemantapan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam pembangunan. Rasionalitas strategi ini adalah apabila masyarakat meningkat kapasitasnya, masyarakat dapat mejadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban.
4. Strategi keempat adalah penyebaran pusat-pusat pertumbuhan tidak hanya di perkotaan saja, tetapi juga dengan menciptakan pusat pertumbuhan kawasan perdesaan. Kawasan ini akan mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya masyarakat maupun beban perkotaan.
5. Strategi kelima adalah tetap menjaga prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan. Prinsip ini menyangkut keberlanjutan sumber daya maupun meningkatkan derajat penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Strategi ini sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, memastikan kelompok rentan akan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan. Dengan strategi ini, upaya percepatan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan tidak akan merusak sumber daya alam yang tersedia, justru bisa memperkuat. Berikut adalah Tabel Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Periode 2017-2022.

Tabel 6.1
Misi I, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode 2017-2022

A. **MISI 1 : Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi**

MISI		TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
I.	**Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi**	I.1	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah dan Masyarakat	**1.1.1**	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Berbasis Prakarsa Bersama	1.1.1.1	Memperkuat pranata sosial melalui kemeitraan Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat untuk Ketertiban dan Keamanan
						1.1.1.2	Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Umat Beragama dan penyelenggaraan dialog antar umat beragama.
						1.1.1.3	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan antara Pemerintah, Tokoh Agama,

							Lembaga Sosial Budaya/Agaman, Cendekiawan dan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik
						1.1.1.4	Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di Kabupaten Buol
				1.1.2	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	**1.1.2.1**	Pengembangan sistem pendukung untuk penanganan gangguan keamanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat
						1.1.2.2	Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Adat dan Komunitas Budaya dalam Pengembangan dan Aktualisasi Nilai dan Tradisi dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan warga

		I.2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi Untuk Perbaikan Pelayanan Publik	**1.2.1**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	**1.2.1.1**	Penyusunan dan Sosialisasi Instruksi Bupati mengenai Penerapan Sikap-Sikap Pelayanan Aparat dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pelayanan; Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimall), PTSP , dan Inovasi Daerah dengan Baik.
						1.2.1.2	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dengan Prioritas Pengembangan Sistem Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Penguatan Reformasi Birokrasi
						1.2.1.3	Optimalisasi Pemanfaatan Persandian untuk Pengamanan Informasi

						1.2.1.4	Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas
						1.2.1.5	Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan
						1.2.1.6	Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya

				1.3.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	**1.3.2.1**	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
				1.3.4	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	**1.3.4.1**	Penyiapan sistem perencanaan dan penganggaran akuntansi berbasis akrual yang mudah dan aplikatif
						1.3.4.2	Penyusunan kebijakan/regulasi/pedoman untuk untuk mendukung Pertanggungjawaban APBD tepat waktu
						1.3.4.3	Penerapan Reward dan Punishment untuk mendorong Perda Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu
						1.3.4.4	Peningkatan Proporsi Belanja Modal, melalui Penguranan Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
						1.3.4.5	Penerapan aplikasi *e-Budgeting*

				1.3.5	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	**1.3.5.1**	Melaksanakan Konsulidasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
				1.3.6	Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan Daerah	**1.3.6.1**	Revitalisasi Fungsi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan
						1.3.6.2	Membangun Data Basis Terintegrasi sebagai Sistem Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Penerapan Sistem Aplikasi *E-Planning* dan *e-Monev*
				1.3.7	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Aparatur yang Adaptif, Responsif, Peduli dan Melayani	**1.3.7.1**	Pembangunan Birokrasi Modern sesuai Kebijakan ASN
						1.3.7.2	Penerapan manajemen ASN yang Transparan, Kompetitif, dan Profesional dan Bermartabat

						1.3.7.3	Peningkatan Kualitas Perencanaan Kebutuhan ASN Termasuk dalam Rangka Pengendalian Jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan Organisasi Birokrasi dan Mendukung Prioritas Pembangunan
						1.3.7.4	Penguatan Kebijakan dan Implementasi Sistem Promosi Terbuka, Sistem Rekrutmen dan Seleksi secara Transparan dan Berbasis Kompetensi diataranya penyempurnaan Tatakelola seleksi dan perluasan implementasi CAT Sistem.
						1.3.7.5	Penguatan Kebijakan dan Implementasi Manajemen Kinerja Pegawai, termasuk pengembangan Kebijakan Reward dan Punishment Berbasis Kinerja

						1.6.1.3	Peningkatan kesadaran toleransi dan menghormati untuk membangun kehidupan harmonis
						1.6.1.4	Peningkatan nilai nilai toleransi, harmoni dan penghormatan melalui pendidikan karakter
						1.6.1.5	Peningkatan fungsi keluarga dalam pembentukan moral dan etika

Tabel 6.2
Misi II, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode 2017-2022

B. **MISI 2 : Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**

MISI		TUJUAN		SASARAN			STRATEGI
I.	**Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**	I.1	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat	**1.1.1**	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	**1.1.1.1**	Peningkatan Profesional dan Pendidikan Profesi Guru
						1.1.1.2	Peningkatan Pengelolaan, Penempatan dan Pendistribusian Guru berdasarkan Pemetaan Komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan Guru
						1.1.1.3	Peningkatan Kesejahteraan Guru

				1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	**1.1.2.1**	Pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus
						1.1.2.2	Pemberian jaminan lembaga PAUD menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan perkembangan anak
						1.1.2.3	Penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya
						1.1.2.4	Pemerataan Akses Pendidikan Dasar yang Inklusif dan Berkualitas
						1.1.2.5	Penyediaan Bantuan Pendidikan yang efektif
						1.1.2.6	Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama & Kewargaan
						1.1.2.7	Pemberian Bantuan Kepada Santri berprestasi dan pemberian Subsidi Pendidikan Terpadu Anak Harapan

						1.1.2.8	Peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia.
						1.1.2.9	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar si sekolah
						1.1.2.10	Peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata yang mendukung pengembangan techno park, science park dan pelaksanaan revolusi mental
						1.1.2.11	Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
		I.2	Meningkatkan Layanan BidangKesehatan yang Berkualitas, Merata dan	**1.2.1**	Meningkatnya Akses Layanan Bidang Kesehatan	**1.2.1.1**	Peningkatan Akses dan Mutu Paket Pelayanan Kesehatan dan Gizi

			Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat				
						1.2.1.2	Peningkatan Promosi Perilaku Masyarakat tentang Kesehatan Gizi, Sanitasi, Hygine dan Pengasuhan
						1.2.1.3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perbaikan Gizi
						1.2.1.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada Remaja
						1.2.1.5	Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
						1.2.1.6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia
						1.2.1.7	Peningkatan Cakupan Imunisasi Tepat Waktu Pada Bayi dan Balita
						1.2.1.8	Peningkatan Peran Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
						1.2.1.9	Peningkatan Upaya Preventif dan Promotif termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit dalam Pengendalian Penyakit Menular

							terutama TB, Malaria dan Penyakit Tidak Menular
						1.2.1.10	Peningkatan Mutu Kesehatan Lingkungan
						1.2.1.11	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
						1.2.1.12	Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak dan Prilaku Hygene
						1.2.1.13	Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
				1.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	**1.2.2.1**	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar
						1.2.2.2	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan

						1.2.2.3	Peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu
						1.2.2.4	Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan Dasar Milik Pemerintah dan Swasta
						1.2.2.5	Peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan Fasilitas Swasta
						1.2.2.6	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar
						1.2.2.7	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit “Mokoyurli “ Buol.
						1.2.2.8	Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Melalui Akreditasi Rumah Sakit dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
						1.2.2.9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif di Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

						1.2.2.10	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Rumah Sakit Terutama Pengelolaan Dana Kesehatan di Rumah Sakit.
						1.2.2.11	Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
						1.2.2.12	Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Termasuk Tenaga Kefarmasian
						1.2.2.13	Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko
						1.2.2.14	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
						1.2.2.15	Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan
						1.2.2.16	Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer

						1.2.2.17	Pengembangan Kualifikasi Finansial dan Non Finansial Bagi Tenaga Kesehatan Terutama Untuk Meningkatkan Retensi Tenaga Kesehatan
						1.2.2.18	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan Publik
						1.2.2.19	Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin
						1.2.2.20	Peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC), terutama untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak mampu dan peningkatan kesiapan supply side SJSN Kesehatan
		1.3	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga dan Reproduksi Kesehatan Keluarga Berencana	**1.3.1**	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam	**1.3.1.1**	Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

					berkeluarga		
						1.3.1.2	Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata danberkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah
						1.3.1.3	Pengembangan operasional pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan
						1.3.1.4	reproduksi (KR) yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan
						1.3.1.5	Peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian nasional program KB
						1.3.1.6	Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun Non-MKJP

						1.3.1.7	Pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu,antarsektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan Reproduksi Remaja
						1.3.1.8	Peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam pendidikan
						1.3.1.9	Peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pemberian alokon bagi pasangan usia muda
						1.3.1.10	Peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pemberian alokon bagi pasangan usia muda
		1.5	Meningkatkan Parstisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	**1.5.1**	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan dan Kegiatan Olahraga	**1.5.1.1**	Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama dan Peningkatan Potensi Pemuda dalam Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan dalam Pembangunan

						1.5.1.2	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan Pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
		1.6	Meningkatkan Pemenuhan Dasar Layanan Sosial	**1.6.1**	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Membentuk Keluarga Kecil Berkualitas	**1.6.1.1**	Percepatan Kepemilikan Akta Lahir, Kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreatifitas dan bakat anak, Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Pengasuhan Anak, dan menyediakan informasi layak anak serta perwujudan sekolah ramah anak.
						1.6.1.2	Peningkatan Upaya Pencegahan, termasuk Pemberian Sanksi Hukum yang Tegas terhadap Pelaku Tindak Kekerasan pada Anak

						1.6.1.3	Peningkatan Upaya Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Peningkatan Kualitas Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pengganti dan Pengasuhan Alternatif
						1.6.1.4	Perluasan Cakupan Program Perlindungan Sosial bagi Anak Rentan
						1.6.1.5	Pengembangan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Miskin melalui Pelatihan Vokasi, Peningkatan Kesempatan Kerja, serta Pemberdayaan Ekonomi dan Kredit Usaha, salah satunya dengan membuka Akses Layanan Keuangan yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas
						1.6.1.6	Penguatan Bantuan dan Jmainan Sosial Bagi Lanjut Usia, Perluasan Jangkauan dan Peningkatan Inklusivitas Layanan Publik bagi Lanjut Usia termasuk Jaminan Kesehatan dan Skema Jaminan Sosial Lainnya
						1.6.1.7	Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil Pengarusutamaan Gender, termasuk PPRG

						1.6.1.8	Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan

Tabel 6.3
Misi 3, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode 2017-2022

C. **MISI 3 : Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan**

MISI		**TUJUAN**		**SASARAN**		**STRATEGI**	
3.	**Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan**	**3.1**	**Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang Optimal dan Berkelanjutan**	**3.1.1**	Tersedianya Stok dan Distribusi Pangan	3.1.1.1	Penyediaan Cadangan Pangan Pokok terutama Beras dan Disversifikasi Penyediaan Konsumsi Pangan yang Bermutu, Sehat, Berbasis Sumber Daya dan Budaya Lokal, serta Aman terutama dari Penyakit Zoonosis dan Halal

						3.1.1.2	Pemantauan Perkembangan Harga Pangan dan Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan antara Lain melalyi Pembanguna Sarana dan Prasarana Distribusi seperti Gudang dan Sarana Transportasi
						3.1.1.3	Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
						3.1.1.4	Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pangan
				3.1.2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	**3.1.2.1**	Peningkatan Aksesibilitas Petani Terhadap Teknologi , Sumber-Sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akser Pasar termasuk Pengembangan Infrastruktur Pengolahan Pemasaran
						3.1.2.2	Perluasan Lahan Pertanian dan Pemberdayaan Pekarangan Pangan
						3.1.2.3	Pengembangan Agroindustri Perdesaan dan Penguatan Kemitraan antara Petani dengan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran melalui Kemitraan Gapoktan serta membangun dan memperkuat jaringan dengan asosiasi, idustri dan sektor jasa terkait.
				3.1.3	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian	**3.1.3.1**	Pngamanan Lahan Pertanian Produktif dan Pemanfaatan Lahan Terlantar, didukung dengan Sistem Irigasi dan Fasilitas Penyediaan Air yang Terpadu

						3.1.3.2	Revitalisasi Sistem Pembenihan Padi, Tanaman Hortikultura, Perkebunan dan Pembibitan serta Ternak Lainnnya
		3.2	**Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Optimal dan Berkelanjutan**	**3.2.1**	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	**3.2.1.1**	Memberi Perlindungan Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam
						3.2.1.2	Pembentukan Sistem dan Kelembagaan Penjaminan Pelaku Usaha Perikanan
						3.2.1.3	Penyediaan Sumber Permodalan dan Pengembangan Fasilitas Kredit yang Murah, Mudah dan Aksesibel
						3.2.1.4	Pengembangan Asuransi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan, serta sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya Ikan
						3.2.1.5	Pembinaan/Penguatan Kapasias Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam dan Pengolah Produk Perikanan
				3.2.2	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	**3.2.2.1**	Penyediaan Induk Unggul, Benih Ikan Bermutu, termasuk PenguatannBalai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat.

						3.2.2.2	Pengembangan Kawasan Budidaya, Penguatan Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Pakan Mandiri dan Obat.
						3.2.2.3	Peningkatan Kapasitas Armada Perikanan Tangkap, melalui alokasi yang Proporsional antara stok Sumber Daya Ikan, Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Jumlah Kapal Penagkapan Ikan
						3.2.2.4	Pendayagunaa Potensi Perariran Umum Daratan (PUD) untuk Perikanan Berwawasan Lingkungan
						3.2.2.5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perikanan Budidaya dan Percontohan Teknologi Budidaya yang Benar melalui Model Pengembangan Techno Park dan Since Park
						3.2.2.6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Terpadu dan Terintegrasi (Hulu-Hilir)

						3.2.2.7	Penyediaan dan Pengembangan Teknologi Penagkapan Ikan yang Efisien dan Ramah Lingkungan dan Fasilitasi serta introduksi Teknologi Budidaya terkini Masyarakat
						3.2.2.8	Pengembangan Pelabuhan Perikanan dan Pengutan Fasilitas Armada Penangkapan
						3.2.2.9	Revitalisasi Tambak-Tambak dan Kolam yang Tidak Produktif dan Pengembangan Jalan Produksi, Irigasi Tambak serta Pengembangan Bibit Rumput Laut
						3.2.2.10	Fasilitasi dan Pemenuhan Kebutuhan BBM pada Sentra-Sentra Nelayan
						3.2.2.11	Pengembangan Balai Benih Ikan / Udang dan Pernaikan Jlaan di Sentra Produksi Ikan

						3.2.2.12	Pengembangan Teknologi Pembuatan Pakan Ternak Kompetitif dengan Sumber Bahan Bahan Baku Lokal dan Pengembangan sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
				3.2.3	Meningkatnya Luasana Kawasan Konservasi Perairan yang Terjaga	**3.2.3.1**	Pengutuhan dan Penambahan Luasan Kawasan Konservasi melalui Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan , Pengutan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan serta Penguatan Kelembagaan
						3.2.3.2	Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir yang Meningkat Ketahanannya terhadap dampak Bencana dan Perubahan Iklim
						3.2.3.3	Penataan Sistem Perijinan Usaha Kelautan dan Perikanan serta Peningkatan Penertiban Ketaatan Pelaku Usaha
				3.2.4	Meningkatnya Industri Kelautan dan Perikanan	**3.2.4.1**	Pengembangan Wisata Bahari di Lokasi-Lokasi Andalan sesuai RTRW Kabupaten Buol

						3.2.4.2	Pengembangan Usaha Perikanan di Kawasan Sentra Produksi (Konsep Hulu-Hilir)

Tabel 6.4
Misi 4, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode 2017-2022

D. **MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing**

MISI		**TUJUAN**		**SASARAN**		**STRATEGI**	
4.	**Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing**	**4.1**	Meningktkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang Berdaya Saing	**4.1.1**	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi Berdaya Saing	4.1.1.1.1	Pengembangan dan Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan dan Perdesaaan

						4.1.1.1.2	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fungsi Pelabuhan dan Bandar Udara Pogogul
						4.1.1.1.3	Pembangunan dan Pengembangan Angkutan Massal Perintis
						4.1.1.2.1	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi
						4.1.1.3.1	Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
						4.1.1.4.1	Pembangunan Sarana dan Prasrana Pemerintahan Daerah
						4.1.1.5.1	Penyediaan Perumahan Layak
						4.1.1.6.1	
						4.1.1.7.1	Peningkatan Akses Air Bersih dan Ketersediaan Air Baku

						4.1.1.8.1	Penyediaan Infrastruktur Air Minum
		4.2	Mengembangkan Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Berdaya Saing	**4.2.1**	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sosial yang Berdaya Saing	4.2.1.1.1	Peningkatan Kebutuhan Layanan Sanitasi melalui Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terkait Sanitasi Termasuk Menghilangkan Praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
		4.3	Kemandirian Energi yang Berdaya Saing	**4.3.1**	Ketersediaan Energi Terbarukan	4.3.1.1.1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro
						4.3.1.1.2	Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
						4.3.1.1.3	Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (*Small Grid System*)

Tabel 6.5
Misi 5, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode 2017-2022

E. **MISI 5 : Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.**

MISI		TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
5.1	**Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan**	5.1.1	**Mengembangkan Struktur Ekonomi yang Tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif Berbasis Kewilayahan dan Ekonomi Kerakyatan**	5.1.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	5.1.1.1.1	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Sekttor-Sektor Unggulan Daerah
						5.1.1.1.2	Perumusan strategi diplomasi ekonomi daerah yang lebih komprehensif untuk mendukung kerjasama ekonomi daerah yang dapat mendorong penurunan hambatan non tarif, pembukaan pasar dan menarik investor asing langsung

						5.1.1.1.3	Penyusunan Kriteria dalam menentukan prioritas kerjasama ekonomi daerah dalam lima tahun kedepan yang mengutungkan dan sesuai dengan kepentingan daerah
						5.1.1.1.4	Peningkatan Koordinasi antar lembaga, pemerintah dengan kalangan dunia usaha, akademisi, LSM dan Masyarakat dalam perumusan strategi diplomasi ekonomi serta implementasi dan pemanfaatan kerjasama ekonomi daerah yang disepakati
				5.1.1.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	**5.1.1.2.1**	Peningkatan Keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompentensi
						5.1.1.2.2	Penguatan Kemitraan yang Mendrong Relevansi dan Inovasi Program Pelatihan dengan Industri
						5.1.1.2.3	Penguatan Layanan Informasi Pasar Kerja

						5.1.1.2.4	Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Menyelesaikan Penataan Kelembagaan
						5.1.1.2.5	Pemberdayaan dan Pembinaan Serikat Pekerrja sehingga dapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi bipartit dalam kedudukan yang sejajar dengan Pemberi Kerja
						5.1.1.2.6	Peran instansi Pemerintah daerah seperti Bappeda perlu diefektifkan terutama di daerah/diwilayah industri, dalam mendorong Penguatan Lembaga Hubungan Industrial
						5.1.1.2.7	Pemetaan penganggur kurang Terdidik dan Kebutuhan Sarana Penunjang dalam rangka Membangun Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan-Kegiatan yang Bersifat Padat Karya
						5.1.1.2.8	Mendorong pekerja setengah Menganggur untuk memanfaatkan waktu senggang melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Teknologi Tepat Guna

				5.1.1.3	Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN	**5.1.1.3.1**	Penyederhanaan Prosedur Perijinan Investasi dan Usaha di Daerah Buol serta Pengembangan Layanan Investasi melalui PTSP
						5.1.1.3.2	Peningkatan Kemitraan antara PMDN dan UKM Lokal
						5.1.1.3.3	Peningkatan Efektivitas Strategi dan Upaya Promosi Investasi
						5.1.1.3.4	Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Investasi antara Pemerintah dan Dunia Usaha serta Pengembangan Investasi Lokal
				5.1.1.4	Berkembangnya Pertumbuhan, IKM, UKM dan Koperasi yang Mandiri	**5.1.1.4.1**	Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil
						5.1.1.4.2	Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha
						5.1.1.4.3	Peningkatan keterampilan dan layanan usaha dan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan

						5.1.1.4.4	Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha
						5.1.1.4.5	Membangun Paling Tidak Satu Kawasan Industri
						5.1.1.4.6	Membangun Sentra Industri Kecil dan Menengah
						5.1.1.4.7	Mendorong Investasi untuk Industri Pengolah Sumber Daya Alam, Baik Hasil Pertanian, Perikanan maupun Hasil Pertambangan
						5.1.1.4.8	Mendorong Investasi untuk Industri Penghasil Barang Konsumsi Kebutuhan Lokal dan Daerah sekitar yang utamanya industri padat tenaga kerja
						5.1.1.4.9	Mendorong Investasi Industri Penghasil Bahan Baku, Bahan Setengah Jadi , Komponen dan Sub Assembly (pendalaman struktur)

						5.1.1.4.10	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Agar Dapat Terintegrasi Dengan Rantai Nilai Industri Pemegang Merek Di dalam Negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri sedang dan besar
				5.1.1.5	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat	**5.1.1.5.1**	Mendatangkan sebanyak mungkin Wisatawan Lokal dan Domestik dan Mancanegara
						5.1.1.5.2	Mendorong Peningkatan Wisatawan Daerah dengan fokus pada pasar wisatawan domestik
						5.1.1.5.3	Dibentuk Pusat Promosi Pariwisata Daerah Buol di 5 Kota Besar di Indonesia melalui Pemberdayaan Perwakilan Kerukunan Keluarga Indonesia Buol, Asrama-Asrama Mahasiswa dan Pelajar Buol di Kalimatan Timur, Manado, Jogyakarta, Palu, Makassar

						5.1.1.5.4	Fasilitasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Buol yang Menjadi Fokus Pemasaran Pariwisata dengan Dalam Penetapan Kawasan Peruntukan Pariwisata dalam RTRS, RIPPDA .
						5.1.1.5.5	Pembentukan dan Menata Kelembagaan Organisasi Pengelola Destinasi dan Peningkatan Citra Kepariwisataan
						5.1.1.5.6	Pembinaan Usaha Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal dan Fasilitasi Investasi Usaha Sektor Pariwisata
		5.2.1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	**5.2.1.1**	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	**5.2.1.1.1**	Merencanakan dan mengembangkan Kota Baru Publik yang Mandiri dan Terpadu di sekitas Kota dan Perdesaan
						5.2.1.1.2	Merencanakan dan Menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana ekonomi, keamanan, sosial budaya dantransportasi publik yang terintegrasi

				5.2.1.2	Meningkatnya Ketepatan Sasaran Masyarakat Miskin dan Rentan penerima program-program pemerintah	**5.2.1.2.1**	Pengembangan *Land Reform* Agraria /Program Tanah Untuk Rakyat
						5.2.1.2.2	Penyediaan Faktor-Faktor Produksi kepada Masyarakat /Penduduk Miskin
						5.2.1.2.3	Penyediaan Fasilitas Peromodalan kepada Masyarakat /Penduduk Miskin

Tabel 6.6
Misi VI, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode 2017-2022

F. MISI 6 : Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan Pengembangan Desa-Kota (*Balancing Linkages*)

Misi		***Tujuan***		***Sasaran***		***Strategi***	
6.	**Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan**	6.1	Meningkatkan Kapasitas dan Pendampingan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan	***6.1.1***	Tersedianya Kapasitas Pemerintahan Desa	6.1.1.1	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Fasilitas, Pelatihan dan Pendampingan

	penmbangan Desa-Kota *(Balancing Linkages)*		Pemerintahan Desa				
						6.1.1.2	Reformasi Pelayanan Publik termasuk Pelayanan di Luar Jam Kantor Oleh Desa
						6.1.1.3	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
						6.1.1.4	Pengembangan Kerjasama antar Desa dan pelaksanaan Penataan Desa serta pengembangan pusat Informasi Desa
		6.2	Meningkatkan Usaha Perekonomian Perdesaan	***6.2.1***	Meningkatnya Kualitas kapasitas Ekonomi Perdesaan	6.2.1.1	Pembentukan, Penataan dan Penguatan BUMDes untuk Mendukung Ketersediaan Sarana Prasarana Produksi Khususnya Benih, Pupuk, Pengolahan Produk Pertanian dan Perikanan Skala Rumah Tangga Desa
						6.2.1.2	Fasilitasi, Pembinaan, maupun Pendampingan dalam Pengembangan Usaha, Bantuan Permodalan/Kredit, Kesempatan Berusaha, Pemasaran dan Kewirausahaan

						6.2.1.3	Peningkatan Kapsitas Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
						6.2.2.1	Pembangunan Sentra Produksi, Sentra Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan serta Destinasi Pariwisata
						6.2.2.2	Pengembangan Kerjasama antar deas dan Kerjasama Pengelolaan BUMDes
						6.2.2.3	Membangunan Sarana Bisnis /Bisnis di Perdesaan
						6.2.3.1	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Penyediaan Lahan Transmigrasi melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha dan prasarana serta sarana
						6.2.3.2	Pengembangan Kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di Lokasi Transmigrasi serta Pengembangan Usaha Ekonomi di Lokasi Transmigrasi

						6.2.3.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lokasi Transmigrasi melalui Pelatihan Masyarakat Desa
		6.3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Masyarakat Perdesaan *(Life Skill)*	***6.3.1***	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	6.3.1.1	Pengembangan Pendidikan Berbasis Keterampilan Kewirausahaaan dan mendorong Peran Aktif Masyarakat dalam Pendidikan dan Kesehatan
						6.3.1.2	Pengembangan Kapasitas dan Pendampingan Lembaga Kemasyarakatn Desa dan Lembaga Adat secara Berkelnjutan
						6.3.1.3	Menguatkan Partisipasi Masyarakat dengan Pengarusutamaan Gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam Pembangunan Desa
		6.4	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Perdesaan Berkelanjutan	***6.4.1***	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDA dan Lingkunga Hidup Desa Berkelanjutan	6.4.1.1	Menjamin Pelaksanaan Distribusi Lahan Kepada Desa-Desa dan Distribusi Hak Atas Tanah Bagi Petani, Buruh Lahan dan Nelayan

						6.4.1.2	Menata Ruang Kawasan Perdesaan untuk Melindungi Lahan Pertanian dan Menekan Alih Fungsi Lahan Produktif dan Lahan Konservasi
						6.4.1.3	Menyiapkan dan Melaksanakan Kebijakan tentang Akses dan Hak Desa untuk Mengelola SDA Berskala Lokal termasuk Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa Beroreintasi Keseimbangan Lingkungan Hidup dan Berwawasan Mitigasi Bencana untuk peningkatan produksi pangan dan mewujudkan Ketahanan Pangan

Tabel 6.7
Misi 7, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode 2017-2022

G. **MISI 7 : Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (*Environmental Security Development*)**

Misi		***Tujuan***		***Sasaran***		***Strategi***	
7.	**Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development)**	7.1.	Meningkatkan Pembangunan Konservasi dan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development)	***7.1.1***	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	7.1.1.1	Melakukan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Melalaui Penerapan Berbagai Instrumen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
						7.1.1.2	Pengelolaan persampahan melingkupi pengumpulan pengangkutan dan pengelolaan akhir
						7.1.1.3	Pemantapan Kinerja dan Penguatan Kapasitas Pokja DAS Kabupaten Buol
						7.1.1.4	Pemeliharaan terhadap Sumber-Sumber Mata Air dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				7.1.2	Terjaganya Keseimbangan Lingkungan	7.2.1.1	Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas dan Rumah Kaca

					Hidup		
				7.1.3	Tersedianya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik	7.3.1.1	Membangun Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat

6.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk intu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent, agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat. Kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada persfektif masyarakat / layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi merekan dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan Sumber Daya Manusia, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah;
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberikan jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Hubungan antara kebijakan umum dan empat perspektif di atas, sekaligus berdasarkan atas strategi pembangunan daerah, guna menunjang pencapaian Visi dan Misi Pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan arah kebijakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan

pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun arah kebijakan tahunan dalam pelaksanaan RPJMD 2017-2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. **Tahun 2018** : Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya saing dan produktivitas daerah guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
2. **Tahun 2019** : Peningkatan Keterkaitan Desa – Kota dan Ekonomi Kawasan Perdesaan Untuk percepatan Pengembangan Wilayah
3. **Tahun 2020** : Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan
4. **Tahun 2021** : Peningkatan dan Kualitas Layanan Publik berbasis Kabupaten Pintar (*Smart Regency*) untuk pemantapan perekonomian daerah Kabupaten Buol.
5. **Tahun 2022** : Pemantapan kesejahteraan dan kemandirian Daerah.

Maka secara jelas, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buol selama periode Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 6.8
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol
Periode Tahun 2017-2022

Arah Kebijakan				
Tahun-1 (2018)	**Tahun-2 (2019)**	**Tahun-3 (2020)**	**Tahun-4 (2021)**	**Tahun-5 (2022)**
"Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Daerah guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Ditunjang Pemantapan Reformasi Birokrasi"	"Peningkatan Keterkaitan Desa – Kota dan Ekonomi Kawasan Perdesaan untuk Percepatan Pengembangan Wilayah Daerah.	"Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan"	"Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Kabupaten Pintar untuk Pemantapan Perekonomian Masyarakat dan Daerah Kabupaten buol"	"Pemantapan Upaya Pencapaian Pembangunan untuk Kemandirian dan Kedaulatan Masyarakat Kabupaten Buol"

6.3 Program Pembangunan Daerah

Penjabaran Program Pembangunan Daerah dijabarkan Tahun 2017-2022,sebagai berikut berikut:

A. Agenda Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buol dalam rangka melaksanakan Misi Tahun 2017-2022, dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) Agenda prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penataan Reformasi Birokrasi yang kuat, efektif dan bersih berlandaskan kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM;
2. Pembangunan Ketentraman, Ketertiban, Demokrasi dan Harmonisasi Politik;
3. Membuat Pemerintah selalu hadir dalam pembangunan Pendidikan dan Kesehatan Gratis Berkualitas Yang Afirmatif;
4. Percepatan Pengentasan Kemiskinan melaui Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Pertanian dan Maritim Berbasis Pemberdayaan Masayarakat serta Kewilayahan;
5. Pertumbuhan dan Kemandirian Ekonomi melalui Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal ;
6. Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif;
7. Pengembangan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
8. Pembangunan Perdesaan yang Maju dan Mandiri;
9. Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan.

B. Program Prioritas Percepatan Lintas Bidang

1. Program Penyusunan Road MAP Reformasi Birokrasi
2. Program Dialog Kebangsanaan guna memperkuat Jati Diri Masyarakat

3. Program Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas dan Afirmatif
4. Program Pengembangan Kawasan Peternakan
5. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan
6. Program Bersahabat dengan Air
7. Program Pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan
8. Program Pengembangan Wisata Bahari dan Agrowisata
9. Program Tanah Untuk Rakyat/TAURA (Land Reforma Agraria)
10. Program Bank Sampah.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi

1. Misi 1: Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi

Adapun dalam menjalankan misi 1 **Mewujudkan Keamanan Daerah, Iklim Demokrasi, Penegakan Supremasi Hukum dan Penataan Reformasi Birokrasi,** dilaksanakan melalui:

- **Program Pembangunan Daerah**
  1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  3) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  5) Program Penyelenggaraan Pembenahan Hukum serta Menciptakan Kondisi Masyarakat Yang Kondusif
  6) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu
  7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
  8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
11) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
12) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah
13) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
14) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
15) Program Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
16) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
17) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
18) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
19) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
21) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
22) Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
23) Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
24) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
25) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
26) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
27) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
28) Program Pendidikan Kedinasan
29) Program Kerjasama Pembangunan
30) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
31) Program Pendidikan Politik Masyarakat

32) Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan, Adat dan Budaya.

2. **Misi 2** : **Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Adapun dalam menjalankan misi 2, yaitu **Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri dan Berkepribadian serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,** dilaksanakan melalui:

- **Program Pembangunan Daerah, yaitu:**
  1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  2) Program Pendidikan Non Formal
  3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  5) Program Pendidikan Kesetaraan
  6) Program Kepangawasan Pendidikan
  7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  14) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
  15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
  16) Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  17) Program Pengadaan,Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

18) Program Keluarga Berencana
19) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
20) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
21) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
22) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
24) Program PelayananKesejahteraan Sosial bagi Lanjut Sosial
25) Program Pengembangan Nilai Budaya
26) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
27) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
28) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
29) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
30) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

3. Misi 3 : **Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan.**

   Adapun dalam menjalankan misi 3, yaitu **Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Pertanian dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan,** dilaksanakan melalui:

   - **Program Pembangunan Daerah**
     1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
     2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
     3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
     4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan
     5) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
     6) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
9) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan
10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
11) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

4. **Misi 4** : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing**

Adapun dalam menjalankan misi 4, yaitu: **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kemandirian Energi Yang Berdaya Saing,** dilaksanakan melalui :

- **Program Pembangunan Daerah**
  1) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
  2) Program pembangunan turap/talud/bronjong;
  3) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  4) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong;
  5) Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan;
  6) Program peningkatan prasarana dan sarana kebinamargaan;
  7) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
  8) Program penyediaan dan pengolahan air baku;
  9) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
  10) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
  11) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

12) Program Pengembangan Perumahan;
13) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
14) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan;
15) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
16) Program pengelolaan areal pemakaman
17) Program Perencanaan Tata Ruang;
18) Program Pemanfaatan Ruang; dan
19) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
20) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
21) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
22) Program peningkatan pelayanan angkutan;
23) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Perhubungan;
24) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan
25) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
26) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
27) Program Pengembangan Energi Terbarukan

5. **Misi 5** : **Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan.**

Adapun dalam menjalankan misi 5, yaitu **Mewujudkan struktur ekonomi yang tangguh dan Memiliki Keunggulan Komparatif berbasis Kewilayahan dan ekonomi kerakyatan,** dilaksanakan melalui:

- **Program Pembangunan Daerah**

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan

3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
5) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
6) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
7) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
9) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
10) Program Penyiapan potensi sumberdaya, prasarana dansarana daerah
11) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
12) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
13) Program Pengembangan Kemitraan
14) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
15) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
16) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri;
17) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
18) Program Pembangunan Prasarana dan sarana Ekonomi; dan
19) Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
20) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
21) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
22) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan
23) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

6. **Misi 6** : **Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota (Balancing Linkages).**

Adapun dalam menjalankan misi 6, yaitu **Mewujudkan pembangunan Perdesaan Yang Mandiri guna Menjaga keseimbangan penmbangan Desa-Kota (Balancing Linkages),** dilaksanakan melalui:

- **Program Pembangunan Daerah**
  1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
  2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;
  3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
  4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;dan
  5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
  6) Program Penanggulangan Kemiskinan
  7) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

7. **Misi 7** : **Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (*Environmental Security Development*).**

Adapun dalam menjalankan misi 7, yaitu **Mewujudkan pembangunan konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan (Environmental Security Development),** dilaksanakan melalui:

- **Program Pembangunan Daerah, yaitu:**
  1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  6) Program Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan dilakukan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja tidak langsung dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat diketahui dengan menarik *trend* perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut selama lima tahun terakhir. Selain itu, terdapat beberapa asumsi-asumsi yang digunakan dalam merumuskan proyeksi tersebut, namun mengeluarkan asumsi terjadinya gejolak perkonomian ekstrim seperti misalnya krisis ekonomi. Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut pada akhirnya membentuk kerangka pendanaan pembangunan daerah. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Buol pada lima tehunmendatang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018-2022

Kode	Uraian	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Juta Rp.)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	**Pendapatan Daerah**	**984,310.35**	**1,111,682.89**	**1,229,616.02**	**1,346,772.28**	**1,492,581.23**
2	**Belanja**	**996,795.47**	**1,106,682.89**	**1,223,866.02**	**1,340,272.28**	**1,485,081.23**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**474,319.50**	**540,378.18**	**587,251.07**	**638,802.22**	**695,545.11**
2.1.1	Belanja Pegawai	317,003.75	373,458.05	410,844.18	451,987.75	497,278.06
2.1.4	Belanja Hibah	9,316.60	9,154.89	9,383.76	9,618.36	9,858.82
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9,304.01	10,061.41	10,312.95	10,570.77	10,835.04
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	399.14	1,359.30	1,555.70	1,799.20	2,097.10
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	136,795.99	144,844.52	153,654.48	163,326.14	173,976.09
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.2	**Belanja Langsung**	**522,475.97**	**566,304.71**	**636,614.96**	**701,470.06**	**789,536.12**
2.2.1	Belanja Pegawai	50,540.99	28,315.24	31,830.75	35,073.50	39,476.81
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197,125.77	237,847.98	267,378.28	294,617.43	331,605.17
2.2.3	Belanja Modal	274,809.20	300,141.50	337,405.93	371,779.13	418,454.14
	Surplus/(Defisit)	**(12,485.11)**	**5,000.00**	**5,750.00**	**6,500.00**	**7,500.00**
3	**Pembiayaan**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16,985.11	-	-	-	-

Kode	Uraian	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Juta Rp.)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4,500.00	5,000.00	5,750.00	6,500.00	7,500.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	**522,475.97**	**566,304.71**	**636,614.96**	**701,470.06**	**789,536.12**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pendapatan daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp979.923.373.786,00,-, diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp984.310.354.946,00,-, di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 akan meningkat menjadi sebesar Rp1.111.682.889.000,00,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.229.616.023.000,00,- di Tahun 2020, kemudian pada Tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp1.346.772.282.000,00,-, dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.492.581.227.000,00,- di Tahun 2022. Selain itu, belanja daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp993.236.507.272,16,-, diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp996.795.465.897,00,- di Tahun 2018, kemudian pada Tahun 2019 akan meningkat menjadi sebesar Rp1.106.682.889.000,00,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.223.866.023.000,00,- di Tahun 2020, kemudian pada Tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp1.340.272.282.000,00,-, dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp1.485.081.227.000,00,- di Tahun 2022. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah yang akan digunakan untuk penyertaan modal pada Tahun 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00,-, meningkat menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00,- di Tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp5.750.000.000,00,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp.6.500.000.000,00,- di Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 akan meningkat menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00,-.

Dari pengurangan antara pendapatan daerah dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan maka dapat diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang diproyeksikan terus meningkat sepanjang tahun 2018-2022, yakni pada Tahun 2018 sebesar Rp522.475.968.234,99,-, meningkat menjadi sebesar Rp566.304.713.796,73,- di Tahun 2019, kemudian pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar Rp636.614.956.531,73,-, meningkat lagi menjadi sebesar Rp701.470.063.642,37,- di Tahun 2021, dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp789.536.120.241,18,-.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Buol memuat program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta program-program strategis yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang disertai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program tersebut. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tabel 7.2. dibawah ini akan disajikan indikasi rencana program prioritas seluruh perangkat daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2018-2022) yang dikelompokkan atas: (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pilihan, serta (4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program, selanjutnya menetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi IKK (Indikator Kinerja Kunci) pada akhir periode masa jabatan disajikan dalam Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Buol Tahun 2018-2022

Indikator		Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja (Tahun)					Kondisi Kinerja Akhir	Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Tahun 2022	
1	Indeks Gotong Royong	65,00	70,00	73,00	75,00	77,00	80,00	80,00	%
2	Persentase Menurunnya Jumlah Konflik di Masyarakat	90,00	95,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,67	97,00	97,50	98,00	99,00	100,00	100,00	Poin
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	B	BB	A	A	A	A	
5	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
6	Persentase Aspek Kualitas Dalam Dokumen Perencanaan	95,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	%
7	Nilai Pelaksanaan LPPD	2,7053	2,7387	3,1153	3,2200	3,3300	3,4150	3,1450	
8	Indeks Pembangunan Manusia	66,37	66,8	67,3	68,9	70,87	80	80	**Poin**

9	Indeks Pendidikan	65,04	67,86	70,15	73,45	75,63	79,37	80,25	%
10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54	57	60	63	66	69	69	%
11	Harapan Lama Sekolah	13,06	13,78	14,11	14,57	14,87	15,2	15,2	%
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100	100	%
13	Angka Usia Harapan Hidup	67,2	67,47	67,74	68,01	68,28	68,55	68,55	%
14	Angka Kematian Bayi	2	0	0	0	0	0	0	%
15	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	0.0066	0.0067	0.0069	0,007	0,0073	0,0077	0,0077	%
16	Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,12	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26	0,26	%
17	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	4	10	20	30	40	50	50	%
18	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	87	90	92	95	98	100	100	%
19	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	77,4	80	83	86	90	92	92	%

20	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100	100	100	100	100	100	100	%
21	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	80	82	85	87	88	90	90	%
22	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1,45	1,48	1,8	1,85	1,87	1,88	1,88	%
23	Nilai Tukar Petani	101	102	105	107	110	112	112	
24	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per Hektar	21.030	26.000	32.000	35.000	40.000	50.000	50.000	Ton
25	Produksi Jagung per Tahun	36.000	50.000	75.000	85.000	95.000	110.000	110.000	Ton
26	Produktivitas Ternak Sapi per Tahun	22.288	27.288	32.000	38.000	44.000	50.000	50.000	Ekor
27	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	48,3	48	47,43	47	46	45	45	%
28	Nilai Tukar Nelayan	101	103	104	105	109	112	112	
29	Produksi Perikanan	73,29	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00	85,00	%
30	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial	3,2	4,2	5,00	5,50	6,00	7,00	7,00	Ha

31	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	31,26	49,00	67,85	75,00	77,00	80,00	80,00	%
32	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	66	67	68	69	71	75	75	%
33	Indeks Angka Kecelekaan lalu Lintas	12,33	11,75	10	9,4	9	8,5	8	%
34	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik danTeknis	62	63	66	70	73	75	75	%
35	Persentase Cakupan Jangkauan Sistem Informasi Daerah	80	82	85	87	90	95	95	%
36	Rasio Gedung Kantor Pemerintahan	92	94	98	100	100	100	100	%
37	Rasio Rumah Layak Huni	0,173	0,178	0,184	0,190	0,196	0,202	0,202	Rasio
38	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	24,08	33,02	43,08	64	65	70	70	%
39	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	55,87	61,49	67,6	74,36	81,8	89,97	89,97	%
40	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	50	60	65	75	85	90	90	%
41	Pertumbuhan Ekonomi	3,64	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00	%

42	Laju Inflasi	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	%
43	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,24	3,10	3,02	2,90	2,75	2,64	2,64	%
44	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	343.975	412.770	495.324	594.389	693.454	832.145	832.145	(Rp. Juta)
45	Persentase Koperasi Aktif	60	60	62	65	66	67	67	%
46	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	38,25	44,75	52,35	61,26	64,32	85,06	85,06	%
47	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,58	0,62	0,78	1,20	1,85	2,10	2,10	%
48	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	1,61	1,77	1,95	2,14	2,35	2,5	2,5	%
49	Kontribusi Sektor Industri Olahan terhadap PDRB	14,01	15,10	16,05	17,27	18,35	19,16	19,16	%
50	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	5,87	6,39	6,91	7,43	7,95	8,47	8,47	%
51	Indeks Gini Rasio	0,301	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,260	Poin
52	Angka Kemiskinan Menurun	16,68	15,48	13,28	11,08	10,23	8,82	8,82	%

53	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	91,7	94,4	97,2	100,0	100	100	100	%
54	Persentase Penurunan Desa Tertinggal	12,96	11,11	9,26	7,41	4,46	0,0	0,0	%
55	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbina	63	70	77	84	91	98	98	BUMDes
56	Cakupan Produk Unggulan Desa	45	50	55	60	65	70	70	%
57	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,638	0,671	0,732	0,768	0,821	0,853	0,853	
58	Rata - Rata Kepemilikan Lahan Petani	1	1,2	1,5	1,7	1,8	2	2	Ha
59	Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	2	3	4	5	6	6	Kawasan
60	Indeks Kualitas Lingkungan	0,18	0,2	0,22	0,24	0,26	0,28	0,28	Poin
61	Persentase DAS yang terpelihara	50,0	50,0	66,7	83,3	85,6	88,2	88,2	%
62	Rasio ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah Ber HP/HGB	38,43	40,27	42,57	44,29	46,35	48,43	48,43	Rasio

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Buol Periode 2017-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	%	3,64	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,00
2	Laju inflasi	%	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
3	PDRB Perkapita	Rp	34.037.560	37.093.560	40.655.472	44.735.413	49.473.917	55.318.808	55.318.808
4	Indeks Gini	Indeks	0,30	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	83,9	84,55	85,35	86,25	87,33	88,69	88,69
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,37	66,8	67,3	68,9	70,87	80	80
9	Angka melek huruf	%	98,48	98,63	98,79	98,95	99,11	99,27	99,27
10	Angka rata - rata lama sekolah	Tahun	8,62	9	9,3	9,6	10	11	11
11	Angka usia harapan hidup	Tahun	67,20	67,47	67,74	68,01	68,28	68,55	68,55
12	Persentase balita gizi buruk	%	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
13	Prevalensi balita gizi kurang	%	0,07	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
14	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
15	Angka partisipasi angkatan kerja	%	64,06	64,13	64,19	64,26	64,32	64,38	64,38
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,50	68,84	69,19	69,53	69,88	70,23	70,23
17	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,24	3,10	3,02	2,90	2,75	2,64	2,64
18	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99
22	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	56	52	51	47	45	40	40
23	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	5,90	5,96	5,99	6,02	6,05	6,08	6,08
24	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	79	79	80	82	84	86	86
28	Kontribusi Sektor Pertanian Perkebunan Terhadap PDRB	%	48,30	48	47,43	47	46	45	45
29	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	4,45	4,54	4,63	4,72	4,82	4,91	4,91
30	Produksi sektor pertanian	Ton	23.775,82	24.251,33	24.736,36	25.231,09	25.735,71	26.250,42	26.250,42
31	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	35,54	35,5	36,08	36,67	37,16	38,24	38,24
32	Produksi sektor perkebunan	Ton	37.225,,06	37.56	37.905, 74	38.246,68	38.586,47	43.691,57	48.796,72

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
33	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	60.00	61.20	62.42	63.67	64.95	66.24	66.24
36	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,58	0,62	0,78	1,20	1,85	2,10	2,10
37	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	3,74	4,08	4,42	4,76	5,1	5,44	5,44
38	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	5,87	6,39	6,91	7,43	7,95	8,47	8,47
39	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	14,01	15,10	16,05	17,27	18,35	19,16	19,16
40	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	12,05	12,55	13,13	13,80	14,30	14,80	14,80
41	Pertumbuhan Industri	%	15	17	19	21	23	25	25
42	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	%	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	618,326	675,000	700,000	725,000	750,000	775,000	775,000
2	Nilai tukar petani	%	101	102	105	107	110	112	112
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	41.92	47.50	50.00	52.50	55.00	57.00	57.00
4	Produktivitas total daerah	Rp	600,000	630,000	661,500	694,575	729,304	765,769	804,057
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	57	60	63	66	69	73	76
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Rasio	0.1	0.12	0.14	0.16	0.18	0.2	0.2
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
9	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	32	37	42	49	56	64	74
10	Rasio ketergantungan	Persen	0.59	0.56	0.54	0.52	0.50	0.48	0.48

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Pendidikan									
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	84	87	60	63	66	69	69
2	Angka partisipasi kasar SD / MI	%	102.89	102.89	102.89	102.89	102.89	102.89	102.89
3	Angka partisipasi kasar SMP / MTs	%	93.66	94	94	95	95	96	96
4	Angka partisipasi kasar SMA / MA	%	82.24	85	85.5	86	86.5	87	87
Angka pendidikan yang ditamatkan									
5	SD/sederajat	%	35.20	35.55	36.00	40.00	40.58	50.00	50.00
6	SLTP/Sederajat	%	30.00	35.00	40.00	43.00	48.00	51.00	51.00
7	SLTA/Sederajat	%	17.57	25.00	25.34	25.87	30.00	30.85	30.85
8	Diploma (D1/D2/D3)	%	2.70	3.00	3.54	3.76	4.00	4.23	4.23
9	Sarjana (S1/S2/S3)	%	4.80	6.12	7.28	7.65	8.10	8.54	8.54
Angka Partisipasi Murni									
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97.44	98	98	99	99	99	99
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	72.28	73	74	75	76	77	77
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	65.24	65.35	65.8	70	70.3	70.83	70.83
Angka partisipasi sekolah									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99.10	99.10	99.35	99.57	99.99	100.00	100.00
14	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	92,66	93,87	94,96	96,35	99,76	100	100
15	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	72,54	89,84	90,84	98,68	99,94	100	100
Angka Putus Sekolah:									
16	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49
17	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.56	0.56	0.5	0.5	0.45	0.45	0.45
Angka Kelulusan:									
18	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	%	97	97.5	98	98.5	99	99.5	99.5
19	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	95	95.5	96	96,5	97	97,5	97,5
20	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	91	92	93	94	95	96	96
Angka Melanjutkan (AM):									
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95.00	95.00	96.00	96.00	97.00	97.00	97.00
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98.20	98.50	98.50	98.60	99.60	100.00	100.00
Fasilitas Pendidikan:									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
23	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95	95.5	96	96.5	97	97.5	97.5
24	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	62	62.5	63	63.5	64	64.5	64.5
25	Rasio ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	88,36	95,15	95,42	96,75	97	97,83	97,83
26	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	20,56	30,53	40	40,87	50	50,97	50,97
27	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	330	330	330	330	330	330	330
28	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	330	330	330	330	330	330	330
29	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
30	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	Rasio	28.50	28.75	29.00	29.25	29.50	29.75	29.75
31	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	98	98	98.25	98.25	98.5	98.5	98.5
32	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99.5	99.5	99.5	99.75	99.75	99.75	99.75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
33	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98.32	98.32	98.32	98.32	98.32	98.32	98.32
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	64.27	68.45	68.93	69	69.25	69.76	69.76
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Kesehatan									
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	2	0	0	0	0	0	21/1000 KH
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	98	99	99	99	100	100	100
3	Angka Kematian Balita	Angka	0	0	0	0	0	0	0
4	Angka Kematian Neonatal	Angka	12	12	12	11	11	11	11
5	Angka Kematian Ibu	Angka	30	25	20	15	10	5	5
6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	16	12	12	12	12	12	12
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,0066	0,0067	0,0069	0,007	0,0073	0,0077	0,0077
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,12	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26	0,26
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	4	10	20	30	40	50	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	93	93	94	94	95	95	95
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	72	74	76	78	80	82	82
13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	76	78	80	82	84	86	86
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari	Kkal/kapita/hari	10	10	10	9	9	9	9
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	85	87	88	90	92	94	96
17	Non Polio AFP	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	88	90	92	93	95	97	97

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Kasus	178	174	171	168	164	161	158
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Kasus	3	3	3	2	2	2	2
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	98	98	98	99	99	99	99
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	98	98	98	99	99	99	99
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	%	98	98	98	99	100	99	99
26	Angka kejadian Malaria	Orang	9	9	9	9	9	9	9
27	Tingkat kematian akibat malaria	Kematian	0	0	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	40	42	44	46	48	50	50
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	80	82	84	86	88	90	90
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0.00065	0.00065	0.00065	0.00065	0.00065	0.00065	0.00065

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	50	52	54	56	58	60	60
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	65	65	70	70	75	75	75
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
34	Cakupan kunjungan bayi	%	87	91	92	93	94	95	95
35	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan pembantu puskesmas	%	48	52	54	56	58	60	60
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	87	88	89	90	91	92	92
38	Cakupan pelayanan nifas	%	83	86	87	88	89	90	90
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
40	Cakupan pelayanan anak balita	%	90	91	92	93	94	95	95
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	60	62	64	66	68	70	70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	60	62	64	66	68	70	70
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	70	72	74	76	78	80	80
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Rasio	0,66	0,76	0,77	0.78	0.79	0.8	0.8
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	0	0	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	66	67	68	69	71	75	75
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0.85	4,85	9,15	14,85	19,15	25	25
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0.06	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	50	60	65	75	85	90	90
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	1.76	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	80	85	87.5	87.5	90	90	90
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	0	0	0	0	0	0	0
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	31.2	53	55	58	60	63	63

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62	78	80	83	85	88	88
13	Rasio Jaringan Irigasi	%	62	63	66	70	73	75	75
14	Persentase penduduk berakses air minum	%	24.08	33.02	43.08	54	65	70	70
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	62	77.5	80	82.5	85	87.5	87.5
16	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	24.08	50	65	75	85	100	100
17	Persentase areal kawasan kumuh	%	83.1	60	45	35	20	0	0
18	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	0	25	30	35	40	45	45
19	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	131.34	100	100	100	100	100	100
20	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	2.18	2.25	2.5	2.5	2.75	2.75	2.75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Penataan Ruang:									
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,1	0,1	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	38,43	40,27	42,57	44,29	46,35	48,43	48,43
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Rasio	0.018	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.75
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	0	0	0	0	0	0
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	Rasio	75	75	75	75	75	75	75
6	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	90	92	94	96	98	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,173	0,178	0,184	0,190	0,196	0,202	0,202
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1	1
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	65.59	67.42	69.30	71.24	73.22	75.27	75.27
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	60	65	70	75	80	85	85
4	Persentase pemukiman yang tertata	%	70	72	74	76	78	80	80
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0.02	0.01	0.005	0	0	0	0
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	34.41	25	20	15	10	5	5
8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	50	52.5	55	57.5	60	62.5	62.5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	18	20	25	30	35	40	40
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	10	20	30	40	50	60	60
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	0	20	30	40	50	60	60
5	Persentase Penegakan PERDA	%	50	60	70	80	90	95	95

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Sosial									
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	45.17	52	54	56	58	60	60
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	45.17	52	54	56	58	60	60
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	50	52	54	56	58	60	60
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	80	82	84	86	88	90	90
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	0	10	20	30	40	50	50
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	60	62	64	66	68	70	70
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	80	90	95	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	79.56	85	90	95	100	100	100
10	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	80,7	83	85	87	90	92	92
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Tenaga Kerja									
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Angka	0	0	0	0	0	0	0
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	3	10	20	40	80	100	100
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	0	20	25	30	35	40	40
4	Keselamatan dan perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	17.03	25	35	45	55	65	65
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	0	0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	50	55	60	65	70	75	75
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	70	75	80	80	85	85	85
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	50	55	60	65	70	75	75
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	0.012	0.02	0.025	0.035	0.04	0.045	0.045

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	74	50	50	50	50	50	50
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	24	24	34	39	44	50	50
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	26	34	39	44	49	50	50
4	Rasio KDRT	%	0,15	0,12	0,1	0,05	0,03	0	0
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	~~%~~		10	9	8	7	6	6
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	50	50	51	52	53	54	54
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	30	32	34	36	38	40	40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Pangan									
1	Ketersediaan pangan utama (kg/perkapita)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita								
3	- energi (kkal/kapita/hari) Kalori	Kalori	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
4	- protein (gram/kapita/hari) Gram	Gram	63	63	63	63	63	63	63
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Pertanahan									
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	25.03	42	44	46	48	50	50
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Lingkungan Hidup									
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / tidak ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	0 s/d 1	0 s/d 1	0 s/d 1	0 s/d 1	0 s/d 1	0 s/d 1	0 s/d 1
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	62.5	65	67.5	70	72.5	75	75
6	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	60	62	64	66	68	70	70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	%	60	62	64	66	68	70	70
8	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah	4	4	4	4	4	4	4
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Timbulan sampah yang ditangani	%	60	62	64	66	68	70	70
12	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	10	12.5	15	17.5	20	22.5	22.5
13	Persentase cakupan area pelayanan	%	30	30	35	35	40	40	40
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	60	62	64	66	68	70	70
15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	71	71	71	71	71	71	71
16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
17	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,55	3,07	3,14	3,2	3,26	3,33	3,33
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1	1	1	1	1	1	1
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1	1	1	1	1	1	1
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	1	1	1	1	1	1	1
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	26,6	50	65	75	85	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	91,7	94,4	97,2	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		0.2	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.75
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		1	1	1	1	1	1	1
4	Persentase LSM aktif	%	60	65	70	75	80	85	85
5	Persentase LPM Berprestasi	%	50	55	60	65	70	75	75
6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	60	65	70	75	80	85	85
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	60	65	70	75	80	85	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	70	72	74	76	78	80	80
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	70	72	74	76	78	80	80
4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2,3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
5	Ratio Akseptor KB	%	97	98	98	99	99	100	100
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	75	75	80	80	85	85	85
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	%	40	38	36	34	32	30	30
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	40	38	36	34	32	30	30

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	25	25	20	20	15	15	15
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	50	55	60	65	70	75	75
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	65	60	55	50	45	45
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	50	55	60	65	70	75	75
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	50	55	60	65	70	75	75
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	50	55	60	65	70	75	75
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	40	50	60	70	80	90	90
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	75	75	80	80	85	85	85
22	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0	0	0
24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
26	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	23	23	23	23	23	23	23
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Perhubungan									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	Orang	85000	86700	88434	90203	92007	93847	95724
2	Rasio ijin trayek	Rasio, per jumlah penduduk	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	418	500	550	605	666	732	805
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	8	8	8	9	10	11	11
5	Persentase layanan angkutan darat	%	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	50	40	30	20	10	0	0
7	Pemasanganga Rambu - rambu	%	60	65	70	80	85	90	90
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit Mobil per KM	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	85,000	86700	88434	90203	92007	93847	95724

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	170,000	173400	176868	180405	184013	187694	191448
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Komunikasi dan Informatika									
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (Rasio)	Rasio	1	1	1	1	1	1	1
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	80	80	80	80	85	85	85
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Rasio	0.25	0.25	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Rasio	0.38	0.4	0.42	0.44	0.46	0.48	0.48
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
1	Persentase koperasi aktif	%	60	60	62	65	66	67	67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	44	65	70	75	80	85	85
3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	38,25	44,75	52,35	61,26	64,32	85,06	85,06
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Penanaman Modal									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org atau kelompok)	Perusahaan	5	5	6	7	8	10	10
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. Juta	343.975	412.770	495.324	594.389	693.454	832.145	998.574
3	Rasio daya serap tenaga kerja (Rasio)	Orang per perusahaan	3,155	3,500	3,750	4,000	4,250	4,500	4,500
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	20	20	20	20	20	20	20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Kepemudaan dan Olah Raga									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	77,4	80	83	86	90	92	92
2	Persentase wirausaha muda	%	85	85	85	85	85	85	85
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	40	45	50	55	60	65	65
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	70	72	74	76	78	80	80
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	1	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah prestasi olahraga	Orang	1	1	2	2	3	3	3
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Statistik									
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku ”PDRB”	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Persandian									
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	47	55	60	65	70	75	75
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Kebudayaan									
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	2	2	2	2	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	7	7	7	7	7	7	7
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	7	7	7	7	7	7	7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Perpustakaan									
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Rasio kunjungan	0.60	0.63	0.66	0.69	0.73	0.80	0.80
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Rasio	0.21	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0.1	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	912	1,094	1,313	1,576	2,074	2,489	2,489
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	5,280	5,544	5,821	6,112	6,418	6,739	7,076
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	0	10	20	30	40	50	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Kearsipan									
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	85,00	90,00	95,00	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Pilihan									
Pariwisata									
1	Kunjungan Wisata	%	85.570	86.070	88.640	91.140	93.640	94.570	96.461
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	3	5	5	5	7	7	7
3	PAD sektor pariwisata	%	1.61	1.77	1,95	2,14	2,35	2,5	2,5

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Pilihan									
Pertanian									
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	51	49	48	47	46	45	45
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	4,45	4,54	4,63	4,72	4,82	4,91	5
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	35,54	35,5	36,08	36,62	37,16	38,24	30
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	15	15	15	15	15	15	15
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	21.030	26.000	32.000	35.000	40.000	50.000	50.000
6	Cakupan bina kelompok petani	%	67,26	67,76	68,26	76,26	81,26	85,26	57

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Pilihan									
Perdagangan									
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp.	0	0	0	0	0	0	0
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10,00	11,01	12,50	13,95	15,35	16,70	16,70
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Pilihan									
Perindustrian									
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	44	44,1	44,3	44,60	44,75	44,95	44,95
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Pilihan									
Transmigrasi									
1	Persentase transmigran swakarsa		30	32	34	36	38	40	40
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Pilihan									
Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi perikanan	%	73,29	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00	85,00
2	Konsumsi ikan	%	92,68	93,06	93,26	93,46	93,66	95,68	95,68

3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	31,26	49,00	67,85	75,00	77,00	80,00	80,00
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	15	16	17	18	18,5	19	40
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	20	20	25	25	30	30	30
6	Nilai tukar nelayan	%	101	103	104	105	109	112	112
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Penunjang Urusan									
Perencanaan Pembangunan									
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Penunjang Urusan									
Keuangan									
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase belanja pendidikan	%	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20
4	Persentase belanja kesehatan	%	>20	>20	>20	>20	>20	>20	>20
5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		15,80	>10	>10	>10	>10	>10	>10
6	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,10	0,04	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Penunjang Urusan									
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	90	90	90	90	90	90	90
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	76.21	77	80	80	85	85	85
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	8.92	15	20	25	25	25	25
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	25	25	25	25	25	25	25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	735	735	735	735	735	735	735
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Penunjang Urusan									
Penelitian dan pengembangan									
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	85	87	90	92	95	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	85	87	90	92	95	100	100
3	Penerapan SIDa:	%	2,32	2,44	2,56	2,69	2,83	2,97	2,97
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Penunjang Urusan									
Pengawasan									
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	36,36	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	60,00
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	5,00	4,5	3,00	2,50	2,00	1,50	1,50
3	Jumlah temuan BPK	Temuan	12	11	10	9	7	5	5
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Penunjang Urusan									
Sekretariat Dewan									
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembanngunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX
PENUTUP

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Kabupaten Buol serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Buol periode 2017-2022.

9.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Buol periode 2017-2022 akan berakhir pada bulan Oktober Tahun 2022, dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga akan berakhir pada waktu yang sama. Untuk perencanaan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plavon Aanggaran Tahun 2023, agar berpedoman pada sasaran pokok, arah kebijakan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Buol dan mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program merupakan pedoman bagi setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah menyusun RENSTRA (Rencana Strategis) OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan perencanaan penganggaran Kabupaten Buol setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Buol dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Buol, serta masyarakat

termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;

2. Kabupaten Buol dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buol berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022;
4. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD. Oleh karena itu seluruh OPD di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap tahun, dengan berpedoman pada RPJMD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan dan ditetapkan oleh kepala OPD serta disahkan oleh .
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buol berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Renstra OPD Kabupaten Buol;
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Buol;
7. Sesuai PP Nomor 3 tahun 2007, harus menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Akhir masa jabatan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka untuk menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Buol melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 dilaksananakan oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Buol.

8. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi, Kebijakan, dan Program dalam RPJMD diperlukan instrumen antara lain organisasi perangkat daerah dan SDM (Sumber Daya Manusia), maka penyusunan organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD 2017-2022 dan membagi atau memisahkan secara jelas tanggungjawab perangkat daerah antara sebagai regulator dengan sebagai operator, artinya tidak diperkenankan saat perangkat daerah mempunyai peran ganda sebagai regulator sekaligus operator karena fungsi evaluasi dan pengawasannya menjadi tumpang tindih serta dijalankan oleh Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi.
9. Dalam hal pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022 menunjukkan adanya hal-hal yang perlu disesuaikan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten Buol dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buol Tahun 2017-2022, maka strategi, arah kebijakan dan program yang telah dirumuskan dapat ditinjau kembali. Kemudian, hasilnya dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
10. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun berkenaan.